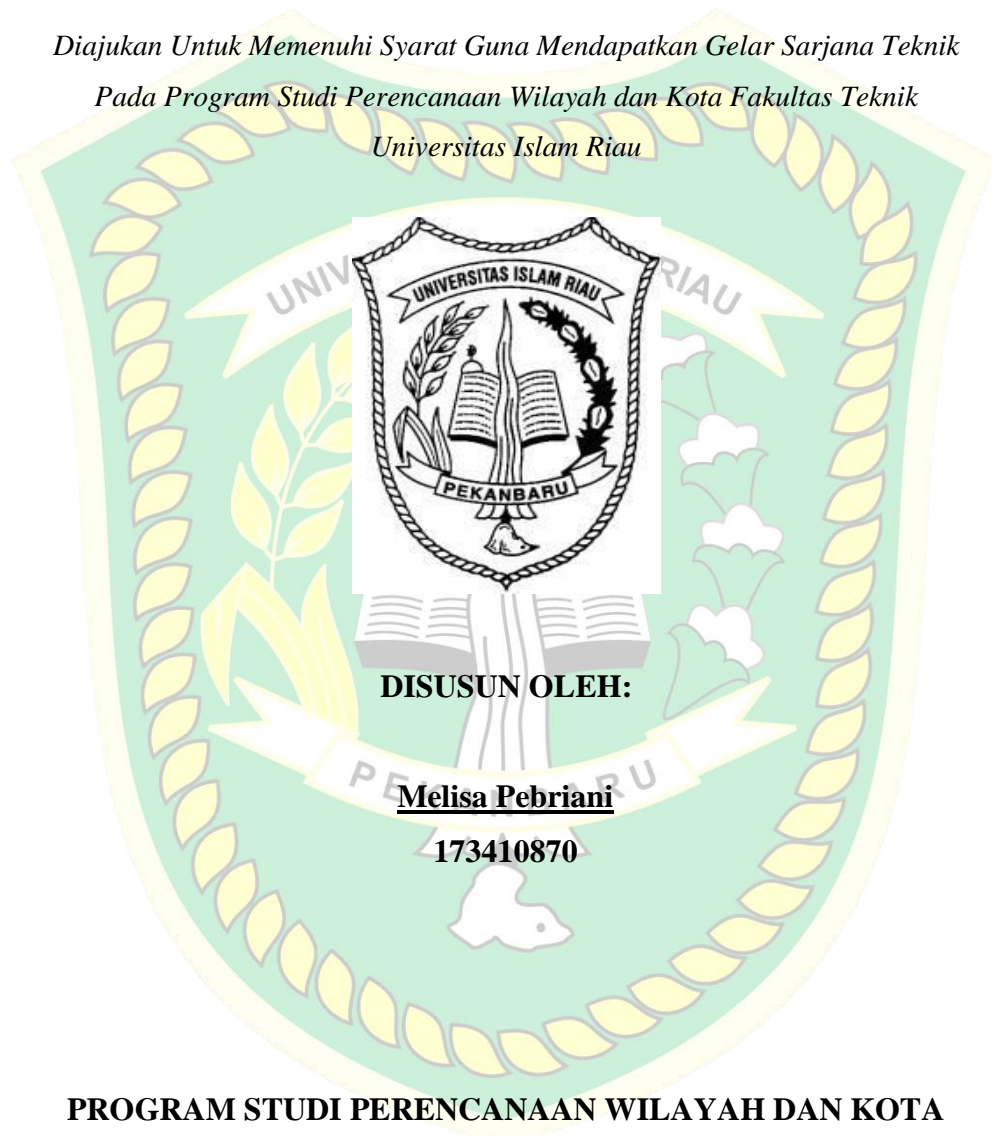


**ANALISIS DISPARITAS EKONOMI ANTAR KABUPATEN  
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2020**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Teknik  
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik  
Universitas Islam Riau*



**DISUSUN OLEH:**

**Melisa Pebriani**

**173410870**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS DISPARITAS EKONOMI ANTAR KABUPATEN DI  
PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2020**

**TUGAS AKHIR**

**Disusun Oleh:**

**MELISA  
PEBRIANI NPM  
173410870**

**Disetujui Oleh:**

**PEMBIMBING I**

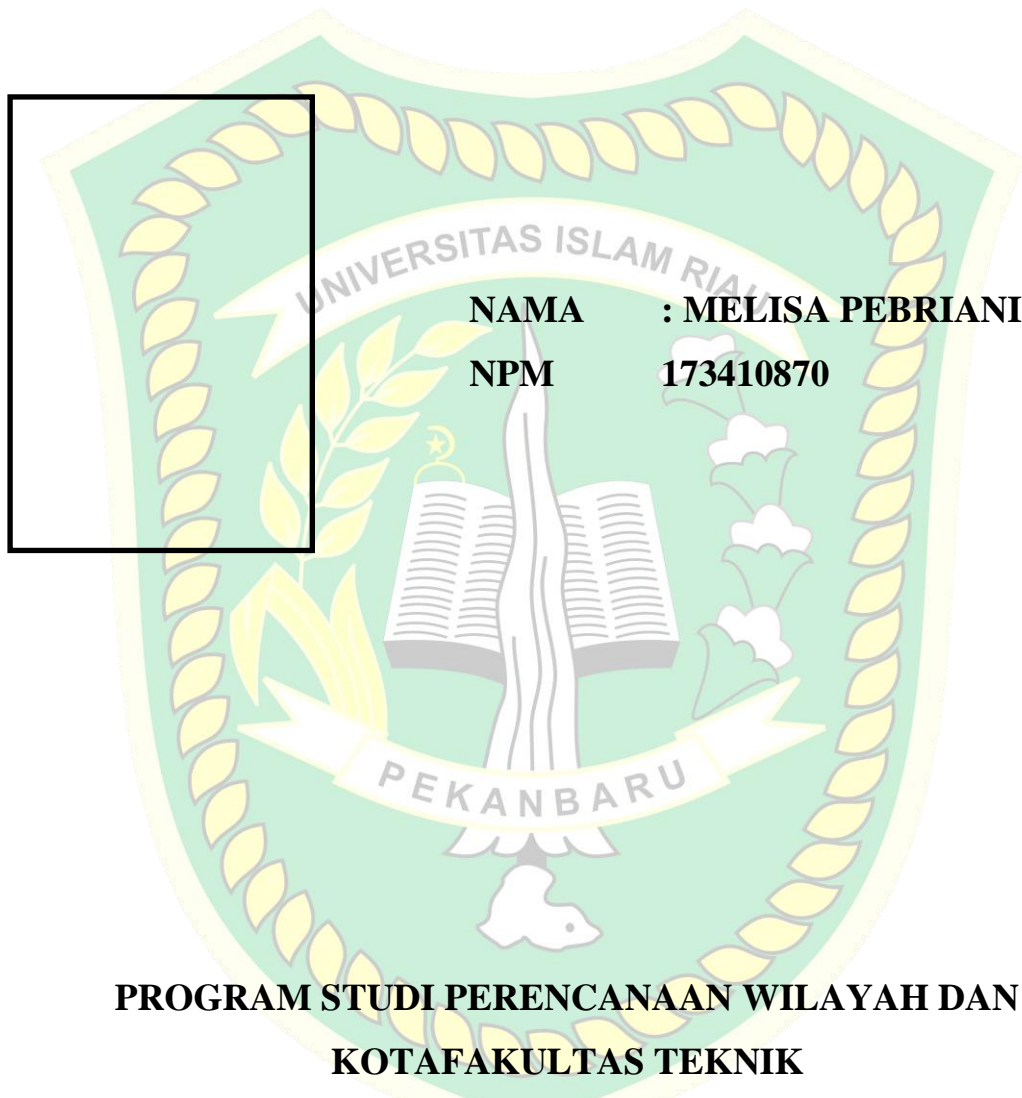
**Puji Astuti, S.T., M.T**

**Disahkan Oleh: KETUA**

**PROGRAM STUDI**

**Puji Astuti, S.T., M.T**

**ANALISIS DISPARITAS EKONOMI ANTAR  
KABUPATEN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2020**



**NAMA : MELISA PEBRIANI**

**NPM 173410870**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN  
KOTAFAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS ISLAM**

**RIAUPEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melisa Pebriani  
Tempat/ Tgl Lahir : Sialang Makmur, 24 Februari 1999  
NPM : 173410870  
Alamat : Desa Tanjung Beludu, Kec. Kelayang  
Kabupaten Indragiri Hulu, Riau

Adalah mahasiswa Universitas Islam Riau yang terdaftar pada :

Fakultas : Teknik  
Program studi : Perencanaan Wilayah dan Kota  
Jenjang pendidikan : S-1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis ini adalah benar dan asli dengan judul “**ANALISIS DISPARITAS EKONOMI ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2020**”.

Apabila dikemudian hari ada yang merasa dirugikan dan atau menuntut karena tugas akhir saya ini menggunakan sebagian dari hasil tulisan atau karya orang lain (**Plagiat**) tanpa mencantumkan nama penulisnya, maka saya akan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 24 Agustus

Melisa Pebriani

173410870

# ANALISIS DISPARITAS EKONOMI ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2020

Melisa Pebriani

NPM: 173410870

## ABSTRAK

Salah satu isu permasalahan yang tidak akan terlepas dari Provinsi Riau adalah masalah disparitas atau ketimpangan ekonomi. Untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan maka diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas ekonomi. Pada tahun 2020 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 4,62 persen terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau mengalami fluktuasi yaitu melambat sejak tahun 2012. Perekonomian Provinsi Riau hanya bertumpu pada dua lapangan usaha yakni Industri Pengolahan serta Pertambangan dan Penggalian. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tertinggi terjadi pada tahun 2012 pada periode tahun 2011-2020.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat disparitas dan tipologi ekonomi yang terjadi antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini disajikan dengan bentuk analisis kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau yang meliputi seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang berjumlah sebanyak 14 kabupaten. Teknik analisis kuantitatif digunakan dalam melihat tingkat disparitas ekonomi daerah dengan menggunakan analisis Indeks Williamson serta tipologi ekonomi antar wilayah dan tipologi ekonomi antar sektor dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Riau selama tahun 2011-2020 berfluktuasi. Dan pola pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang terjadi sejak tahun 2011-2020 antar kabupaten/kota mengalami perubahan pola pembangunan ekonomi yang baik. Dan, untuk tingkat ketimpangan yang terjadi pada Provinsi Riau tahun 2011-2020 masih termasuk pada kategori ketimpangan level tinggi.

**Kata Kunci: Disparitas, Tipologi, Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi Riau**

**ANALYSIS OF ECONOMIC DISPARITIES BETWEEN DISTRICTS  
IN THE PROVINCE OF RIAU IN 2011-2020**

**Melisa Pebriani**

**173410870**

**ABSTRACT**

*One of the issues that cannot be separated from Riau Province is the problem of economic disparity or inequality. To achieve the expected welfare, it is necessary to increase economic growth and reduce economic disparities. In 2020 Riau Province contributed 4.62 percent to the national economy. Riau Province's economic growth has fluctuated, namely slowing down since 2012. The Riau Province's economy only relies on two business fields, namely the Processing Industry and Mining and Quarrying. The highest economic growth in Riau Province occurred in 2012 in the period 2011-2020.*

*The purpose of this study is to analyze the level of economic disparity and typology that occurs between districts/cities in the Riau Province. Approach This research uses a quantitative research approach. This research is presented in the form of descriptive quantitative analysis. This research was conducted in Riau Province which includes all districts in Riau Province, totaling 14 districts. Quantitative analysis technique is used to see the level of regional economic disparity by using the Williamson Index analysis as well as inter-regional economic typology and inter-sectoral economic typology using Klassen Typology analysis.*

*The results of the study indicate that the rate of economic growth that occurred in Riau Province during 2011-2020 fluctuated. And the pattern of development that has occurred since 2011-2020 between districts/cities has changed the pattern of good economic development. And, for the level of inequality that occurred in Riau Province in 2011-2020 is still included in the category of high level inequality.*

**Keywords: Disparity, Typology, Economic Growth, Riau Province**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan sholawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad *Shallahu 'Alaihi Wasallam* yang telah menuntun kita semua ke jalan yang besar.

Tugas akhir ini berjudul “Analisis Disparitas Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2011-2020”. Tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata I pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Adapun isi dari tugas akhir ini adalah pola pembangunan ekonomi tiap kabupaten dan tingginya tingkat disparitas yang terjadi antar kabupaten di Provinsi Riau.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya sebelum dan selama pengerjaan skripsi ini. Atas semua bantuan, bimbingan, arahan, dukungan dan fasilitas yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda **Junaidi** Ibunda **Dahyunialis**, juga Kakak saya **Tika Wulandari** serta abang saya **Yogi Pratama Yudha** dan kedua Adik saya **Antin Auliani** dan **Yoga** yang sangat penulis sayangi dan hormati yang telah memberikan doa, nasehat, dukungan, serta harapan yang tak henti-hentinya kepada penulis hingga saat ini.

2. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCI.** selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. Eng. Muslim** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau beserta jajarannya.
4. Ibu **Puji Astuti, ST., MT.** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, juga Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dukungan, serta meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis.
5. Bapak **Ir. H. Firdaus, MP** dan Ibu **Rona Muliana ST, MT** selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan serta arahan kepada penulis sehingga tugas akhir ini bisa menjadi lebih baik lagi.
6. Seluruh Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau atas segala ilmu, pengetahuan, pengalaman, serta Staf Tata Usaha atas pelayanannya selama penulis belajar pada perkuliahan ini.
7. Sahabat lelaki penulis **Muhammad Alvi Rauf**, yang selalu mendengarkan keluh-kesah penulis.
8. Sahabat terbaik penulis **Mella Kusuma Delvi**, yang selalu menemani dan memberikan bantuan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman seperjuangan penulis **Pitih Anilawati, Veggy Anugrah Sasmita, Maulina Sutji Zulyanti , Inggi Yandriani, Planologi 17A**, teman-teman



**Planologi Angkatan 17**, dan **HIMPLAN UIR**, serta abang/kakak senior dan adik-adik junior yang sudah mengisi hari-hari penulis pada masa perkuliahan.

10. Sahabat serta teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah memberikan bahan candaan untuk melewati hari-hari, dukungan, pendapat, saran, dan bantuan lainnya selama masa perkuliahan, serta bagi yang secara tidak langsung juga turut membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, sehingga pada masa yang akan datang penulis dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi. Akhir kata, semoga tugas akhir ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan.

Pekanbaru, 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	9
1.4 Tujuan dan Sasaran .....	9
1.4.1 Tujuan .....	9
1.4.2 Sasaran .....	10
1.5 Manfaat Penelitian .....	10
1.5.1 Manfaat Penelitian Bagi Akademik .....	10
1.5.2 Manfaat Penelitian Bagi Pemerintah .....	11
1.5.3 Manfaat Penelitian Bagi Masyarakat .....	11
1.6 Ruang Lingkup Penelitian .....	11
1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian .....	11
1.6.2 Ruang Lingkup Materi .....	14
1.7 Kerangka Berpikir .....	15
1.8 Sistematika Penulisan .....	16
BAB II .....	18
TINJAUAN PUSTAKA .....	18
2.1 Pembangunan Ekonomi .....	18
2.2 Manfaat Pembangunan .....	20
2.3 Kesulitan-Kesulitan dalam Pembangunan Ekonomi .....	21
2.4 Pertumbuhan Ekonomi .....	24
2.5 Teori Lokasi Pertumbuhan .....	25
2.6 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah .....	26

2.6.1	Konsep Wilayah .....	30
2.7	Pengertian Disparitas .....	31
2.7.1	Ketimpangan Wilayah.....	35
2.7.2	Ketimpangan Pendapatan.....	36
2.8	Teori Disparitas .....	40
2.9	Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah.....	42
2.10	Konsep Ketimpangan .....	42
2.10.1	Konsep-konsep Pusat Pengembangan.....	43
2.11	Faktor Penyebab Ketimpangan Wilayah.....	44
2.12	Kebijakan Fiskal Islam dalam Upaya Mengurangi Disparitas Ekonomi	49
2.13	Ukuran Ketimpangan .....	50
2.13.1	CV Willimason .....	51
2.13.4	Tipologi Sektor .....	55
2.14	Disparitas Pembangunan Ekonomi .....	56
2.14.1	Konsep Disparitas Pembangunan Ekonomi .....	58
2.15	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	59
2.15.1	Metode Perhitungan PDRB.....	60
2.15.2	PDRB Per Kapita .....	63
2.16	Jumlah Penduduk .....	64
2.18	Sintesa Teori.....	66
2.19	Penelitian Terdahulu.....	71
BAB III	.....	74
METODOLOGI PENELITIAN	.....	74
3.1	Pendekatan Metodologi Penelitian.....	74
3.2	Jenis Penelitian.....	75
3.3	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	75
3.4	Bahan dan Alat Penelitian .....	76
3.5	Operasional Variabel .....	76
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	77
3.7	Teknik Analisis.....	78
3.7.1	Menganalisis Pola Disparitas dengan Tipologi Klassen .....	78
3.7.2	Menganalisis Tingkat Disparitas Ekonomi Wilayah.....	80

3.8	Populasi dan Sample .....	81
3.8.1	Populasi.....	81
3.8.2	Sample.....	82
3.9	Matrik Tahapan Analisa .....	83
3.10	Desain Survey.....	84
BAB IV .....		88
GAMBARAN UMUM .....		88
4.1	Gambaran Umum Provinsi Riau .....	88
4.1.1	Wilayah Administrasi dan Iklim .....	88
4.1.2	Kondisi Kependudukan.....	91
4.1.3	Kondisi Perekonomian .....	93
4.2	Gambaran Umum Wilayah Kota Pekanbaru .....	94
4.2.1	Wilayah Administrasi dan Iklim .....	94
4.2.2	Kondisi Kependudukan.....	97
4.2.3	Kondisi Perekonomian .....	98
4.3	Gambaran Umum Wilayah Kota Dumai .....	100
4.3.1	Wilayah Administrasi dan Iklim .....	100
4.3.2	Kondisi Kependudukan.....	104
4.3.3	Kondisi Perekonomian .....	105
4.4	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu .....	107
4.4.1	Wilayah Administrasi dan Iklim .....	107
4.4.2	Kondisi Penduduk.....	111
4.4.3	Kondisi Perekonomian .....	112
4.5	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.....	114
4.5.1	Wilayah Administrasi dan Iklim .....	114
4.5.2	Kondisi Kependudukan.....	118
4.5.3	Kondisi Perekonomian .....	119
4.6	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kampar .....	120
4.6.1	Wilayah Administrasi dan Iklim .....	120
4.6.2	Kondisi Kependudukan.....	123
4.6.3	Kondisi Perekonomian .....	124
4.7	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bengkalis .....	124

4.7.1	Wilayah Administrasi dan Iklim .....	124
4.7.2	Kondisi Kependudukan.....	128
4.7.3	Kondisi Perekonomian .....	128
4.8	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Siak .....	129
4.8.1	Letak Geografis dan Iklim .....	129
4.8.2	Kondisi Kependudukan.....	133
4.8.3	Kondisi Perekonomian .....	134
4.9	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	135
4.9.1	Wilayah Administrasi dan Iklim .....	135
4.9.2	Kondisi Kependudukan.....	138
4.9.3	Kondisi Perekonomian .....	138
4.10	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi .....	140
4.10.1	Wilayah Administrasi dan Iklim .....	140
4.10.2	Kondisi Kependudukan.....	143
4.10.3	Kondisi Perekonomian .....	144
4.11	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pelalawan.....	146
4.11.1	Wilayah Administrasi dan Iklim.....	146
4.11.2	Kondisi Kependudukan.....	149
4.11.3	Kondisi Perekonomian .....	150
4.12	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.....	151
4.12.1	Wilayah Administrasi dan Iklim .....	151
4.12.2	Kondisi Kependudukan.....	156
4.12.3	Kondisi Perekonomian .....	157
4.13	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Rokan Hilir .....	159
4.13.1	Wilayah Administrasi dan Iklim .....	159
4.13.2	Kondisi Kependudukan.....	162
4.13.3	Kondisi Perekonomian .....	163
BAB V.....		165
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		165
5.1	Identifikasi Pertumbuhan Ekonomi yang Terjadi di Provinsi Riau .....	165
5.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota Tahun 2011.....	173
5.1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2012.....	175

5.1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota Tahun 2013.....	177
5.1.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2014.....	179
5.1.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2015.....	181
5.1.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2016.....	183
5.1.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2017.....	186
5.1.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2018.....	188
5.1.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2019.....	190
5.1.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	193
5.2	Analisis Tipologi Klassen antar Wilayah Provinsi Riau Tahun 2011-2020 195	
5.2.1	Analisis Tipologi Wilayah Provinsi Riau.....	195
5.2.2	Analisis Tipologi Sektor Antar Wilayah Provinsi Riau.....	204
5.3	Analisis Tingkat Disparitas Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2011-2020 244	
<b>BAB VI</b> .....		<b>259</b>
<b>PENUTUP</b> .....		<b>259</b>
6.1	Kesimpulan.....	259
6.2	Saran.....	262
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>263</b>
Sumber Jurnal: .....		263
Sumber Buku: .....		264
Sumber Skripsi:.....		264

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sintesa Teori .....	67
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu .....	71
Tabel 3. 1 Variabel Penelitian .....	77
Tabel 3. 2 Klasifikasi Tipologi Wilayah .....	79
Tabel 3. 3 Klasifikasi Tipologi antar Sektor .....	80
Tabel 3. 4 Matriks Tahapan Analisa Disparitas Antar Kabupaten di Provinsi Riau .....	83
Tabel 3. 5 Desain Survei .....	85
Tabel 4. 1 Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2020 .....	92
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020 .....	98
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2020 .....	105
Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 .....	112
Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 .....	119
Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2020 .....	123
Tabel 4. 7 Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 .....	128
Tabel 4. 8 Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2020 .....	133
Tabel 4. 9 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 .....	138
Tabel 4. 10 Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 .....	143
Tabel 4. 11 Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 .....	149
Tabel 4. 12 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 .....	157
Tabel 4. 13 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 .....	162
Tabel 5. 1 PDRB Provinsi Riau antar Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2020 .....	169
Tabel 5. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Periode 2011-2020 .....	170
Tabel 5. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2011 .....	173

Tabel 5. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2012 .....	176
Tabel 5. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2013 .....	178
Tabel 5. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2014 .....	180
Tabel 5. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau tahun 2015 .....	182
Tabel 5. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2016 .....	184
Tabel 5. 9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2017 .....	187
Tabel 5. 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau tahun 2018 .....	189
Tabel 5. 11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2019.....	191
Tabel 5. 12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2020 .....	193
Tabel 5. 13 Matriks Tipologi Klassen Provinsi Riau Tahun 2011-2015 .....	197
Tabel 5. 14 Matriks Tipologi Klassen Provinsi Riau Tahun 2016-2020 .....	201
Tabel 5. 15 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Provinsi Riau.....	205
Tabel 5. 16 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kota Pekanbaru.....	205
Tabel 5. 17 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kota Dumai.....	206
Tabel 5. 18 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Indragiri Hulu.....	207
Tabel 5. 19 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Indragiri Hilir.....	207
Tabel 5. 20 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten Kampar .....	208
Tabel 5. 21 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten Bengkalis ....	208
Tabel 5. 22 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten Siak .....	209
Tabel 5. 23 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten Kepulauan Meranti.....	210
Tabel 5. 24 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten Kuantan Singingi.....	210
Tabel 5. 25 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten Pelalawan....	211
Tabel 5. 26 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Rokan Hulu .....	211
Tabel 5. 27 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten Rokan Hilir .	212
Tabel 5. 28 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kota Pekanbaru .....	213
Tabel 5. 29 Klasifikasi Tipologi Sektor Kota Pekanbaru .....	215
Tabel 5. 30 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kota Dumai .....	216
Tabel 5. 31 Klasifikasi Tipologi Sektor Kota Dumai .....	218
Tabel 5. 32 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Indragiri Hulu.....	218



Tabel 5. 33 Klasifikasi Tipologi Sekor Kota Indragiri Hulu .....	220
Tabel 5. 34 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Indragiri Hilir .....	221
Tabel 5. 35 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Indragiri Hilir .....	223
Tabel 5. 36 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Kampar.....	224
Tabel 5. 37 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Kampar .....	226
Tabel 5. 38 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Bengkalis .....	227
Tabel 5. 39 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Bengkalis.....	228
Tabel 5. 40 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Siak .....	229
Tabel 5. 41 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Siak.....	231
Tabel 5. 42 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Kepulauan Meranti.....	232
Tabel 5. 43 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Kepulauan Meranti .....	234
Tabel 5. 44 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Kuantan Singingi .....	235
Tabel 5. 45 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Kuantan Singingi.....	236
Tabel 5. 46 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Pelalawan .....	237
Tabel 5. 47 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Pelalawan .....	239
Tabel 5. 48 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Rokan Hulu .....	239
Tabel 5. 49 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Rokan Hulu .....	241
Tabel 5. 50 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Rokan Hilir .....	242
Tabel 5. 51 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Rokan Hilir.....	244
Tabel 5. 52 Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2011 .....	245
Tabel 5. 53 Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2012 .....	246
Tabel 5. 54 Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2013.....	247
Tabel 5. 55 Hasil Analisis Indeks Williaimson Tahun 2014 .....	248
Tabel 5. 56 Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2015 .....	249
Tabel 5. 57 Indeks Williaimson Tahun 2016 .....	250
Tabel 5. 58 Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2017 .....	251
Tabel 5. 59 Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2018 .....	252
Tabel 5. 60 Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2019 .....	253
Tabel 5. 61 Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2020 .....	254
Tabel 5. 62 Kategori Tingkat Disparitas Indeks Williamson.....	255

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Riau.....	28
Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir .....	15
Gambar 4.1 Peta Administrasi Provinsi Riau.....	105
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kota Pekanbaru.....	111
Gambar 4.3 Peta Administrasi Kota Dumai .....	118
Gambar 4.4 Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hulu.....	125
Gambar 4.5 Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir.....	132
Gambar 4.6 Peta Administrasi Kabupaten Kampar.....	137
Gambar 4.7 Peta Administrasi Kabupaten Bengkalis.....	142
Gambar 4.8 Peta Administrasi Kabupaten Siak.....	147
Gambar 4.9 Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti.....	152
Gambar 4.10 Peta Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi.....	157
Gambar 4.11 Peta Administrasi Kabupaten Pelalawan.....	163
Gambar 4.12 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu.....	170
Gambar 4. 13 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir.....	176
Gambar 5. 1 Rata-rata Laju Pertumbuhan Provinsi Riau Tahun 2011- 2020 .....	167
Gambar 5. 2 Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun.....	172
Gambar 5. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2011 .....	175
Gambar 5. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2012 .....	177
Gambar 5. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2013 .....	179
Gambar 5. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2014 .....	181
Gambar 5. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2015 .....	183
Gambar 5. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2016 .....	186
Gambar 5. 9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2017 .....	188
Gambar 5. 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2018 .....	190
Gambar 5. 11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2019 .....	192
Gambar 5. 12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2020 .....	195
Gambar 5. 13 Pola Pembangunan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2011-2015... ..	197
Gambar 5.14 Peta Tipologi Wilayah Antar Kabupaten Tahun 2011-2015.....	214

Gambar 5.15 Peta Tipologi Wilayah Antar Kabupaten Tahun 2016-2020.....217

Gambar 5.16 Peta Hasil Analisis Tingkat Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Riau .....273



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang mendasar dan dihadapi oleh setiap negara dalam awal kebijakan pembangunan ekonomi selain target mengejar pertumbuhan ekonomi adalah aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sering dijadikan indikator kemajuan ekonomi, pada sebagian negara ternyata menyisakan berbagai persoalan. Di beberapa negara sedang berkembang tujuan tersebut kadang menjadi dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau terjadinya ketimpangan pendapatan dan persoalan kemiskinan.

Tujuan pembangunan ekonomi pada hakekatnya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan maka diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas ekonomi. Oleh sebab itu, maka diperlukan dilakukan analisis terhadap disparitas yang terjadi pada setiap daerah untuk mengetahui keterkaitan disparitas terhadap pembangunan antar daerah.

Menurut Subandi, (2011) Pertumbuhan ekonomi yang pesat pada kurun waktu tahun 1970 hingga 1990 yang ditandai dengan tingginya persentase tingkat pertumbuhan ekonomi di beberapa negara di wilayah asia. Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikatakan berhasil apabila terjadinya pertumbuhan ekonomi yang juga diiringi dengan berkurangnya ketimpangan pendapatan pada penduduknya. Ketimpangan pembagian pendapatan di negara-negara berkembang

sejak tahun tujuh puluhan telah menjadi perhatian utama dalam menetapkan kebijaksanaan pembangunan. Perhatian ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya, kebijaksanaan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan semakin meningkatnya ketimpangan pembagian pendapatan dengan penelitiannya di beberapa negara.

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per-kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad dalam Subandi, 2011). Proses pembangunan ekonomi menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam: (1) perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa; (2) perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan (Subandi,2008). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikannya lebih besar ataupun lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan terhadap struktur ekonomi atau tidak.

Menurut Todaro, (2000) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, *output* per kapita dan jangka panjang. Dengan pengertian ini, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis terkait dengan *output* total (GDP) dan aspek jumlah penduduk. Pada jangka panjang, pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan perubahan

perekonomian dalam angka tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian (*selfgenerating*).

Menurut Adisasmita, (2011) berpendapat bahwa ketimpangan antar daerah dapat menimbulkan kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah, dan disparitas ekonomi yang semakin tajam. Ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu wilayah. Masyarakat berpendapat bahwa ketimpangan suatu daerah cukup tinggi setelah melihat banyak kelompok miskin pada wilayah bersangkutan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Bahkan di antara sesama negara berkembang, ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia termasuk yang lebih tinggi (Sjafrizal, 2012).

Menurut Sirojuzilam, (2005) ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga terhadap pembangunan antar daerah dalam wilayah suatu Negara. Menurut Keynes dalam Dermawan, (2020) ketimpangan pembangunan antara lain sumber daya alam yang dimiliki, perpindahan tenaga kerja, perpindahan modal, dan kebijakan pemerintah.

Disparitas yang terjadi di Indonesia telah banyak dikaji dan di teliti oleh banyak studi. Dan, kesimpulan yang dapat ditarik dari Iskandar, (2010) pada beberapa studi analisis yang sudah ada, faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas ekonomi yaitu: konsentrasi kegiatan ekonomi antar wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar wilayah, perbedaan

sumber daya alam antar wilayah, perbedaan kondisi demografis antar wilayah, dan kurang lancarnya perdagangan antar wilayah.

Menurut Bhinadi, (2003) pada penelitiannya tentang disparitas pertumbuhan ekonomi jawa dan luar pulau jawa mengatakan, bahwa pertumbuhan kapital secara positif signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan pendapatan per kapita dan mempunyai peran paling besar dibandingkan pertumbuhan tenaga kerja dan pertumbuhan kualitas sumberdaya manusia. Adapun peran pertumbuhan terhadap tenaga kerja dan pertumbuhan terhadap kualitas sumberdaya manusia sangat kecil dan tidak signifikan di dalam model pertumbuhan ekonomi regional. Pada pertumbuhan tenaga kerja mempunyai kontribusi negatif, sedangkan kontribusi pertumbuhan terhadap kualitas sumberdaya manusia kontribusinya positif. Nilai efisiensi atau produktifitas faktor total wilayah jawa lebih rendah dibandingkan dengan wilayah luar Pulau Jawa.

Ketimpangan spasial menunjukkan bahwa adanya perbedaan pendapatan per kapita antara wilayah yang satu dan lainnya. Ketimpangan berarti ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi. Dengan terjadinya ketidakmerataan ini maka akan berdampak pada kondisi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Maksudnya adalah karena tidak meratanya pertumbuhan ekonomi, maka kesejahteraan masyarakat pada daerah yang pertumbuhan ekonominya sedikit akan rendah. Karena ketimpangan spasial juga merupakan faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Sedangkan di sisi lain pendekatan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi selama ini juga menimbulkan melebarnya ketimpangan sosial-ekonomi antar wilayah menjadi besar. Wilayah

yang dulunya tidak tersentuh oleh pembangunan mulai menuntut hak-haknya. Akibat perbedaan terhadap pembangunan yang terjadi pada setiap wilayah. Wilayah yang memiliki peluang ingin maju menjadi terhalang akibat kurang baiknya penyediaan fasilitas yang ada. Memberikan kesulitan untuk mereka bergerak maju.

Untuk mengetahui bagaimana tingginya tingkat disparitas di suatu provinsi antar wilayah satu dan wilayah lainnya. Maka diperlukannya dilakukan analisis disparitas dengan menggunakan berbagai instrumen metode analisis untuk mengetahui berapa besarnya tingkat disparitas suatu provinsi, seperti *Indeks Williamson* dan *Tipologi Klassen*. Dimana metode analisis tersebut memiliki kegunaan yang berbeda tergantung penelitian yang hendak dilakukan mengenai ketimpangan. Setelah melakukan analisis dan memperoleh hasil. Maka dari hasil analisis tersebut dapat memberikan gambaran seberapa tinggi disparitas yang telah terjadi pada satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Provinsi Riau atau yang biasa dikenal dengan Bumi Melayu Lancang Kuning merupakan salah satu daerah mashyur di negeri ini. Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi terkaya di Indonesia dengan potensi alamnya yang luar biasa. Sehingga pada tahun 2019, Provinsi Riau menduduki peringkat ke-86 di Indonesia dan menduduki posisi ke-2 Pulau Sumatra. Namun, dibalik kaya nya potensi alam yang dimiliki Provinsi Riau ini tentu saja tetap memiliki beberapa permasalahan dalam peningkatan pembangunan ekonominya. Provinsi Riau tentu saja tidak akan terlepas dari masalah ketimpangan terhadap pertumbuhan



ekonomi. Secara spasial, pada tahun 2020 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 4,62 persen terhadap perekonomian nasional.

Ketimpangan terjadi disebabkan karena adanya perbedaan pembangunan ekonomi terhadap wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Riau. Masing-masing wilayah tentu memiliki potensi sumberdaya alam yang berbeda dan sektor unggulan yang berbeda, sehingga perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan tingkat pertumbuhan pembangunan ekonomi wilayah di masing-masing wilayah yang ada di Provinsi Riau ini.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau mengalami fluktuasi yaitu melambat sejak tahun 2012. Perekonomian Provinsi Riau hanya bertumpu pada dua lapangan usaha yakni Industri Pengolahan serta Pertambangan dan Penggalian. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tertinggi terjadi pada tahun 2012 pada periode tahun 2011-2020. Ketimpangan di Provinsi Riau dari tahun 2011 hingga 2020 terus mengalami perbaikan. Perlu adanya upaya dari pemerintah daerah untuk mendorong sektor-sektor yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih stabil, merata dan berkesinambungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau tahun 2011-2020 dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen dan Indeks Williamson. Kedua indeks ini digunakan untuk melihat pola pertumbuhan ekonomi tiap wilayah yang ada di Provinsi Riau serta mengetahui tingkat ketimpangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau menyebabkan perbedaan pendapatan dan perbedaan pengeluaran antar wilayah di Provinsi Riau. Selain itu,

hasil yang di dapatkan kemudian dijadikan sebagai acuan langkah strategis dalam mengatasi disparitas ekonomi yang terjadi di Provinsi Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Uraian dari latar belakang di atas dapat disimpulkan menjadi beberapa bagian yaitu, sebagai berikut:

1. Permasalahan yang menjadi dasar yang dihadapi oleh setiap negara dalam awal pembangunan adalah aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi. Pada negara berkembang tujuan dalam mementingkan pertumbuhan ekonomi atau terjadinya ketimpangan dan persoalan kemiskinan menjadi dilema. Tujuan pembangunan ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi disparitas ekonomi. adanya disparitas ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah akan menimbulkan kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah, dan disparitas ekonomi yang akan semakin tajam.
2. Disparitas yang terjadi di Provinsi Riau antar wilayah/kabupaten masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan terhadap prioritas pembangunan ekonomi yang ada pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau. Untuk mengetahui tingginya tingkat disparitas yang ada pada suatu wilayah, diperlukannya untuk melakukan analisis disparitas dengan menggunakan berbagai instrumen metode analisis untuk mengetahui tingkat disparitas suatu wilayah seperti pada penelitian ini menggunakan metode analisis, *Indeks Williamson* dan *Tipologi Klassen*.

3. Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Riau atas dasar harga konstan dengan migas periode tahun 2011-2020 berfluktuasi, dimana dimulai sejak tahun 2012-2020, hal ini disebabkan karena ada nya beberapa bencana yang memberikan dampak menurunnya angka terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Dan, penurunan yang terjadi secara signifikan pada periode tahun 2011-2020 terjadi pada tahun 2020, mencapai nilai 0,27% bahkan masih jauh dari angka 1.

Dalam analisis disparitas ekonomi antar wilayah, perlu untuk diketahui wilayah mana saja yang mengalami ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada Provinsi Riau terlihat adanya indikasi disparitas ekonomi pada daerah setiap kabupaten yang ada. Dapat dilihat dari pembangunan yang tidak sama rata dari satu wilayah dengan wilayah lainnya, baik terhadap pembangunan ekonominya maupun terhadap pembangunan infrastrukturnya. Ada beberapa wilayah yang menjadi pusat perhatian oleh pemerintah dan ada juga wilayah yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dimana pemerintah tampak memperhatikan wilayah-wilayah dengan potensi yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah yang hanya memiliki sedikit potensi.

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat disparitas yang terjadi di Provinsi Riau. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap penyebab terjadinya disparitas di Provinsi Riau yang menyebabkan perbedaan pada pembangunan ekonomi pada

Provinsi Riau. Menggunakan analisis Tipologi Klassen untuk mengetahui pola pembangunan ekonomi tiap wilayah dan menggunakan analisis Indeks Williamson untuk mengetahui ketimpangan ekonomi serta untuk mengetahui tingkat disparitas pendapatan antar wilayah di Provinsi Riau. Permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis dalam laporan ini yaitu disparitas ekonomi di Provinsi Riau tahun 2011-2020.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan pada sub bab sebelumnya maka diperoleh beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau Tahun 2011-2020?
2. Bagaimana tipologi ekonomi serta klasifikasinya pada kabupaten/kota di Provinsi Riau berdasarkan analisis Tipologi Klassen?
3. Berapa tingkat disparitas ekonomi antar kabupaten di Provinsi Riau berdasarkan analisis Indeks Williamson?

### **1.4 Tujuan dan Sasaran**

#### **1.4.1 Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat disparitas dan tipologi ekonomi yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2011-2020.

### **1.4.2 Sasaran**

Adapun sasaran penelitian ini berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan maka peneliti menyusun beberapa sasaran dalam mendukung penelitian ini. Sasarana penelitian senagai berikut:

1. Mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Riau tahun 2011-2020
2. Menganalisis Tipologi Ekonomi Provinsi Riau
3. Menganalisis tingkat disparitas ekonomi di Provinsi Riau

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya maka manfaat dari pelaksanakan penelitian in adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1 Manfaat Penelitian Bagi Akademik**

Memberikan sumbangan akademik yang mungkin dapat memberikan ilmu ataupun berupa penambahan wawasan pada suatu organisasi dalam melakukan suatu penelitian. Dengan adanya penelitian mengenai analisis disparitas ekonomi antar kabupaten di Provinsi Riau ini dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya dalam memberikan masukan atau rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah untuk mengurangi tingkat disparitas di Indonesia.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian Bagi Pemerintah**

Sebagai bahan yang dapat menjadi arahan atau acuan dalam melakukan kajian dalam mengembangkan Provinsi Riau sehingga dapat mengurangi disparitas yang terjadi di masa yang akan datang. Selain itu mampu memberikan bantuan kepada pemerintah dalam mengambil suatu keputusan yang akan di ambil mengenai pembangunan di Provinsi Riau serta mengurangi terjadi nya disparitas di wilayah penelitian tersebut. Dan pemerintah diharapkan akan lebih mudah untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan di Provinsi Riau.

### **1.5.3 Manfaat Penelitian Bagi Masyarakat**

Manfaat bagi masyarakat yaitu menambah ilmu pengetahuan terhadap perekonomian di daerah dan disparitas ekonomi daerah yang ada pada umumnya terjadi di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengubah kondisi, situasi, serta masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang secara langsung daerah nya terkena dampak disparitas atau ketimpangan ekonomi.

## **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian**

Adapun ruang lingkup wilayah pada penelitian ini meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Riau. Provinsi Riau memiliki luas wilayah 87.023,66 Km<sup>2</sup>. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, yang terletak antara 01°05'00" Lintang Selatan – 02°

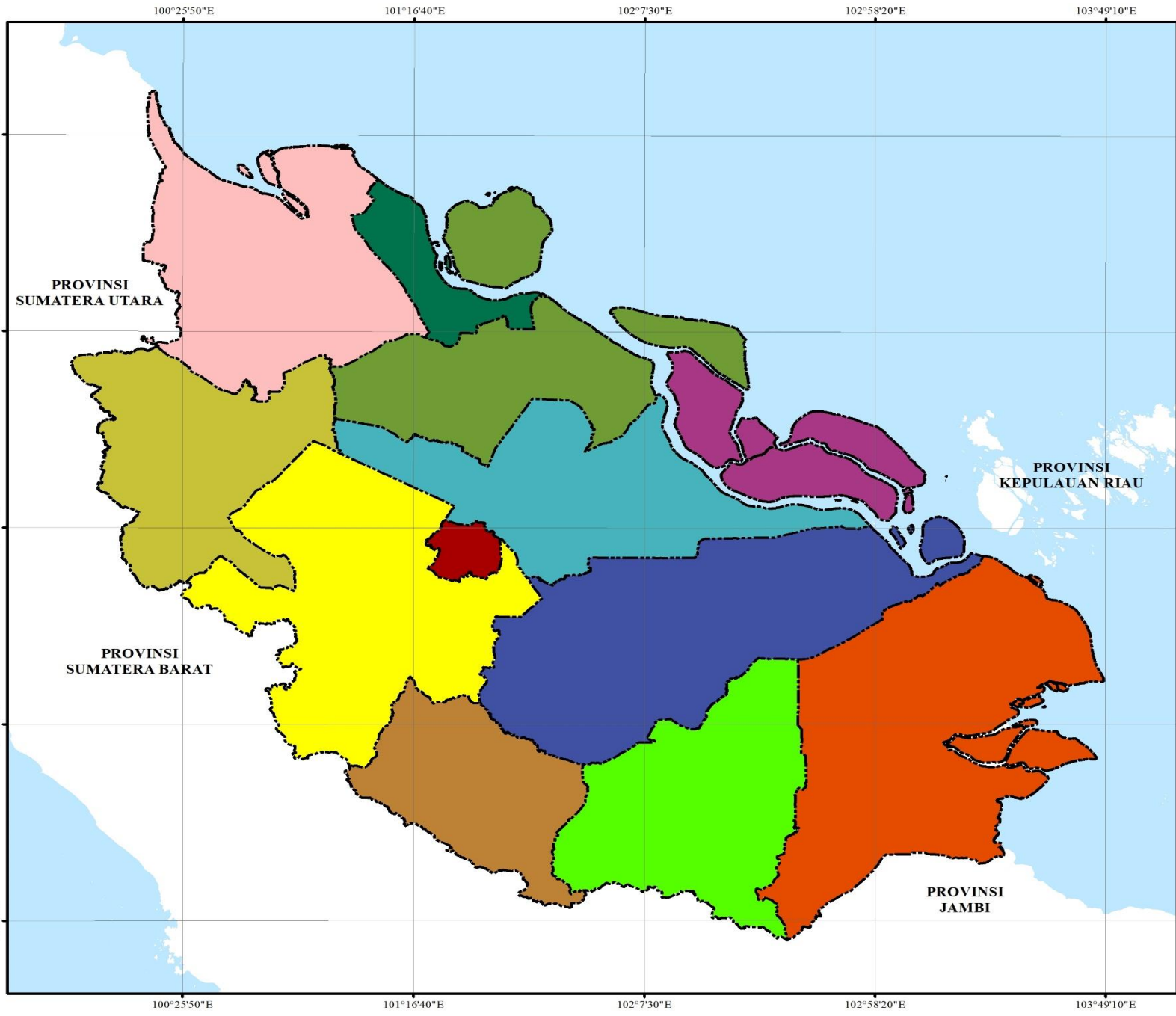
25'00" Lintang Utara dan 100 °00'00" Bujur Timur - 105 °05'00" Bujur Timur.

Terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa. Provinsi Riau berbatasan dengan:

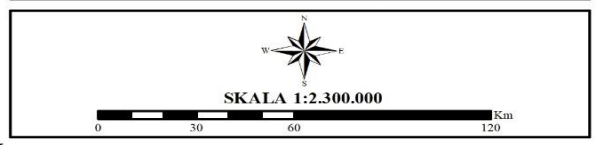
- a. Sebelah Utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- c. Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara
- d. Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Berikut ruang lingkup wilayah administrasi Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Riau





**GAMBAR 1.1 PETA ADMINISTRASI  
PROVINSI RIAU**



Sistem Grid : ..... Grid Geografi  
 Datum Horizontal : ..... WGS 84



**LEGENDA**

<b>ADMINISTRASI</b>	
-----	Batas Kabupaten/ Kota
	PEKANBARU
	ROKAN HILIR
	BENGKALIS
	ROKAN HULU
	INDRAGIRI HILIR
	SIAK
	INDRAGIRI HULU
	KAMPAR
	KEPULAUAN MERANTI
	KOTA DUMAI
	KUANTAN SINGINGI
	PELALAWAN

<b>Dosen Pembimbing :</b> Puji Astuti, ST, MT	<b>Nama :</b> Melisa Pebriani <b>NPM :</b> 173410870
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

**SUMBER**

1. SHP RBI (Rupa Bumi Indonesia) Tahun 2017
2. Citra Satellite



### 1.6.2 Ruang Lingkup Materi

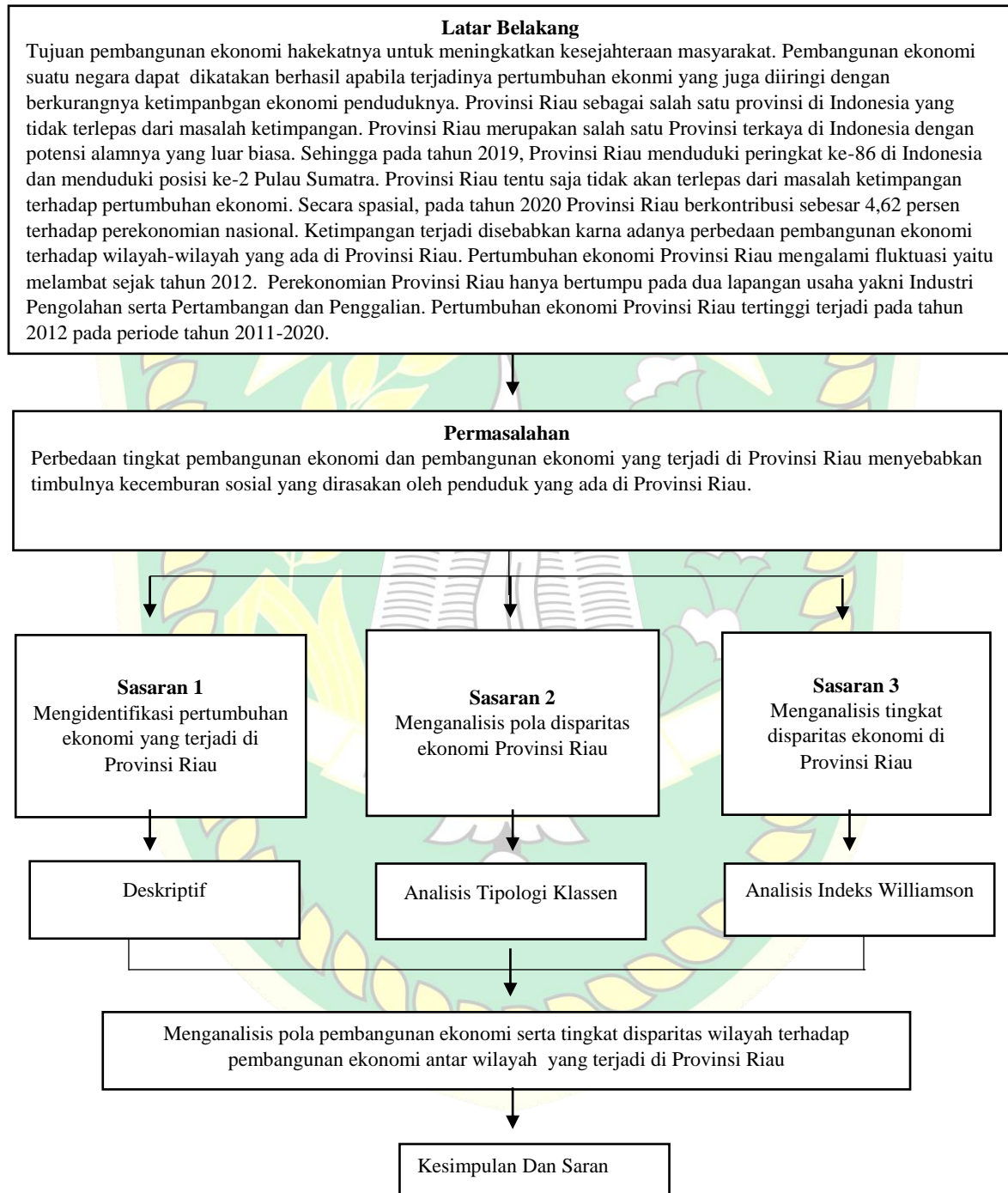
Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dalam studi ini dimaksudkan dengan tujuan untuk memfokuskan penelitian hanya pada sasaran yang di inginkan. Ini dilakukan agar penelitian lebih terarah serta mudah dipahami. Adapun ruang lingkup materi pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dengan menggunakan data laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan migas tahun 2011-2020. Untuk mengetahui perubahan pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dari tahun 2011-2020 dengan menggunakan metode deskriptif.
2. Untuk melakukan analisis mengenai tipologi antar wilayah dan tipologi antar sektor serta menentukan klasifikasi masing-masing wilayah dan sektor dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen. Variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah disparitas pola perkembangan ekonomi, disparitas ekonomi antar sektor. Masing-masing tipologi wilayah dan tipologi sektor memiliki 4 klasifikasi.
3. Untuk menganalisis tingkat disparitas ekonomi yang terjadi antar wilayah yang ada di Provinsi Riau dari tahun 2011-2020. Dengan menggunakan analisis Indeks Williamson. Data yang digunakan pada analisis Indeks Williamson adalah PDRB per kapita dan jumlah penduduk.

## 1.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir studi dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.1

berikut:



Sumber: Hasil Analisis, 2021

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan sistematika sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penyusunan, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka berpikir dan serta sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang dasar-dasar teori yang mendukung dalam penulisan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan berdasarkan kajian literatur yang diperoleh dari buku-buku meliputi definisi, pengertian, sintesa teori dan penelitian terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi mengenai metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis data dan sumber data, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, teknik pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI**

Pada bab ini berisi mengenai deskripsi gambaran umum wilayah penelitian yaitu Provinsi Riau diantaranya, Kota Pekanbaru, Kota

Dumai, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti.

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini terdiri dari dua tahap analisa, yaitu analisis disparitas wilayah untuk mengukur besarnya disparitas yang terjadi menurut variabel-variabel ekonomi. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas di Provinsi Riau.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari seluruh pembahasan dalam penelitian dan di dalamnya terdapat jawaban dari rumusan permasalahan penelitian. Selain itu, juga membuat saran berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Rostow dalam Suri (2017) mengajukan lima tahap pertumbuhan dalam pembangunan ekonominya, memandang bahwa tingkatan kritis bagi negara berkembang adalah tahap tinggal landas, dimana masyarakat suatu negara berkembang akan mengalami transformasi menuju masyarakat yang maju. Selanjutnya Rostow (dalam Suri, 2017) juga berpendapat bahwa salah satu prinsip yang perlu dilaksanakan dalam tahapan ini adalah mobilisasi tabungan domestik dan luar negeri agar dapat menghasilkan investasi yang cukup bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan pada bidang ekonomi ditempatkan dalam urutan pertama dari seluruh aktivitas dalam pembangunan. Dalam rangka pembangunan ekonomi sekaligus terkait usaha-usaha pemerataan kembali hasil pembangunan yang merata keseluruh daerah, maupun berupa peningkatan dalam pendapatan masyarakat. Secara bertahap dilakukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan keterbelakangan. Pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita serta lajunya pembangunan ekonomi ditujukan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik

Bruto) untuk tingkat Nasional dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tingkat wilayah . Oleh karna itu, perubahan pada pendapatan per kapita dan peningkatan pada PDRB dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi menurut kebanyakan teorikus ekonomi islam bersifat komprehensif, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata, akan tetapi seperti ditegaskan oleh Khursyid (dalam Mth, 2003) meliputi aspek moral dan sosial, material dan spiritual. Sebagian penulis seperti Yusuf (dalam Mth, 2003) berpendapat bahwa pemberlakuan *al-'urf* untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi tidak relevan dengan masyarakat muslim.

Menurut Yusuf (dalam Mth, 2003) tujuan pembangunan ekonomi dalam islam untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*al-hayat at-tabiyyah*) sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an seperti:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya: “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagi mu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurannya, karna itu mohon ampunanlah kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya.

Ayat ini mengandung dua makna yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pertama, makna *al-wujub* atau kewajiban manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan. Kedua, ayat ini mengandung perintah Allah kepada umat manusia untuk membangun jagad raya. Ayat lain

tentang pembangunan ekonomi adalah firman Allah SWT pada Qur'an surah Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahi di segala penjurunya dan makanlah sebagaimana dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu kembali (setelah dibangkitkan).

Ayat diatas mengandung makna *wajib al-infaq* (kewajiban mengeluarkan biaya) dan membangun fasilitas yang mendukung keberhasilan kewajiban tersebut. Hukum membangun fasilitas yang mendukung realisasi terhadap perintah yang bersifat wajib adalah wajib pula. Dari sini kemudian para penulis muslim memahami adanya konsep pembangunan ekonomi di dalam ajaran syari'ah.

## 2.2 Manfaat Pembangunan

Menurut Bintang dan Ariastita, (2012) Pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik. adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Di samping itu kebahagiaan penduduk akan bertambah pula karena pembangunan ekonomi tersebut menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam

sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Oleh karena itu pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan. Pembangunan ekonomi memberikan kemampuan dan kesempatan kepada mereka untuk mengatasi masalah yang ada. Pembangunan ekonomi juga memberikan suatu kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas. Pembangunan ekonomi juga memungkinkan orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat kemanusiaan, karena makin banyaknya sarana yang tersedia. Dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan akan mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara yang susah berkembang. Namun, beberapa penelitian telah menghasilkan perkiraan-perkiraan dimana negara-negara yang sedang berkembang lebih menyadari kemiskinannya, akan memahami pentingnya pembangunan ekonomi ini dan berusaha agar tingkat perkembangan yang diusahakan itu akan cukup tinggi sesuai dengan kemampuannya.

### **2.3 Kesulitan-Kesulitan dalam Pembangunan Ekonomi**

Semua negara yang ada di dunia baik negara-negara maju maupun negara sedang berkembang tentu melaksanakan pembangunan ekonomi. maksudnya untuk menaikkan pendapatan riil per kapita atau paling tidak mempertahankan tingkat pendapatan yang telah dicapai. Bagi negara yang sedang berkembang pembangunan ekonomi jelas dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup sehingga setaraf dengan tingkat hidup di negara-negara maju. Negara sedang berkembang saat ini telah menyadari tentang kemiskinan yang dialami dan jurang



perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dengan negara sedang berkembang.

Pada pokoknya disimpulkan adanya gap besar antara output potensial dan output riil. Sehingga masalahnya, mengapa hal ini selalu ada, dan mengapa negara-negara tersebut tetap miskin. Setelah ditinjau lagi karakteristik yang masih ada di negara sedang berkembang baik bersifat sosial maupun ekonomis. Seperti telah sedikit disinggung, sifat-sifat negara belum maju di antaranya yaitu: pendapatan per kapita rendah, makanan, pakaian dan perumahan yang kurang memenuhi syarat, kesehatan penduduk kurang baik, sedangkan sektor pertanian kurang produktif padahal sektor ini merupakan mata pencaharian terpenting bagi sebagian besar penduduk serta adanya tingkat kelahiran yang tinggi dengan sedikit penduduk dewasa. Berikut ini karakteristik-karakteristik lain yang merupakan penghambatan bagi perkembangan ekonomi di negara-negara sedang berkembang:

#### **A. Pendapatan Per Kapita Sebagai Indeks Perkembangan**

Di samping kesulitan perhitungan pendapatan nasional, penentuan tingkat pendapatan sebagai batas antara maju dan belum maju adalah tidak tepat. Negara dikatakan maju bila income negara itu lebih besar daripada \$300, sebenarnya kurang tepat. Tetapi pendapatan per kapita tetap dipakai sebagai indeks perkembangan karena:

1. Pendapatan per kapita merupakan indeks tunggal yang kita punyai.

2. memang tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menghilangkan kemiskinan.
3. Pendapatan per kapita merupakan petunjuk yang cukup baik bagi struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Seperti misalnya dikatakan atas dasar pendapatan per kapita negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin.

## **B. Pengangguran**

Pengangguran-pengangguran telah merupakan pokok kebijaksanaan bagi negara sedang berkembang dan negara maju. Underemployment dan disguised unemployment telah bergeser ke kota dalam bentuk pengangguran terbuka. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pengangguran di kota-kota ialah:

1. Banyaknya tenaga yang pindah dari desa ke kota.
2. Kota tak mampu menampung tenaga, karena kekurangan faktor produksi lain (terutama kapital) untuk mengimbangi tenaga kerja yang meningkat jumlahnya itu.

Perpindahan tenaga kerja ini berhubungan dengan push dan pull factors (kekuatan yang mendorong dan menarik untuk pindah dari desa ke kota. Push factors berupa:

1. Terbatasnya kesempatan kerja di desa
2. Keinginan untuk pindah ditunjang oleh tersedianya transportasi dan pendidikan yang lebih baik.

### **C. Distribusi Pendapatan**

Distribusi pendapatan lebih tidak merata di negara sedang berkembang daripada di negara maju. Trend distribusi pendapatan akan semakin merata, semakin maju suatu perekonomian. Perkembangan di negara sedang berkembang banyak menguntungkan golongan kecil saja, 920% terkaya). Di negara yang miskin, golongan yang termiskin pasti miskin sekali, sedangkan di negara maju yang termiskin mungkin masih lebih kaya dari golongan yang menengah di negara miskin.

#### **2.4 Pertumbuhan Ekonomi**

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Peningkatan dan pertumbuhan ekonomi pada daerah membawa pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu alat ukur dalam mengukur laju pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto. Dalam pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan cara menghitung peningkatan nilai PDRB pada tahun ke tahun berikutnya.

Menurut Adam dalam Suri (2019) ada dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output (GDP) total dan pertumbuhan penduduk. Kedua aspek tersebut berkaitan satu sama lainnya. Kedua aspek tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk

meningkatkan kekayaan suatu negara atau wilayah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara atau wilayah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Bruto Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas harga konstan. tidak adanya pemerataan dalam proses pembangunan akan mengakibatkan ketimpangan atau ketimpangan antar daerah. Ketimpangan yang terjadi dapat menyebabkan disparitas ekonomi dan kecemburuan sosial.

## **2.5 Teori Lokasi Pertumbuhan**

Teori lokasi adalah cabang ilmu ekonomi regional yang paling tertua dan dikembangkan sejak abad ke sembilan belas (Richardson (dalam Budiwikramatunggadewa, 2015)). Teori ini merupakan jawaban dari pertanyaan Weber (dalam Budiwikramatunggadewa, 2015) yaitu orang yang pertama kali mengajukan pertanyaan mengapa pabrik-pabrik cenderung memiliki lokasi yang berdekatan. Teori lokasi adalah teori yang menjelaskan dimana dan bagaimana suatu aktivitas ekonomi dapat memilih lokasinya secara optimal. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut sangat penting bagi para pengambil keputusan publik. Perancang lembaga perdagangan eceran (yang ingin menentukan lokasi yang tepat) maupun pengembang komunitas real estate, yang berharap dapat menarik bisnis mereka ke kawasan-kawasan mereka. Keputusan lokasi perusahaan atau pembangunan yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi seharusnya dapat menyebabkan berkembangnya kota dan daerah.

Pemilihan lokasi aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor lokasi ini. Faktor-faktor lokasi menurut Soepono, (1999) dikelompokkan menjadi dua orientasi yaitu:

1. Orientasi transportasi, adalah bahwa transportasi merupakan porsi terbesar dari biaya total dari organisasi suatu aktivitas ekonomi, sehingga menjadi penentu keputusan lokasi. Faktor-faktor lokasi yang berorientasi transportasi antara lain: faktor transportasi, faktor sumberdaya, faktor pasar, dan faktor tenaga kerja.
2. Orientasi masukan lokal, adalah masukan lokal merupakan persentase terbesar dari biaya total dan disebut ke lokasi lain. Faktor-faktor lokasi yang berorientasi masukan lokal antara lain: faktor energi, faktor kenyamanan (mutu hidup, kualitas hidup atau gaya hidup), faktor aglomerasi, pelayanan publik setempat, pajak, insentif pemerintah, (pusat dan daerah), iklim bisnis setempat, site costs (harga tanah dan gedung, fasilitas perkantoran dan gedung), dan stabilitas atau iklim politik.

## **2.6 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah**

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi di artikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat akan meningkat (Nurhayani dkk, 2015). Kemampuan yang mengalami peningkatan disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang akan selalu mengalami penambahan

dalam jumlah serta kualitasnya. Selain itu, penambahan terhadap tenaga kerja juga akan meningkat akibat dari adanya perkembangan penduduk seiring bertambahnya pengalaman kerja dan pendidikan akan menambahkan keterampilan pada mereka. Menurut Sukirno, (2002) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya (Sukirno, 2004). Formula untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_t = \frac{\text{PDRB riil} - \text{PDRB riil } t-1 \times 100}{\text{PDRB riil } t-1}$$

Dimana:

$Y_t$  = Pertumbuhan Ekonomi

PDRB riil = Pendapatan Domestik Regional Bruto

$t$  = Periode Tahun

$t - 1$  = Periode Tahun Sebelumnya

#### a. Teori Ekonomi Neo Klasik

Peranan teori ekonomi Neo-Klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah (*regional*), karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial

yang signifikan. Namun, teori ini memberikan dua konsep penting dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi.

#### **b. Teori Basis Ekonomi**

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk kemudian di ekspor, sehingga akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job cretain*) baru.

#### **c. Teori Pertumbuhan Rostow**

Teori pertumbuhan Rostow membagi proses pembangunan ekonomi suatu negara menjadi 5 (lima) tahapan :

- a. Tahap ekonomi tradisional
- b. Tahap ekonomi pra tinggal landas
- c. Tahap tinggal landas
- d. Tahap menuju kedewasaan
- e. Tahap konsumsi masyarakat tinggi.

#### **d. Teori Pertumbuhan Mahzab Keynesian**

Setiap perekonomian dapat menyisihkan sejumlah proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang-barang modal. Menurut

(Harrad Domar), untuk dapat meningkatkan laju perekonomian, diperlukan investasi sebagai tambahan stok modal (Arsyad, 2010). Teori ini memandang bahwa ada hubungan ekonomis antara stok modal (K) dan tingkat output total (Y) yang dengan istilah capital output ratio = cor = K. Yaitu :

$$k = \frac{K}{Y} \text{ atau } \frac{\Delta K}{\Delta Y} k \text{ atau } \Delta K$$

$$= K \cdot \Delta$$

**e. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik**

Model Pertumbuhan Neo Klasik berpegang pada skala hasil yang terus berkurang dari input tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri. Bentuk persamaan formalnya (fungsi produksi agregat standar) yaitu  $y = y^0 \cdot (AL) \cdot 1^0$  dimana Y adalah Produk Domestik Regional Bruto, L adalah produktivitas kerja (Todaro, 2006). Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik dengan menggunakan fungsi *Coob Douglass* yaitu:

$$Q_t = T_t K_t^a L_t^b$$

Dimana :

$Q_t$  = Tingkat Produksi pada tahun t

$T_t$  = Tingkat Teknologi pada tahun t

$K_t$  = Jumlah stok barang modal pada tahun t

$L_t$  = Jumlah tenaga kerja pada tahun t



### 2.6.1 Konsep Wilayah

Menurut Budiharsono, (2001) wilayah adalah suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang dibatasi oleh bagian-bagian yang tergantung secara internal. Wilayah dapat dibagi menjadi 4 kriteria, yaitu:

1. Wilayah Homogen

Wilayah yang sifat dan ciri-cirinya relatif sama. Persamaan ini biasanya meliputi dari hal ekonomi, geografi, agama dan suku. Setiap perubahan di wilayah tersebut maka akan menyebabkan perubahan di bagian lain dengan prioritas yang sama.

2. Wilayah Nodal

Wilayah nodal adalah wilayah yang mempunyai ketergantungan kepada pusat pertumbuhan dan daerah belakang (Hinterland).

3. Wilayah Administratif

Wilayah yang ditentukan oleh batas-batas kepentingan administratif pemerintah atau politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan, serta RT dan RW. Pengelolaan pada wilayah ini memerlukan kerjasama antar administratif lainnya.

4. Wilayah Perencanaan

Wilayah perencanaan bukan hanya dari aspek fisik dan ekonomi tetapi juga ada dalam aspek ekologis Indeks Williamson. Ukuran yang paling utama dalam menganalisis besaran ketimpangan antar wilayah adalah dengan perhitungan Indeks Williamson. Dasar dari perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah

penduduk per daerah. Ketimpangan pendapatan antar wilayah di Kabupaten Indragiri Hulu yang digunakan dengan menggunakan Indeks Williamson.

## **2.7 Pengertian Disparitas**

Ketimpangan atau disparitas antar daerah adalah hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi pada suatu daerah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan kandungan pada sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Dengan adanya perbedaan ini memberikan dampak terhadap kemampuan daerah dalam mendorong proses pembangunan juga jadi berbeda.

Menurut Kuncoro, (2006) ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat. Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010).

Berikut ini beberapa definisi ketimpangan menurut para ahli:

1. Menurut Chaniago, (2011) ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial.
2. Menurut Winarno, (2007) ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat.

3. Menurut Haughton & Khand, (2002) ketimpangan adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan.
4. Aswidah, (2014) ketimpangan sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi.

Disparitas ekonomi adalah perbedaan pada pembangunan ekonomi antar satu daerah dengan daerah lainnya baik secara vertikal maupun secara horizontal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan atau ketidakmerataan pembangunan pada wilayah tersebut. Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk mengurangi terjadinya ketimpangan atau disparitas. Peningkatan yang terjadi pada pendekatan per kapita dapat memberikan gambaran terhadap tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah. Namun, meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata.

Menurut kuznets (dalam Budiwikramatungadewa, 2015) dalam penelitiannya di negara-negara maju berpendapat bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk. Namun, pada tahap-tahap berikutnya akan membaik. Penelitian inilah yang dikenal secara luas sebagai konsep kurva Kuznets U terbalik. Sementara itu, menurut Oshima (dalam Budiwikramatungadewa, 2015) bahwa negara-negara asia nampaknya mengikuti kurva Kuznet dalam kesejahteraan pendapat. Menurut Ardani (dalam Budiwikramatungadewa, 2015) mengemukakan bahwa ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.

Ketimpangan antar wilayah dimunculkan oleh North, (1990) dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Di dalam teori tersebut dimunculkan bahwa sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah dan kemudian hipotesa ini dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik. Dalam hipotesa Neo-Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan. Proses ini akan terus berjalan sampai kepada ketimpangan berada di titik puncak. Bila proses pembangunan berlanjut maka ketimpangan pembangunan akan mengalami penurunan. Dalam negara-negara berkembang ketimpangan pembangunan antar wilayahnya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju. Dengan kata lain, maka kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah berbentuk huruf U terbalik.

Kebenaran hipotesa neo-klasik telah diuji kebenarannya oleh Williamson (dalam Siallagan, 2019) melalui studi mengenai ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara berkembang menggunakan data time series dan cross section yang menunjukkan hasil bahwa hipotesa neo-klasik terbukti benar secara empirik. Kuznet (dalam Siallagan, 2019) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan. Observasi ini kemudian yang dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik” karena perubahan longitudinal (time series) dalam distribusi pendapatan.

Selain Ketimpangan antar wilayah, ketimpangan antar daerah juga dijelaskan oleh Mydral (dalam Siallagan, 2019) dengan membangun teori kelatarbelakangan dan pembangunan pada ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskannya menggunakan spread effect dan backwash effect atau dampak sebar diartikan sebagai pengaruh yang dapat mendatangkan keuntungan meliputi aliran kegiatan-kegiatan investasi pada pusat pertumbuhan di daerah sekitarnya, sedangkan backwash effect atau dampak balik diartikan sebagai pengaruh yang dapat menimbulkan kerugian kepada manusia yang ada di wilayah sekitar dan memberikan akibat berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya perlu mendapatkan pemerataan pembangunan untuk mengimbangi perkembangan pada wilayah tersebut.

Ketimpangan antar wilayah yang semakin besar disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu:

1. Adanya migrasi tenaga kerja antar wilayah bersifat selektif yang pada umumnya para migran tersebut lebih terdidik, mempunyai keterampilan yang tinggi dan masih produktif.
2. Adanya migrasi kapital antar wilayah. Adanya proses aglomerasi pada wilayah yang relatif kaya menyebabkan daya tarik tersendiri bagi investor pada wilayah lainnya yang memberikan akibat terjadinya aliran kapital wilayah yang telah terlebih dahulu maju.

3. Adanya pembangunan sarana publik pada wilayah yang lebih padat dan potensial berakibat mendorong terjadinya ketimpangan antar wilayah lebih besar.
4. Kurangnya keterkaitan antar wilayah yang menyebabkan terhambatnya proses efek sebar dari proses pembangunan yang berdampak semakin besarnya ketimpangan yang terjadi.

### **2.7.1 Ketimpangan Wilayah**

Disparitas atau biasanya yang dikenal dengan ketimpangan daerah/wilayah adalah ketimpangan yang terjadi tidak hanya terhadap distribusi pendapatan masyarakat, namun juga terjadi terhadap pembangunan antar wilayah di dalam suatu negara. Tidak adanya pemerataan dalam proses pembangunan akan mengakibatkan ketimpangan atau ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan antar wilayah akan menimbulkan dampak terhadap kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang semakin tajam, wilayah-wilayah yang mengalami keterbelakangan atau tertinggal mempunyai ketergantungan yang kuat dengan wilayah luas. Ketimpangan wilayah adalah berbedanya atau telah terjadinya ketidaksamaan terhadap kondisi lokasi yang terjadi minimal antara dua entitas pada struktur wilayah. Selain itu akses untuk mencapai pusat pelayanan sulit, yang mengakibatkan daerah belakang (*hinterland*) menjadi semakin diabaikan karena tidak ditunjang dengan jumlah fasilitas yang baik dan memadai.

Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar wilayah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai. Alokasi

penganggaran pembangunan adalah sebagai instrument untuk mengantisipasi terjadinya ketimpangan dimasa yang akan datang. Strategi alokasi anggaran seharusnya dapat mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta menjadi alat yang dapat mengurangi ketimpangan atau disparitas antar wilayah itu sendiri.

### **2.7.2 Ketimpangan Pendapatan**

Menurut KBBI, ketimpangan merupakan hal yang tidak sebagaimana mestinya seperti tidak adil, tidak beres. Sedangkan, pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu (BPS,2017).

Pengertian pendapatan menurut Soediyono, (1992) adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat dalam waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi nasional. Masalah ketimpangan pendapatan sering juga diartikan pendapatan riil dari yang kaya terus bertambah sedangkan yang miskin akan terus berkurang. Artinya pendapatan riil dari yang kaya tumbuh lebih daripada yang miskin. Ketimpangan pendapatan adalah bedanya jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat pada suatu daerah.

Ketimpangan pendapatan merupakan hal yang umum terjadi pada kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karna adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Sehingga dengan adanya perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda.

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Ketimpangan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan 40 persen masyarakat kelompok bawah dengan total pendapatan seluruh penduduk. Akibat dari ketimpangan pendapatan yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan beberapa permasalahan sosial dan ekonomi pada suatu negara.

Menurut Siallagan (2013), Lembaga Independen Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) pada tahun 2017 mencatat faktor-faktor yang menyebabkan tingginya ketimpangan di Indonesia yaitu:

1. Fundamentalisme pasar yang mendorong orang kaya mengambil keuntungan terbesar dari pertumbuhan ekonomi.
2. Political Capture yang meningkat, yaitu orang kaya mampu memanfaatkan pengaruh perubahan aturan yang dapat menguntungkan mereka.
3. Ketidaksertaan gender.
4. Upah murah yang menyebabkan masyarakat bawah tidak mampu mengangkat diri dari jurang kemiskinan, dan
5. Ketimpangan akses antara perdesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur.

Pemecahan permasalahan ketimpangan bukan dengan tujuan agar semua masyarakat berada pada tingkatan yang sama melainkan bagaimana caranya agar tingkat disparitas pada suatu wilayah itu mengecil.



### 2.7.2.1 Teori Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan antar wilayah dalam suatu perekonomian merupakan fenomena yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia (Firdhaus, 2018). Morris (dalam Firdhaus, 2018) menyatakan mengenai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembagian pendapatan terdapat suatu *trade-off*. Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan meningkatkan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sedangkan pemerataan dan hasil-hasilnya yang cukup baik hanya akan dicapai dalam pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat sehingga kebijakan yang menggunakan pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan ketimpangan antar wilayah.

Masalah ketimpangan pendapatan sering diikhtisarkan, bahwa pendapatan riil dari yang kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang ini berarti bahwa pendapatan riil dari yang kaya tumbuh cepat daripada yang miskin. Herrick (dalam Firdhaus, 2018). Dengan adanya perbedaan pendapatan tersebut, terjadinya perbedaan pendapatan antar masyarakat yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat. Dengan adanya perbedaan tersebut maka terlihat bahwa ketimpangan yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

Menurut Williamson, (1999) ketimpangan antar daerah akan semakin membesar disebabkan oleh:

1. Adanya migrasi tenaga kerja yang produktif dan pada umumnya para migrasi lebih terdidik dan memiliki keterampilan yang tinggi.

2. Adanya migrasi kapital dimana daerah yang kaya akan menarik lebih banyak investor.
3. Adanya pembangunan sarana publik yang lebih pada daerah tertentu sehingga menyebabkan ketimpangan yang lebih besar.
4. Kurangnya keterkaitan antar daerah sehingga menyebabkan kurangnya penyebaran yang membuat ketimpangan menjadi lebih besar.

Tujuan utama dari adanya pembangunan ekonomi adalah untuk mengurangi terjadinya disparitas pada suatu wilayah. Dengan cara melakukan peningkatan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita memang memberikan bukti pada tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah, namun bukan berarti menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata. Terdapat bentuk-bentuk ketimpangan di antaranya:

1. Ketimpangan pendapatan wilayah

Menurut Willimason (dalam Firdhaus, 2018) meneliti hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi negara yang sudah maju dan yang sedang berkembang. Tahap pembangunan yang terjadi pada disparitas lingkup regional menjadi semakin besar dan pembangunan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

2. Ketimpangan pembangunan antar wilayah

Masyarakat yang tinggal di desa atau di kota adalah suatu kondisi yang sudah umum terjadinya ketimpangan pembangunan. Hal ini terjadi

dikarenakan pembangunan hanya terfokus pada daerah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan. Selain itu, pada faktor yang internal sebaran jumlah penduduk yang tidak merata dan masih minimnya lapangan pekerjaan juga menjadi penghambat pertumbuhan daerah perdesaan. Jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada di pedesaan tidak produktif dibandingkan lapangan pekerjaan yang ada di perkotaan yang mempunyai lapangan kerja yang banyak.

## **2.8 Teori Disparitas**

Menurut Moihuddin dan Hashia, (2012) Disparitas regional adalah fenomena yang bersifat universal. Di semua negara tanpa memandang ukuran dan tingkat pembangunan. Disparitas ekonomi merupakan masalah yang kerap sekali terjadi antar daerah, dimana terjadinya pembangunan yang tidak merata. Pada banyak negara, pembagian ekonomi yang tidak merata telah melahirkan masalah-masalah sosial politik. Kebijakan-kebijakan pembangunan telah diarahkan untuk mengurangi disparitas antar daerah (Rustiadi dkk, 2011).

Menurut Wie (dalam Raditya dkk, 2012) negara yang semata-mata hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tanpa memikirkan pendistribusian pendapatan tersebut akan memunculkan ketimpangan-ketimpangan sebagai berikut:

- a. Ketimpangan pendapatan antar golongan atau ketimpangan relatif, ketimpangan antar golongan ini biasanya diukur dengan koefisien gini. Kendati koefisien gini bukan merupakan indikator yang ideal mengenai

ketimpangan pendapatan antar berbagai golongan, namun sedikitnya angka ini dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola distribusi pendapatan.

- b. Ketimpangan antar masyarakat pedesaan dengan masyarakat kota, ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat juga ditinjau dari segi perbedaan perolehan pendapatan antar masyarakat desa dengan masyarakat kota (*Urban-rural-income disparities*). Untuk membedakan hal ini, digunakan dua indikator, yaitu pertama perbandingan antara tingkat pendapatan di daerah perkotaan dan pedesaan. Kedua, disparitas pendapatan daerah perkotaan dan daerah pedesaan.
- c. Ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah, dan kajian sisi lain dalam melihat ketimpangan-ketimpangan pendapatan nasional adalah ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi antar daerah di berbagai daerah di Indonesia, yang mengakibatkan pola terjadinya ketimpangan pendapatan antar daerah (*region income disparities*). Ketimpangan pendapatan ini disebabkan oleh penyebaran sumberdaya alam yang tidak merata serta dalam laju pertumbuhan daerah dan belum berhasilnya usaha-usaha perubahan yang merata antar daerah di Indonesia. Menurut Todaro (2004), menggambarkan ketimpangan dengan mempertimbangkan hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dan tingkat ketimpangan pendapatan untuk negara maju dan sedang berkembang. Dan, menggambarkan ketimpangan pendapatan negara-negara tersebut dalam tiga kelompok dimana pengelompokan ini disesuaikan dengan tinggi, sedang, dan

rendahnya tingkat pendapatan yang diukur menurut koefisien gini dan tingkat PDRB.

## **2.9 Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah**

Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah muncul terutama sebagai reaksi terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan dari teori Neoklasik (Nurhayani dkk, 2015). Kekuatan pasar tidak dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antar daerah dalam suatu negara, sebaliknya kekuatan-kekuatan ini cenderung akan keseimbangan pertumbuhan. Mydral (dalam Nurhayani, 2015) berpendapat bahwa perubahan-perubahan dalam suatu sistem sosial tidak diikuti oleh penggantian perubahan-perubahan pada arah yang berlawanan. Beranjak dari pendapat ini, ia juga mengembangkan teori penyebab kumulatif dan berputarnya proses sosial untuk menjelaskan ketimpangan internasional dan antarwilayah. Menurut Mydral (dalam Nurhayani, 2015) terdapat dua kekuatan yang bekerja dalam proses pertumbuhan ekonomi, efek balik negatif (backwash effect) dan efek penyebaran (spread effect).

## **2.10 Konsep Ketimpangan**

Kuznets (dalam Siallagan, 2019) mengungkapkan bahwa pada proses awal pertumbuhan ekonomi di negara miskin cenderung menyebabkan terjadinya kemiskinan yang meningkat dan juga membuat ketimpangan dalam pendapatan semakin tidak merata. Kemudian setelah negara tersebut mengalami kemajuan akan membuat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan semakin menurun

(Kuncoro, 2001). Ketimpangan pendapatan cenderung lebih tinggi pada sektor industri modern daripada suatu wilayah dengan sektor pertanian yang relatif tetap. Kuznet juga mengungkapkan bahwa ketimpangan dalam pendapatan ditahap awal cenderung semakin meningkat karena adanya perekonomian yang mengalami penurunan yang cukup besar dalam perindustrian pendapatan, kemudian setelah tahap pembangunan berikutnya ketimpangan pendapatan cenderung menurun karena distribusi pendapatan lebih merata.

Menurut Sukirno, (2010) distribusi pendapatan terbagi menjadi dua yaitu distribusi pendapatan relatif yang merupakan perbandingan antara total pendapatan yang sudah diterima oleh sekelompok penerima pendapatan tersebut, sedangkan distribusi pendapatan mutlak merupakan persentase masyarakat yang mendapatkan pendapatan yang mencapai pendapatan tertentu ataupun kurang darinya. Pemetaan dalam distribusi pendapatan terdiri dari tiga kategori yaitu pembagian distribusi pendapatan antar golongan masyarakat antar daerah, desa dan kota, serta pembagian distribusi pendapatan antar wilayah kabupaten/kota.

### **2.10.1 Konsep-konsep Pusat Pengembangan**

Teori tempat sentral telah dikembangkan menjadi teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan ini ini menekankan pada pada dinamisme dan aglomerasi industri-industri. Sehingga memungkinkan kebijakan secara simultan yaitu yang utama adalah pemilihan pusat-pusat modal yang dominan. Mydral (dalam Budiwikramatungadewa, 2015) menekankan analisisnya pada faktor-faktor yang memberikan penyebab akibat tidak

seimbangya pertumbuhan di berbagai daerah dan negara yaitu backwash effect lebih kuat dari faktor yang menimbulkan spread effect.

Hirman (dalam Budiwikramatunggadewa, 2015) memiliki pandangan dan pendapat yang sama dengan Peurrox dan Mydral (dalam Budiwikramatunggadewa, 2015), ia berpendapat bahwa kemajuan ekonomi tidak terjadi dengan waktu yang sama di berbagai daerah dan apabila suatu daerah terjadi pembangunan yang memiliki daya tarik yang kuat sehingga memberikan konsentrasi pembangunan ekonomi di sekitar daerah dimana pembangunan bermula. Boudeville juga berpendapat kutub pertumbuhan wilayah sebagai perangkat industri yang sedang berkembang dan berlokasi di daerah perkotaan yang mendorong berkembangnya perekonomian lebih lanjut melalui wilayah pengaruhnya.

## **2.11 Faktor Penyebab Ketimpangan Wilayah**

Menurut Sjafrizal, (2017) Faktor utama yang menyebabkan atau memicu ketimpangan ekonomi antarwilayah dapat dijelaskan secara empirik unsur penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah tersebut.

### **a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam**

Penyebab pertama yang mendorong timbulnya ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumber daya alam pada masing-masing wilayah. sebagaimana diketahui bahwa perbedaan kandungan sumber daya alam ini di Indonesia ternyata cukup besar. Ada wilayah yang mempunyai minyak dan gas alam, tetapi

wilayah lain tidak mempunyai. Ada wilayah yang mempunyai deposit batu bara yang cukup besar, tapi wilayah lain tidak ada. Demikian juga ada wilayah dengan tingkat kesburan lahan yang juga sangat bervariasi, sehingga mempengaruhi upaya untuk mendorong pembangunan pertanian pada masing-masing daerah. Dengan adanya perbedaan kandungan daerah sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada wilayah bersangkutan.

#### **b. Perbedaan Kondisi Demografis**

Kondisi Demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkat laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat wilayah bersangkutan. Kondisi demografis ini akan mempengaruhi ketimpangan ekonomi antar wilayah, karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai tingkat produktivitas kerja yang lebih tinggi. Kondisi ini akan mendorong peningkatan investasi ke wilayah bersangkutan sehingga akan cenderung meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi ke wilayah bersangkutan.

#### **c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa**

Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa antar wilayah dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan ekonomi antar wilayah.



Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar wilayah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah karena bila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu wilayah tidak dapat dijual ke wilayah lain yang membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan ekonomi antarwilayah akan cenderung lebih tinggi karena kelebihan suatu wilayah tidak dapat dimanfaatkan oleh wilayah lain yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong kegiatan ekonominya. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana, ketimpangan ekonomi antarwilayah akan cenderung relatif tinggi pada negara sedang berkembang di mana mobilitas barang dan jasa kurang lancar karena terbatasnya fasilitas transportasi dan komunikasi dan masih terdapatnya beberapa wilayah yang terisolir.

#### **d. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah**

Pertumbuhan ekonomi wilayah akan cenderung lebih cepat pada wilayah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan wilayah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, karena terdapatnya sumber daya alam yang lebih banyak pada wilayah tertentu, misal terdapatnya minyak bumi, gas, batubara, dan bahan mineral lainnya. *Kedua*, lebih meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut dan udara, juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antar

wilayah. *Ketiga*, kondisi demografi (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi cenderung terkonsentrasi dimana sumber daya manusia tersedia dalam jumlah cukup dan dengan kualitas yang lebih baik.

#### **e. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah**

Tidak dapat disangkal bahwa investasi merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. karena itu, wilayah yang mendapatkan alokasi investasi swasta ke daerahnya akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat pula mendorong proses pembangunan wilayah melalui penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Alokasi investasi pemerintah ke wilayah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan wilayah di anut. Bila sistem pemerintahan wilayah yang di anut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintahan akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. akan tetapi, sebaliknya bilaman sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau desentralisasi, maka dana investasi pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan ekonomi antar wilayah akan cenderung lebih rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Williamson dalam Dermawan, (2020) menyatakan disparitas antar wilayah akan cenderung semakin membesar khususnya pada tahapan awal terjadinya suatu proses pembangunan. Lebih

jauh dikatakannya bahwa secara umum beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab terjadinya peningkatan disparitas antar wilayah tersebut, yaitu:

1. Migrasi penduduk yang produktif ( usia kerja) dan memiliki keahlian (terdidik) dari wilayah-wilayah kurang berkembang ke wilayah-wilayah yang telah berkembang, karena disana mereka dapat memperoleh upah/gaji yang lebih besar.
2. Investasi cenderung dilakukan di daerah yang telah berkembang karena faktor pasar (skala ekonomi, ekonomi eksternal, dan lain sebagainya), dimana keuntungannya relatif besar, demikian pula resiko kerugian relatif kecil umumnya. Di samping itu, terjadi pula pengaliran modal dari wilayah miskin menuju wilayah yang telah berkembang.
3. Kebijakan pemerintah, disadari atau tidak cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya sarana dan prasarana kegiatan sosial ekonomi wilayah yang telah berkembang karena adanya kebutuhan yang lebih besar. Hal ini justru telah mendorong perkembangan industri yang lebih pesat di wilayah yang lebih maju.
4. Pola perdagangan dan kegiatan perdagangan didominasi oleh industri-industri di daerah yang lebih berkembang. Industri di wilayah yang kaya telah menjadi sumber dari barang-barang yang diperdagangkan, dan demikian industri yang dikembangkan di wilayah miskin akan mengalami banyak kesulitan dalam memperoleh pasarnya. Ketidaksanggupan untuk bersaing dengan industri di wilayah yang lebih maju menjadi lebih serius

lagi keadaannya sebagai akibat dari buruknya jaringan perangkutan dan prasarana ekonomi lainnya di wilayah yang lebih miskin

5. Tidak adanya kaitan antara pasar daerah (*regional market*) telah menyebabkan terjadinya rintangan untuk perencanaan dan pelipatgandaan pendapatan.

### **2.12 Kebijakan Fiskal Islam dalam Upaya Mengurangi Disparitas Ekonomi**

Menurut Mannan (dalam Waluyo, 2017) prinsip islam tentang kebijakan belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Semua kitab agama masa dahulu, al-Qur'an merupakan satu-satunya kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan negara mengenai pengeluaran pendapatan. Dengan demikian kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif atau meniadakan insentif yang di sediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah.

Prinsip islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijaksanaan fiskal di anggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui intensif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (Waluyo, 2017).

Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi merupakan indikator kegagalan suatu negara dalam proses pembangunan. Karena pembangunan yang dilaksanakan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat. Pemerintah sangat berperan menyediakan berbagai barang publik untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui kebijakan publik dan fisiknya (Waluyo, 2017).

Menurut Maliky (dalam Waluyo, 2017) kebutuhan pokok yang di syariatkan oleh islam terbagi menjadi 2 (dua). Pertama, kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Meliputi, kebutuhan pangan, sandang dan tempat tinggal. Kedua, kebutuhan-kebutuhan pokok bagi rakyat secara keseluruhan. Kebutuhan ini meliputi keamanan, kesehatan dan pendidikan.

### **2.13 Ukuran Ketimpangan**

Untuk melihat seberapa besarnya tingkat ketimpangan pada suatu wilayah maka diperlukannya analisis melalui perhitungan Indeks Williamson (dalam Siallagan, 2019). Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dan dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Hasil pengukuran dari indeks williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai ke angka 1 atau  $0 < IW < 1$ . Jika indeks williamson semakin mendekati angka 0 maka ketimpangan antar daerah/wilayah adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut merata dan sebaliknya jika indeks williamson semakin mendekati angka 1 maka ketimpangan semakin tinggi atau tingkat ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar wilayah tidak merata.

Berikut perhitungan yang biasa digunakan dalam melakukan analisis ketimpangan untuk melihat seberapa besarnya tingkat ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah atau daerah:

### 2.13.1 CV Willimason

Menurut Raditya dkk, (2012) CV Williamson (*Coefficient of Variation Williamson*) atau yang biasa disebut dengan Indeks williamson, merupakan alat matematis yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan antar wilayah dan sudah sangat sering di aplikasikan untuk menganalisis ketimpangan ekonomi antar wilayah khususnya untuk indikator ketimpangan PDRB per kapita. Williamson memperlakukan CV inidengan menimbangnnya dengan proporsi penduduk, yang disebut CV<sub>w</sub> (Tadjoeddin, 2011). Nilai indeksnya berskala antara 0 dan 1. Bila nilainya mendekati 0 ( $0 < CV_w < 0,5$ ), berarti distribusi PDRB menurut wilayah sangat merata, dan sebaiknya jika mendekati 1 ( $0,5 < CV_w < 1$ ) berarti tingkat disparitas sangat tinggi.

Rumus Williamson mengaitkan beberapa variabel, yaitu jumlah penduduk pada suatu kota, tingkat PDRB, semuanya diasumsikan secara hierarkis. Artinya, jika yang dihitung adalah kabupaten, maka perbandingannya adalah dengan provinsi yang menaungi kabupaten tersebut. Jika yang dhitung adalah provinsi, maka perbandingannya adalah dengan angka nasional.

$$IW = \frac{[\sum(Y_i - \hat{y})^2 \cdot \frac{f_i}{n}]^{-2}}{\hat{y}}$$

Sumber: Mohammad Faisal Firdhaus (2018)

Dimana:

$n$  : jumlah penduduk daerah satu tingkat hierarki di atas kabupaten atau kota, berarti provinsi jika yang dihitung kabupaten atau kabupaten jika yang dihitung adalah kota, secara berurutan.

$f_i$  : Jumlah penduduk kabupaten/kota ke- $i$

$\bar{y}$  : PDRB per kapita rata-rata Provinsi, satu tingkat hierarki di atas  $Y_i$

$Y_i$  : PDRB per kapita kabupaten/kota ke- $i$  (Rupiah)

Dalam penelitian ini, Indeks Williamson tidak hanya digunakan dalam menghitung besar ketimpangan PDRB per kapita saja, tetapi juga menghitung ketimpangan berdasarkan indikator-indikator lainnya baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, dilakukan beberapa penyesuaian bagaimana agar dapat mengaplikasikan formula indeks williamson tersebut kepada variabel-variabel lainnya.

### 2.13.2 Tipologi Klassen

Tipologi Klassen adalah salah satu alat analisa yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor, sub sektor, usaha atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah. Tipologi Klassen dilakukan dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang menjadi acuan pertumbuhan ekonomi nasional. Tipologi klassen juga merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional, yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tipologi klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan PDRB

per kapita daerah dengan PDRB yang menjadi acuan atau PDB per kapita secara nasional.

Analisis Tipologi Klassen dapat digunakan untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi posisi perekonomian suatu daerah dengan memperhatikan perekonomian daerah yang diacunya.
- b. Mengidentifikasi sektor, sub sektor atau usaha komoditi unggulan suatu wilayah.

Dari uraian tujuan di atas pengguna analisis tipologi klassen akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat membuat prioritas kebijakan daerah berdasarkan keunggulan sektor, sub sektor, usaha, atau komoditi daerah yang merupakan hasil analisis tipologi klassen.
- b. Dapat menentukan prioritas kebijakan suatu wilayah berdasarkan posisi perekonomian yang dimiliki terhadap perekonomian nasional maupun wilayah yang diacunya.
- c. Dapat menilai suatu wilayah baik dari segi daerah maupun sektoral.
- d. Alat analisis tipologi klassen merupakan gabungan atau perpaduan antara alat analisis hasil bagi lokasi atau *Location Quotient* dengan model rasio pertumbuhan (MPR). Tipologi Klassen dapat digunakan melalui dua pendekatan, yaitu sektoral maupun daerah. Data yang biasa digunakan adalah data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).



### 2.13.3 Tipologi Wilayah

Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi setiap wilayah tentu nya masing-masing berbeda. Ada wilayah yang mampu memacu kegiatan ekonominya sehingga dapat tumbuh pesat. Disisi lain ada pula wilayah yang tidak dapat berbuat banyak sehingga siklus ekonminya stagnan di satu titik atau bahkan tumbuh negatif. Untuk dapat membandingkan tingkat kemajuan suatu wilayah digunakan *Typologi Klassen* sebagai analisis, *typologi klassen* melakukan pengelompokkan wilayah berdasarkan dua karakteristik yang dimiliki wilayah tersebut yaitu PDRB Perkapita dan Laju pertumbuhan ekonomi (syafrizal,1997).

Menurut Kuncoro, 1997 menjelaskan bahwa dengan menggunakan alat analisis ini dapat diperoleh empat klasifikasi pertumbuhan masing-masing daerah yaitu:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonmi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari rata-rata wilayah.
2. Daerah maju tapi tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata.
3. Daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan, tetapi tingkat perkapita lebih rendah dari rata-rata.
4. Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang rendah.

#### 2.13.4 Tipologi Sektor

Sektor ekonomi adalah suatu pengelompokan kegiatan ekonomi dengan menggunakan beberapa faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Suatu sektor yang dapat mengembangkan dan mendorong pertumbuhan terhadap sektor-sektor lainnya, baik dari segi pemanfaatan sektor output terhadap input untuk proses produksinya merupakan definisi dari sektor unggulan, menurut Widodo (2006). Sektor unggulan sendiri adalah sektor yang berpotensi besar terhadap perekonomian suatu wilayah dan tersebar untuk mendorong ekonomi secara keseluruhan.

Analisis Tipologi Sektor menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut, menurut Sjafrizal (2008).

- a. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat ( Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB wilayah yang menjadi referensi (s) dan memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (gi) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (g). Klasifikasi ini dilambangkan dengan  $si > s$  dan  $gi > g$ .
- b. Sektor Maju Tapi Tertekan (Kuadran II). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB wilayah yang menjadi referensi (s), tetapi memiliki nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB (gi) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor

tersebut terhadap PDRB wilayah yang menjadi referensi (g). Klasifikasi ini dilambangkan dengan  $s_i < s$  dan  $g_i > g$ .

- c. Sektor potensial atau masih dapat berkembang (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB ( $s_i$ ) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s), tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB ( $g_i$ ) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (g). Klasifikasi ini dilambangkan dengan  $s_i > s$  dan  $g_i < g$ .
- d. Sektor relatif tertinggal ( Kuadran IV). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB ( $s_i$ ) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s) dan sekaligus memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB ( $g_i$ ) yang lebih kecil; dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (g). Klasifikasi ini dilambangkan dengan  $s_i < s$  dan  $g_i < g$ .

#### **2.14 Disparitas Pembangunan Ekonomi**

Menurut Emilia dan Imelia, (2006) dalam modul ekonomi regional faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi adalah:

1. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan

antar wilayah. Ekonomi pada daerah yang dengan konsentrasi tinggi cenderung akan tumbuh pesat dibandingkan wilayah yang tingkat konsentrasi rendah.

## 2. Alokasi Investasi

Menurut Domar (dalam Nurhayani, 2015) menerangkan bahwa adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Artinya rendahnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita antar daerah di wilayah tersebut rendah karena tidak adanya kegiatan ekonomi yang produktif.

## 3. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah Antar Wilayah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapital antar daerah merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi wilayah. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan perbedaan pendapatan perkapita antar daerah/wilayah dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output atau input bebas.

## 4. Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) Antar Wilayah

Menurut kaum klasik (dalam Nurhayani, 2015) pembangunan ekonomi di wilayah yang kaya SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di wilayah yang miskin SDA. Dalam arti SDA dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan selain itu diperlukan faktor-faktor lain yang sangat penting yaitu teknologi dan SDM.

5. Perbedaan Kondisi Demografi wilayah.

Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antar wilayah. Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Dilihat dari sisi permintaan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi pertumbuhan pasar, yang berarti faktor pendorong bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi.

6. Kurang Lancarnya Perdagangan Wilayah

Kurang lancarnya perdagangan antar daerah (intra-trade) merupakan unsur menciptakan ketimpangan ekonomi regional. Sisi permintaan: kelangkaan akan barang dan jasa untuk konsumen mempengaruhi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan: kelangkaan akan barang dan jasa untuk konsumen mempengaruhi permintaan pasar terhadap kegiatan ekonomi lokal yang sifatnya komplementer dengan barang jasa tersebut.

#### **2.14.1 Konsep Disparitas Pembangunan Ekonomi**

Revolusi sosial hampir berawal dari adanya kecemburuan sosial antara golongan sebagai dampak dari kondisi ekonomi dalam masyarakat yang terdiri dari kemiskinan dan ketimpangan, baik ketimpangan antardaerah, antar golongan ataupun ketimpangan sektor. Karena itu, kerangka pembangunan Nasional Bangsa Indonesia menekankan pada azas “Trilogi pembangunan” yang meliputi *pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas*, ketiga aspek trilogi pembangunan tersebut merupakan kondisi yang dinamis dan saling bergantian prioritasnya

penekanannya dalam setiap rencana pembangunan ekonomi. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. akibat dari perbedaan ini, kemampuan status daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

### **2.15 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data makro yang disusun untuk mengetahui kondisi dan perilaku ekonomi suatu wilayah. PDRB merupakan nilai tambah bruto yang seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen (warga negara) atau non residen. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah, maka digunakan suatu indikator yang disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah total nilai produk barang dan jasa yang di produksi suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan.

Menurut Astuti, (2018) Indikasi penting untuk mengetahui dalam periode tertentu berdasarkan pada jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggunakan harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode yang ditentukan, baik atas dasar harga yang berlaku

maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Menurut Kuncoro, (2006) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB provinsi, kabupaten atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. PDRB merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga yang berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, sedangkan PDRB harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar saat ini menggunakan tahun 2015.

### **2.15.1 Metode Perhitungan PDRB**

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan empat metode pendekatan, yaitu:

#### **1. Pendekatan Pendapatan**

PDRB menurut pendekatan pendapatan adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu

wilayah dalam jangka waktu yang ditentukan. Balas jasa yang dimaksud adalah adanya upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Menurut Sukirno, (2005) dalam melakukan penyusunan Produk Domestik Regional Bruto terbagi menjadi dua, yaitu:

a. PDRB atas harga konstan

Menurut BPS, PDRB atas dasar harga konstan adalah keseluruhan nilai tambah produksi barang serta jasa yang dihitung dengan harga suatu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar yang mana dalam penelitian ini menggunakan tahun dasar 2015. Dengan menggunakan PDRB atas dasar harga konstan guna untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

b. PDRB atas dasar harga berlaku

Menurut BPS, PDRB atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah yang diperoleh dari sektor ekonomi secara keseluruhan yang mana nilai tambah yang diperoleh dihitung dari harga pada setiap tahunnya yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar struktur perekonomian dan perannya dalam sektor ekonomi.

**2. Pendekatan Produksi**

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendekatan produksi dapat juga disebut dengan pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto



dengan cara mengurangi nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap sektor ekonomi. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi sembilan (9) sektor atau lapangan usaha, yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa.

### 3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir dari:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b. Konsumsi pemerintah.
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto, dalam jangka waktu tertentu.
- d. Perubahan stok.
- e. Ekspor netto (ekspor dikurangi impor)
- f. Impor netto.

### 2.15.2 PDRB Per Kapita

Produktivitas suatu daerah dicerminkan dari produk domestik, sedangkan tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari sudut penggunaannya setelah diperhitungkan aliran pendapatan yang keluar masuk daerah tersebut. Menurut Todaro (dalam Siallagan, 2019) PDRB per kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan daerah.

Pendapatan per kapita sering kali menjadi indikator dalam menilai kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah, karena indikator ini dinilai lebih baik bila hanya menggunakan indikator laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kelebihan dari pendekatan per kapita adalah karena perhitungan yang sangat mudah dilakukan. Selain itu dari kemudahan memperoleh data juga sangat mudah, karena semua wilayah baik secara nasional, provinsi, kabupaten atau kota memiliki catatan PDB dan PDRB serta catatan jumlah penduduk dimana menjadi data dasar dalam melakukan penelitian ini. Manfaat lain yang bisa didapat dari melakukan perhitungan ini adalah pendapatan per kapita bisa menjadi dasar untuk melakukan analisis lanjutan seperti analisis klassen, analisis regresi yang membutuhkan data ekonomi wilayah dan lainnya. Adapun pendapatan per kapita di dapat dari dengan membagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk.

Semakin tinggi tingkat PDRB per kapita, maka akan semakin tinggi pula tingkat perekonomian pada wilayah tersebut dan akan semakin maju.

Kemakmuran dan kemajuan wilayah tidak hanya ditentukan oleh besarnya angka PDRB, namun juga ditentukan oleh besarnya penduduk. Namun, dalam hal ini PDRB per kapita juga memiliki kelemahan yaitu tidak selalu dapat menggambarkan pendapatan riil masyarakat dan distribusi pendapatan yang sama, sehingga sering kali dijumpai banyak wilayah yang memiliki PDRB per kapita yang tinggi. Namun, masyarakatnya masih banyak pada kondisi yang miskin, ini disebabkan karna distribusi pendapatan yang tidak merata.

#### **2.16 Jumlah Penduduk**

BPS, (2015) menjabarkan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha membangun suatu perekonomian karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi (Sukirno, 2005).

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting pada suatu negara. Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak akan menimbulkan masalah produktivitas penduduknya juga tinggi sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan timpang. Jumlah penduduk sangat perlu untuk diketahui, hal ini berguna untuk penyediaan tenaga kerja. Dengan adanya penambahan jumlah penduduk, maka akan mejadikan kompetensi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat. Populasi penduduk merupakan salah satu faktor penyebab

dari ketimpangan pendapatan. Pertambahan jumlah penduduk pada suatu wilayah biasanya berasal dari angka kelahiran dan juga terjadinya migrasi penduduk ke suatu wilayah. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat cepat dan terus meningkat. Masalah yang akan dihadapi dari pertambahan jumlah penduduk ini adalah pangan, energi dan papan. Jumlah penduduk yang bertambah dari tahun ke tahun akan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari banyaknya jumlah penduduk, antara lain:

- a. Meningkatnya kebutuhan fasilitas sosial
- b. Meningkatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit lapangan kerja
- c. Meningkatnya angka pengangguran

Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan jumlah penduduk, ada tiga faktor yaitu tingkat kelahiran, tingkat kematian dan tingkat migrasi atau perpindahan penduduk. PDRB per kapita adalah salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang melibatkan unsur jumlah penduduk dalam perhitungannya. Jumlah penduduk yang tinggi pada suatu daerah tidak akan menjadi masalah selama produktivitas penduduk daerah yang bersangkutan juga tinggi sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Dan, permasalahan akan muncul ketika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan. Jumlah penduduk muda dan tua juga memberikan pengaruh kepada produktivitas penduduk. Rasio dependensi yang tinggi akibat besarnya jumlah penduduk usia

muda dan usia tua juga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.

### **2.18 Sintesa Teori**

Berdasarkan uraian landasan teori, penulis membuat sintesa teori yang mendukung dalam penelitian Analisis Disparitas Ekonomi Antar Wilayah Di Provinsi Riau berdasarkan aspek ekonomi. Untuk menganalisa tingkat disparitas antar wilayah alat analisis yang digunakan ialah Indeks Williamson dan untuk melihat pola pembangunan ekonomi serta mengetahui klasifikasi setiap wilayah di Provinsi Riau.



**Tabel 2. 1 Sintesa Teori**

No	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi			
1	Definisi Pertumbuhan Ekonomi	-Raswita dan Made, 2013  -Todaro dalam Firdhaus, 2018	-Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah yang bersangkutan  -Pertumbuhan ekonomi di definisikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang.
2	Ukuran Pertumbuhan Ekonomi	-The World Bank dalam Indrawan dkk, 2012	-ukuran pertumbuhan ekonomi berdasarkan penurunan dan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan PDRB
3	Tahapan Pertumbuhan	-Rostow dalam Suri, 2017  -Adam dalam Suri, 2017  -Kuzent dalam Siallagan, 2019	-Mengajukan lima tahap pertumbuhan dan pembangunan ekonominya, memandang bahwa tingkat kritis bagi negara berkembang adalah tahap tinggal landas, dimana masyarakat suatu negara berkembang akan mengalami transformasi menuju masyarakat yang maju.  -Ada dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output (GDP) total dan pertumbuhan penduduk.  -Dalam penelitiannya di negara-negara maju berpendapat bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk.

Disparitas/Ketimpangan			
1	Definisi Ketimpangan	<p>-Kuncoro (2006)</p> <p>-Chaniago dalam Siallagan, 2019</p> <p>-Winarno dalam Siallagan, 2019</p> <p>-Aswidah dalam Siallagan, 2019</p> <p>-Ardani dalam Budiwikramatunggadewa, 2015</p> <p>-Krimi dkk dalam Wiguna, 2016</p>	<p>-Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat.</p> <p>-Ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial.</p> <p>-Ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikiis warga masyarakat</p> <p>-Ketimpangan sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi.</p> <p>-Ketimpangan/ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri.</p> <p>-Disparitas regional adalah fenomena yang bersifat universal.</p> <p>-Proses pada awal proses awal pertumbuhan ekonomi di negara miskin cenderung menyebabkan terjadinya kemiskinan yang meningkat dan juga membuat ketimpangan dalam pendapatan semakin tidak merata.</p>

		-Kuznet dalam Siallagan, 2019	
2	Faktor Disparitas/Ketimpangan	-Williamson dalam Siallagan, 2019  -Suyanto, (2013)	-1. Adanya migrasi tenaga kerja antar daerah bersifat selektif yang pada umumnya para migran tersebut lebih terdidik, mempunyai keterampilan yang tinggi dan masih produktif. 2. Adanya Migrasi kapital antar daerah. 3. Adanya pembangunan sarana publik pada daerah yang lebih padat dan potensial berakibat mendorong terjadinya ketimpangan/ketimpangan antar daerah lebih besar. 4. Kurangnya keterkaitan antar daerah yang menyebabkan terhambatnya proses efek sebar dari proses pembangunan yang berdampak semakin besarnya ketimpangan/ketimpangan yang terjadi.  -Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya ketimpangan di Indonesia yaitu: 1. Fundamentalisme pasar yang mendorong orang kaya mengambil keuntungan terbesar dari pertumbuhan ekonomi. 2. Political Culture yang meningkat, yaitu orang kaya mampu memanfaatkan pengaruh perubahan aturan yang dapat menguntungkan mereka. 3. Ketidaksertaan gender. 4. Upah murah yang menyebabkan masyarakat bawah tidak mampu mengangkat diri dari jurang kemiskinan dan, 5. Ketimpangan akses antara perdesaan dan perkotaan.
Indeks Williamson			
1	Pengertian Indeks Williamson	Raditya, 2012	CV Williamson atau biasa disebut dengan Indeks Williamson merupakan alat matematis yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan antar wilayah dan sudah sering di aplikasikan untuk menganalisis ketimpangan ekonomi antar wilayah khususnya untuk indikator ketimpangan PDRB Per Kapita.
Pendapatan			



1	Pengertian Pendapatan	-BPS, (2007)  -Soediyono, (1992)	-Pendapatan adalah seluruh penghasilan yang diterima baik sektor formal maupun non formal yang terhitung dalam jangka waktu tertentu.  -Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat dalam waktu tertentu sebagai balas jasa faktor-faktor produksi nasional.
Pendekatan Per Kapita			
1	Pengertian Pendapatan Per Kapita	-Todaro dalam Siallagan, 2019.  -Suyanto,2013	-PDRB Per Kapita di suatu daerah mencerminkan rata-rata kemampuan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pokok.  -Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat merupakan salah satu indikasi kesejahteraan yang berasal dari aspek pemerataan pendapatan daerah.

Sumber: Hasil Analisis, 2021

## 2.19 Penelitian Terdahulu

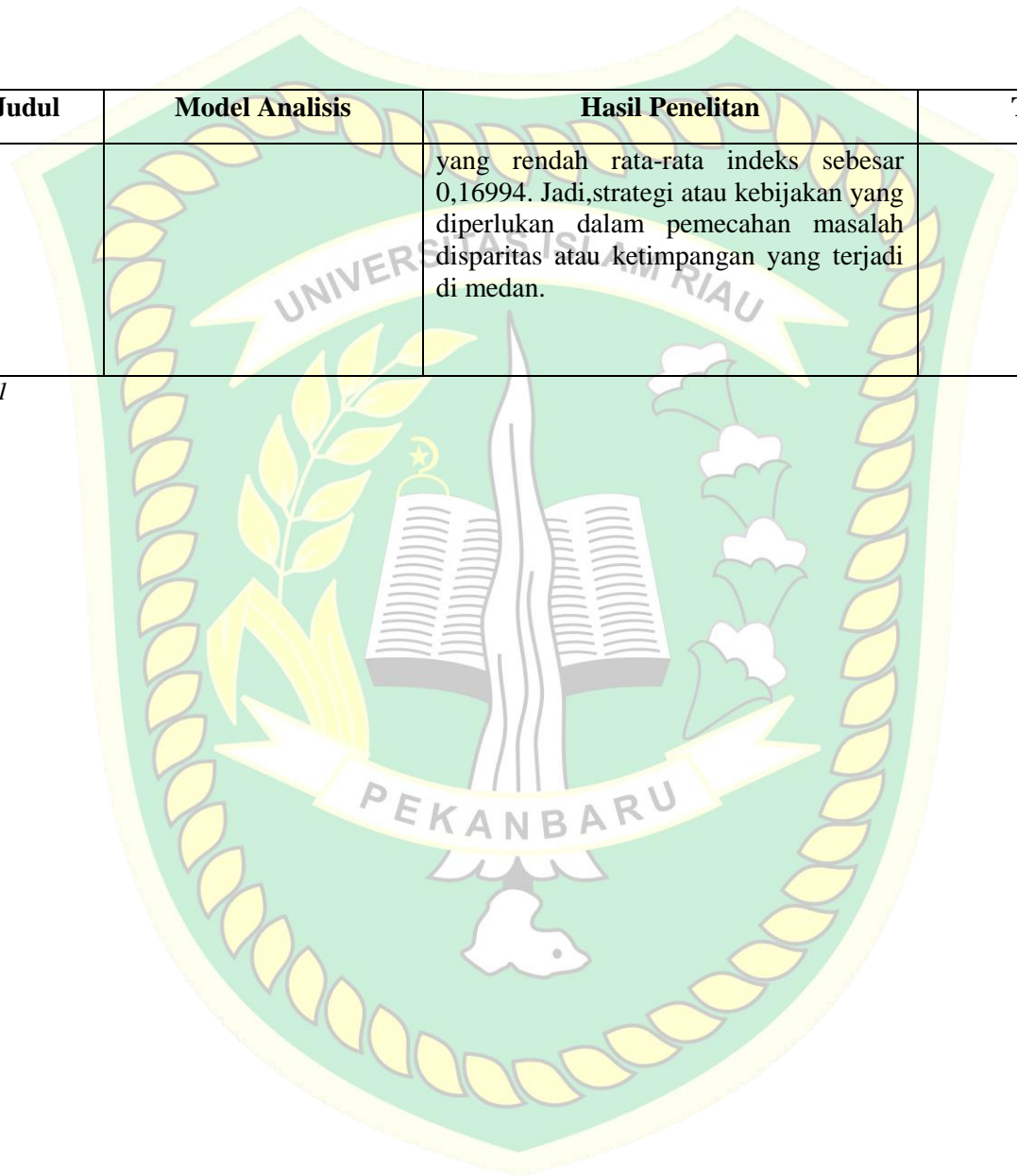
**Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu**

Peneliti (Tahun) dan Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian	Tujuan Penelitian
Bintang, Cihe Aprilia dan Putu Gde (2012). Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Berbasis Komoditas Unggulan Sub Sektor Perkebunan di Wilayah Kabupaten Bengkalis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Analisis LQ</li> <li>-Analisis Kontribusi Share</li> <li>-Analisis Input-Output (I-O)</li> </ul>	Komoditas unggulan di Kabupaten Bengkalis yang memiliki keterkaitan yang besar kedepan dan kebelakang. Tingkat kesesuaian fungsi pusat pelayanan di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut: industri pengolahan Kecamatan Manda yang berfungsi sebagai PKL termasuk dalam kategori yang sesuai. Kecamatan Bengkalis sebagai PKW termasuk kealam kategori sedangdan Kecamatan Buruk Bakul sebagai PKLp termasuk kedalam kategori tidak sesuai.	Untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
R, Ibnu Thomiyah (2019). Analisis Disparitas Ekonomi Wilayah Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelalawan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Analisis Indeks Williamson</li> <li>-Analisis Tipologi Klassen</li> </ul>	Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing sektor di Wilayah Pekansikawan dan tingkat disparitas yang terjadi tidak terlalu tinggi selama lima tahun terakhir serta terdapat pola disparitas antar wilayah pada masing-masing sektor dengan tingkat disparitas yang berbeda.	

Peneliti (Tahun) dan Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian	Tujuan Penelitian
Siregar, Renggi Erwanda (2020). Analisis Tingkat Disparitas Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Analisis Indeks Williamson</li> <li>-Analisis Regresi Linear Berganda</li> </ul>	Kota Batam merupakan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. PDRB terendah ialah Kabupaten Lingga. Berdasarkan hasil analisis nilai disparitas yang tergolong sedang, dikarenakan nilai Indeks Williamson yang mendekati 0,5.	Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis disparitas yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dengan mengidentifikasi pengaruh variabel PDRB per kapita, PAD, dan IPM terhadap disparitas wilayah dan aspek ekonomi.
Firdhaus, Mohammad Faisal (2018). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Lumajang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Indeks Williamson</li> <li>-Tipologi Klassen</li> </ul>	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Williamson di Kabupaten Lumajang sebesar 0,95 yang berarti tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Lumajang ini tergolong tinggi.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi yang ada di Kabupaten Lumajang.
Khairunnisa, Astari (2015). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kota Medan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipologi Klasse</li> <li>- Indeks Williamson</li> <li>- Analisis Deskriptif</li> </ul>	Hasil Analisis Tipologi Klassen selama periode 2001-2005 dan 2006-2010 mengklasifikasikan 3 (tiga) kabupaten yang termasuk ke dalam Kuadran I (maju cepat dan tumbuh cepat), 5 kabupaten masuk kuadran II (maju tapi tertekan), 2 kabupaten masuk kuadran III (maju tapi tertekan) dan 4 kabupaten masuk kuadran IV (relatif tertinggal) dan 7 kabupaten telah mengalami perubahan pada pola pembangunan ekonomi. Analisis Indeks Williamson nya menunjukkan nilai	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perkembangan ekonomi masing-masing daerah di Kabupaten, tingkat disparitas (ketimpangan) pembangunan ekonomi yang terjadi antar kabupaten, serta strategi atau kebijakan yang tepat dalam mengatasi disparitas (ketimpangan) pembangunan.

Peneliti (Tahun) dan Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian	Tujuan Penelitian
		yang rendah rata-rata indeks sebesar 0,16994. Jadi, strategi atau kebijakan yang diperlukan dalam pemecahan masalah disparitas atau ketimpangan yang terjadi di medan.	

*Sumber: Hasil Analisis, 2021*



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, sementara Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut (Syahrudin dan Salim, 2014). Metodologi Penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan suatu analisis teoritis tentang sebuah metode atau cara. Sedangkan penelitian merupakan sebuah penyajian yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah penguasaan dan jawaban dari suatu masalah. Dapat disimpulkan bahwa secara sederhana, metodologi penelitian adalah sebuah ilmu untuk mempelajari langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan sebuah penelitian (Syahrudin dan Salim, 2014).

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metoda statistika. Pada dasarnya pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam angka pengujian hipotesis) dan menyimpulkan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metoda kuantitatif akan diperoleh signifikan perbedaan kelompok atau signifikan hubungan antar variabel yang diteliti. Jenis penelitian yang biasa dipakai dalam metoda kuantitatif adalah penelitian komparasi, yaitu perbandingan. Tahapan pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

melakukan perhitungan dengan teknik analisis Tipologi Klassen dan Indeks Williamson, untuk melihat tingkatan kelompok pada pola pembangunan ekonomi serta tingginya tingkat ketimpangan yang terjadi.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini disajikan dengan bentuk analisis kuantitatif deskriptif. Kuantitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Penelitian kuantitatif deskriptif dalam penelitian ini didasarkan dari penelitian yang ingin mengkaji dan melihat tingkat disparitas ekonomi serta klasifikasi pola perkembangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Riau tahun 2011-2020.

### **3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau yang meliputi seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang berjumlah sebanyak 14 kabupaten. Dengan luas wilayah penelitian 87.023,66 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan rawa-rawa. Provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota, yaitu: Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari bulan September 2021 hingga bulan Maret 2022.

### **3.4 Bahan dan Alat Penelitian**

Dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini digunakan beberapa bahan dan alat penelitian yang merupakan langkah awal dari kegiatan penelitian ini, diantaranya:

1. Buku dan jurnal serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian sebagai literatur penelitian.
2. Alat tulis (pena atau pensil) digunakan untuk mencatat atau menulis.
3. Kamera digital, digunakan untuk mendokumentasikan data hasil pengamatan.
4. Penunjuk waktu, digunakan untuk mengetahui waktu pengambilan data.
5. Komputer dan printer, untuk mengolah dan mencetak data.

### **3.5 Operasional Variabel**

Operasional variabel adalah pendefinisian variabel dalam bentuk yang dapat diukur, agar lebih lugas dan tidak membingungkan. Untuk memperjelas dan memudahkan pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan definisi operasional variabel. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3. 1 Variabel Penelitian**

No	Variabel Penelitian	Indikator
1	Disparitas Perkembangan Ekonomi antar Wilayah	- Laju Pertumbuhan Ekonomi - PDRB Per Kapita
2	Disparitas Ekonomi antar Sektor	- Laju Pertumbuhan Ekonomi - Kontribusi Ekonomi
3	Pertumbuhan Ekonomi	- Laju Pertumbuhan Ekonomi - PDRB Perkapita - Jumlah Penduduk

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Untuk menyamakan pemahaman tentang variabel-variabel yang digunakan dan menghindari perbedaan penafsiran, maka penulis memberikan definisi operasional, sebagai berikut:

- a. Disparitas perkembangan ekonomi adalah ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Riau.
- b. Disparitas ekonomi antar sektor adalah ketimpangan yang terjadi antar sektor antar kabupaten/kota di Provinsi Riau
- c. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa.
- d. Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah persentase perubahan PDRB tiap kabupaten, perubahan PDRB Provinsi Riau tahun 2011-2020.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik survei data sekunder. Pengumpulan data sekunder ini bersumber dari dokumen perencanaan wilayah dan daerah, BPS Provinsi Riau, BPS setiap kabupaten se- Provinsi Riau dan sumber-sumber



lainnya. Hal yang sangat perlu diperhatikan dalam melakukan pengumpulan data sekunder ini adalah keakuratan data dan validitas data.

### **3.7 Teknik Analisis**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif digunakan dalam melihat tingkat disparitas ekonomi daerah serta pola perkembangan ekonomi wilayah.

#### **3.7.1 Menganalisis Pola Disparitas dengan Tipologi Klassen**

Untuk melihat pola disparitas pembangunan ekonomi pada suatu daerah maka diperlukannya melakukan analisis dengan menggunakan alat ukur analisis Tipologi Klassen. Analisis ini didasarkan pada indikator utama yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata pendapatan per kapita suatu daerah. Analisis ini dibagi menjadi 4 klasifikasi yang masing-masing klasifikasinya berbeda, yaitu:

- a. Kuadran I yaitu wilayah maju dan cepat tumbuh (high growth and high income) yaitu kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi.
- b. Kuadran II yaitu wilayah maju tapi tertekan (high growth but high income) merupakan kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih rendah sedangkan pendapatan per kapitanya lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi.
- c. Kuadran III yaitu wilayah berkembang cepat (low growth but high income) merupakan kabupaten yang mempunyai pertumbuhan ekonomi

yang tinggi tapi pendapatan perkapitanya lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi.

- d. Kuadran IV yaitu wilayah yang relatif tertinggal (low growth and low income) merupakan kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah juga pendapatan perkapita yang rendah dibandingkan provinsi.

Klasifikasi Tipologi Wilayah dapat di jelaskan pada Tabel 3.2 Klasifikasi Tipologi Klassen.

**Tabel 3. 2 Klasifikasi Tipologi Wilayah**

r \ y	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Wilayah Berkembang Cepat (Kuadran III)	Wilayah Maju dan Cepat Tumbuh (Kuadran I)
$r_i < r$	Wilayah yang Relatif Tertinggal (Kuadran IV)	Wilayah Maju Tetapi Tertekan (Kuadran II)

Sumber: Mohammad Faisal Firdhaus (2018)

Keterangan:

$r_i$  = Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB kabupaten i

$y_i$  = PDRB perkapita kabupaten i

$r$  = Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Riau

$y$  = PDRB Perkapita Provinsi Riau

Selain ada nya rumus untuk melihat pola disparitas suatu wilayah, tipologi klassen juga dapat digunakan untuk melihat atau memberi jawaban terhadap ketimpangan antar sektor pada suatu wilayah, dengan rumus sebagai berikut.

**Tabel 3. 3 Klasifikasi Tipologi antar Sektor**

Kontribusi Sektoral	Laju Pertumbuhan	
	$g_i \geq g$	$g_i < g$
$s_i \geq s$	Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan
$s_i < s$	Sektor Potensial atau Masih dapat Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal

Keterangan:

$s$  = Kontribusi Sektoral Provinsi

$s_i$  = Kontribusi Sektoral Wilayah  $i$

$g$  = Laju Pertumbuhan Provinsi

$g_i$  = Laju Pertumbuhan Wilayah  $i$

Data yang digunakan adalah laju pertumbuhan dan kontribusi wilayah penelitian yang akan dibandingkan dengan laju pertumbuhan serta kontribusi ekonomi tingkat provinsi.

### 3.7.2 Menganalisis Tingkat Disparitas Ekonomi Wilayah

Melakukan analisis tingkat disparitas ekonomi wilayah sangat diperlukan untuk melihat tingkat disparitas yang terjadi pada wilayah yang diteliti. Untuk mengukur tingkat disparitas pada suatu daerah biasanya menggunakan alat analisis Indeks Williamson dengan rumus sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Sumber: Mohammad Faisal Firdhaus (2018)

Keterangan:

IW = Indeks Williamson

$F_i$  = Jumlah Penduduk Daerah (jiwa)

$n$  = Jumlah Penduduk Provinsi Riau (jiwa)

$Y_i$  = PDRB Per Kapita kabupaten  $i$  (rupiah)

$Y$  = PDRB Per Kapita Rata-rata Provinsi Riau.

Indeks Williamson terletak antara 0 sampai 1 apabila ketimpangan mendekati 0 maka ketimpangan pembangunan antar wilayah rendah dan apabila indeks menunjukkan mendekati 1 maka ketimpangan antar wilayah semakin tinggi.

### **3.8 Populasi dan Sample**

#### **3.8.1 Populasi**

Menurut Sugiyono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang direrapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah keseluruhan data baik subyek maupun yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dengan populasi yang digunakan jumlah penduduk Provinsi Riau dan jumlah penduduk seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

### 3.8.2 Sample

Sample adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati (Yamin, 2008). Sampel dalam penelitian ini adalah data baik subyek maupun obyek yang berkaitan dengan faktor-faktor genangan banjir.

Sampel dalam penelitian ini untuk rumusan masalah ketiga yaitu jumlah penduduk setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau, pemilihan sampel sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai, juga berdasarkan asas obyek yang menyebabkan permasalahan suatu permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan penyebab terjadinya disparitas di Provinsi Riau.



### 3.9 Matrik Tahapan Analisa

Sasaran	Variabel	Indikator	Alat Analisis	Output
Mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Riau	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. PDRB perkapita	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Deskriptif	Mengetahui perkembangan ekonomi yang terjadi tahun 2011-2020
Menganalisis perkembangan pola pembangunan ekonomi di Provinsi Riau	1. Disparitas Pembangunan Ekonomi 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pendapatan perkapita	Analisis Tipologi Klassen	Mengetahui perubahan penduduk
Menganalisis tingkat disparitas ekonomi di Provinsi Riau	1. Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2. Jumlah Penduduk	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pendapatan Perkapita 3. Jumlah Penduduk	Analisis Indeks Williamson	Mengetahui tingginya tingkat ketimpangan Provinsi Riau

**Tabel 3. 4 Matriks Tahapan Analisa Disparitas Antar Kabupaten di Provinsi Riau**

*Sumber: Hasil Analisis,, 2021*

### 3.10 Desain Survey

Desain survei ini berisi tentang gambaran variabel-variabel yang digunakan untuk melakukan penelitian atau semua proses yang diperlukan dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Nazir dalam Siregar, 2020).

Desain penelitian ini berisikan yaitu berupa sumber data, sumber, hingga metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini



**Tabel 3. 5 Desain Survei**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Data</b>	<b>Sumber</b>	<b>Teknik Analisis</b>	<b>Output</b>
Analisis Disparitas Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Riau	Mengidentifikasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Riau	1. Pertumbuhan Ekonomi	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	1. Provinsi Riau dalam Angka 2. PDRB Provinsi Riau menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2020	BPS Provinsi Riau	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Mengetahui perkembangan ekonomi yang terjadi tahun 2011-2020
	Menganalisis Perkembangan ekonomi di Provinsi Riau	1. Disparitas Perkembangan Ekonomi antar wilayah 2. Disparitas ekonomi antar sektor	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. PDRB Perkapita 3. Kontribusi Ekonomi	1. PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020 2. PDRB Kota Dumai Tahun 2011-2020 3. PDRB Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2020 4. PDRB Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2020 5. PDRB Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2020 6. PDRB Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2020 7. PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2020 8. PDRB Kabupaten	BPS Provinsi Riau	Analisis Tipologi Klassen	Mengetahui perubahan penduduk



Tujuan	Sasaran	Variabel	Indikator	Data	Sumber	Teknik Analisis	Output
				Rokan Hilir Tahun 2011-2020 9. PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2020 10. PDRB Kabupaten Siak Tahun 2011-2020 11. PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2020 12. PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2011-2020			
	Menganalisis tingkat disparitas ekonomi di Provinsi Riau	1. Pertumbuhan Ekonomi	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. PDRB Per Kapita 3. Jumlah Penduduk	1. PDRB Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020 2. PDRB Kota Dumai Tahun 2011-2020 3. PDRB Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2020 4. PDRB Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2020 5. PDRB Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2020 6. PDRB Kabupaten	BPS Provinsi Riau	Analisis Indeks Williamson	Mengetahui ketimpangan Wilayah antar Kabupaten di Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Variabel	Indikator	Data	Sumber	Teknik Analisis	Output
				Kuantan Singingi Tahun 2011-2020 7. PDRB Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2020 8. PDRB Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2020 9. PDRB Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011-2020 10. PDRB Kabupaten Siak Tahun 2011-2020 11. PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2020 12. PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2011-2020			

Sumber: Hasil Analisis, 2021

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1 Gambaran Umum Provinsi Riau**

##### **4.1.1 Wilayah Administrasi dan Iklim**

Daerah Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten dan 2 Kota yaitu: Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti, serta Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Setiap Kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati dan Kota dikepalai oleh seorang Walikota.

Dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau pada tahun 2020 169 kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat dan 1.873 kelurahan/desa yang dikepalai oleh seorang lurah/kepala desa.

Pemerintah Provinsi Riau menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan anggaran pemerintah daerah harus didata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik. Di sisi lain, realisasi penerimaan Provinsi Riau tahun 2019 berjumlah 8.703,23 milyar rupiah. Dibanding dengan realisasi penerimaan Provinsi Riau 2018 yang berjumlah 8.478,99 milyar rupiah naik sebesar 2,64 persen.

Di Provinsi Riau, ada 5 wilayah yang melakukan pengamatan iklim, yaitu Stasiun Meterologi Indragiri Hulu di Kabupaten Indragiri Hulu, Pos

Pengamatan Meteorologi Bandara RAPP Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan, Stasiun Klimatologi Tambang di Kabupaten Kampar, Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dan Pos Pengamatan Meteorologi Bandara Pinang Kampai di Kota Dumai.

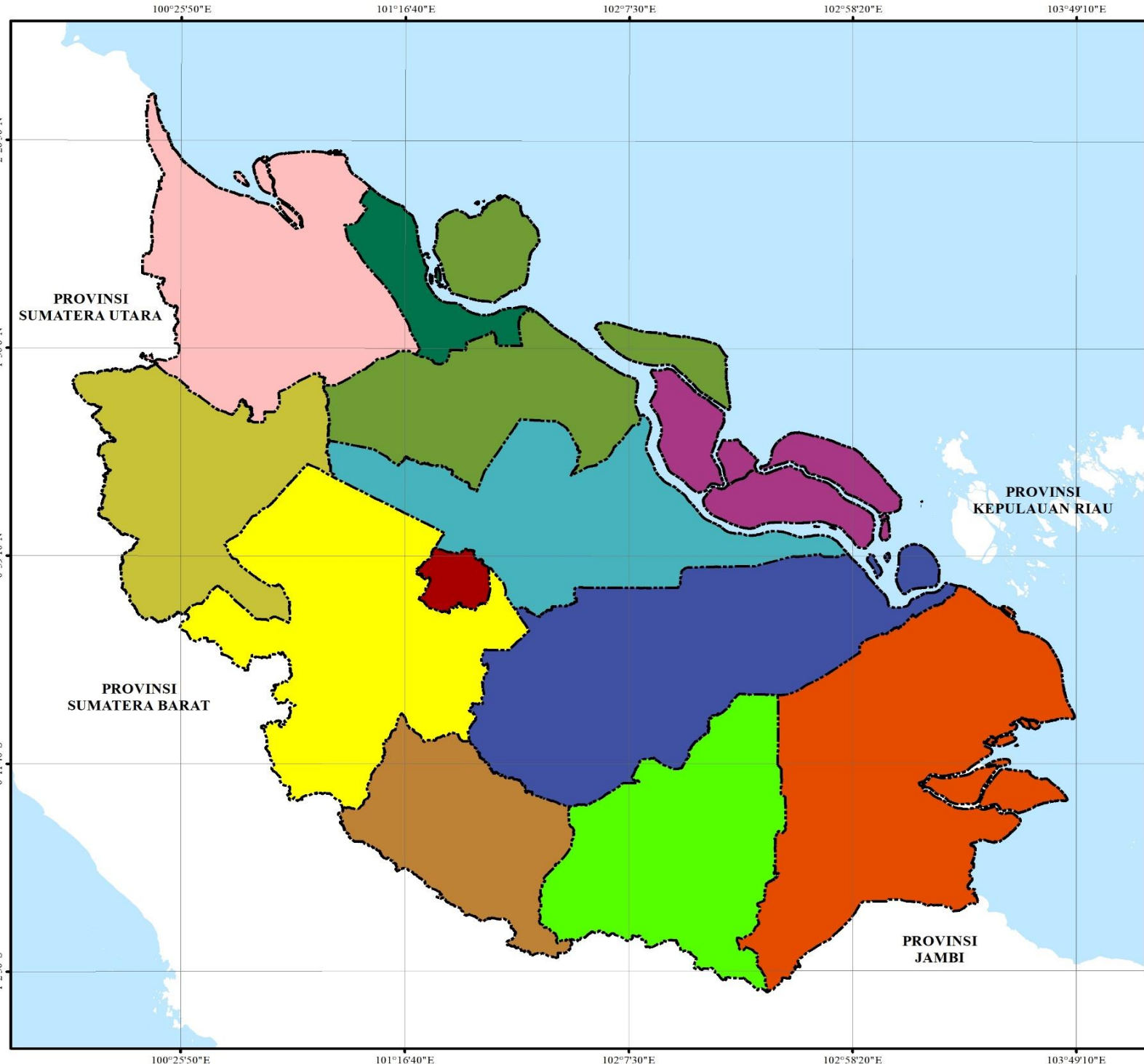
Dari lima wilayah tersebut selama tahun 2020, suhu tertinggi terjadi di Kabupaten Kampar pada bulan februari dengan maksimal suhu sebesar 38,00 derajat celcius, serta suhu terendah terjadi di Kabupaten Kampar pada bulan desember dengan suhu sebesar 20,00 derajat celcius. Dari lima wilayah tersebut curah hujan tertinggi terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu pada bulan april sebesar 506,2 mm, serta curah hujan terendah terjadi di Kota Pekanbaru pada bulan februari sebesar 30,00 mm.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 87.023,66 Km<sup>2</sup>. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01°05'00" Lintang Selatan sampai 02°25'00" Lintang Utara atau antara 100°00'00" Bujur Timur -105°05'00" Bujur Timur.

Batas-batas daerah Provinsi Riau adalah:

- a. Sebelah Utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- c. Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- d. Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara

Berikut gambaran umum ruang lingkup wilayah administrasi Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar 4.1 Peta Administrasi Provinsi Riau



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**GAMBAR 4.1 PETA ADMINISTRASI**  
**PROVINSI RIAU**



Sistem Grid : ..... Grid Geografi  
 Datum Horizontal : ..... WGS 84



**LEGENDA**

<b>ADMINISTRASI</b>	
-----	Batas Kabupaten/ Kota
	PEKANBARU
	ROKAN HILIR
	ROKAN HULU
	SIAK
	BENGKALIS
	INDRAGIRI HILIR
	INDRAGIRI HULU
	KAMPAR
	KEPULAUAN MERANTI
	KOTA DUMAI
	KUANTAN SINGINGI
	PELALAWAN

**Dosen Pembimbing :**  
 Puji Astuti, ST, MT

**Nama :** Melisa Pebriani  
**NPM :** 173410870

- SUMBER**
1. SHP RBI (Rupa Bumi Indonesia) Tahun 1917
  2. Citra Satellite

#### 4.1.2 Kondisi Kependudukan

Sensus penduduk 2020 mencatat penduduk Provinsi Riau pada bulan September 2020 sebanyak 6,39 juta jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk Provinsi Riau terus mengalami peningkatan. Hasil sensus penduduk 2020 dibandingkan dengan sensus penduduk 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 855,72 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 85,57 ribu setiap tahun.

Kepadatan penduduk di Provinsi Riau tahun 2020 mencapai 73,48 jiwa/km<sup>2</sup>. Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Pekanbaru sebesar 1.555,28 jiwa/km<sup>2</sup> dan kepadatan terendah di Kabupaten Pelalawan sebesar 30,57 jiwa/km<sup>2</sup>. Kota Pekanbaru mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 983,36 ribu jiwa, diikuti Kabupaten Kampar 841,33 ribu jiwa dan Kabupaten Indragiri Hilir 654,91 ribu jiwa. Jumlah penduduk Provinsi Riau terbanyak ada pada kelompok umur 0-4 tahun, artinya komposisi penduduk usia muda yang belum produktif masih cukup tinggi sehingga perlu kebijakan dari pemerintah terkait kesehatan dan pendidikan penduduk usia balita. Jumlah penduduk Provinsi Riau per kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 4.1 Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2020.

**Tabel 4. 1 Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-2020**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Provinsi Riau Tahun 2011-2020									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Kuantan Singingi	294.468,00	302.631,00	306.718,00	310.619,00	314.276,00	317.935,00	321.216,00	324.413,00	327.316,00	334.943,00
Kabupaten Indragiri Hulu	372.074,00	383.814,00	392.345,00	400.901,00	409.431,00	417.733,00	425.897,00	433.934,00	441.789,00	444.548,00
Kabupaten Indragiri Hilir	675.898,00	676.419,00	685.530,00	694.614,00	703.734,00	713.034,00	722.234,00	731.396,00	740.598,00	654.909,00
Kabupaten Pelalawan	329.539,00	339.869,00	358.210,00	377.221,00	396.990,00	417.498,00	438.788,00	460.780,00	483.622,00	390.046,00
Kabupaten Siak	391.760,00	404.093,00	416.298,00	428.499,00	440.841,00	453.052,00	465.414,00	477.670,00	489.996,00	457.940,00
Kabupaten Kampar	711.236,00	733.506,00	753.376,00	773.171,00	793.005,00	812.702,00	832.387,00	851.837,00	871.117,00	841.332,00
Kabupaten Rokan Hulu	507.079,00	523.024,00	545.483,00	568.576,00	592.278,00	616.466,00	641.208,00	666.410,00	692.120,00	561.385,00
Kabupaten Bengkalis	503.604,00	519.380,00	527.918,00	536.138,00	543.987,00	551.683,00	559.081,00	566.228,00	573.003,00	565.569,00
Kabupaten Rokan Hilir	574.419,00	592.404,00	609.779,00	627.233,00	644.680,00	662.242,00	679.663,00	697.218,00	714.497,00	637.161,00
Kabupaten Kepulauan Meranti	177.004,00	177.587,00	178.839,00	179.894,00	181.095,00	182.152,00	183.297,00	184.372,00	185.516,00	206.116,00
Kota Pekanbaru	929.247,00	958.352,00	984.674,00	1 011.467,00	1 038.118,00	1 064.566,00	1 091.088,00	1 117.359,00	1 143.359,00	983.356,00
Kota Dumai	259.913,00	268.022,00	274.089,00	280.109,00	285.967,00	291.908,00	297.638,00	303.292,00	308.812,00	316.782,00
Provinsi Riau	5 726.241,00	5 879.109,00	6 033.268,00	6 188.442,00	6 344.402,00	6 500.971,00	6 657.911,00	6 814.909,00	6 971.745,00	6 394.087,00

Sumber:

BPS

Provinsi

Riau,

2011-2020

### 4.1.3 Kondisi Perekonomian

Perekonomian Provinsi Riau tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 729,17 Triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.490,02 triliun. Provinsi Riau berada pada urutan ke-6 di Indonesia atau ke-2 di luar Pulau Jawa, setelah Provinsi Sumatera Utara.

Selama sepuluh tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Provinsi Riau didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Kontruksi, serta Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Provinsi Riau.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Riau pada tahun 2020 adalah dari lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 28,27 persen diikuti lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 26,83 persen, dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 17,86 persen. Sementara itu, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 10,36 persen dan lapangan usaha Kontruksi sebesar 9,68 persen.



## 4.2 Gambaran Umum Wilayah Kota Pekanbaru

### 4.2.1 Wilayah Administrasi dan Iklim

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016, bahwa Kota Pekanbaru dibagi atas 10 Kecamatan dan 2 Kota yang terdiri dari 84 kelurahan.

Luas wilayah Kota Pekanbaru meliputi 632,26 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Tenayan Raya, Rumbai Pesisir dan Rumbai merupakan tiga kecamatan terluas di Kota Pekanbaru, dengan persentase luas wilayah terhadap total wilayah Kota Pekanbaru masing-masing adalah 27,09%, 24,88% dan 20,38%. Dilihat dari ketinggian wilayah tiap kecamatan, Kecamatan Tenayan Raya merupakan kecamatan dengan wilayah tertinggi yakni mencapai 43 meter di atas permukaan laut. Sebaliknya, Kecamatan Limapuluh merupakan kecamatan dengan wilayah terendah yang hanya berkisar 4 meter di atas permukaan laut.

Suhu udara maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 mencapai 36,00°C yang terjadi pada bulan April, Mei dan Agustus sedangkan suhu udara minimum mencapai 22,00°C yang terjadi pada bulan Oktober. Curah hujan maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 mencapai 42,80 mm<sup>3</sup> dengan jumlah hari hujan 23 hari yang terjadi pada bulan November, sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan Februari sebesar 30,20 mm<sup>3</sup> dengan jumlah hari hujan 14 hari.

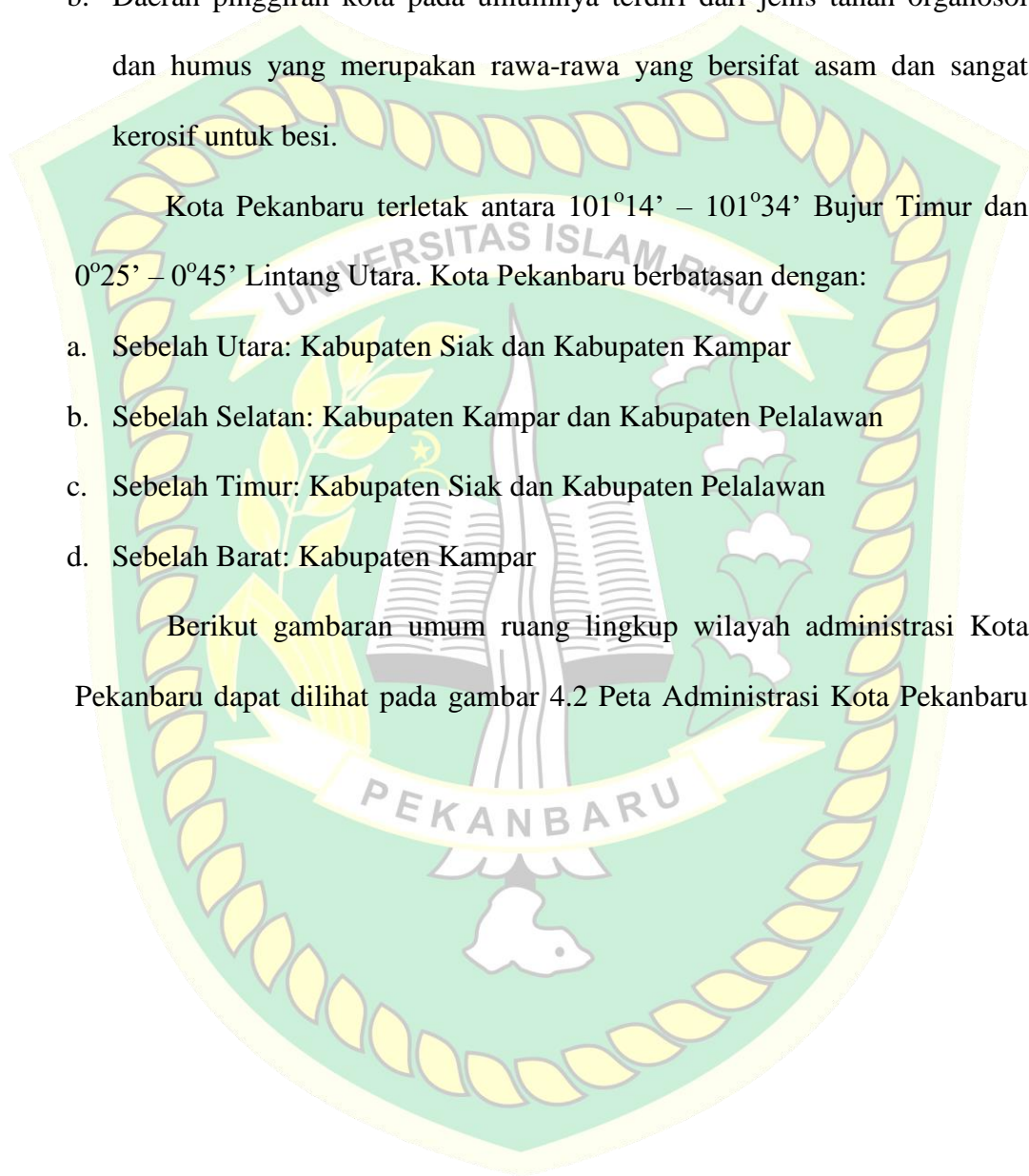
Kota Pekanbaru memiliki daerah yang relatif datar dengan ciri-ciri, sebagai berikut:

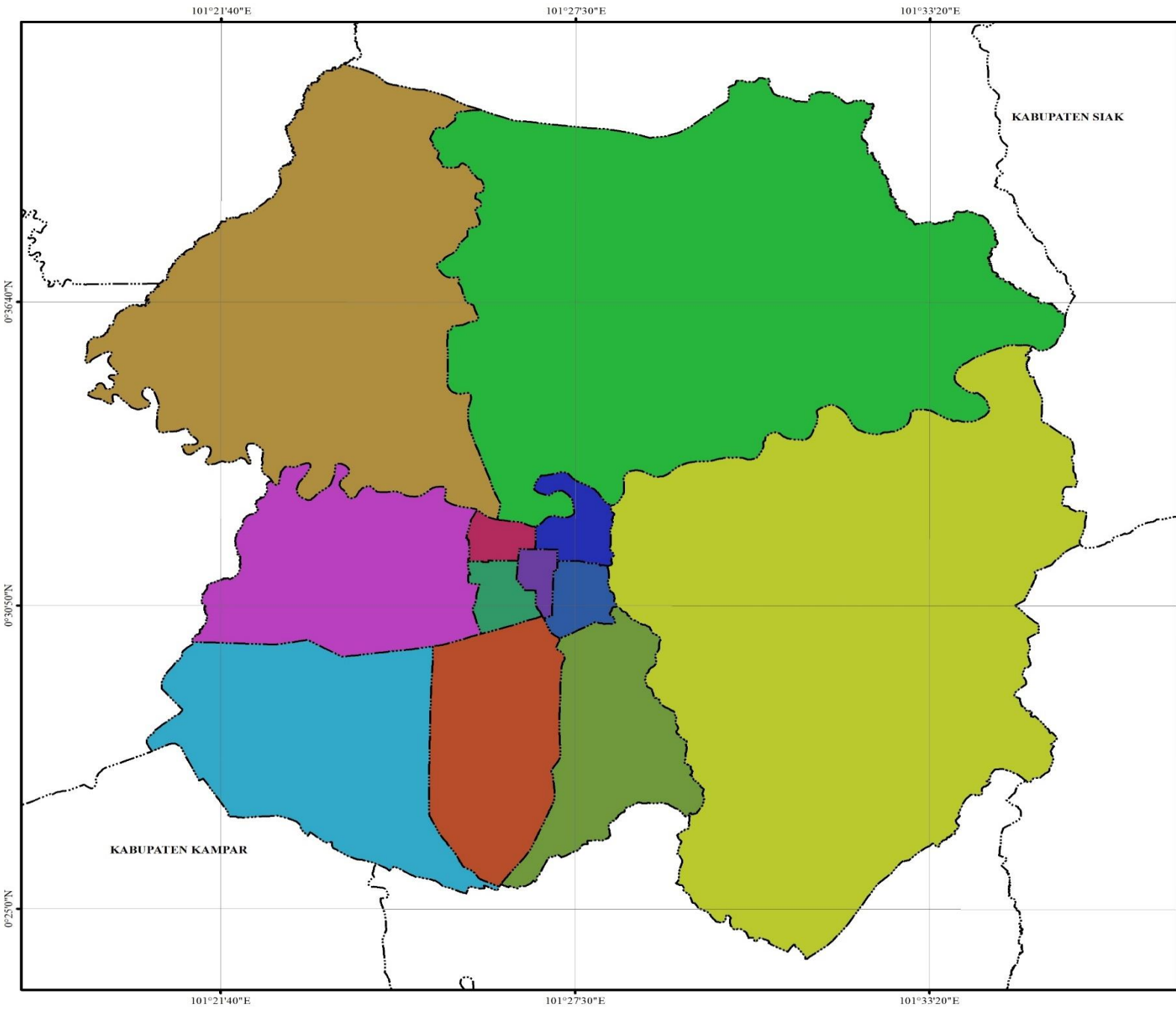
- a. Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir.
- b. Daerah pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam dan sangat kerosif untuk besi.

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ}14'$  –  $101^{\circ}34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25'$  –  $0^{\circ}45'$  Lintang Utara. Kota Pekanbaru berbatasan dengan:



- a. Sebelah Utara: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Kampar

Berikut gambaran umum ruang lingkup wilayah administrasi Kota Pekanbaru dapat dilihat pada gambar 4.2 Peta Administrasi Kota Pekanbaru





**GAMBAR 4.2 PETA ADMINISTRASI KOTA PEKANBARU**

  
**SKALA 1:170.000**  


Sistem Grid : ..... Grid Geografi  
 Datum Horizontal : ..... WGS 84



**LEGENDA**

<b>ADMINISTRASI</b>	
----- Batas Kabupaten	 SAIL
----- Batas Kecamatan	 SENAPELAN
<b>KECAMATAN</b>	
 BUKITRAYA	 TAMPAN
 LIMAPULUH	 TENAYANRAYA
 MARPOYAN DAMAI	
 PAYUNG SEKAKI	
 PEKANBARUKOTA	
 RUMBAI	
 RUMBAI PESISIR	

<b>Dosen Pembimbing :</b> Puji Astuti, ST, MT	<b>Nama : Melisa Pebriani</b> <b>NPM : 173410870</b>
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

**SUMBER**

1. SHP RBI (Rupa Bumi Indonesia) Tahun 2017
2. Citra Satellite

#### 4.2.2 Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2020 bersumber dari hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), yaitu sebesar 983.356 jiwa, yang terdiri 495.117 penduduk laki-laki dan 488.239 penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101. Persentase penduduk jika dirinci menurut kecamatan, memperlihatkan bahwa Kecamatan Tampan, Tenayan Raya dan Marpoyan Damai adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak. Jika dibagi dengan luas wilayah, terlihat bahwa Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota dan Limapuluh memiliki kepadatan penduduk paling besar dibandingkan kecamatan lainnya.

Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja di Kota Pekanbaru dari data hasil olah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus adalah sebanyak 555.138 jiwa, yang terdiri dari 342.012 laki-laki dan 213.126 perempuan. Dari angkatan kerja tersebut ada sebanyak 507.617 penduduk yang bekerja, sedangkan sisanya adalah penduduk yang tidak bekerja/menganggur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Pekanbaru tahun 2020 sebesar 65,22 dan tingkat pengangguran sebesar 8,56. Artinya dari 100 penduduk usia kerja 65 orang diantaranya berpartisipasi aktif di dunia kerja dan sebesar 8,56% dari jumlah angkatan kerja adalah pengangguran. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai pada tahun sebelumnya dengan tingkat pengangguran pada tahun 2019 sebesar 7,86. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada setiap kecamatan yang

ada di Kota Pekanbaru pada tahun terakhir yaitu tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020.

**Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2011-2020**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2020</b>
Tampan	203.238
Payung Sekaki	96.296
Bukit Raya	93.478
Marpoyan Damai	127.600
Tenayan Raya	154.261
Limapuluh	38.613
Sail	20.384
Pekanbaru Kota	22.604
Sukajadi	42.852
Senapelan	35.357
Rumbai	78.185
Rumbai Pesisir	70.488
Total	983.356

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2021

#### **4.2.3 Kondisi Perekonomian**

Nilai PDRB Kota Pekanbaru atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 115,52 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 3,24 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang nilai PDRB-nya sebesar 118,76 triliun rupiah. Turunnya nilai PDRB ini terjadi karena Pandemi Covid-19 yang telah melemahkan perekonomian.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan dari 72,18 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 69,02 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020, perekonomian di Kota Pekanbaru mengalami kontraksi sebesar 4,48%. Ini

disebabkan oleh menurunnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha imbas dari pandemi.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020), struktur perekonomian Kota Pekanbaru didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, Kontruksi dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Pekanbaru. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Kontruksi, yaitu sebesar 30,17%. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 30,20%. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, areparasi Mobil, dan Sepeda Motor, Menurun dari 31,46% pada tahun 2019 menjadi 29,23% pada tahun 2020. Kemudian, Industri Pengolahan, peranannya terhadap perekonomian di Kota Pekanbaru meningkat menjadi 20,78% pada tahun 2020, sebelumnya sebesar 19,10% pada tahun 2019.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Pekanbaru pada tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan kegiatan produksi di sebagian besar lapangan usaha. Nilai PDRB tahun 2020 Kota Pekanbaru atas dasar harga konstan, sebesar 69,02 triliun rupiah. Angka tersebut menurun dari 72,18 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020, perekonomian di Kota Pekanbaru mengalami kontraksi sebesar 4,38%.

Aktivitas kegiatan jasa di Kota Pekanbaru tercatat mengalami penurunan paska diumumkannya pasien terkonfirmasi positif Covid19 di Pekanbaru pada 13 Maret 2020. Adanya kebijakan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro) di beberapa kecamatan terutama saat jam malam, pembatasan masyarakat untuk beribadah di tempat ibadah, pembatalan keberangkatan jemaah haji dan umroh, penutupan tempat hiburan, mall, bioskop, hotel dan bandara serta memberlakukan WFH-WFO bagi pekerja, berdampak pada turunnya seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Nilai PDRB per kapita Kota Pekanbaru atas dasar harga berlaku tahun 2016-2019 mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2020, PDRB per kapita mengalami penurunan akibat adanya penurunan daya beli masyarakat karena pandemi.

### **4.3 Gambaran Umum Wilayah Kota Dumai**

#### **4.3.1 Wilayah Administrasi dan Iklim**

Pembentukan Pemerintah Kota Dumai dikukuhkan dengan Undang-undang N0.16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999. Dimana waktu itu wilayah administrasi pemerintah daerah terdiri dari 3 wilayah kecamatan, 13 kelurahan, dan 9 desa. Kemudian berdasarkan Perda No.8 dan 9 tahun 2009 dimekarkan menjadi 7 kecamatan dengan 33 kelurahan. Secara administrasi Kota Dumai dikepalai oleh seorang Walikota dengan seorang Wakil Walikota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai disamping bertugas secara teknis, juga mengkoordinir dan mengintegrasikan usaha,

penyusunan rencana dan program kerja. Inspektorat Kota Dumai merupakan unsur pengawas dengan tugas pokok melakukan pengawasan umum atas jalannya roda pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Kepmendagri No.13 Tahun 2006, dalam Peencanaan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah menganut prinsip berimbang dan dinamis. Realisasi pendapatan Kota Dumai pada tahun 2020 berjumlah 1,357 triliun rupiah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 325,77 miliar rupiah, dana perimbangan sebesar 917,17 miliar rupiah dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 114,45 miliar rupiah.

Kota Dumai berada dalam satu hamparan dengan luas wilayah 1.727,38 Km<sup>2</sup>. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan kecamatan dengan jarak ke ibukota kabupaten terjauh adalah Kecamatan Medang Kampai. Sebagian wilayah dan Kota Dumai terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan sebagian dataran tinggi di bagian selatan.

Di wilayah Kota Dumai terdapat 53 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan, dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Sungai Buluala, Sungai Senepis, dan Sungai Masjid merupakan sungai terpanjang. Kota Dumai beriklim tropis dengan suhu udara pada tahun 2020 berkisar antara 21,4°C – 36,4°C dan terdapat dua musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan terbanyak di Kota Dumai selama tahun 2020 terjadi pada bulan November yaitu 366,8 mm<sup>3</sup>, sedangkan yang terkecil terjadi pada bulan Maret yaitu 69,1 mm<sup>3</sup>. Sementara itu jumlah hari hujan terbanyak

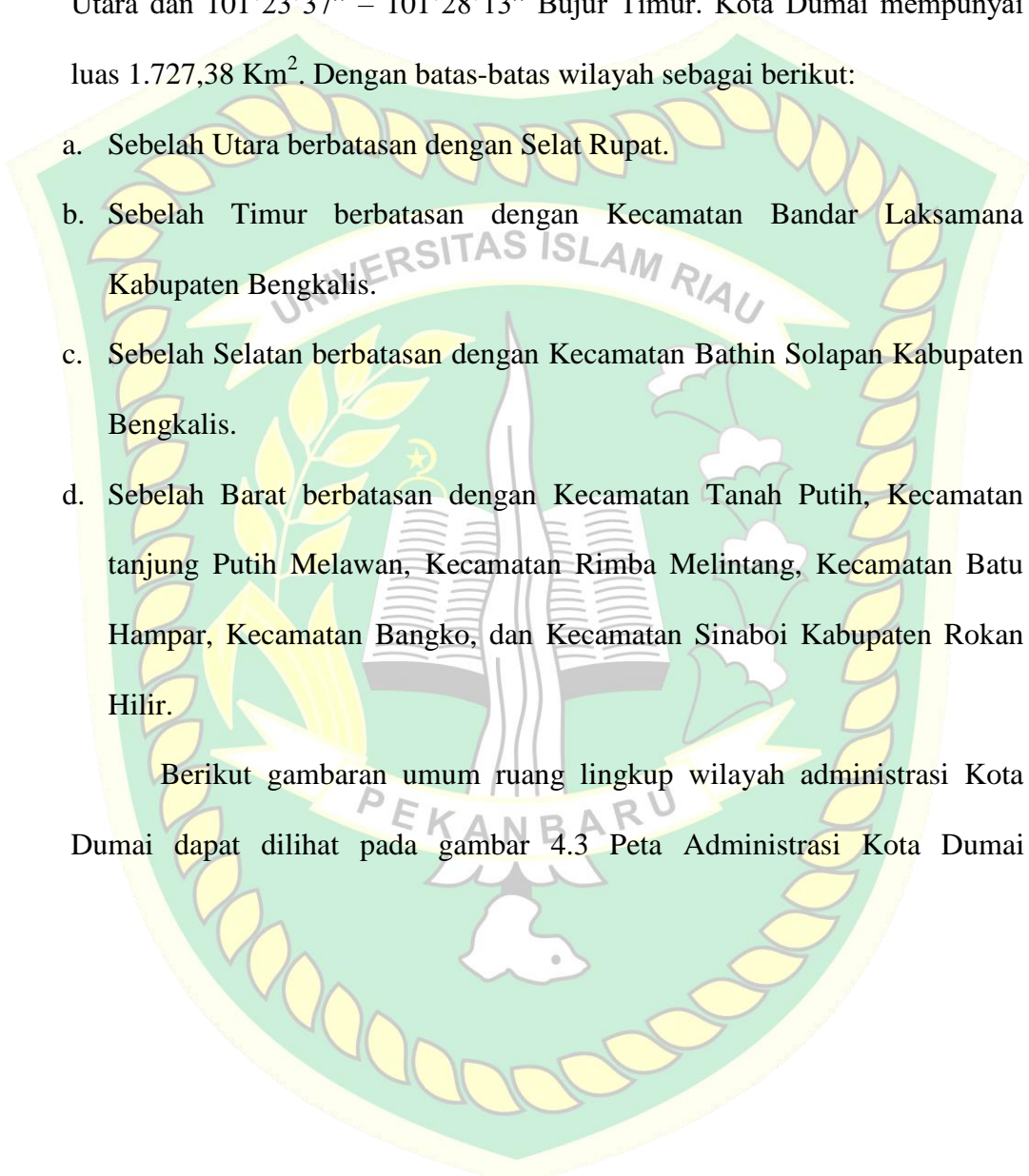


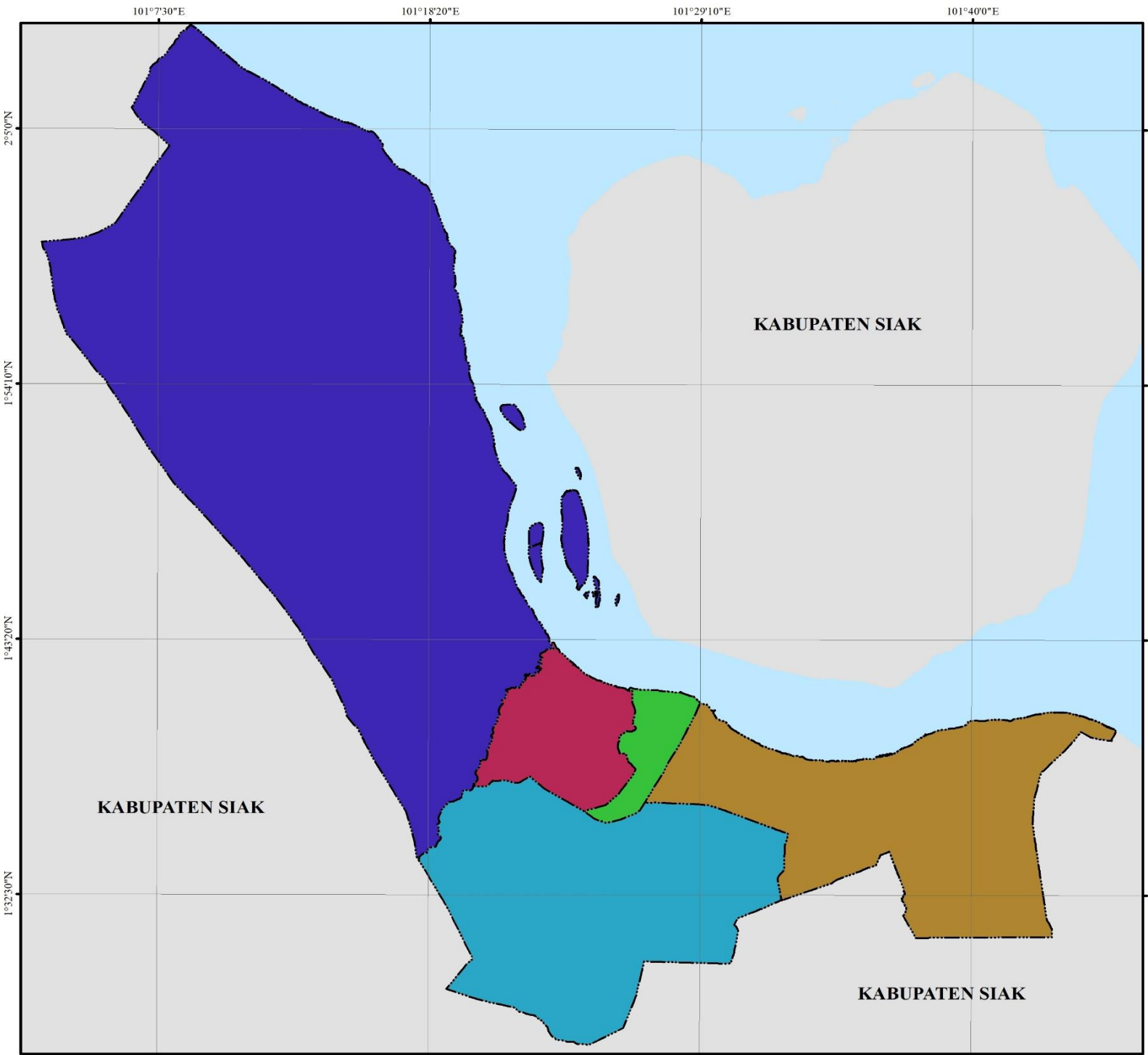
terjadi pada bulan September dan November sebanyak 25 hari dan terkcecil pada bulan Maret yaitu sebanyak 11 hari.

Kota Dumai terletak pada posisi antara 1°23'00" – 1°24'23" Lintang Utara dan 101°23'37" – 101°28'13" Bujur Timur. Kota Dumai mempunyai luas 1.727,38 Km<sup>2</sup>. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Rupa.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan tanjung Putih Melawan, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Bangko, dan Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

Berikut gambaran umum ruang lingkup wilayah administrasi Kota Dumai dapat dilihat pada gambar 4.3 Peta Administrasi Kota Dumai





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**GAMBAR 4.3 PETA ADMINISTRASI KOTA DUMAI**



**SKALA 1:400.000**  
 0 50 100 200 300 Km

Sistem Grid : ..... Grid Geografi  
 Datum Horizontal : ..... WGS 84



**LEGENDA**

**ADMINISTRASI**  
 - - - - - Batas Kabupaten  
 - · - · - - Batas Kecamatan

- KECAMATAN**
- BUKITKAPUR
  - DUMAI BARAT
  - DUMAI TIMUR
  - MEDANGKAMPAI
  - SUNGAISEMBILAN

**Dosen Pembimbing :**  
**Puji Astuti, ST, MT**

**Nama : Melisa Pebriani**  
**NPM : 173410870**

**SUMBER**

1. SHP RBI (Rupa Bumi Indonesia) Tahun 2017
2. Citra Satellite

### 4.3.2 Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Dumai menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 (SP 2010) sebanyak 253.803 jiwa dan luas wilayah seluas 1.727,38 Km<sup>2</sup> sehingga kepadatan penduduk di Kota Dumai tahun 2010 adalah 147 jiwa per Km<sup>2</sup>. Dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 sampai 2020 sebesar 2,17%, jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2020 bertambah menjadi 316,782 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 162.769 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 154.013 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 183 jiwa per km<sup>2</sup>.

Kecamatan dengan penduduk terbanyak tahun 2020 adalah Dumai Timur dengan jumlah penduduk 68.930 jiwa (21,76%), sedangkan kecamatan dengan penduduk terendah adalah medan Kampai dengan jumlah penduduk 16.794 jiwa (5,30%). Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Dumai paling banyak berada pada kelompok umur 0-4 tahun dan paling sedikit pada kelompok umur 75 tahun keatas, dengan jumlah masing-masing sebesar 33.966 jiwa dan 2.480 jiwa.

Pada tahun 2020, BPS mencatat dari 146.586 orang angkatan kerja (penduduk 15 tahun ke atas), 134.581 orang adalah pengangguran. Jumlah pencari kerja terdaftar di Kota Dumai pada Dinas Tenaga Kerja Terdaftar di Kota Dumai dan Transmigrasi Kota Dumai pada tahun 2020 sebesar 4.878 orang dan terjadi penurunan sebesar 12,37% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk yang ada di Kota Dumai Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kota Dumai tahun 2020

**Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2020**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2020</b>
Bukit Kapur	51.564
Medang Kampai	16.794
Sungai Sembilan	41.738
Dumai Barat	44.292
Dumai Selatan	52.791
Dumai Timur	68.930
Dumai Kota	40.673
Total	316.782

*Sumber: BPS Kota Dumai, 2021*

#### **4.3.3 Kondisi Perekonomian**

Nilai PDRB Kota Dumai atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 mencapai 36,32 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,18 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 36,15 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini lebih dipengaruhi oleh peningkatan harga (Inflasi). Sementara itu, berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami penurunan dari 24,86 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 24,60 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa, selama tahun 202, Kota Dumai mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar -1,05%, menurun signifikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,60%. Penurunan PDRB harga konstan ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflansi.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020), struktur perekonomian Kota Dumai masih di dominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor; Kontruksi; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; serta Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Dumai pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 59,97% (meningkat dari 57,73% di tahun 2019). Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,48% (menurun dari 15,87% dari tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Kontruksi sebesar 10,85% (menurun dari 11,20% di tahun 2019). Berikutnya, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,72% (meningkat dari 5,32% ditahun 2019), dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 2,00%.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Dumai pada tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi si beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflansi. Nilai PDRB Kota Dumai tahun 2020 dasar harga konstan 2010 mencapai 24,60 triliun rupiah. Angka tersebut menurun sebesar 0,26 triliun rupiah dari tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa, selama tahun 2020, terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar -1,05%, menurun jauh jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,60%.

#### **4.4 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu**

##### **4.4.1 Wilayah Administrasi dan Iklim**

Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di taluk kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu berkedudukan di Rengat. Dan pada tahun 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan.

1. Kecamatan Rengat Ibukota Rengat
2. Kecamatan Rengat Barat, Ibukota Pematang Reba
3. Kecamatan Seberida, Ibukota Pangkalan Kasai
4. Kecamatan Batang Gansal, Ibukota Seberida
5. Kecamatan Batang Cenaku, Ibukota Aur Cina
6. Kecamatan Pasir Penyau, Ibukota Air Molek
7. Kecamatan Lirik, Ibukota Lirik
8. Kecamatan Simpang Kelayang, Ibukota Simpang Kelayang
9. Kecamatan Peranap, Ibukota Peranap
10. Kecamatan Batang Peranap, Ibukota Selunak
11. Kecamatan Rakit Kulim, Ibukota Petonggan
12. Kecamatan Sungai Lala, Ibukota Kelawar
13. Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Ibukota Lubuk Batu Tinggal
14. Kecamatan Kuala Cenaku, Ibukota Kuala Cenaku

Di Kabupaten Indragiri Hulu tercatat ada sebanyak 94 perusahaan yang berpotensi mencemarkan lingkungan. Jumlah ini naik dari tahun 2018 lalu yang berjumlah 89 perusahaan. Ini menunjukkan adanya peningkatan peran serta perusahaan untuk memiliki izin pengelolaan lingkungan. Sementara itu, pada tahun 2020 tercatat ada sebanyak 42 perusahaan di Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan sebanyak 25 perusahaan yang memiliki izin pembuangan air limbah.

Suhu dan kelembaban udara ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Suhu udara maksimum pada tahun 2020 yaitu 35,4°C, sedangkan suhu minimum berkisar pada 22,0°C. Curah hujan maksimum pada tahun 2020 sebesar 506,2 mm / 22 hari yang terjadi pada bulan Januari. Kelembaban udara maksimum mencapai 100%, sedangkan kelembaban udara minimum berkisar pada 83%.

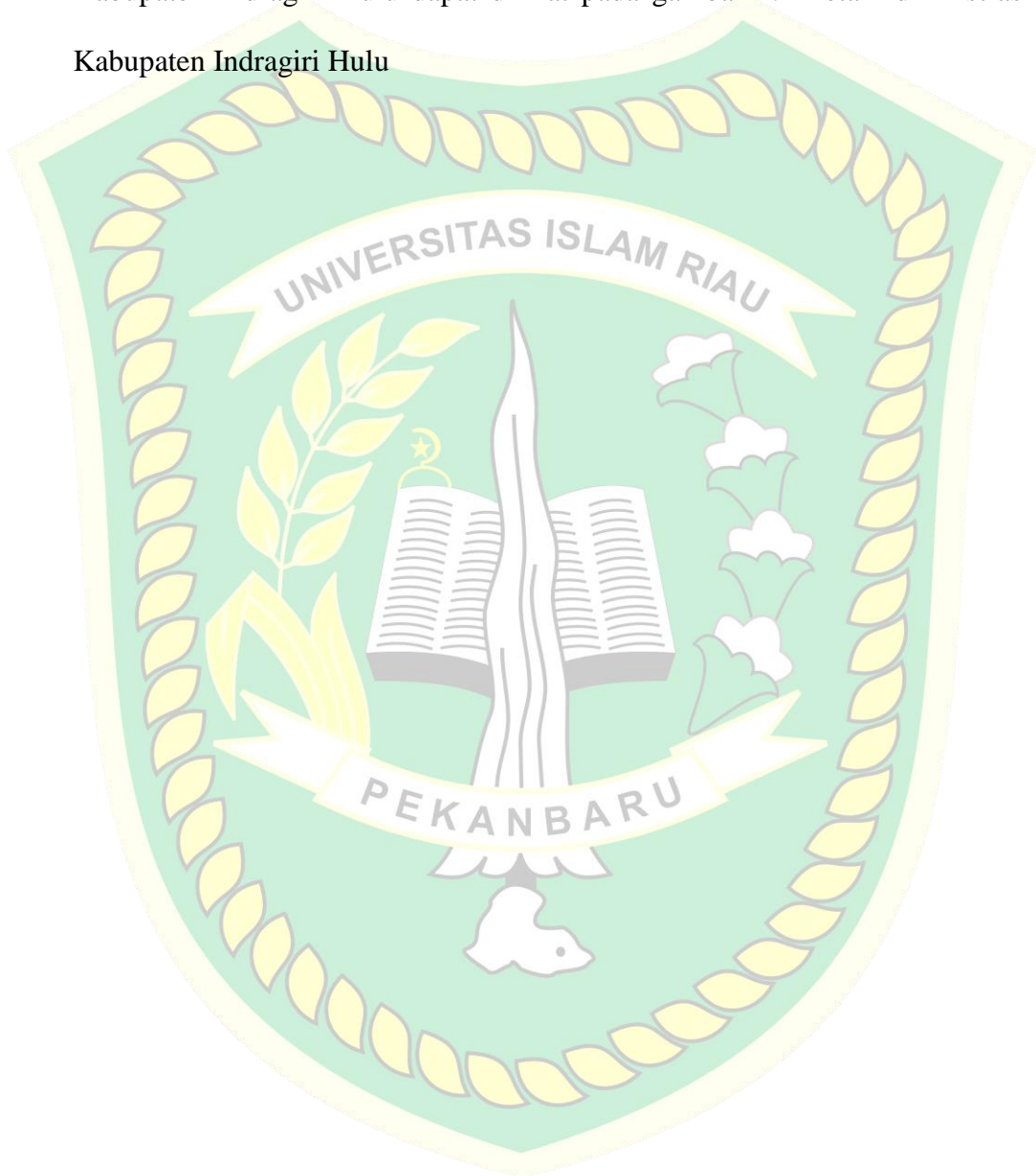
Luas Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198,26 Km<sup>2</sup> (819.826,0 Ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa denan ketinggian 5-100 m di atas permukaan laut. Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 14 kecamatan dengan 178 desa dan 16 kelurahan. Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada 0°15'Lintang Utara, 1°5' Lintang Selatan, 101°10' Bujur Timur, dan 102°48' Bujur Barat. Dimana Kabupaten Indragiri Hulu berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo Tebo (Provinsi Jambi)

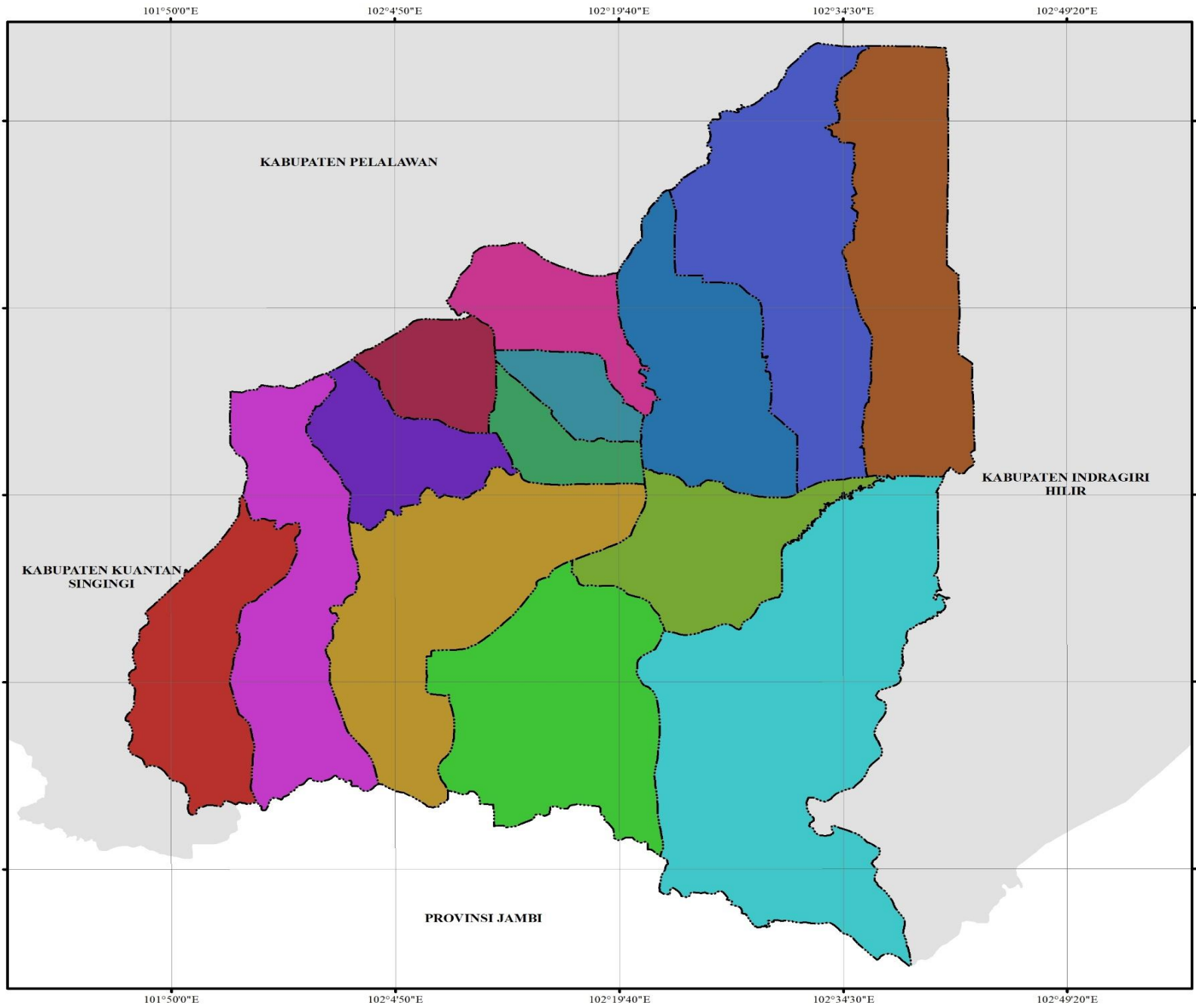
c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi

d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indagiri Hilir

Berikut gambaran umum ruang lingkup wilayah administrasi Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada gambar 4.4 Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hulu






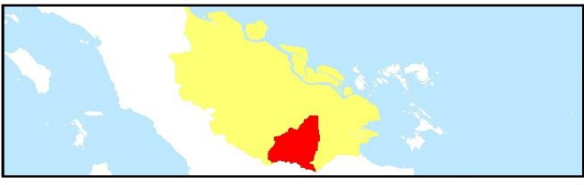


  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

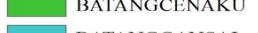


**GAMBAR 4.4 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

  
**SKALA 1:700.000**  
 0 50 100 200 300 Km

Sistem Grid : ..... Grid Geografi  
 Datum Horizontal : ..... WGS 84



**LEGENDA**

<b>ADMINISTRASI</b>		 RAKITKULIM
 Batas Kabupaten	 RENGAT	
 Batas Kecamatan	 RENGAT BARAT	
<b>KECAMATAN</b>		 SEBERIDA
 BATANGCENAKU	 SUNGAILALA	
 BATANGGANSAL		
 BATANGPERANAP		
 KELAYANG		
 KUALACENAKU		
 LIRIK		
 LUBUK BATU JAYA		
 PASIR PENYU		
 PERANAP		

<b>Dosen Pembimbing :</b> Puji Astuti, ST, MT	<b>Nama :</b> Melisa Pebriani <b>NPM :</b> 173410870
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

- SUMBER**
1. SHP RBI (Rupa Bumi Indonesia) Tahun 2017
  2. Citra Satellite

#### 4.4.2 Kondisi Penduduk

Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2020 berjumlah sebesar 444,548 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 228,502 jiwa (51,40%) dan penduduk perempuan 216,046 jiwa (48,60%). Dimana penduduk laki-laki di Kabupaten Indragiri Hulu lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan, dengan seks ratio di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 105,76 artinya terdapat 106 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk Indragiri Hulu tahun 2020 sebanyak 54 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk tertinggi masih terdapat di Kecamatan Lirik 204 jiwa per kilometer persegi, tetapi kondisi ini dikarenakan luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Pasir Penyus masih tergabung dengan Kecamatan Sungai Lala dan Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Peranap yaitu 28 jiwa per kilometer persegi, dengan kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Peranap masih tergabung dengan Kecamatan Batang Peranap.

Jumlah Angkatan Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) adalah sebanyak 215.215 jiwa, yang terdiri dari 138.672 laki-laki dan 76.543 perempuan. Dari angkatan kerja tersebut, ada sebanyak 204.644 penduduk yang bekerja, sedangkan sisanya 10.571 penduduk menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 sebesar 65,94 dan tingkat pengangguran sebesar 4,70. Jumlah

penduduk yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020.

**Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020</b>
Peranap	35.161
Batang Peranap	13.252
Seberida	56.571
Batang Cenaku	40.736
Batang Gansal	33.272
Kelayang	24.542
Rakit Kulim	23.836
Pasir Penyu	36.234
Lirik	27.624
Sungai Lala	16.608
Lubuk Batu Jaya	22.981
Rengat Barat	48.573
Rengat	50.603
Kuala Cenaku	14.555
Toral	444.548

*Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hulu, 2021*

#### **4.4.3 Kondisi Perekonomian**

Nilai PDRB Kabupaten Indragiri Hulu atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2019 mencapai 41,659 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,276 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang nilai PDRB-nya sebesar 40,386 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflansi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 28,778 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hulu mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,78%, lebih cepat dibandingkan tahun

sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Peranan terbesar dalam menentukan PDRB Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 28,56% (angka ini meningkat dari 28,23% di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 27,34% (menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 27,68%), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,04% (meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,72%). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Ecer, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,26% (meningkat dari 10,82% di tahun 2018) dan lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan sebesar 9,37%.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Indragiri Hulu atas dasar harga konstan tahun 2019 adalah 29,866 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 28,778 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,78%, meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 3,49%.

## **4.5 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir**

### **4.5.1 Wilayah Administrasi dan Iklim**

Pada tahun 2020, wilayah administrasi pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami perubahan khususnya di tingkat RT. Terdapat 20 kecamatan, 179 desa, 39 kelurahan, serta 4.626 wilayah Satuan Lingkungan Setempat yang berbentuk RT. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi andalan dalam menjalankan roda pemerintahan mengalami sedikit perubahan jumlah dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari jenis kelamin, PNS perempuan masih mendominasi sebesar 56,21% dan PNS berjenis kelamin laki-laki sebesar 43,78%.

Peraturan daerah (Perda) adalah instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah dan ditetapkan setelah mendapat persetujuan DPRD. Jumlah perda yang dihasilkan oleh DPRD bisa menjadi salah satu indikator kinerja. Pada tahun 2020, DPRD Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan 9 perda, bertambah dibandingkan tahun 2019 sebanyak 6 perda. Jumlah Perda di tahun 2020 masih jauh lebih sedikit dibandingkan di tahun 2018 yaitu sebanyak 19 perda. Perda yang dihasilkan diharapkan bisa menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah.

Berdasarkan realisasi APBD tahun 2020, pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1,91 triliun rupiah. Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 182,91 milyar rupiah, angka ini lebih tinggi dari PAD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019 yang sebesar 153,74 miliar rupiah. Secara total pendapatan daerah Kabupaten Indragiri

Hilir tahun 2020 lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 2,01 triliun rupiah. APBD adalah pedoman dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah dalam melaksanakan pelayanan publik.

Jika dilihat berdasarkan topografi wilayah, sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah daratan rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih dari 5 meter dari permukaan laut yang mengakibatkan daerah ini menjadi daerah rawan beriklim tropis basah. Akan tetapi terdapat desa-desa yang merupakan dataran tinggi. Desa-desa tersebut terletak di Kecamatan Kemuning dan Keritang.

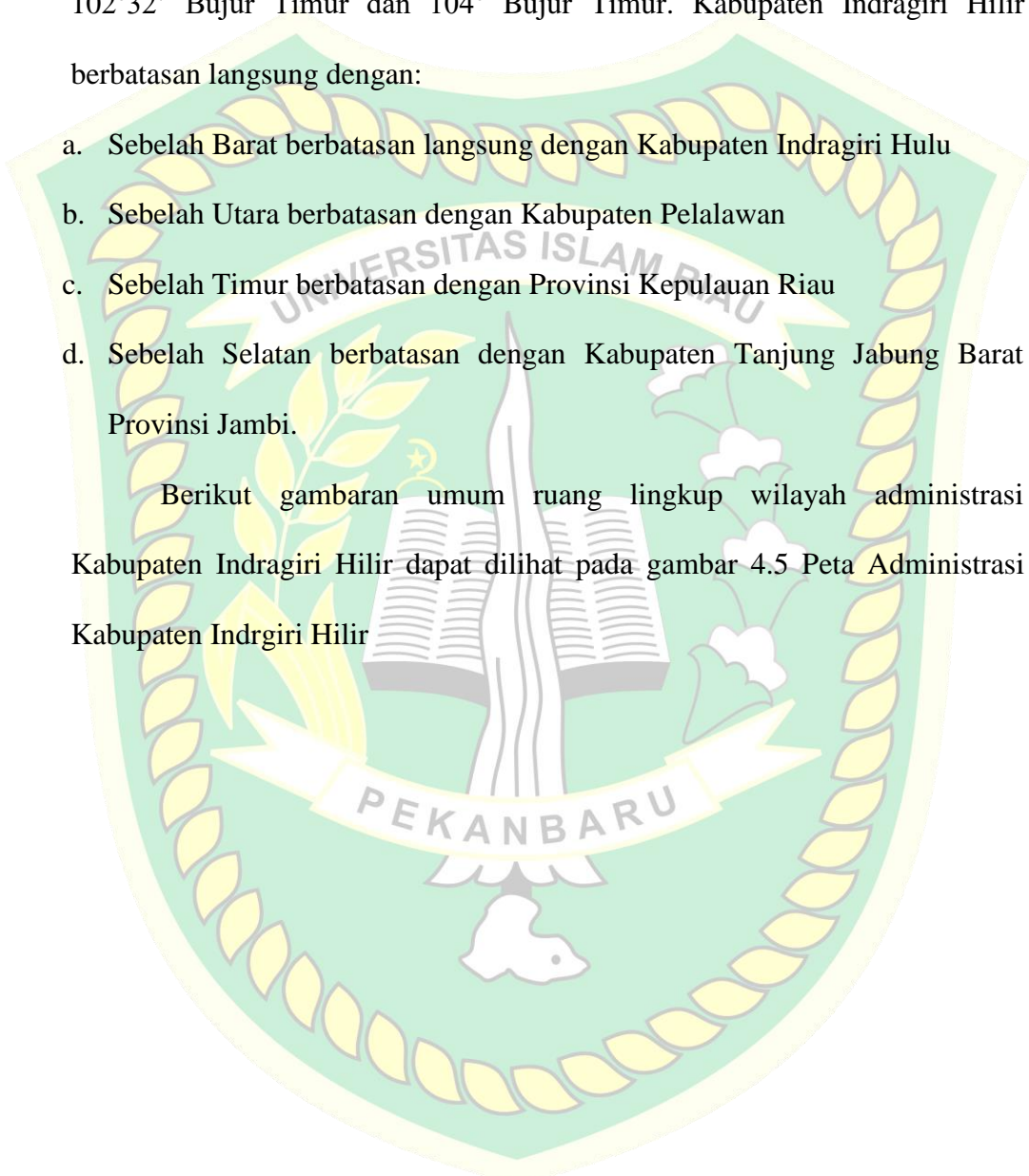
Dari 20 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan di Gaung merupakan Kecamatan terbesar dengan luas 2.093,52 Km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Sungai Batang dengan kecamatan terkecil dengan luas 148,71 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan negeri sribu parit. Kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya menggunakan kendaraan speed boat, pompong dan perahu.

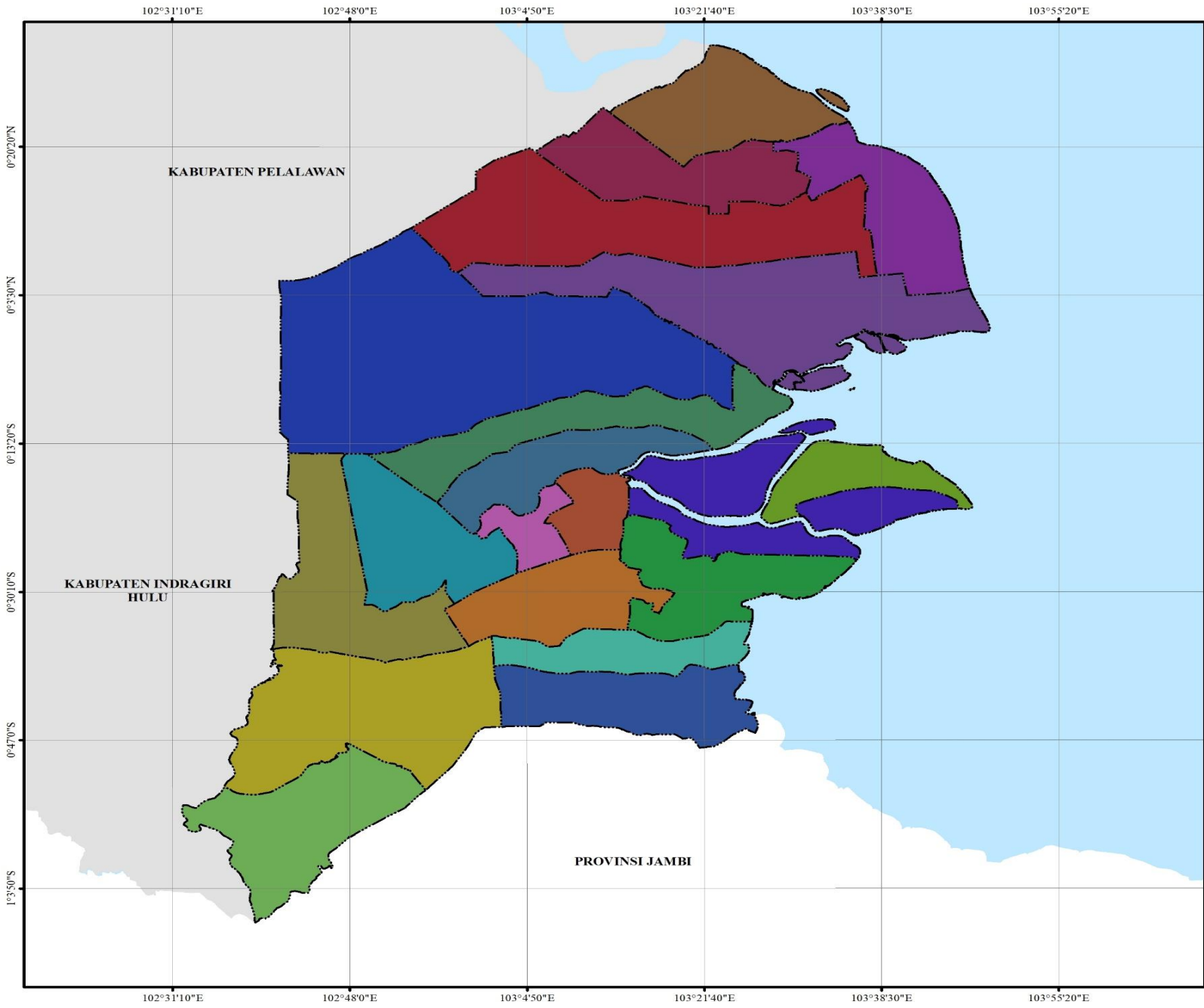
Rata-rata curah hujan selama tahun 2020 adalah 179,9 mm, dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November yaitu sebesar 263,2 mm dan terendah pada bulan Februari yaitu 98 mm. Sedangkan rata-rata hujan selama tahun 2020 adalah 10 hari perbulan, dimana rata-rata hari hujan tertinggi pada bulan September dan November sebanyak 13 hari dan terendah terjadi pada bulan Februari sebanyak 7 hari.

Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak di bagian selatan Provinsi Riau memiliki luas sebesar 11.605,97 Km<sup>2</sup>. Indragiri Hilir secara astronomis terletak antara 0°36' Lintang Utara dan 1°07' Lintang Selatan, dan antara 102°32' Bujur Timur dan 104° Bujur Timur. Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

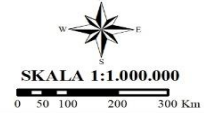
Berikut gambaran umum ruang lingkup wilayah administrasi Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada gambar 4.5 Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir





  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**GAMBAR 4.5 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

  
**SKALA 1:1.000.000**  
 0 50 100 200 300 Km

Sistem Grid : ..... Grid Geografi  
 Datum Horizontal : ..... WGS 84



**LEGENDA**

<b>ADMINISTRASI</b>	
----- Batas Kabupaten	----- Batas Kecamatan
<b>KECAMATAN</b>	
BATANGTUAKA	MANDAIH
CONCONG	PELANGIRAN
ENOK	PULAUBURUNG
GAUNG	RETEH
GAUNGANAKSERKA	SUNGAIBATANG
KATEMAN	TANAH MERAH
KEMPAS	TELUKBELENGKONG
KEMUNING	TEMBILAHAN
KERITANG	TEMBILAHAN HULU
KUALA INDRAGIRI	TEMPULING

<b>Dosen Pembimbing :</b> Puji Astuti, ST, MT	<b>Nama :</b> Melisa Pebriani <b>NPM :</b> 173410870
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

- SUMBER**
1. SHP RBI (Rupa Bumi Indonesia) Tahun 2017
  2. Citra Satellite



#### 4.5.2 Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir hasil Sensus Penduduk tahun 2020 (SP 2020) sebanyak 654.909 jiwa. Dengan luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir seluas wilayah 11.605,97 Km<sup>2</sup>, maka secara rata-rata 48 jiwa akan tersebar di setiap kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2020 sebesar -0,10%. Rasion jenis kelamin penduduk Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2020 sebesar 107,7 menandakan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki. Berdasarkan grafik piramida penduduk, penduduk Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2020 termasuk dalam ciri penduduk ekspansif. Ditandai dengan masih melebarnya bidang piramid pada kelompok umur muda, mulai bertambahnya bidang pada kelompok usia produktif, dan makin melebarnya bidang pada kelompok usia lanjut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2020 sebesar 4,35%, mengalami penurunan sebesar 0,2% dibandingkan tahun 2019. Hal ini menunjukkan dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedai untuk melakukan aktivitas ekonomi, sebanyak 4 orang adalah pengangguran. Indikator ketenagakerjaan yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Tenaga Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 62,93 di tahun 2018 menjadi 64,44 di tahun 2019, serta 69,17 di tahun 2020. Artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 69 orang tersedia untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020 sebesar 1.060.412, terjadi kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 998,982 rupiah. Jika dilihat dari jenis pengeluarannya, rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan di tahun 2020 sebesar 54,73% dan untuk non makanan sebesar 45,27%. Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020.

**Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020</b>
Keritang	63.103
Kemuning	38.499
Reteh	35.974
Sungai Batang	10.066
Enok	33.846
Tanah Merah	25.236
Kuala Indragiri	14.679
Concong	11.764
Tembilahan	77.862
Tembilahan Hulu	46.662
Tempuling	31.633
Kempas	38.671
Batang Tuaka	27.190
Gaung Anak Serka	22.591
Gaung	38.367
Mandah	34.531
Kateman	29.284
Pelangiran	35.318
Teluk Belengkong	9.229
Pulau Burung	20.404
Total	654.909

*Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2021*

#### **4.5.3 Kondisi Perekonomian**

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Pada tahun 2020, Kabupaten

Indragiri Hilir berhasil meningkatkan nilai PDRB menjadi 65.022,92 miliar rupiah atau naik 1,82% dari tahun 2019. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebesar 46,78% diikuti sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan masing-masing 24,05% dan 16,14%. Di sisi lain, secara riil Kabupaten Indragiri Hilir mencatat PDRB tahun 2020 sebesar 44.927,61 miliar rupiah. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir mencatat PDRB tahun 2020 sebesar 44.927,61 miliar rupiah. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir mengalami perlambatan dari 4,16% di tahun 2019 menjadi 0,34% di tahun 2020.

Struktur ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir setiap tahunnya didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 46,78%. Di tahun 2020, hampir seluruh kategori lapangan usaha mengalami perlambatan, efek dari pandemi covid-19. Untuk PDRB per kapita, pada tahun 2020 tercatat senilai 86,72 juta rupiah. Peningkatan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Dalam lima tahun terakhir, secara rata-rata nilai PDRB per kapita mencapai 83,66 juta rupiah.

#### **4.6 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kampar**

##### **4.6.1 Wilayah Administrasi dan Iklim**

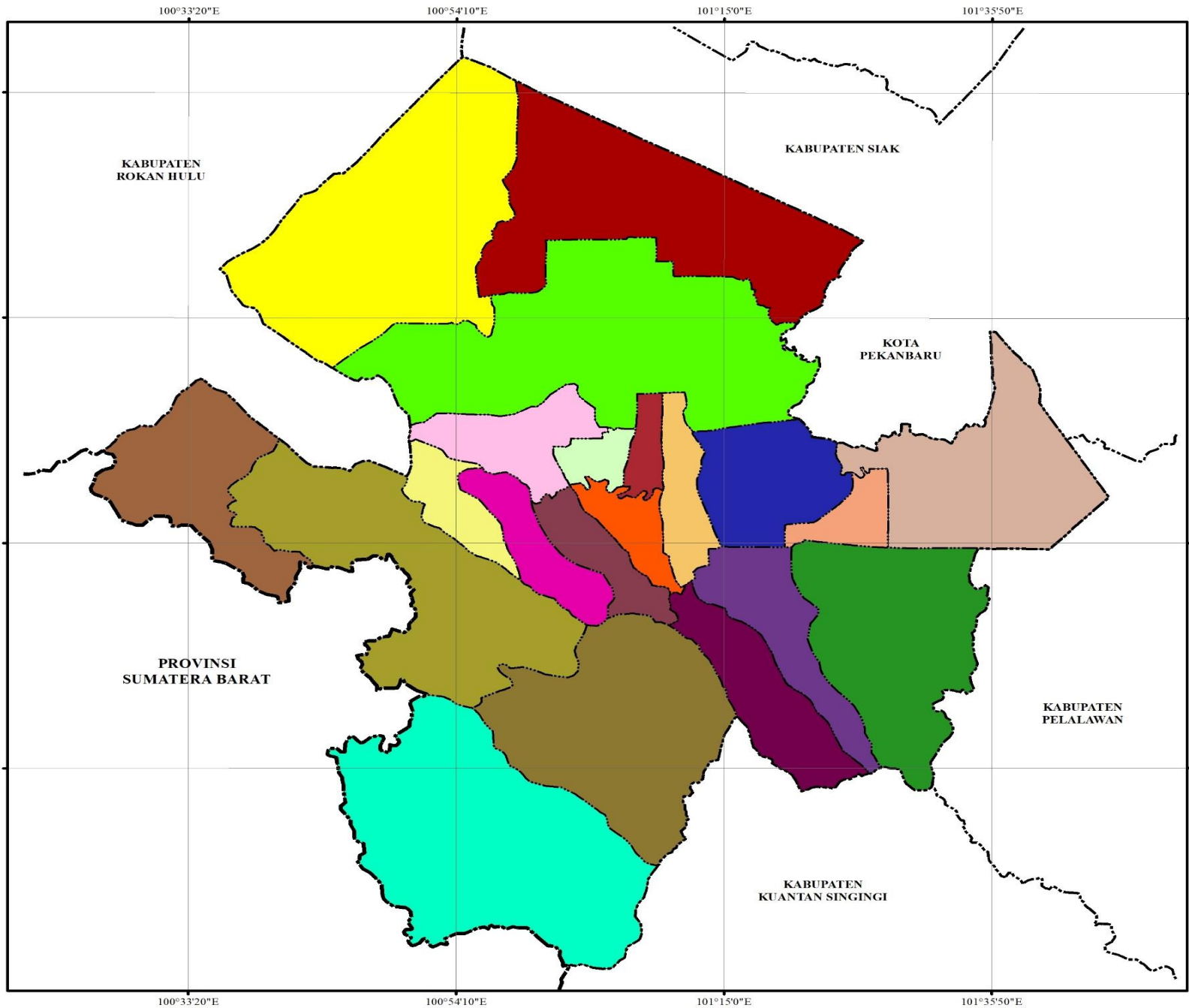
Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan yaitu Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kecamatan Kampar Kiri Hilir,

Kecamatan Gunung Sahilan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampa, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Tambang, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Perhentian Raja.

Secara astronomis, Kabupaten Kampar terletak antara  $01000'40''$  Lintang Utara dan  $00027'00''$  Lintang Selatan dan antara  $100028'30''$  –  $101014'30''$  Bujur Timur dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang  $00$ . Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kampar memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Berikut gambaran umum ruang lingkup wilayah administrasi Kabupaten Kampar dapat dilihat pada gambar 4.6 Peta Administrasi Kabupaten Kampar

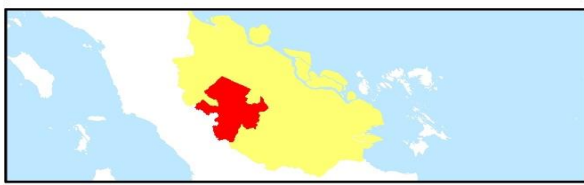


  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**GAMBAR 4.6 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN KAMPAR**

  
**SKALA 1:820.000**  
 0 6 12 24 36 Km

Sistem Grid : ..... Grid Geografi  
 Datum Horizontal : ..... WGS 84



**LEGENDA**

<b>ADMINISTRASI</b>	KOTO KAMPAR HULU
Batas Kabupaten	KUOK
Batas Kecamatan	PERHENTIAN RAJA
<b>KECAMATAN</b>	RUMBIO JAYA
TAPUNG HILIR	SALO
TAPUNG HULU	SIAK HULU
BANGKINANG	TAMBANG
BANGKINANG KOTA	XIII KOTO KAMPAR
GUNUNG SAHLAN	TAPUNG
KAMPA	
KAMPAR KIRI	
KAMPAR KIRI HILIR	
KAMPAR KIRI HULU	
KAMPAR KIRI TENGAH	
KAMPAR UTARA	
KECAMATAN KAMPAR	

<b>Dosen Pembimbing :</b> <b>Puji Astuti, ST, MT</b>	<b>Nama : Melisa Pebriani</b> <b>NPM : 173410870</b>
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

**SUMBER**

1. SHP RBI (Rupa Bumi Indonesia) Tahun 2017
2. Citra Satelite

#### 4.6.2 Kondisi Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2020 berjumlah sebesar 841.332 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 431.295 jiwa dan penduduk perempuan 410.037 jiwa. Dimana penduduk laki-laki di Kabupaten Kampar lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan, dengan seks ratio di Kabupaten Kampar sebesar 105,2. Jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2020.

**Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2020**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2020</b>
Kampar Kiri	32.583
Kampar Kiri Hulu	10.972
Kampar Kiri Hilir	12.593
Gunung Sahilan	20.384
Kampar Kiri Tengah	27.470
XIII Koto Kampar	23.535
Koto Kampar Hulu	19.717
Kuok	25.897
Salo	25.802
Tapung	101.524
Tapung Hulu	80.108
Tapung Hilir	57.769
Bangkinang Kota	37.247
Bangkinang	33.802
Kampar	51.206
Kampa	23.959
Rumbio Jaya	18.138
Kampar Utara	18.057
Tambang	98.939
Siak Hulu	102.886
Perhentian Raja	18.744
Total	841.332

Sumber: BPS Kabupaten Kampar, 2021

### **4.6.3 Kondisi Perekonomian**

Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Kampar menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu berjumlah 72.977,19 miliar rupiah, dibandingkan dengan tahun 2019 senilai 77.278,81 miliar rupiah. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebesar 33,14% dan diikuti sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan yang bernilai sebanyak 25,75%.

## **4.7 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bengkalis**

### **4.7.1 Wilayah Administrasi dan Iklim**

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Lembaga Negara Nomor 25 tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Rokan Hilir. Dan pada awal 2009 Kabupaten Bengkalis kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tahun 2017 terjadi pemekaran kecamatan di Kecamatan Bengkalis, sehingga jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi sebanyak 11 kecamatan. Sebelumnya seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis terdiri dari 102 desa/kelurahan pada tahun 2013. Pada tahun 2004, telah aktif 52 desa baru hasil pemekaran sehingga jumlah desa/kelurahan di

Kabupaten Bengkalis menjadi 154 desa/kelurahan, sementara pada tahun 2015 menjadi 155 desa/kelurahan.

Pada tahun 2020, Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan yang terletak di daratan dan kepulauan. Untuk luas wilayah Kabupaten Bengkalis 8.426,48 Km<sup>2</sup>, terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Terdapat sebanyak 3 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Jika dirinci luas wilayah menurut kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Talang Mandau merupakan kecamatan yang terluas yaitu 1.244,71 Km<sup>2</sup> (14,77%) dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Rupa Utara dengan luas 378,68 Km<sup>2</sup> (4,49%). Jarak terjauh antara ibukota kecamatan dengan ibukota Kabupaten Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Bathin Solapan yaitu Desa Sebangar dan jarak lurus 106 Km. Dan jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah ibukota Kecamatan Bantan, yaitu Desa Selat Baru, dan ibukota Kecamatan Bukit Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 Km.

Secara astronomis, Kabupaten Bengkalis terletak antara 207°37,2" – 0055°33,6" Lintang Utara dan 100°57'57,6 – 102°30'25,2" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Bengkalis memiliki batas-batas dengan:

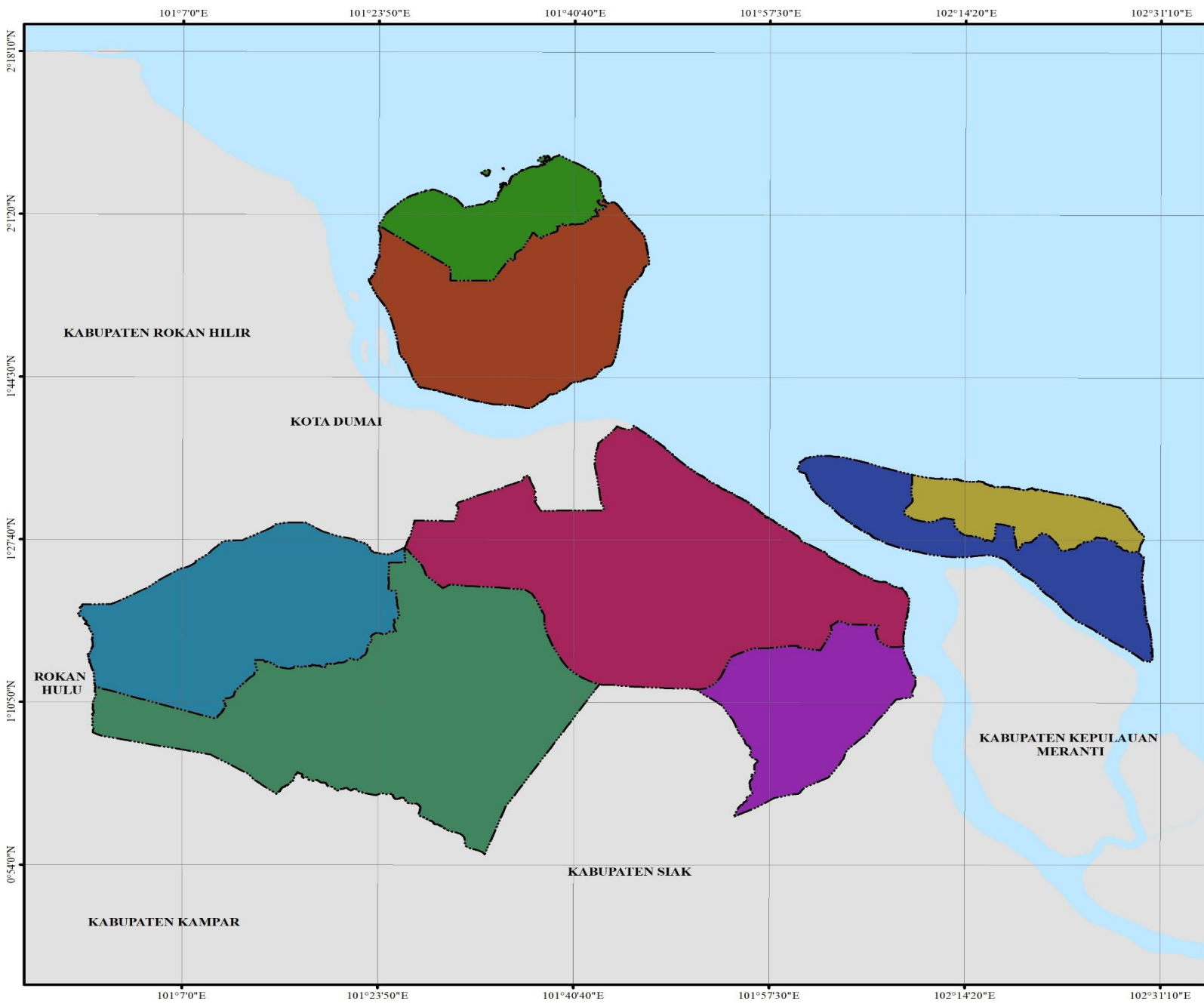
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti



- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berikut gambaran umum ruang lingkup wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar 4.7 Peta Administrasi Kabupaten Bengkalis.





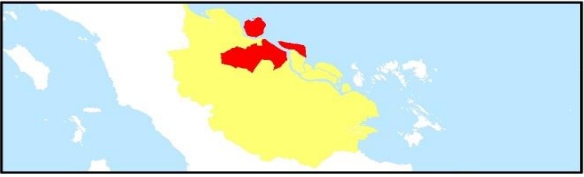
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**GAMBAR 4.7 PETA ADMINISTRASI**  
**KABUPATEN BENGKALIS**



**SKALA 1:909.024**  
 0 50 100 200 300 Km

Sistem Grid : ..... Grid Geografi  
 Datum Horizontal : ..... WGS 84



**LEGENDA**

- ADMINISTRASI**  
 - - - - - Batas Kabupaten  
 - - - - - Batas Kecamatan
- KECAMATAN**
- BANTAN
  - BENGKALIS
  - BUKIT BATU
  - MANDAU
  - PINGGIR
  - RUPAT
  - RUPAT UTARA
  - SIAK KECIL

<b>Dosen Pembimbing :</b> <b>Puji Astuti, ST, MT</b>	<b>Nama : Melisa Pebriani</b> <b>NPM : 173410870</b>
---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

- SUMBER**
1. SHIP RBI (Rupa Bumi Indonesia) Tahun 2017
  2. Citra Satellite

#### 4.7.2 Kondisi Kependudukan

Penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 (SP 2020) Bulan September sebanyak 565.569 jiwa. Penduduk hasil registrasi penduduk data Disdukcapil kondisi Semester II 2020 sebanyak 593.397 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tahun 2020 mencapai 65 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di sebelas kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Mandau dengan kepadatan sebesar 409 jiwa / Km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan bandar Laksamana sebesar 12 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kondisi banyaknya penduduk Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 4.7 Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

**Tabel 4. 7 Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2020**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2020</b>
Mandau	152.258
Pinggir	62.098
Bathin Solapan	91.586
Talang Mandau	24.000
Bukit Batu	21.771
Siak Kecil	24.168
Bandar Laksmana	15.842
Rupat	34.719
Rupat Utara	14.117
Bengkalis	83.085
Bantan	41.907
Total	565.569

*Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2021*

#### 4.7.3 Kondisi Perekonomian

Pada tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis persentase penduduk miskin Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 6,4% naik dari tahun 2019 yakni

sebesar 6,22%, hal ini sedikit banyak dipengaruhi situasi Covid-19 yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Sementara itu, data lain menyenutkan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bengkalis tahun 2020 sebesar 66,97, naik dari tahun 2019 sebesar 66,07. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 1.216 665, naik dari tahun 2019. PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 sebesar 115,882 Triliun Rupiah, dengan distribusi terbesar dari kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 55,93%. Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 16,99% (naik dari 13,06% dari tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,65% (naik dari 9,22% di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,30% (naik dari 6,49% di tahun 2019) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 3,61% (naik dari 3,01% di tahun 2019). Sementara itu laju pertumbuhan PDRB tahun 2020 adalah sebesar -3,30, turun dari tahun 2019 yang sebesar -1,89.

#### **4.8 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Siak**

##### **4.8.1 Letak Geografis dan Iklim**

Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Siak dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 53 tahun 1999, oleh Menteri Dalam Negeri (Feisal Tanjung) pada tanggal 12 Oktober 1999. Kabupaten Siak secara administrasi dikepalai oleh seorang Bupati/Kepala Daerah didampingi oleh seorang Wakil

Bupati. Jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Siak sebanyak 14 kecamatan yang terdiri dari 131 desa/kelurahan pada tahun 2020. Hingga Desember 2020, tercatat sebanyak 5.631 Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak baik di lingkungan kabupaten maupun kecamatan.

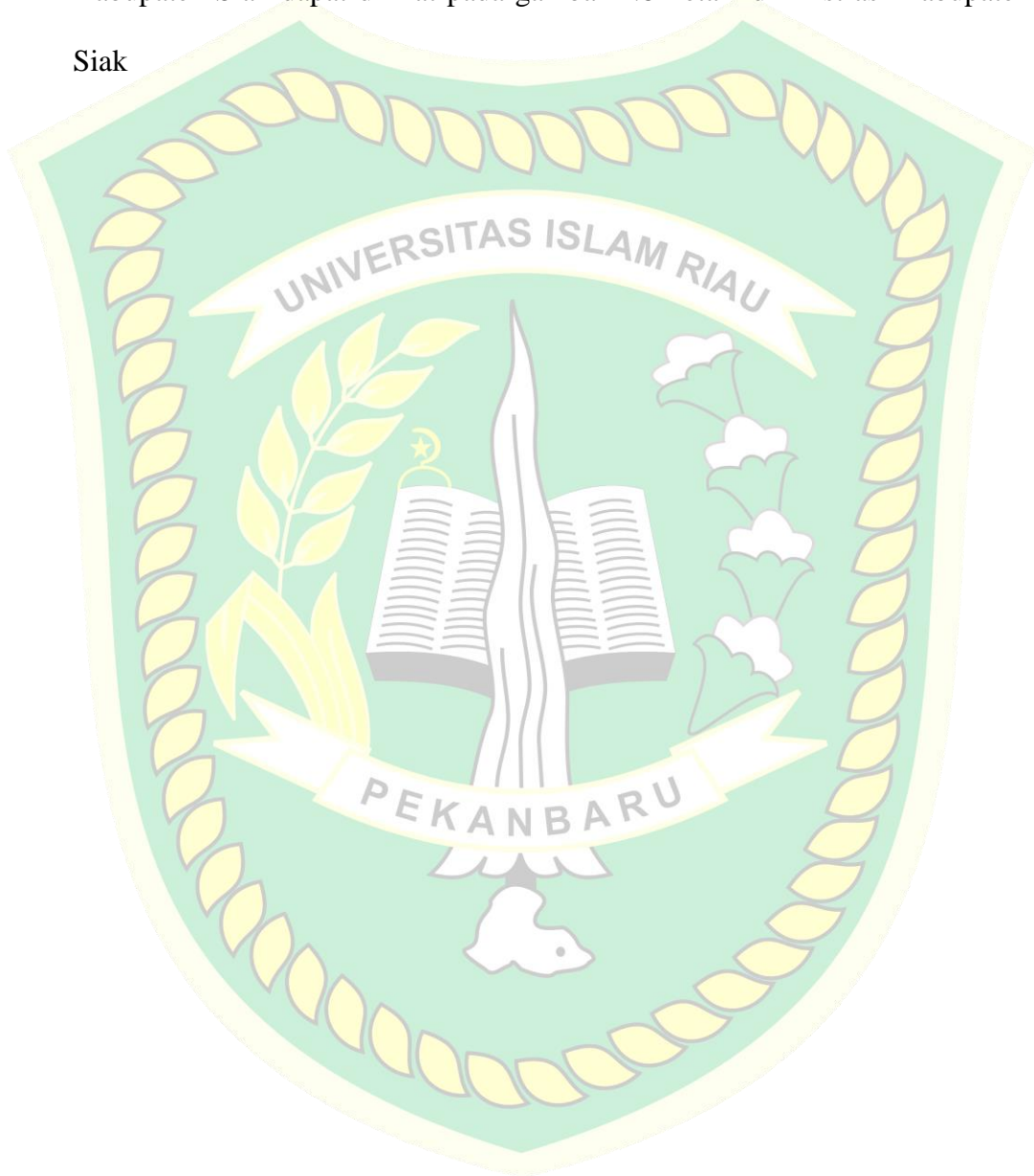
Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri podsolik merah kuning dari batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara  $25^{\circ}$  –  $32^{\circ}$ C. Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

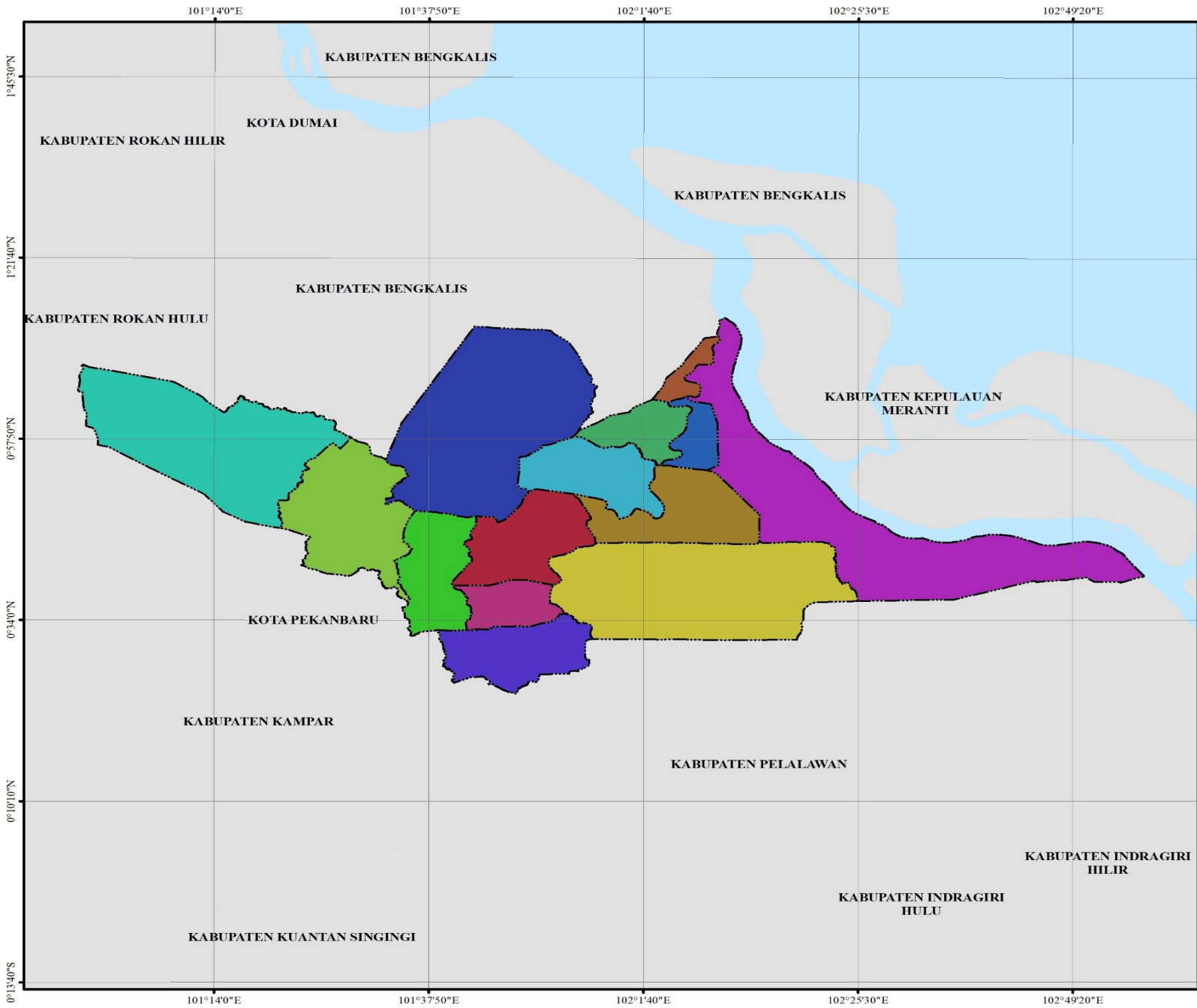
Secara astronomis, Kabupaten Siak terletak antara  $1^{\circ}16'30''$  –  $0^{\circ}20'49''$  Lintang Utara dan  $100^{\circ}54'21''$  –  $102^{\circ}14'59''$  Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Siak memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan.


Berikut gambaran umum ruang lingkup wilayah administrasi Kabupaten Siak dapat dilihat pada gambar 4.8 Peta Administrasi Kabupaten Siak





  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**













**GAMBAR 4.8 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SIAK**

  
**SKALA 1:1.164.061**  
 0 50 100 200 300 Km

Sistem Grid : ..... Grid Geografi  
 Datum Horizontal : ..... WGS 84



**LEGENDA**

<b>ADMINISTRASI</b>	
----- Batas Kabupaten	 SABAAUAH
- - - - - Batas Kecamatan	 SIAK
<b>KECAMATAN</b>	
 BUNGARAYA	 SUNGAIAPIT
 DAYUN	 SUNGAIMANDAU
 KANDIS	 TUALANG
 KERINCIKANAN	
 KOTOGASIB	
 LUBUKDALAM	
 MEMPURA	
 MINAS	
 PUSAKO	

**Dosen Pembimbing :**  
Puji Astuti, ST, MT

**Nama :** Melisa Pebriani  
**NPM :** 173410870

- SUMBER**
- SHP RBI (Rupa Bumi Indonesia) Tahun 2017
  - Citra Satellite

#### 4.8.2 Kondisi Kependudukan

Penduduk Kabupaten Siak berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 sebanyak 457,940 ribu jiwa yang terdiri atas 236,499 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 221,446 ribu jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106,80. Kepadatan penduduk di Kabupaten Siak tahun 2020 mencapai 53,50 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di empat belas kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tualang dengan kepadatan sebesar 937,80 jiwa/Km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Sungai Mandau sebesar 6,10 jiwa/km<sup>2</sup>.

Banyaknya pencari kerja yang terdaftar di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak pada tahun 2020 didominasi oleh yang kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 587 orang. Dan dari bulan yang terbanyak pencari kerja yang terdaftar adalah pada bulan Juni 2020 yaitu sebanyak 142 orang pencari kerja. Kondisi kependudukan Kabupaten Siak dengan jumlah penduduknya pada tahun 2020 dapat kita lihat secara detail pada Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Siak tahun 2020.

**Tabel 4. 8 Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2020**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Kabupaten Siak tahun 2020</b>
Minas	27.67
Sungai Mandau	8.56
Kandis	68.17
Siak	28.88
Kerinci Kanan	21.90
Tualang	113.06
Dayun	29.79
Lubuk Dalam	19.03
Koto Gasib	22.26



<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Kabupaten Siak tahun 2020</b>
Mempura	15.81
Sungai Apit	29.48
Bunga Raya	25.70
Sabak Auh	12.59
Pusako	7.19
Total	430.09

*Sumber: BPS Kabupaten Siak, 2021*

### **4.8.3 Kondisi Perekonomian**

Pada tahun 2020 tercatat pengeluaran rata-rata perkapita untuk komoditi makanan sebesar Rp.747 477 dan komoditi non-makanan sebesar Rp 662 905. Statistik Pendapatan Regional antara lain berguna untuk:

- a. Indikator tingkat pertumbuhan daerah.
- b. Indikator struktur ekonomi
- c. Indikator tingkat inflasi
- d. Indikator tingkat kemakmuran

Besarnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak dapat dilihat berdasarkan kenaikan PDRB setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak selama periode tahun 2016-2020 yang mengacu pada tahun dasar 2010 telah tumbuh dengan pertumbuhan PDRB pada 2020 sebesar -0,51%. PDRB atas harga berlaku pada tahun 2020 (angka sangat sementara) tercatat sebesar 77 884,13 miliar rupiah. Sementara itu PDRB atas harga konstan 2010 (angka sangat sementara) sebesar 53 313,85 miliar rupiah. Nilai PDRB perkapita Kabupaten Siak sebesar 77.844, 13 miliar rupiah untuk ADHB dan 53.313,85 miliar rupiah untuk ADHK menempati peringkat

ketiga terbesar di wilayah Provinsi Riau, dimana Kabupaten Bengkalis berada di tempat pertama. Dari segi sosial, Kabupaten Siak memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata Provinsi Riau. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Siak sebesar 25,38 ribu orang pada tahun 2020.

#### **4.9 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti**

##### **4.9.1 Wilayah Administrasi dan Iklim**

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau yang memiliki 9 kecamatan didalamnya 3 kecamatan terletak di Pulau Tebing Tinggi, 3 kecamatan terletak di Pulau Rangsang dan 3 kecamatan terletak di Pulau Padang. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas daratan seluas 3.707,84 Km<sup>2</sup> dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Tebing Tinggi Timur dan luas wilayah terkecil berada di Kecamatan Tebing Tinggi. Dengan kondisi geografis yang ada, Kecamatan Tasik Putri merupakan kecamatan terjauh yang berjarak lebih kurang 97 Km dari Ibukota kabupaten.

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 kecamatan yang terdiri dari 96 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Kecamatan Rangsang memiliki pembagian desa terbanyak yaitu 14 desa, sedangkan Kecamatan Tebing Tinggi memiliki kecamatan paling sedikit yaitu 9 desa/kelurahan.

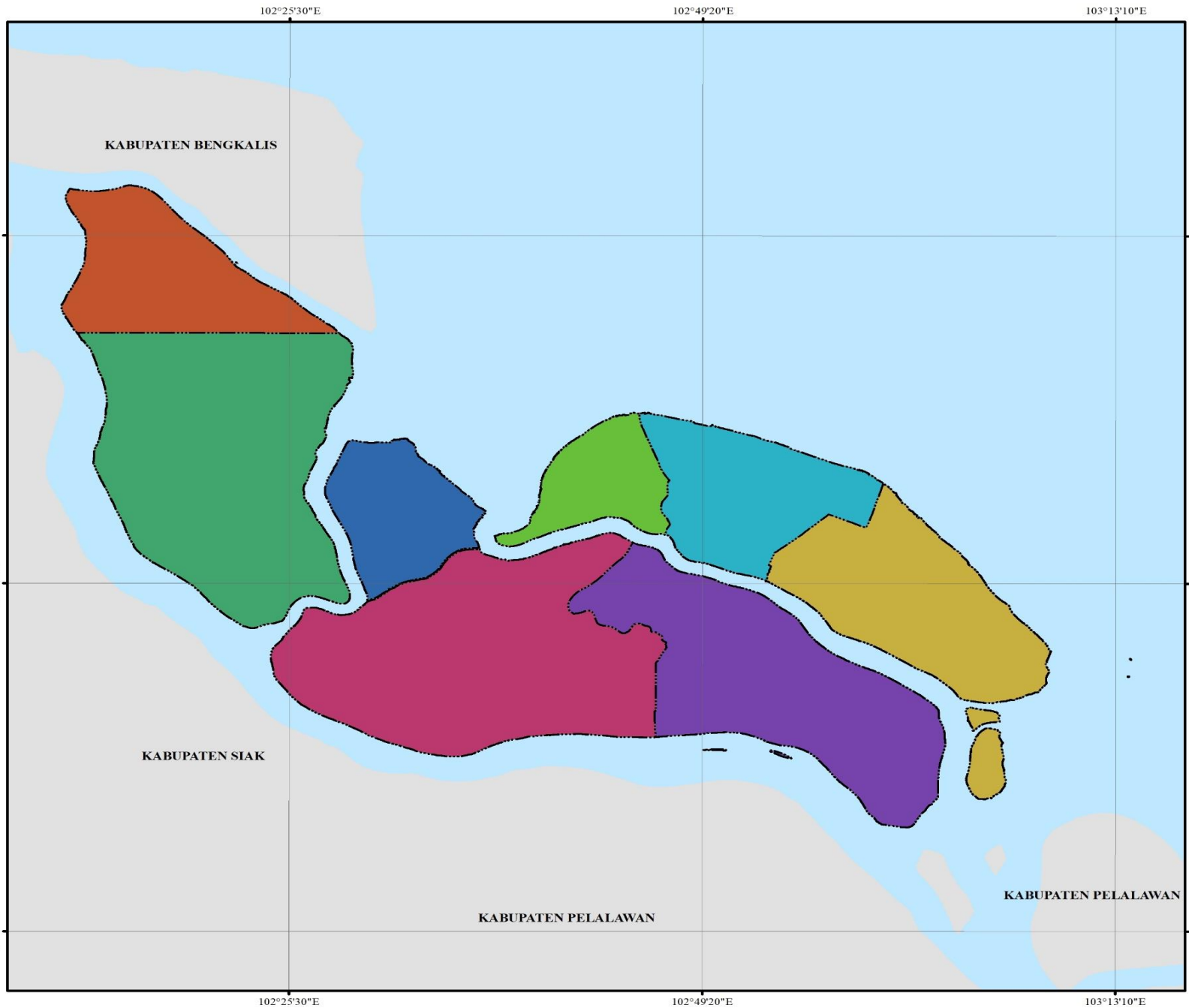
Secara astronomis, Kabupaten Kepulauan Meranti terletak antara 0°42'30" – 1°28'0" Lintang Utara dan 102°12'0" – 103°10'0" Bujur Timur.

Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki batas-batas:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau.

Berikut gambaran umum ruang lingkup wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada gambar 4.9 Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti.





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS TEKNIK  
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**GAMBAR 4.9 PETA ADMINISTRASI  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



**SKALA 1:606.125**  
0 50 100 200 300 Km

Sistem Grid : ..... Grid Geografi  
Datum Horizontal : ..... WGS 84



**LEGENDA**

- ADMINISTRASI**  
 - - - - - Batas Kabupaten  
 - · - · - - Batas Kecamatan
- KECAMATAN**
- MERBAU
  - PULAU MERBAU
  - RANGSANG
  - RANGSANG BARAT
  - RANGSANG PESISIR
  - TASIK PUTRI PUYU
  - TEBING TINGGI BARAT
  - TEBING TINGGI TIMUR

**Dosen Pembimbing :**  
Puji Astuti, ST, MT

**Nama :** Melisa Pebriani  
**NPM :** 173410870

**SUMBER**

1. SHP RBI (Rupa Bumi Indonesia) Tahun 2017
2. Citra Satellite

#### 4.9.2 Kondisi Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 (SP 2020) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik adalah 206.116 jiwa yang terdiri dari 106.502 jiwa penduduk laki-laki dan 99.614 jiwa penduduk perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Tebing Tinggi dan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Tebing Tinggi Timur menurut data registrasi penduduk dan proyeksi penduduk. Banyaknya jumlah penduduk yang menetap di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat kita lihat pada Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020

**Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020</b>
Tebing Tinggi Barat	18.382
Tebing Tinggi	67.219
Tebing Tinggi Timur	13.293
Rangsang	20.123
Rangsang Pesisir	18.853
Rangsang Barat	19.488
Merbau	15.305
Pulau Merbau	15.824
Tasik Putri Puyu	17.629
Total	206.116

*Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021*

#### 4.9.3 Kondisi Perekonomian

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2020, angka PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 18,06 triliun rupiah dengan kontribusi dari kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan untuk PDRB Kabupaten

Kepulauan Meranti tahun 2020 atas dasar harga konstan sebesar 12,68 triliun rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan, dari 12,629 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 12,684 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 0,43% (dengan migas). Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi, tidak dipengaruhi inflasi. Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 38,90% (naik dari 36,37% di tahun 2019) selanjutnya Industri Pengolahan sebesar 26,23% (naik dari 24,19% di tahun 2019) selanjutnya Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,84% (turun dari 19,71% di tahun 2019) dan disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,51% (naik dari 8,97% pada tahun 2019). Dari keempat lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki peranan besar dalam membentuk nilai tambah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pertumbuhan ekonomi selama 2020 mengalami pelambatan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan kegiatan pada berbagai sektor seperti sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, dan sektor Penyedia Akomodasi dan Makan Minum. Sementara itu, produksi di sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan sehingga pertumbuhan migas masih

tumbuh cukup baik (0,43%). Namun, pertumbuhan ekonomi tanpa migas mengalami kontraksi sebesar 0,37%.

#### **4.10 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi**

##### **4.10.1 Wilayah Administrasi dan Iklim**

Kuantan Singingi terdiri dari 15 kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Singingi, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Cerenti, dan Kecamatan Inuman. Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 kecamatan.

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan curah hujan pada tahun 2020 berkisar antara 88,60 – 527,40 mm per bulan. Jumlah rata-rata hari hujan per bulan pada tahun 2020 adalah sebanyak 10 hari. Dan hujan paling sering turun pada bulan April berjumlah sebanyak 16 hari dalam satu bulan. Kemudian disusul lagi pada bulan Oktober dan November sebanyak 13 hari dan 14 hari dalam satu bulan.

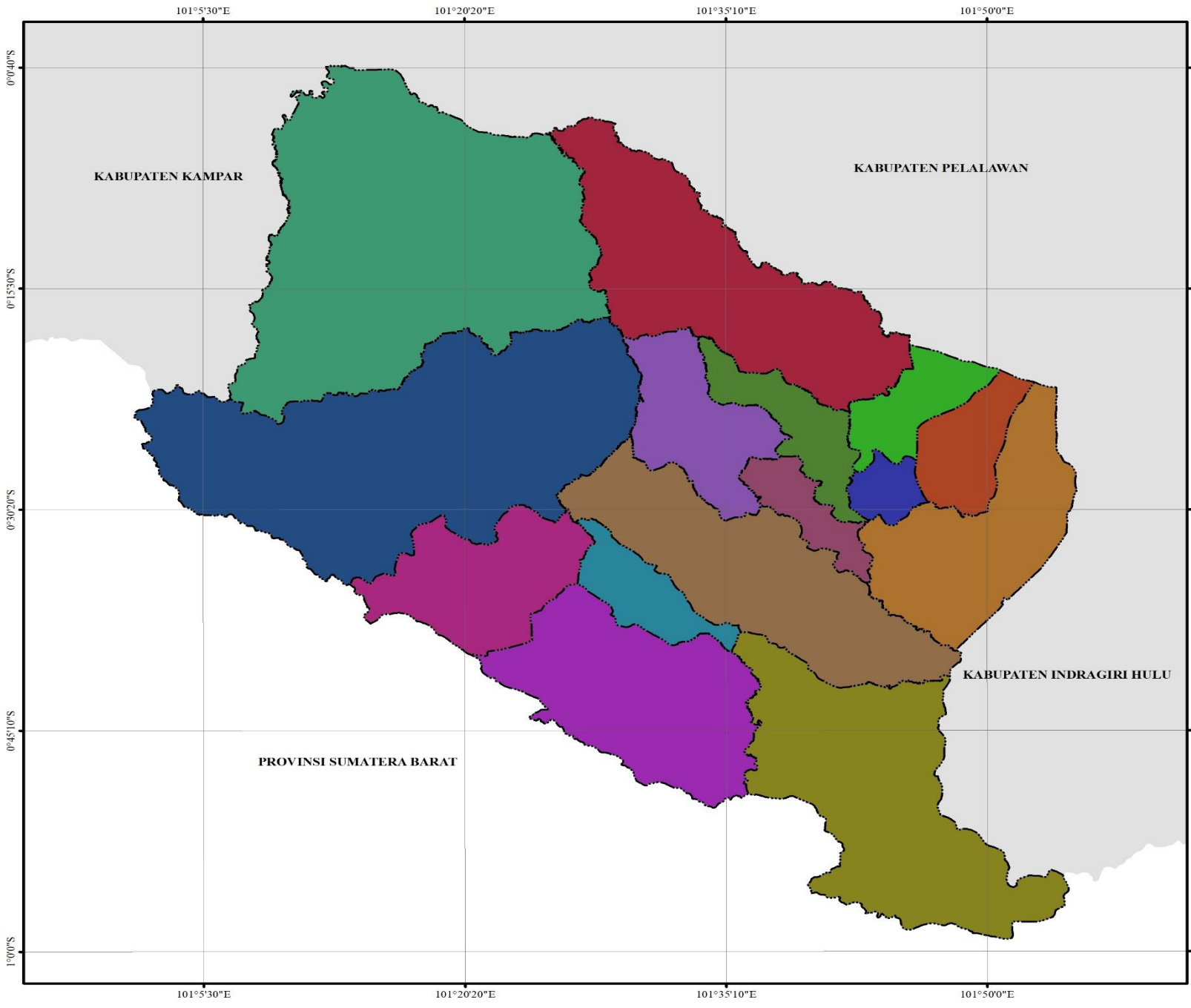
Pada tahun 2001 saat awal terbentuknya Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 6 kecamatan definitif dan 6 kecamatan pembantu, yang mencakup 10 kelurahan, 189 desa definitif dan satu desa persiapan. Berdasarkan Perda No.16 tahun 2002, maka pada tahun 2002 Kabupaten Kuantan Singingi menjadi 12 kecamatan definitif dengan 10 kelurahan dan 190 desa definitif. Pada Juli 2012, terjadi lagi pemekaran. Kabupaten Kuantan Singingi dimekarkan menjadi 15 kecamatan, dengan tambahan Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Kini, Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 kecamatan dengan 11 kelurahan dan 218 desa.

Secara astronomis, Kabupaten Kuantan Singingi terletak antara  $0^{\circ}00' - 1^{\circ}00'$  Lintang Selatan dan  $101^{\circ}02' - 101^{\circ}55'$  Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu.



Berikut gambaran umum ruang lingkup wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi.





  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

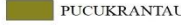










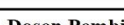
**GAMBAR 4.10 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

  
**SKALA 1:588.981**  


Sistem Grid : ..... Grid Geografi  
 Datum Horizontal : ..... WGS 84



**LEGENDA**

<b>ADMINISTRASI</b>	
--- Batas Kabupaten	 PUCUKRANTAU
- - - Batas Kecamatan	 SENTAJORAYA
	 SINGINGI
	 SINGINGI HILIR
<b>KECAMATAN</b>	
 BENAI	
 CERENTI	
 GUNUNGTUAR	
 HILUKUANTAN	
 INUMAN	
 KUANTAN HILIR	
 KUANTAN HILIR SEBERANG	
 KUANTAN TENGAH	
 KUANTANMUDIK	
 LOGASTANAHDARAT	
 PANGEAN	

<b>Dosen Pembimbing :</b> Puji Astuti, ST, MT	<b>Nama :</b> Melisa Pebriani <b>NPM :</b> 173410870
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

**SUMBER**

1. SHP RBI (Rupa Bumi Indonesia) Tahun 2017
2. Citra Satellite

#### 4.10.2 Kondisi Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 (SP 2020) tercatat sebanyak 334.943 jiwa yang terdiri dari 170.406 jiwa laki-laki dan 164.537 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Kuantan Tengah yaitu 51.894 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Hulu Kuantan yaitu 9.252 jiwa.

Dilihat dari komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 164.537 jiwa dan perempuan berjumlah 164.537 jiwa. Rasio jenis kelamin 103,6. Rasio jenis kelamin yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau sebesar 108,0 dan rasio jenis kelamin yang paling rendah terdapat di Kecamatan Hulu Kuantan sebesar 99,8. Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dapat kita lihat pada Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

**Tabel 4. 10 Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020</b>
Kuantan Mudik	25.06
Hulu Kuantan	9.25
Gunung Toar	13.89
Pucuk Rantau	10.38
Singingi	34.15
Singingi Hilir	42.28
Kuantan Tengah	51.89
Sentajo Raya	30.57
Benai	16.41
Kuantan Hilir	14.18
Pangean	20.02
Logas Tanah Darat	23.34
Kuantan Hilir Seberang	11.36

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020</b>
Ceenti	15.56
Inuman	16.62
Total	334.94

*Sumber: BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2021*

#### **4.10.3 Kondisi Perekonomian**

Nilai PDRB Kabupaten Kuantan Singingi atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 mencapai 33,75 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,88 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 31,87 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 23,61 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 23,84 triliun rupiah pada tahun 2020. Hasil ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Kuantan Singingi mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 0,98%, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi didominasi oleh 5 usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; Pertambangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kuantan Singingi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten

Kuantan Singingi pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 50,73% (angka ini meningkat dari 47,97 dari tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 27,68% (turun dari 28,00% di tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,91% (turun dari 8,63% di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,98 (turun dari 4,87% di tahun 2019) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,74% (trn dari 4,24% di tahun 2019).

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Kuantan Singingi atas dasar harga konstan 2010, mencapai 23,84 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 23,61 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,98%, namun melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,58%. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, 9 kategori mengalami pertumbuhan yang positif dan 8 kategori mengalami pertumbuhan negatif.

## **4.11 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pelalawan**

### **4.11.1 Wilayah Administrasi dan Iklim**

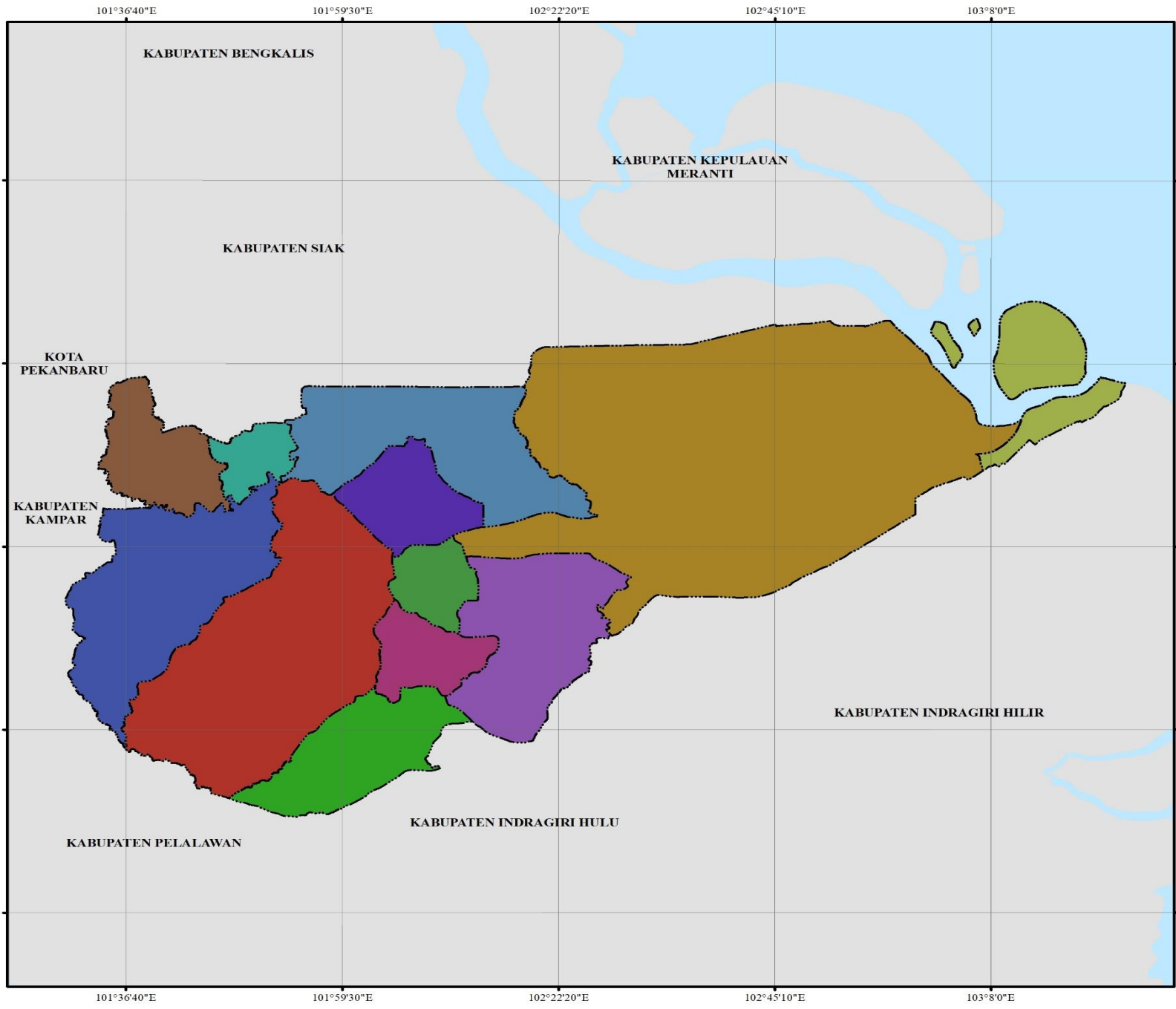
Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan kurang lebih 13.067,29 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 4.113,03 Km<sup>2</sup> (31,48%) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas Kabupaten Pelalawan. Jarak lurus ibukota kecamatan yang terdekat dengan ibukota kabupaten adalah ibukota Kecamatan Pangkalan Kerinci lebih kurang 0 km. Sedangkan Jarak yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar (Teluk Dalam) sejauh 159,2 km.

Pada tahun 2020, kecamatan di Kabupaten Pelalawan berjumlah 12 kecamatan, dengan 14 kelurahan dan 104 desa. Jumlah RT dan RW di Kabupaten Pelalawan berjumlah sebanyak 2.005 dan 681. Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur Pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Lintang Selatan dan antara 100,42' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

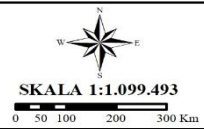
Berikut gambaran umum ruang lingkup wilayah administrasi Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada gambar 4.11 Peta Administrasi Kabupaten Pelalawan





  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**



**GAMBAR 4.11 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN PELALAWAN**

  
**SKALA 1:1.099.493**  
 0 50 100 200 300 Km










Sistem Grid : ..... Grid Geografi  
 Datum Horizontal : ..... WGS 84



**LEGENDA**

<b>ADMINISTRASI</b>	 TELUKMERANTI
----- Batas Kabupaten	 UKUI
----- Batas Kecamatan	

**KECAMATAN**

-  BANDARPETALANGAN
-  BANDARSEIKUANG
-  BUNUT
-  KERUMUTAN
-  KUALAKAMPAR
-  LANGGAM
-  PANGKALANKERINCI
-  PANGKALANKURAS
-  PANGKALANLESUNG
-  PELALAWAN

<b>Dosen Pembimbing :</b> Puji Astuti, ST, MT	<b>Nama :</b> Melisa Pebriani <b>NPM :</b> 173410870
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

**SUMBER**

1. SHP RBI (Rupa Bumi Indonesia) Tahun 2017
2. Citra Satelite

#### 4.11.2 Kondisi Kependudukan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) September, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan tahun 2020 adalah 390.046 jiwa. Terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 201.685 jiwa dan perempuan 188.361 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan dengan penduduk terbanyak ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu 94.585 jiwa dan terendah di Kecamatan Bunut 15.465 jiwa. Sex Ratio Kabupaten Pelalawan di tahun 2020 adalah 107. Ini menandakan jumlah penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pelalawan 30 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci 435 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Teluk Meranti, 4 jiwa per km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pelalawan untuk lebih jelas lagi dapat kita lihat pada Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

**Tabel 4. 11 Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2020**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2020</b>
Langgam	33.00
Pangkalan Kerinci	94.59
Bandar Sei Kijang	21.48
Pangkalan Kuras	61.12
Ukui	40.30
Pangkalan Lesung	29.83
Bunut	15.47
Pelalawan	19.12
Bandar Petalangan	16.45
Kuala Kampar	17.84
Kerumutan	24.42



Kecamatan	Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2020
Teluk Meranti	16.44
Total	390.05

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2021

#### 4.11.3 Kondisi Perekonomian

Nilai PDRB Kabupaten Pelalawan atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 mencapai 50,64 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,92 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 47,72 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 34,34 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 35,11 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020, Kabupaten Pelalawan mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 2,24%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Pelalawan didominasi oleh 2 (dua) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan kedua kategori terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pelalawan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pelalawan pada tahun 2020 dihasilkan oleh Kategori Industri Pengolahan, yaitu mencapai 48,65%, kemudian diikuti Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 40,62%. Kedua kategori ini menyumbang PDRB Kabupaten Pelalawan hingga 89,27% di tahun 2020.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Pelalawan meningkat pada tahun 2020. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh kategori yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Pelalawan atas dasar harga konstan 2020, mencapai 35,11 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 34,34 triliun rupiah pada tahun 2019, hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,24%, menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 3,87%. Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 menurun dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Pelalawan pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 98,60 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 99,87 juta rupiah.

#### **4.12 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Rokan Hulu**

##### **4.12.1 Wilayah Administrasi dan Iklim**

Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.588,13 Km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 16 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bonai Darussalam yang menempati 14,75% dari luas kabupaten. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Ujung Batu yang menempati 1,31% dari luas kabupaten. Rokan Hulu memiliki rata-rata tinggi wilayah 72 mdpl. Penelitian Kecamatan IV Koto merupakan kecamatan dengan rata-rata tinggi wilayah

terbesar (11 mdpl), sedangkan kecamatan dengan rata-rata tinggi wilayah terendah adalah Kecamatan Bonai Darussalam (21 mdpl).

Struktur pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana layaknya struktur pemerintahan kabupaten lain di Indonesia. Rokan Hulu memiliki 16 kecamatan yang terdiri dari 139 desa dan 6 kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Rambah dan Kecamatan Rambah Samo (14 desa/kelurahan). Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam (3 desa).

Salah satu implikasi dari adanya otonomi daerah adalah kabupaten memiliki wewenang yang jauh lebih besar dalam mengelola daerahnya baik itu dari sisi pelaksanaan pembangunan maupun pembiayaannya. Atau dengan kata lain, kabupaten memiliki hak yang lebih besar menentukan arah/kebijakan pembangunan di satu sisi, sementara itu sisi lain daerah juga memiliki kewajiban yang lebih besar dalam membiayai pembangunannya tersebut. Sumber utama pendapatan daerah masih didominasi dari dana Perimbangan yaitu sebesar 73,00% di tahun 2019. Sedangkan belanja terbesar didominasi belanja tidak langsung sebesar 54,98% di tahun 2019.

Kondisi iklim di Rokan Hulu ditunjukkan melalui data suhu udara, kelembapan, kecepatan angin dan curah hujan. Pada tahun 2020, rata-rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan Maret ( $28,70^{\circ}\text{C}$ ), sedangkan terendah pada bulan Januari, Februari, dan Desember ( $26,60^{\circ}\text{C}$ ). Kelembapan udara

tertinggi di bulan Mei (98,70%) dan terendah di bulan Agustus (94,20%). Kecepatan angin tertinggi di bulan Maret (4,98 m/det) dan terendah di bulan Februari (3,07 m/det). Untuk curah hujan, tertinggi di bulan November (3.411 mm) terendah di bulan Oktober (1.012 mm). Jumlah hari hujan tertinggi di bulan November (179 hari) dan terendah di bulan Agustus (76 hari). Jumlah curah dan hari hujan diakumulasikan dari setiap kecamatan.

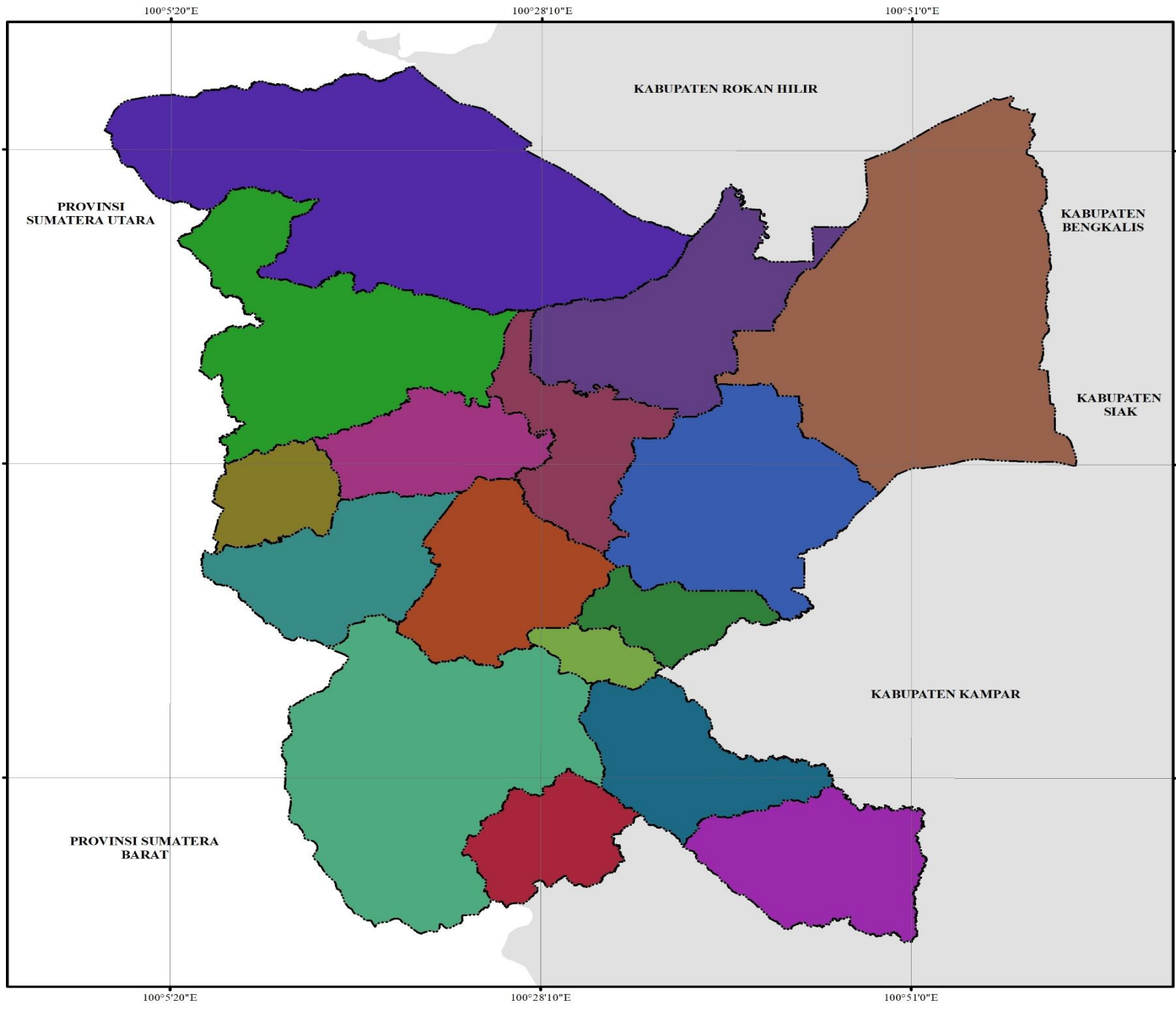
Jarak tempuh ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten (Pasar Pengaraian) dan Provinsi (pekanbaru) cukup bervariasi. Sontang merupakan ibukota Kecamatan Bonai Darussalam yang mempunyai jarak tempuh terjauh baik ke Pasar Pengaraian (111 Km) maupun ke Kota Pekanbaru (303 Km). Secara astronomis, Rokan Hulu terletak pada  $0^{\circ}25'20''$  –  $10^{\circ}25'41''$  Lintang Utara dan  $100^{\circ}02'56''$  –  $100^{\circ}56'59''$  Bujur Timur.

Secara geografis, Rokan Hulu berbatasan dengan:

- a. Sebelah Tenggara pada peta Provinsi Riau.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Sumatera Utara.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kampar.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Provinsi Sumatera Barat.
- e. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

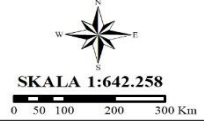
Berikut gambaran umum ruang lingkup wilayah administrasi Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada gambar 4.12 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hulu



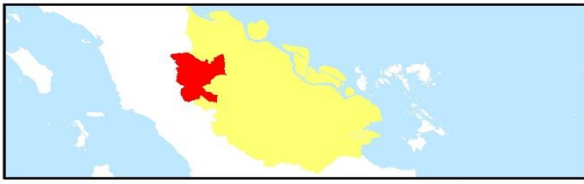


  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**GAMBAR 4.12 PETA ADMINISTRASI KABUPATEN ROKAN HULU**

  
**SKALA 1:642.258**  
 0 50 100 200 300 Km

Sistem Grid : ..... Grid Geografi  
 Datum Horizontal : ..... WGS 84



**LEGENDA**

**ADMINISTRASI**

----- Batas Kabupaten	<span style="color: green;">■</span> TAMBUSAI
----- Batas Kecamatan	<span style="color: purple;">■</span> TAMBUSAI UTARA
	<span style="color: blue;">■</span> TANDUN
	<span style="color: lightgreen;">■</span> UJUNG BATU

**KECAMATAN**

<span style="color: brown;">■</span> BANGUN PURBA
<span style="color: tan;">■</span> BONAI DARUSSALAM
<span style="color: purple;">■</span> KABUN
<span style="color: darkpurple;">■</span> KEPENUHAN
<span style="color: maroon;">■</span> KEPENUHAN HULU
<span style="color: blue;">■</span> KUNTO DARUSSALAM
<span style="color: green;">■</span> PAGARAN TAPAH DARUSSALAM
<span style="color: red;">■</span> PENDALIAN IV KOTO
<span style="color: teal;">■</span> RAMBAH
<span style="color: lightgreen;">■</span> RAMBAH HILIR
<span style="color: orange;">■</span> RAMBAH SAMO
<span style="color: lightgreen;">■</span> ROKAN IV KOTO

<b>Dosen Pembimbing :</b> Puji Astuti, ST, MT	<b>Nama :</b> Melisa Pebriani <b>NPM :</b> 173410870
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

**SUMBER**

- SHP RBI (Rupa Bumi Indonesia) Tahun 2017
- Citra Satelite

#### 4.12.2 Kondisi Kependudukan

Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) merupakan sensus ketujuh sejak Indonesia merdeka. Berbeda dengan enam sensus penduduk sebelumnya, pada SP 2020 pencacahan lapangan menggunakan data dasar dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 berdasarkan hasil SP 2020 sebesar 561.385 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,87%. Persentase penduduk terbanyak tercatat di Kecamatan Tambusai Utara (15,22%), sedangkan persentase penduduk terkecil tercatat di Kecamatan Pagaran Traph Darussala, (2,10%). Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Bonai Darussalam (23 orang / km<sup>2</sup>).

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) pada tahun 2020 sebanyak 483.657 jiwa. Penduduk usia kerja dan angkatan kerja merupakan pembentuk indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 sebesar 65,26%. Kemudian dari total angkatan kerja sebanyak 4,42% merupakan pengangguran, indikator ini dikenal dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sektor Pertanian merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 54,19%. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja pada tahun 2020 sebanyak 807 orang. Pencari Kerja terbanyak adalah taman Sekolah Menengah Atas (72,74%) diikuti oleh Sarjana (18,22%). Banyaknya penduduk yang ada antar

kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada Tabel 4.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020

**Tabel 4. 12 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020</b>
Rokan IV Koto	23.01
Pendalihan IV Koto	12.77
Tandun	30.77
Kabun	26.28
Ujung Batu	49.25
Rambah Samo	33.94
Rambah	51.05
Rambah Hilir	40.44
Bangun Purba	18.89
Tambusai	62.02
Tambusai Utara	85.47
Kepenuhan	26.62
Kepenuhan Hulu	18.12
Kunto Darussalam	44.88
Pagaran Tapah Darussalam	11.81
Bomai Darussalam	26.07
Total	561.39

*Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hulu, 2021*

#### **4.12.3 Kondisi Perekonomian**

Nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 mencapai 36.083,71 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.201,47 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 33.882,24 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 25.101,65 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 25.479,88 miliar rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Rokan Hulu mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 1,51%.



Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hulu didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertambangan dan Penggalian dan Konstruksi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 54,22% (angka ini meningkat dari 52,26% di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 25,26% (naik dari 24,70% di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,35% (turun dari 5,64% di tahun 2016). Berikutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,28% (turun dari 5,69% di tahun 2016) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 3,55% (turun dari 3,57% di tahun 2016).

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2010 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga konstan 2010, mencapai 25.479,88 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari 25.101,65 miliar rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,51%, mengalami

perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,92%.

#### **4.13 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Rokan Hilir**

##### **4.13.1 Wilayah Administrasi dan Iklim**

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor.53 Tahun 1999 bersama dengan pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Secara administrasi Kabupaten Rokan Hilir Dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh seorang Wakil Bupati.

Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 18 kecamatan yaitu: Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Pujud, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Rantau Kopar, Tanjung Medan, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Balai Jaya, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Kubu, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Bangko, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan bangko Pusako yang masing-masing dikepalai oleh seorang camat.

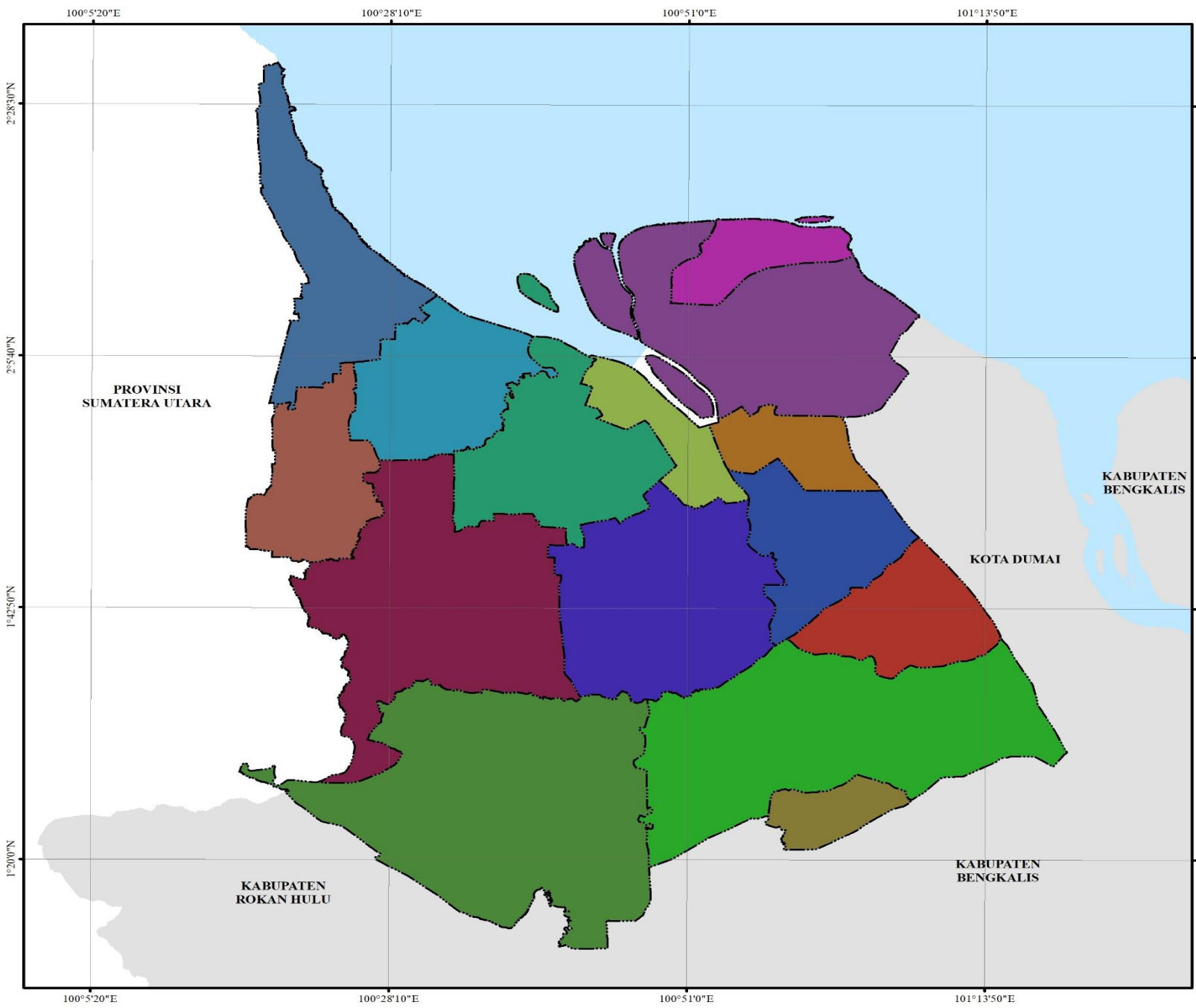
Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999. Wilayah

Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian Pesisir Timur Pulau Sumatera antara 1014' – 2030' Lintang Utara dan 100016' – 101021' Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 Km<sup>2</sup>, dimana Kecamatan Tanah Putih merupakan kecamatan terluas yaitu 1.915,23 Km<sup>2</sup> dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 Km<sup>2</sup>. Dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdapat 16 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Diantara sungai-sungai tersebut yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Rokan dengan panjang 35 km.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Berikut gambaran umum ruang lingkup wilayah administrasi Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada gambar 4.13 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS TEKNIK  
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**GAMBAR 4.13 PETA ADMINISTRASI  
KABUPATEN ROKAN HILIR**



**SKALA 1:800.000**  
0 50 100 200 300 Km

Sistem Grid : ..... Grid Geografi  
Datum Horizontal : ..... WGS 84



**LEGENDA**

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>ADMINISTRASI</b> | RIMBA MELINTANG             |
| Batas Kabupaten     | SIMPANG KANAN               |
| Batas Kecamatan     | SINABOI                     |
| <b>KECAMATAN</b>    | TANAH PUTIH                 |
| BAGAN SINEMBAH      | TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN |
| BANGKO              |                             |
| BANGKO PUSAKO       |                             |
| BATU HAMPAR         |                             |
| KUBU                |                             |
| KUBU BABUSALAM      |                             |
| PASIR LIMAU KAPAS   |                             |
| PEKAITAN            |                             |
| PUJUD               |                             |
| RANTAU KOPAR        |                             |

**Dosen Pembimbing :**  
Puji Astuti, ST, MT

**Nama :** Melisa Pebriani  
**NPM :** 173410870

**SUMBER**

- SIIP RBI (Rupa Bumi Indonesia) Tahun 2017
- Citra Satellite

#### 4.13.2 Kondisi Kependudukan

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 714.497 jiwa yang terdiri atas 366.419 jiwa penduduk laki-laki dan 348.078 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 2,48%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,27.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 mencapai 80 jiwa/km<sup>2</sup> dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bangko dengan kepadatan sebesar 185 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Rantau Kopar sebesar 31 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada Tabel 4.13 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020

**Tabel 4. 13 Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020</b>
Tanah Putih	69.150
Pujud	33.954
Tanah Putih Tanjung Melawan	14.628
Rantau Kopar	6.592
Tanjung Medan	36.282
Bagan Sinembah	69.825
Simpang Kanan	24.821
Bagan Sinembah Raya	20.150
Balai Jaya	53.404
Kubu	25.616
Pasir Limbau Kapas	37.258

Kecamatan	Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020
Kubu Babussalam	23.836
Bangko	78.742
Sinaboi	18.373
Batu Hampar	9.448
Pekaitan	15.858
Rimba Melintang	37.624
Bangko Pusako	61.600
Total	637.161

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2021

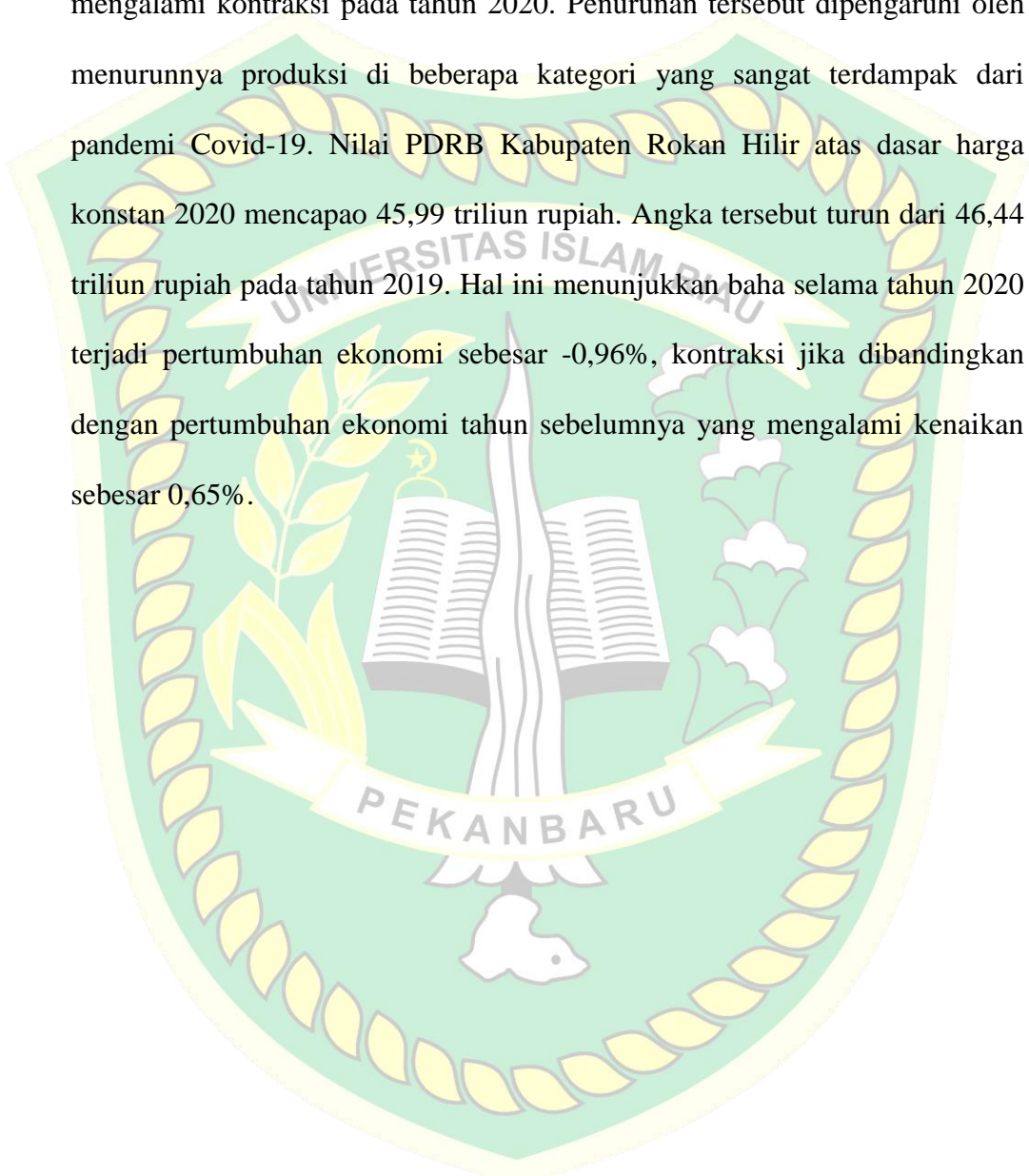
#### 4.13.3 Kondisi Perekonomian

Nilai PDRB Kabupaten Rokan Hilir atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2020 mencapai 67,95 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 6,64 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 74,59 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kontraksi, dari 46,44 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 45,99 triliun rupiah pada tahun 2020, Kabupaten Rokan Hilir mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar -0,96% (dengan migas), kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan.

Selama lima tahun terakhir perekonomian Kabupaten Rokan Hilir didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha; Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hilir. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 dihasilkan oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 38,48%.

Selanjutnya kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 31,84%, disusul oleh kategori Industri Pengolahan sebesar 21,54%.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Rokan Hilir mengalami kontraksi pada tahun 2020. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di beberapa kategori yang sangat terdampak dari pandemi Covid-19. Nilai PDRB Kabupaten Rokan Hilir atas dasar harga konstan 2020 mencapai 45,99 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 46,44 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar -0,96%, kontraksi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mengalami kenaikan sebesar 0,65%.



## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identifikasi Pertumbuhan Ekonomi yang Terjadi di Provinsi Riau

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi sebagai penghasil migas terbesar, perkembangan ekonomi dengan memasukkan unsur migas pada PDRB Provinsi Riau menjadi sangat perlu untuk dipaparkan. Kemudian agar semakin lengkap akan dibahas juga gambaran pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Riau, melalui pendekatan produksi akan dapat menghasilkan informasi tentang pertumbuhan ekonomi.

Identifikasi, mengenai pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau periode tahun 2011-2020 ini menggunakan metode deskriptif. Berisi penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi yang di ambil dari data laju pertumbuhan ekonomi dengan migas yang terjadi di Provinsi Riau. Alasan peneliti mengambil data penelitian dengan migas dibandingkan tanpa migas, dikarenakan Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang kaya akan migas nya. Sehingga, data penelitian dengan migas akan lebih akurat dibandingkan data tanpa migas, sekaligus melihat perbandingan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tanpa migas dengan kabupaten/kota dengan migas.

Setelah unsur migas diperhitungkan kedalam PDRB kabupaten/kota se-Provinsi Riau maka tampak keragaman pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut, khususnya kabupaten/kota yang memiliki sumber

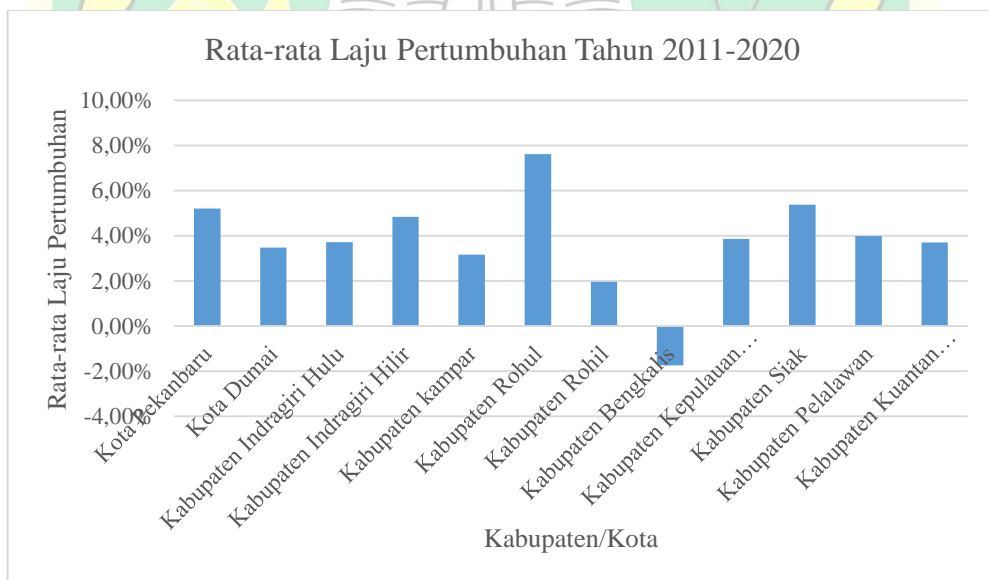


daya migas. Keragaman pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut timbul karena cukup berfluktuasinya produksi dan nilai tambah dari hasil migas tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi dengan migas kabupaten/kota di Provinsi Riau akan sangat berbeda dibandingkan dengan ulasan tanpa memasukkan unsur migas. Perbedaan terletak pada kabupaten/kota yang memiliki produksi migas atau yang melakukan pengolahan migas, seperti yang terjadi pada Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai.

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Riau atas dasar harga konstan tahun 2011 bernilai sebesar 5,59% meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 6,54%. Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi menurun dibandingkan tahun 2012 menjadi 4,69%. Namun pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 6,27%. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,11%. Namun, pada tahun 2016 kembali lagi terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,95%. Tahun 2017 kembali mengalami penurunan namun tidak cukup tinggi sebesar 3,40%. Kembali terulang, pada tahun 2018 terjadi lagi penurunan yang cukup tinggi sebesar 2,94%. Kemudian pada tahun 2020, mengalami kembali terjadi peningkatan namun tidak signifikan sebesar 3,00%. Dan, terakhir yang paling

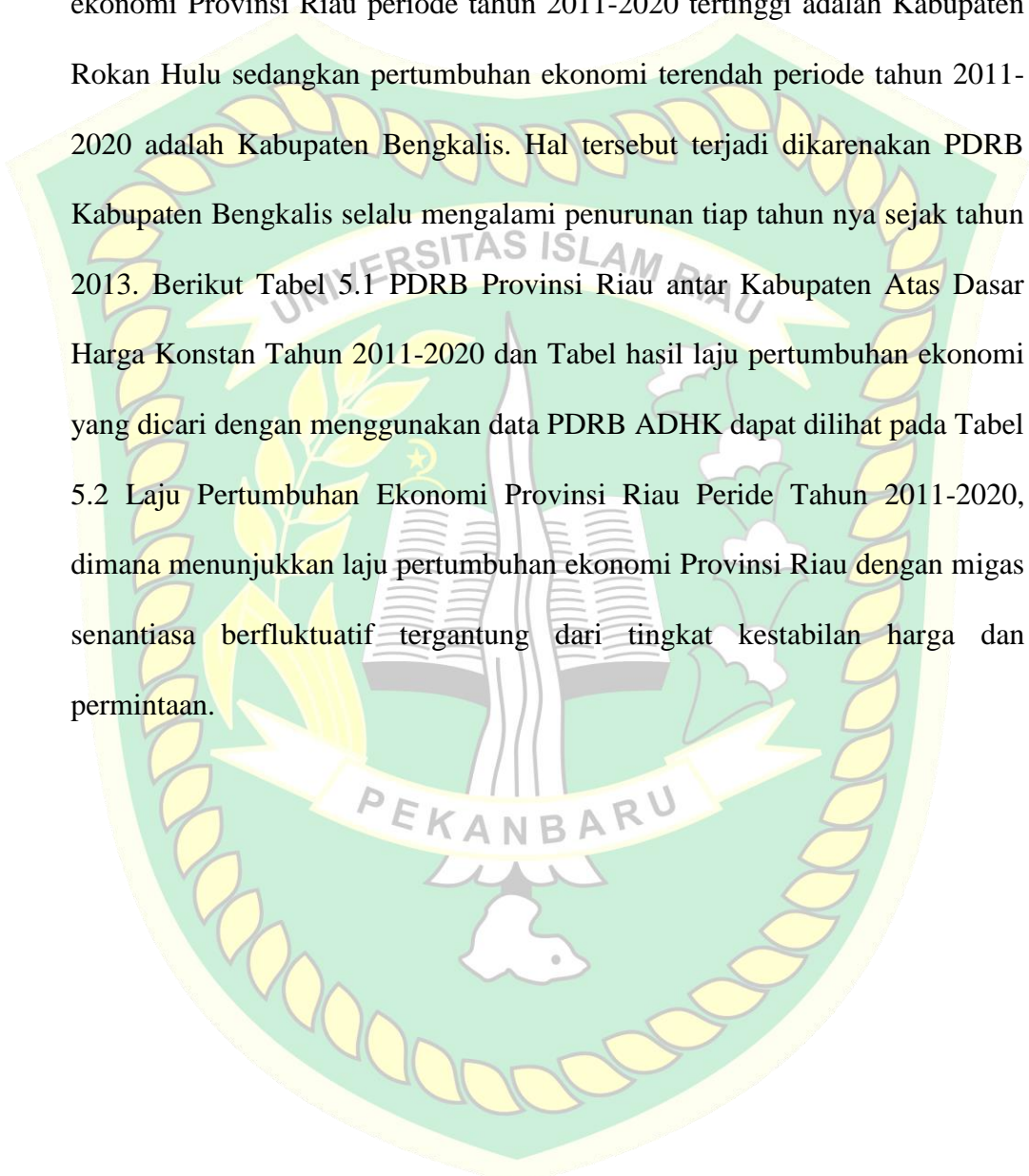
terparah serta terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya adalah tahun 2020 dimana laju pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan dengan nilai sebesar 0,27%. Penyebab utama terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 ini adalah adanya pandemi COVID-19. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi pada sebagian besar lapangan usaha.

Selama periode tahun 2011-2020 laju pertumbuhan ekonomi cenderung melemah dan berfluktuasi. Pada kurun waktu tersebut harga minyak dunia yang berfluktuasi serta tingkat produksi migas yang mengalami banyak kendala baik bersifat teknis maupun non teknis mempengaruhi pergerakan ekonomi Provinsi Riau. Selain itu, kondisi beberapa sumur minyak yang sudah mulai menua juga mempengaruhi produksi migas.



**Gambar 5. 1 Rata-rata Laju Pertumbuhan Provinsi Riau Tahun 2011- 2020**

Gambar 5.1 merupakan hasil dari rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau antar kabupaten/kota tahun 2011-2020. Rata-rata pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota Provinsi Riau sangat bervariasi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau periode tahun 2011-2020 tertinggi adalah Kabupaten Rokan Hulu sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah periode tahun 2011-2020 adalah Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut terjadi dikarenakan PDRB Kabupaten Bengkalis selalu mengalami penurunan tiap tahunnya sejak tahun 2013. Berikut Tabel 5.1 PDRB Provinsi Riau antar Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2020 dan Tabel hasil laju pertumbuhan ekonomi yang dicari dengan menggunakan data PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel 5.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Periode Tahun 2011-2020, dimana menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan migas senantiasa berfluktuatif tergantung dari tingkat kestabilan harga dan permintaan.



**Tabel 5. 1 PDRB Provinsi Riau antar Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2020**

No	Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Pekanbaru	44.845.770,0 0	48.351.737	51.053.167	54.570.280	57.557.348	60.891.070	64.619.259	68.104.593	72.181.895	69.016.920
2	Kota Dumai	18.242.262	18.909.846	19.605.668	20.204.796	20.054.169	21.391,57	22.344,83	23.538,47	24.855,82	24.595,60
3	Kabupaten Indragiri Hulu	21.874.124	23.708.459	25.180.130	26.572.896	25.804.982	26.742.942	27.807.309	28.778.036	29.866.449	29.830.890
4	Kabupaten Indragiri Hilir	30.066.529	32.444.529	34.769.508	37.155.800	37.922.057	39.697.572	41.491.371	42.988.737	44.775.564	44.927.611
5	Kabupaten Kampar	39.378.306	41.668.547	41.297.583	45.816.466	46.304.582	47.610.214	49.022.012	49.958.841	51.888.864	51.423.899
6	Kabupaten Rohul	17.026.716,0 0	19.966.871	21.645.415,0 0	25.355.416,0 0	26.907.158,0 0	29.145.614,0 0	30.992.304,0 0	32.290.185,0 0	33.882.238,0 0	36.083.707,0 0
7	Kabupaten Rohil	42.757.232,0 0	45.953.747,0 0	50.200.092,0 0	54.545.552,0 0	60.692.968,0 0	45.555.997	46.265.171	46.136.678	46.436.792	45.992.508
8	Kabupaten Bengkalis	89.999.289,0 0	91.397.010,0 0	88.411.085,0 0	85.003.796,0 0	82.676.674,0 0	80.577.991	79.189.782	77.848.257	73.637.699	73.856.113
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	9.287.925	9.909.809	10.329.760	10.788.877	11.096.269	11.451.080,0 0	11.827.312,0 0	12.304.367,0 0	12.629.433,0 0	12.683.872,0 0
10	Kabupaten Siak	33.530.068	34.546.110	36.254.780	37.806.325	38.786.333	51.577.220	52.029.653	52.595.328	53.366.526	53.313.850
11	Kabupaten Pelalawan	25.161.103	25.920.639	27.360.639	29.058.309	29.774.302	30.654.217	31.899.178	33.056.062	34.336.470	35.107.147
12	Kabupaten Kuantan Singingi	17.307	18.333,00	19.336,00	20.331	19.896,00	20.669,00	21.574,00	22.579,00	23.612,00	23.844
	<b>Jumlah</b>	372.186.631, 01	392.795.637, 00	406.127.163, 00	426.898.844, 15	437.596.738, 00	423.945.977, 57	435.187.269, 83	444.107.201, 47	453.050.397, 82	452.284.957, 04

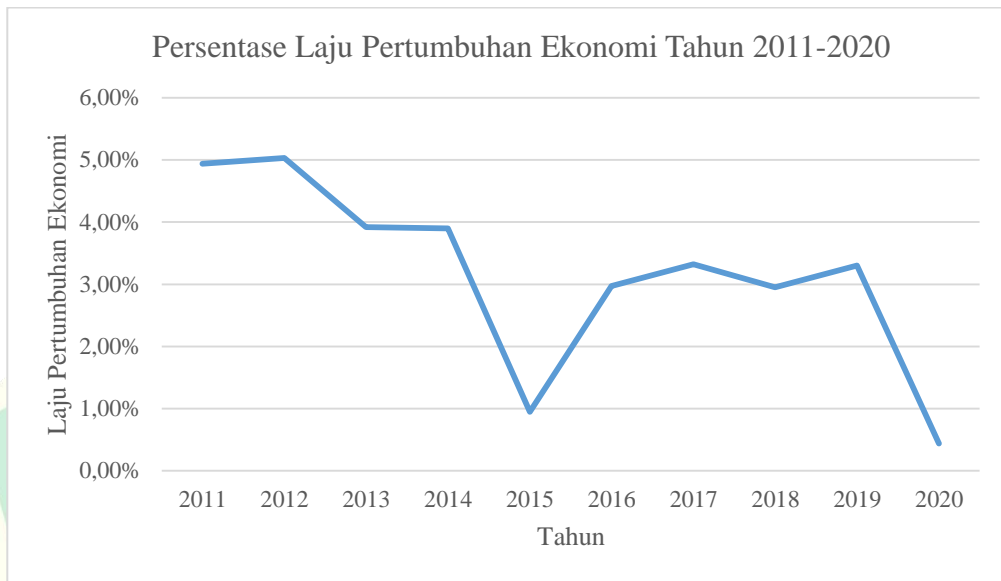
Sumber: PDRB Provinsi Riau Tahun 2011-2020

**Tabel 5. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Periode 2011-2020**

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Kota Pekanbaru	7,53%	7,81%	5,58%	6,88%	5,58%	5,68%	6,12%	5,39%	5,98%	-4,38%	5,73%
Kota Dumai	4,26%	3,65%	3,67%	3,00%	2,03%	4,13%	4,45%	5,34%	5,59%	-1,04%	3,51%
Kabupaten Indragiri Hulu	5,25%	8,38%	6,20%	5,53%	-2,94%	3,69%	3,98%	3,49%	3,78%	-0,12%	3,72%
Kabupaten Indragiri Hilir	7,15%	7,90%	7,16%	6,86%	2,07%	4,68%	4,51%	3,60%	4,15%	0,34%	4,84%
Kabupaten Kampar	4,11%	5,81%	6,31%	3,43%	1,09%	2,81%	2,96%	1,91%	3,86%	-0,90%	3,13%
Kabupaten Rohul	6,88%	6,12%	5,99%	6,50%	1,98%	4,77%	5,38%	4,18%	4,92%	1,51%	4,82%
Kabupaten Rohil	-0,01%	3,65%	2,38%	4,81%	0,52%	1,97%	1,55%	-0,27%	0,65%	-0,96%	1,43%
Kabupaten Bengkalis	7,85%	-0,65%	-3,26%	-3,85%	-2,73%	-2,53%	-1,72%	-1,69%	-1,89%	-3,30%	-1,37%

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Kabupaten Kepulauan Meranti	6,87%	6,69%	4,24%	4,44%	2,84%	3,20%	3,28%	4,03%	2,64%	0,43%	3,86%
Kabupaten Siak	-0,52%	2,07%	-2,32%	-1,80%	0,64%	0,39%	0,87%	1,08%	1,46%	-0,10%	0,24%
Kabupaten Pelalawan	5,73%	3,01%	5,55%	6,20%	2,46%	2,95%	4,06%	3,62%	3,87%	2,24%	3,97%
Kabupaten Kuantan Singingi	4,17%	5,92%	5,47%	5,14%	-2,14%	3,88%	4,37%	4,65%	4,58%	0,98%	3,70%
Total	59,312	60,416	46,991	46,853	11,408	35,611	39,856	35,362	39,632	-5,306	3,88%

Sumber: Hasil Analisis, 2022



**Gambar 5.2 Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2011-2020**

Gambar 5.2 Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2011-2020 menyajikan pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan memasukkan unsur migas ke dalam perhitungan PDRB. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar 5.2 mengalami fluktuasi pada periode tahun 2011-2020. Ini disebabkan karna ketidakstabilan migas yang mana secara umum akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang memiliki kaitan dengan sumber daya migas yang besar dan yang tidak memiliki kaitan dengan sumber daya migas. Sebelum mengalami penurunan angka atau persentasae laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2011. Sebaliknya, pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau melemah disebabkan karena bencana kabut asap yang melanda Provinsi Riau. Dan, pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan sehingga kembali menurun cukup drastis

kembali pada tahun 2020 disebabkan oleh COVID-19 yang melanda dunia. Berikut penjelasan mengenai laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Riau tahun 2011-2020.

### 5.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota Tahun 2011

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2011 bernilai sebesar 4,94%. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru pada tahun 2010-2011 sebesar 7,53 persen. Pertumbuhan ini sudah mengacu pada penggunaan tahun dasar 2000. Dimana sektor terbesar diperoleh dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 13,59%. Selanjutnya sektor yang menjadi sektor unggulan adalah sektor Angkutan dan Komunikasi dan sektor Konstruksi dengan nilai masing-masing adalah 10,86% dan 10,08%. Diharapkan dengan berkembangnya sektor-sektor unggulan tersebut akan dapat memacu pertumbuhan sektor-sektor lainnya sehingga akan tercipta struktur ekonomi yang kokoh, seimbang dan dinamis.

**Tabel 5. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2011**

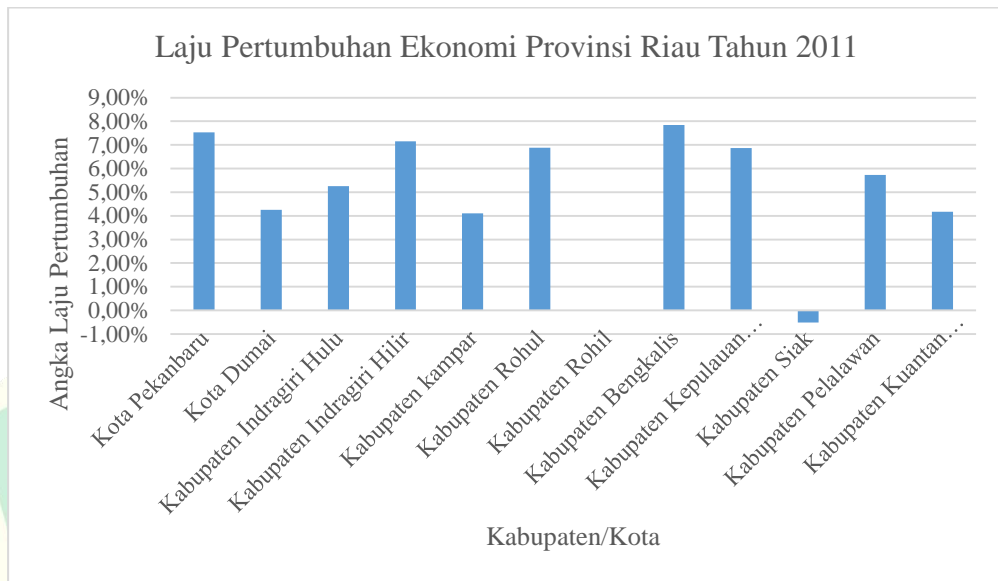
No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	Kota Pekanbaru	7,53%
2	Kota Dumai	4,26%
3	Kabupaten Indragiri Hulu	5,25%
4	Kabupaten Indragiri Hilir	7,15%
5	Kabupaten Kampar	4,11%
6	Kabupaten Rohul	6,88%
7	Kabupaten Rohil	-0,01%
8	Kabupaten Bengkalis	7,85%



No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	6,87%
10	Kabupaten Siak	-0,52%
11	Kabupaten Pelalawan	5,73%
12	Kabupaten Kuantan Singingi	4,17%
Rata-rata		4,94%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2011 menduduki peringkat pertama di wilayah Provinsi Riau sebesar 4,94 persen. Diikuti oleh Kota Pekanbaru 4,94 persen, Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 7,15 persen, Kabupaten Rokan Hulu sebesar 6,88 persen, Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 6,87 persen, Kabupaten Pelalawan sebesar 5,73 persen, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 5,25 persen, Kota Dumai sebesar 4,26 persen, Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 4,17 persen, Kabupaten Kampar sebesar 4,11 persen, Kabupaten Siak sebesar -0,52 persen dan terkecil adalah Kabupaten Rokan Hilir sebesar -0,01 persen. Lebih jelas lagi dapat dilihat pada gambar 5.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2011.



**Gambar 5. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2011**

### 5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2012

Sebagai salah satu provinsi penghasil migas terbesar, perkembangan ekonomi dengan memasukkan unsur migas pada PDRB Provinsi Riau. Setelah unsur migas diperhitungkan ke dalam PDRB kabupaten/kota se- Provinsi Riau maka tampak keragaman pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut timbul karena cukup berfluktuasi dari segi produksi dan nilai tambah dari hasil migas tersebut. Kabupaten/kota yang memiliki produksi migas atau yang melakukan pengolahan migas, seperti pada Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai.

Pada tahun 2011 dan tahun sebelumnya percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau cenderung menguat. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi mengalami ketidakstabilan migas sebesar 5,03 persen secara umum

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang memiliki kaitan dengan sumber daya migas yang besar. Pada tahun 2012, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi bernilai sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau antar kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 5.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2012

**Tabel 5. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2012**

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	Kota Pekanbaru	7,81%
2	Kota Dumai	3,65%
3	Kabupaten Indragiri Hulu	8,38%
4	Kabupaten Indragiri Hilir	7,90%
5	Kabupaten Kampar	5,81%
6	Kabupaten Rohul	6,12%
7	Kabupaten Rohil	3,65%
8	Kabupaten Bengkalis	-0,65%
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	6,69%
10	Kabupaten Siak	2,07%
11	Kabupaten Pelalawan	3,01%
12	Kabupaten Kuantan Singingi	5,92%
	Rata-rata	5,03%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Kabupaten Bengkalis laju pertumbuhannya terendah sebesar -0,65 persen, kemudian disusul oleh Kabupaten Siak sebesar 2,07 persen, Kabupaten Pelalawan sebesar 3,01 persen, Kota Dumai dan Rokan Hilir sebesar 3,65 persen. Dan, untuk kabupaten/kota yang memiliki produksi migas dengan laju pertumbuhan tinggi ada pada Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 8,38 persen, Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 6,69 persen,

Kabupaten Rokan Hulu sebesar 6,12 persen, Kabupaten Kampar sebesar 5,81 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tertinggi disumbangkan oleh Kabupaten Indragiri Hilir 7,90 persen, Kota Pekanbaru sebesar 7,81 persen. dan Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 5,92 persen. Untuk melihat lebih jelas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 5.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2012.



**Gambar 5. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2012**

### 5.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota Tahun 2013

Selama tahun 2011 – 2013 percepatan pertumbuhan ekonomi cenderung melemah seperti yang terlihat dari pada tabel 5.1. Pada waktu tersebut harga minyak dunia yang mengalami fluktuasi serta tingkat produksi migas yang mengalami banyak kendala baik yang bersifat teknis maupun non teknis mempengaruhi pergerakan perekonomian Provinsi Riau. Melemahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya di

akibatkan oleh ketidakstabilan migas pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau sebesar 3,92 persen. Hal ini tentu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Berikut adalah Tabel 5.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2013.

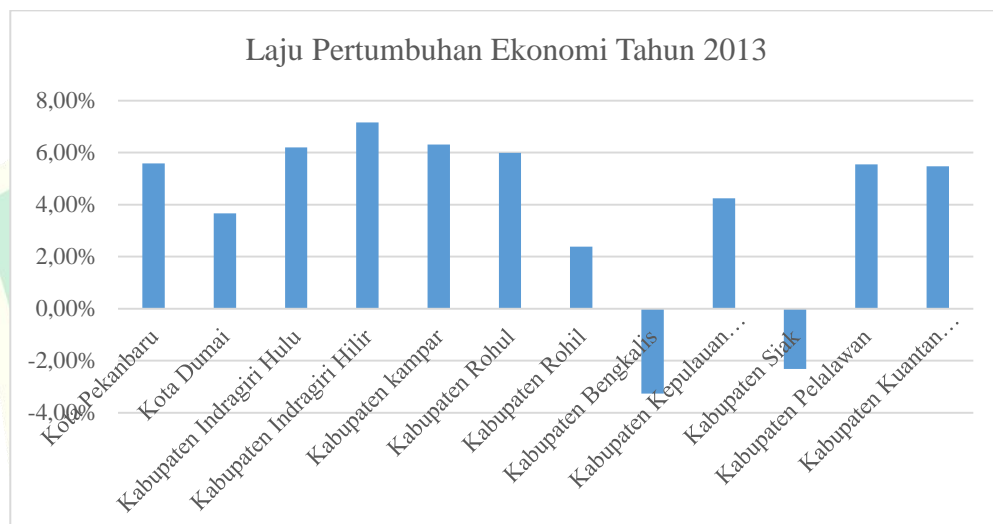
**Tabel 5. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2013**

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	Kota Pekanbaru	5,58%
2	Kota Dumai	3,67%
3	Kabupaten Indragiri Hulu	6,20%
4	Kabupaten Indragiri Hilir	7,16%
5	Kabupaten Kampar	6,31%
6	Kabupaten Rohul	5,99%
7	Kabupaten Rohil	2,38%
8	Kabupaten Bengkalis	-3,26%
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	4,24%
10	Kabupaten Siak	-2,32%
11	Kabupaten Pelalawan	5,55%
12	Kabupaten Kuantan Singingi	5,47%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pada tahun 2013, Kabupaten Bengkalis laju pertumbuhan ekonominya semakin menurun dengan angka sebesar -3,26 persen, disusul oleh Kabupaten Siak dengan nilai sebesar -2,32 persen, Kabupaten Rokan Hilir sebesar 2,38 persen, Kota Dumai sebesar 3,67 persen, Kabupaten Kepulauan Meranti 4,23 persen, Kabupaten Pelalawan sebesar 5,55 persen, Kota Pekanbaru sebesar 5,58 persen, Kabupaten Rokan Hulu sebesar 5,99 persen., Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 6,20 persen, Kabupaten Kampar sebesar 6,31 persen. Kabupaten dengan angka laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 adalah

Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau agar lebih jelas lagi dapat dilihat pada Gambar 5.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2013.



**Gambar 5. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2013**

#### **5.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2014**

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2014 masih mengalami kestabilan pada laju pertumbuhan ekonominya, hal ini dikarenakan angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 tidak mengalami perubahan jumlah yang drastis dibandingkan tahun sebelumnya.. Perekonomian Riau tahun 2014 tumbuh sebesar 3,90 persen. Provinsi Riau pada tahun 2014 berada di posisi ke-8 dari 9 provinsi di Pulau Sumatera. Untuk lebih jelas mengenai pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 5.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2014.

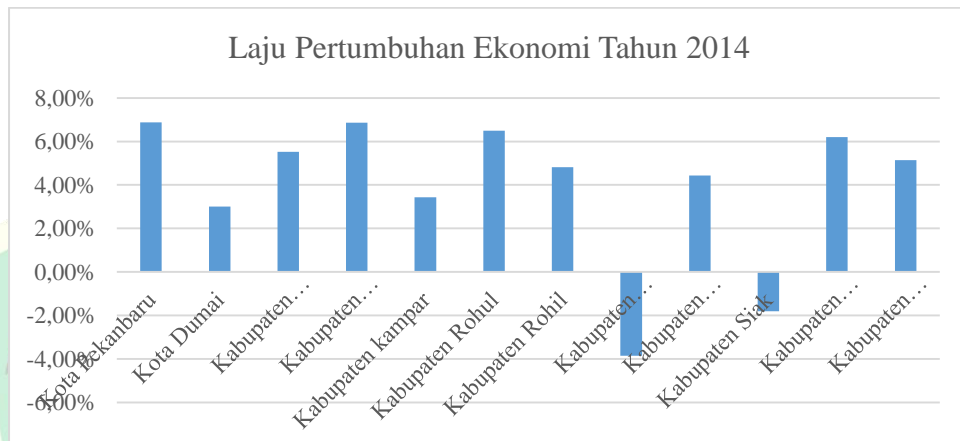
**Tabel 5. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2014**

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	Kota Pekanbaru	6,88%
2	Kota Dumai	3,00%
3	Kabupaten Indragiri Hulu	5,53%
4	Kabupaten Indragiri Hilir	6,86%
5	Kabupaten Kampar	3,43%
6	Kabupaten Rokan Hulu	6,50%
7	Kabupaten Rokan Hilir	4,81%
8	Kabupaten Bengkalis	-3,85%
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	4,44%
10	Kabupaten Siak	-1,80%
11	Kabupaten Pelalawan	6,20%
12	Kabupaten Kuantan Singingi	5,14%
Rata-rata		3,90%

*Sumber: Hasil Analisis, 2022*

Tabel 5.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2014 menjelaskan bahwa kabupaten/kota yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru dengan nilai 6,88 persen, diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hilir dengan nilai sebesar 6,86 persen, Kabupaten Rokan Hulu sebesar 6,50 persen, Kabupaten Pelalawan sebesar 6,20 persen, dan Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 5,53 persen, Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 5,14 persen, Kabupaten Rokan Hilir sebesar 4,81 persen, Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 4,44 persen, Kabupaten Kampar sebesar 3,43 persen Kota Dumai sebesar 3,00 persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi provinsi riau pada tahun 2014 terkecil

adalah Kabupaten Bengkalis sebesar -3,85 persen dan Kabupaten Siak sebesar -1,80 persen.



**Gambar 5. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2014**

### 5.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2015

Pada tahun 2015 kembali terjadi penurunan terhadap pertumbuhan perekonomian Provinsi Riau dibandingkan tahun 2014. Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2015 sebesar 0,95 persen, melambatnya pertumbuhan ekonomi ini diakibatkan oleh ketidakstabilan harga migas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, terutama wilayah yang memiliki kontribusi migas cukup besar dalam PDRB. Tidak hanya itu, pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau menurun disebabkan karena kabut asap yang melanda Provinsi Riau dan sebagian Pulau Sumatera, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau hanya tumbuh 0,95 persen. Penjelasan lebih lengkap mengenai pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2015.



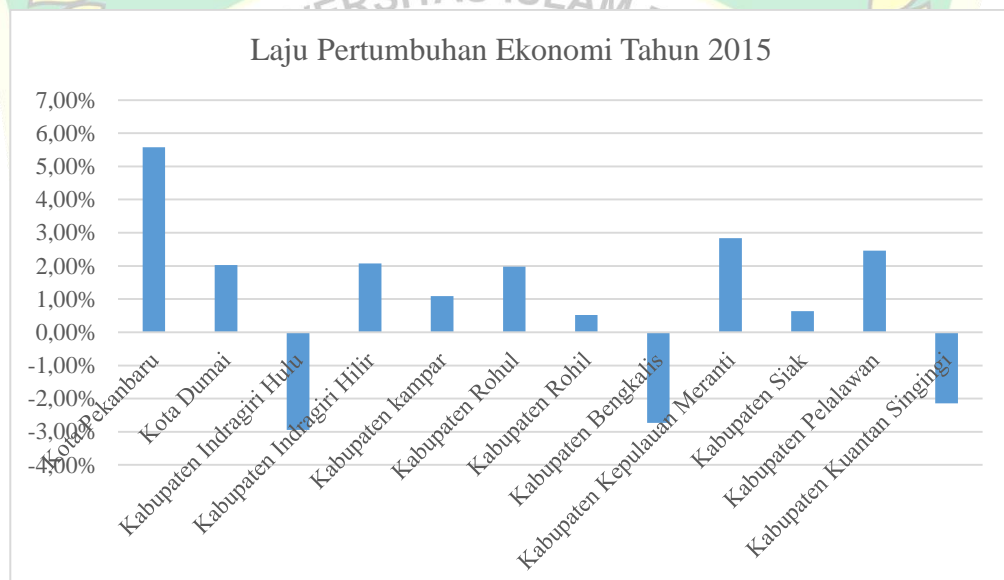
**Tabel 5. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau tahun 2015**

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	Kota Pekanbaru	5,58%
2	Kota Dumai	2,03%
3	Kabupaten Indragiri Hulu	-2,94%
4	Kabupaten Indragiri Hilir	2,07%
5	Kabupaten Kampar	1,09%
6	Kabupaten Rohul	1,98%
7	Kabupaten Rohil	0,52%
8	Kabupaten Bengkalis	-2,73%
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	2,84%
10	Kabupaten Siak	0,64%
11	Kabupaten Pelalawan	2,46%
12	Kabupaten Kuantan Singingi	-2,14%
Rata-rata		0,95%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 5.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2015 terlihat jelas ada beberapa kabupaten/kota yang laju pertumbuhan ekonominya bernilai negatif. Kabupaten/Kota dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada Tabel 5.7 adalah Kota Pekanbaru sebesar 5,58 persen. Kabupaten/Kota dengan angka laju pertumbuhan ekonomi tertinggi (memiliki kaitan dengan migas) adalah Kepulauan Meranti dengan nilai sebesar 2,84. Selain itu, beberapa kabupaten/kota memiliki kaitan dengan migas, namun pertumbuhan ekonominya rendah yaitu Kabupaten Indragiri Hulu sebesar -2,94 persen, Kabupaten Bengkalis sebesar -2,73 persen, Kabupaten Rokan Hilir sebesar 0,52 persen, disusul oleh Kabupaten Siak sebesar 0,64 persen, lanjut oleh Kabupaten Kabupaten Kampar sebesar 1,09 persen, Kabupaten

Rokan Hulu sebesar 1,98 persen, Kota Dumai sebesar 2,03 persen dan Kabupaten Pelalawan sebesar 2,46 persen. Dan, untuk kabupaten/kota tanpa kaitan migas yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi jatuh pada Kota Pekanbaru sebesar 5,58 persen, Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 2,07 persen dan kabupaten dengan angka laju pertumbuhan ekonomi terendah tanpa kaitan dengan migas adalah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar -2,14 persen.



**Gambar 5. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2015**

### 5.1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2016

Perekonomian Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh perekonomian global, terutama sektor migas dan sektor kelapa sawit. Bergejolaknya harga minyak mentah dan harag CPO di pasar Internasional akan berimbas pada kinerja ekonomi Provinsi Riau. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mulai membaik pada tahun 2016, ekonomi Provinsi Riau juga

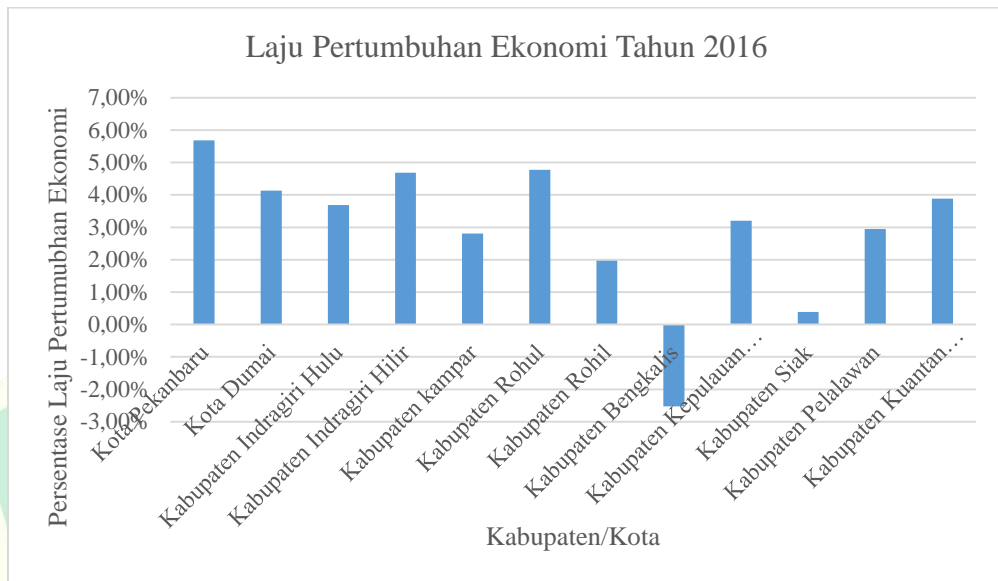
mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini didukung dengan membaiknya harga beberapa komoditas unggulan Provinsi Riau, seperti CPO dan berkurangnya bencana asap secara drastis Provinsi Riau, menyebabkan ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2016 tumbuh sebesar 2,97 persen. Kondisi ini juga mempengaruhi perkembangan ekonomi Provinsi Riau yang cenderung mengalami percepatan di tahun 2016, walaupun masih ada kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2016 di Provinsi Riau antar kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 5.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2016.

**Tabel 5. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2016**

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	Kota Pekanbaru	5,68%
2	Kota Dumai	4,13%
3	Kabupaten Indragiri Hulu	3,69%
4	Kabupaten Indragiri Hilir	4,68%
5	Kabupaten Kampar	2,81%
6	Kabupaten Rohul	4,77%
7	Kabupaten Rohil	1,97%
8	Kabupaten Bengkalis	-2,53%
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	3,20%
10	Kabupaten Siak	0,39%
11	Kabupaten Pelalawan	2,95%
12	Kabupaten Kuantan Singingi	3,88%
Rata-rata		2,97%

*Sumber: Hasil Analisis, 2022*

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang memiliki kontribusi migas cukup besar dalam PDRB mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali Kabupaten Bengkalis sebesar -2,53 persen. Hal ini disebabkan karena produksi minyak yang terus menurun dari tahun ke tahun. Kabupaten Bengkalis hampir 70 persen perekonomiannya bergantung pada migas. Selain Kabupaten Bengkalis, Kabupaten yang angka laju pertumbuhannya tinggi serta memiliki kaitan atau menghasilkan migas adalah Kota Dumai sebesar 4,13 persen meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian Kabupaten/kota penghasil migas mengalami kenaikan dan penurunan angka laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu Kabupaten Rokan Hulu naik menjadi sebesar 4,77 persen, Kabupaten Indragiri Hulu mengalami kenaikan angka sebesar 3,69 persen, Kabupaten Kepulauan Meranti meningkat sebesar 3,20 persen, Kabupaten Pelalawan sebesar 2,95 persen, Kabupaten Kampar sebesar 2,81 persen, Kabupaten Rokan Hilir sebesar 1,97 persen, dan Kabupaten Siak yang mengalami penurunan angka laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2015 dengan nilai sebesar 0,39 persen. Selain Kabupaten/kota tanpa penghasil migas, ada beberapa kabupaten/kota yang juga mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kota Pekanbaru sebesar 5,68 persen, Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 4,68 persen dan Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 3,88 persen.



**Gambar 5. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2016**

### 5.1.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2017

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mulai membaik pada tahun 2017, ekonomi Provinsi Riau juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan membaiknya harga beberapa komoditas unggulan Provinsi Riau, seperti Cpo dan berkurangnya bencana asap secara drastis di Provinsi Riau menyebabkan ekonomi Provinsi Riau tumbuh sebesar 3,32 persen. Kondisi ini juga mempengaruhi perkembangan ekonomi menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau yang cenderung mengalami percepatan di tahun 2017, meskipun masih ada kabupaten yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar -1,72 persen. Berikut dibawah ini tabel 5.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2017.

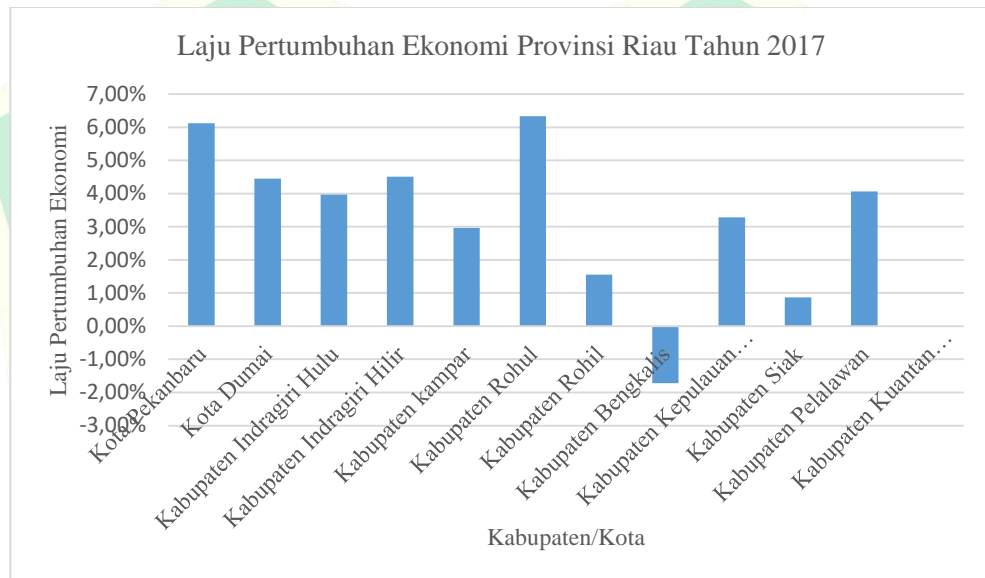
**Tabel 5. 9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2017**

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	Kota Pekanbaru	6,12%
2	Kota Dumai	4,45%
3	Kabupaten Indragiri Hulu	3,98%
4	Kabupaten Indragiri Hilir	4,51%
5	Kabupaten Kampar	2,96%
6	Kabupaten Rohul	5,38%
7	Kabupaten Rohil	1,55%
8	Kabupaten Bengkalis	-1,72%
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	3,28%
10	Kabupaten Siak	0,87%
11	Kabupaten Pelalawan	4,06%
12	Kabupaten Kuantan Singingi	4,37%
Rata-rata		3,32%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 5.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau tahun 2017 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang memiliki kontribusi migas cukup besar dalam PDRB mengalami pertumbuhan yang positif, Kabupaten Rokan hulu sebesar 5,38 persen, kemudian diikuti oleh Kota Dumai sebesar 4,45 persen, Kabupaten Pelalawan sebesar 4,06 persen, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 3,97 persen, Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 3,28 persen, Kabupaten Kampar sebesar 2,96 persen dan yang paling rendah adalah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 1,55 persen. Kabupaten/kota yang memiliki peningkatan pada pertumbuhan ekonomi yang tidak berkontribusi migas adalah Kota Pekanbaru sebesar 6,12 persen meningkat

dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 4,51 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 4,37 persen meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.



**Gambar 5. 9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2017**

### 5.1.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2018

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik pada tahun 2017, didukung dengan membaiknya harga beberapa komoditas unggulan Provinsi Riau. Namun, pada tahun 2018 perekonomian Provinsi Riau sedikit melambat dengan tumbuh hanya sebesar 2,94 persen. Hal ini jelas saja akan memberi pengaruh terhadap perkembangan ekonomi menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau yang cenderung juga akan mengalami perlambatan. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2018 untuk

lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 5.10 Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2018.

**Tabel 5. 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau tahun 2018**

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	Kota Pekanbaru	5,39%
2	Kota Dumai	5,34%
3	Kabupaten Indragiri Hulu	3,49%
4	Kabupaten Indragiri Hilir	3,60%
5	Kabupaten Kampar	1,91%
6	Kabupaten Rohul	4,18%
7	Kabupaten Rohil	-0,27%
8	Kabupaten Bengkalis	-1,69%
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	4,03%
10	Kabupaten Siak	1,08%
11	Kabupaten Pelalawan	3,62%
12	Kabupaten Kuantan Singingi	4,65%
Rata-rata		2,94%

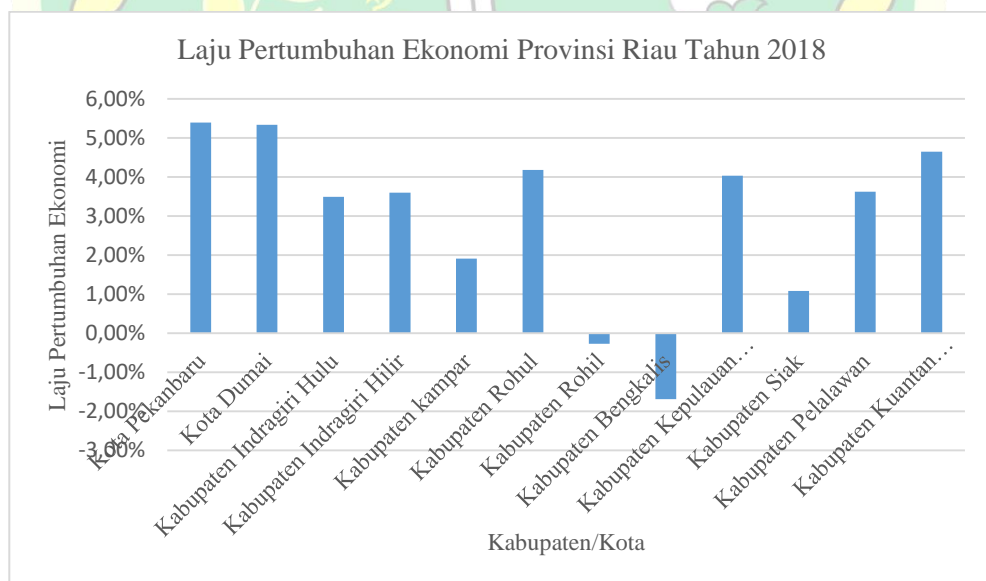
*Sumber: Hasil Analisis, 2022*

Tabel 5.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2018 terlihat masih ada kabupaten yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu Kabupaten Rokan Hilir sebesar -0,27 persen dan Kabupaten Bengkalis sebesar -1,69 persen. Kedua kabupaten tersebut di dominasi oleh pertambangan minyak dan gas. Ketergantungan perekonomiannya pada migas. Hal ini disebabkan oleh produksi minyak yang terus menurun dari tahun ke tahun.

Sementara itu, Kota Dumai, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak (kabupaten/kota memiliki kaitan dengan migas) perekonomiannya tumbuh



masing-masing sebesar 5,34 persen, 4,03 persen dan 1,08 persen, membaik dibanding tahun sebelumnya. Kabupaten/kota yang memiliki kaitan dengan migas serta mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya adalah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 5,34 persen, Kabupaten Pelalawan sebesar 3,62 persen dan Kabupaten Kampar sebesar 1,91 persen. Sementara itu, kabupaten/kota tanpa kaitan dengan migas yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya adalah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 4,65 persen. Kabupaten lain nya yang tidak memiliki kaitan dengan migas namun mengalami penurunan adalah Kota Pekanbaru sebesar 5,39 persen dan Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 3,49 persen.



**Gambar 5. 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2018**

### 5.1.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2019

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi sejak tahun 2011-2020. Pada tahun 2018, perekonomian Provinsi Riau melambat dengan

tumbuh hanya sebesar 2,94 persen. Pada tahun 2019, perekonomian Provinsi Riau kembali tumbuh sebesar 3,00 persen. Berikut Tabel 5.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2019 berisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau Tahun 2019 antar kabupaten/kota.

**Tabel 5. 11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2019**

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	Kota Pekanbaru	5,98%
2	Kota Dumai	5,59%
3	Kabupaten Indragiri Hulu	3,78%
4	Kabupaten Indragiri Hilir	4,15%
5	Kabupaten Kampar	3,86%
6	Kabupaten Rohul	4,93%
7	Kabupaten Rohil	0,65%
8	Kabupaten Bengkalis	-1,89%
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	2,64%
10	Kabupaten Siak	1,46%
11	Kabupaten Pelalawan	3,87%
12	Kabupaten Kuantan Singingi	4,57%
Rata-rata		3,30%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 5.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2019 masih ada kabupaten yang mengalami pertumbuhan negatif, adalah Kabupaten Bengkalis dengan nilai sebesar -1,89 persen. Kabupaten /kota lainnya mengalami pertumbuhan yang positif serta banyak kabupaten yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Seperti kabupaten/kota yang memiliki kaitan migas dan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi adalah Kota Dumai sebesar 5,59 persen, Kabupaten Rokan Hulu sebesar 4,93

persen, Kabupaten Kampar sebesar 3,86 persen, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 3,78 persen, Kabupaten Pelalawan sebesar 3,87 persen, Kabupaten Siak sebesar 1,46 persen dan Kabupaten Rokan Hilir sebesar 0,65 persen.

Namun, masih ada beberapa kabupaten yang memiliki kaitan atau kontribusi dengan migas yang mengalami penurunan pertumbuhan yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 3,87 persen rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Pekanbaru, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi adalah 3 Kabupaten yang tidak memiliki kaitan dengan migas namun memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi Provinsi Riau, masing-masing bernilai sebesar 5,98 persen, 4,15 persen dan 4,57 persen. Dimana Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya.



**Gambar 5. 11 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2019**

### 5.1.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2020

COVID-19 yang mulai muncul pada awal Maret 2020, menjadi penyebab utama terjadinya kontraksi ekonomi tahun 2020 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Tidak terkecuali Provinsi Riau juga ikut terdampak dan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi turun hingga 0,20 persen. Lapangan usaha yang paling terdampak COVID-19 adalah kegiatan yang bergerak dibidang jasa, diantaranya: Jasa Perusahaan; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Lainnya. Dan, penurunan produksi minyak mentah ikut menekan pertumbuhan ekonomi sejak berapa tahun terakhir. Meski demikian, untungnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2020 masih ditahan oleh permintaan CPO, kertas dan bubur kertas yang menjadi komoditas unggulan Provinsi Riau. COVID-19 dan beberapa fenomena ekonomi dalam perekonomian kabupaten/kota tahun 2020 terlihat lebih bervariasi dibandingkan dengan tahun 2019. Berikut dibawah ini Tabel 5.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2020.

**Tabel 5. 12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2020**

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1	Kota Pekanbaru	-4,38%
2	Kota Dumai	-1,05%
3	Kabupaten Indragiri Hulu	-0,12%
4	Kabupaten Indragiri Hilir	0,34%
5	Kabupaten Kampar	-0,90%
6	Kabupaten Rohul	1,51%
7	Kabupaten Rohil	-0,96%
8	Kabupaten Bengkalis	-3,30%

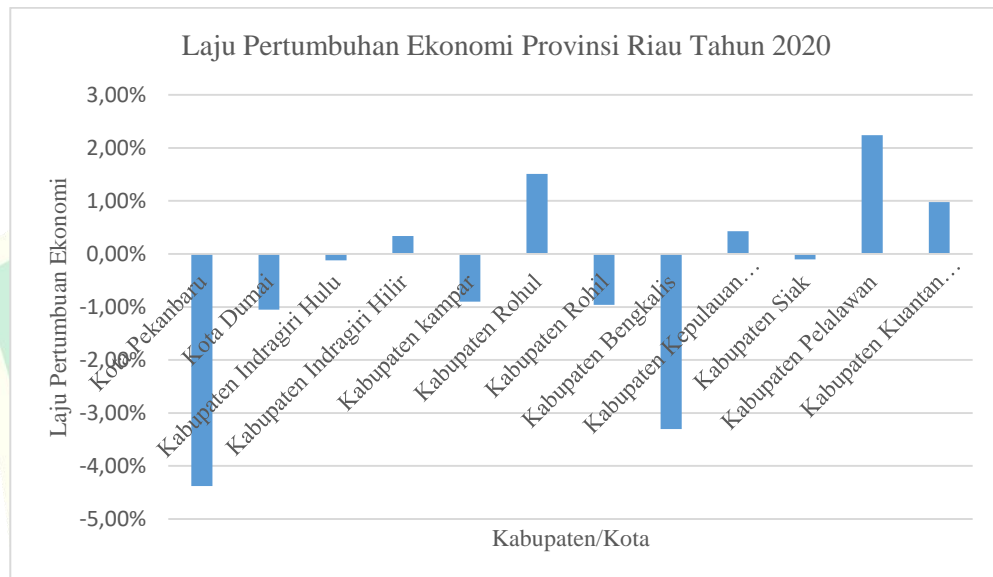
No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	0,43%
10	Kabupaten Siak	-0,10%
11	Kabupaten Pelalawan	2,24%
12	Kabupaten Kuantan Singingi	0,98%
Rata-rata		0,27%

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, perekonomian di enam kabupaten/kota masih tumbuh positif sementara di enam kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan atau kontraksi hingga negatif. Dimana pada tahun 2019 hanya Kabupaten Bengkalis saja yang mengalami kontraksi. Namun tahun 2020 kabupaten/kota yang ikut mengalami kontraksi yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Pekanbaru sebagai pusat jasa mengalami kontraksi paling dalam dengan penurunan 4,38 persen. Kemudian posisi kedua adalah Kabupaten Bengkalis dengan kontraksi penurunan 3,30 persen. Kabupaten Bengkalis meski ikut terdampak COVID-19, namun penyebab utama kontraksi ekonomi yang terjadi disebabkan struktur ekonomi Kabupaten Bengkalis yang ditopang 56 persen dari migas sementara produksi migas beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan secara alami. Sementara lima kabupaten/kota lainnya tumbuh melambat dibandingkan tahun 2019. Kabupaten/kota tersebut antara lain: Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 0,98 persen, Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 0,34 persen, Kabupaten

Pelalawan sebesar 2,24 persen, Kabupaten Rokan Hulu sebesar 1,51 persen, Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 0,43 persen.



**Gambar 5. 12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2020**

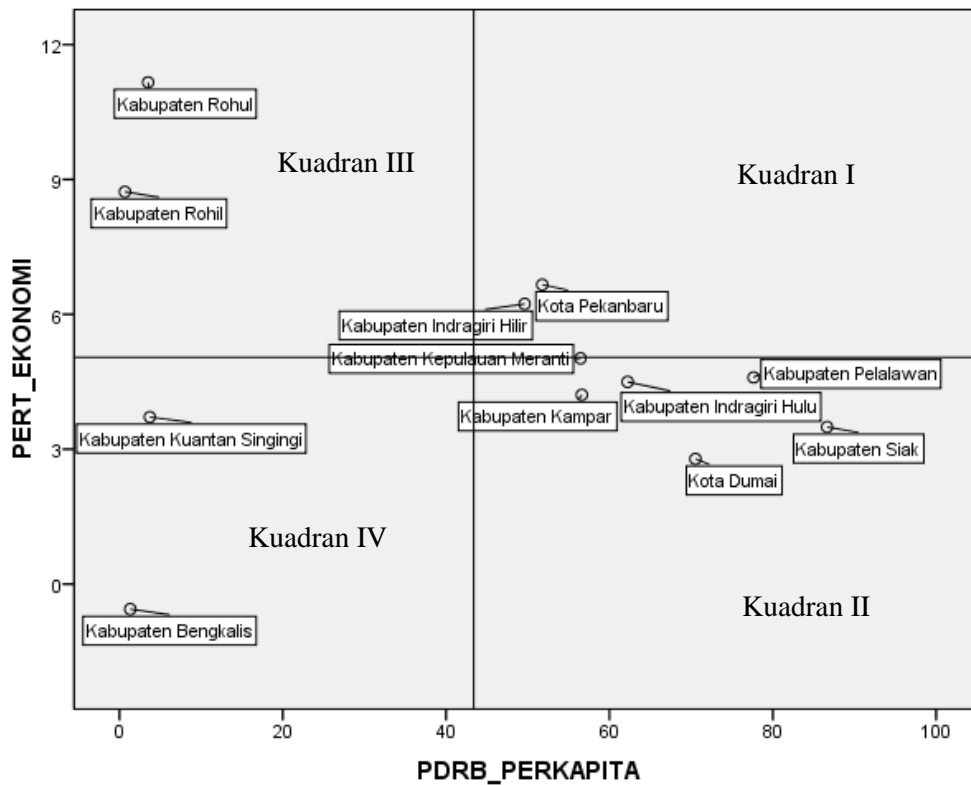
## 5.2 Analisis Tipologi Klassen antar Wilayah Provinsi Riau Tahun 2011-2020

### 5.2.1 Analisis Tipologi Wilayah Provinsi Riau

Analisis *Tipologi Wilayah* adalah alat yang akan menunjukkan bagaimana pola dari pembangunan ekonomi pada tiap kabupaten di Provinsi Riau dan mengklasifikasikan tiap-tiap kabupaten ke dalam 4 kuadran. Dengan menentukan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal (Sumbu Y) dan rata-rata PDRB Perkapita sebagai sumbu Horizontal (sumbu X). Untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi antar kabupaten di Provinsi Riau maka dibagi menjadi 2 kategori, yaitu periode tahun 2011-2015 dan periode tahun 2016-2020.

Untuk melakukan analisis pola disparitas ekonomi wilayah, peneliti menggunakan analisis *Tipologi Wilayah* yang dibantu dengan menggunakan aplikasi *SPSS* untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah yang terjadi di wilayah Provinsi Riau. Adapun input data yang digunakan dalam *Tipologi Wilayah* menggunakan data PDRB Perkapita serta Tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang dicari dengan menggunakan data PDRB serta data jumlah penduduk dari 12 kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Adapun sumber data PDRB dan jumlah penduduk didapatkan dari data BPS Provinsi Riau dan BPS 12 Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Dimana hasil yang diperoleh dari periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 5.13 Pola Pembangunan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2011-2015.





**Gambar 5. 13 Pola Pembangunan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2011-2015**

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen yang tertera pada Gambar 5. 13 Pola pembangunan ekonomi Provinsi Riau Tahun 2011-2020. Dimana Provinsi Riau yang terdiri dari 12 kabupaten/kota dibagi menjadi 4 kuadran berdasarkan pada PDRB perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi. Maka di dapat hasil klasifikasi per kabupaten/kota pada periode tahun 2011-2015 dalam bentuk tabel dibawah ini Tabel 5.13 Matriks Tipologi Wilayah Provinsi Riau Tahun 2011-2015.

**Tabel 5. 13 Matriks Tipologi Klassen Provinsi Riau Tahun 2011-2015**

	$(y_i < y)$	$(y_i > y)$
$(r_i > r)$	<p><b>Kuadran III</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Rokan Hulu</li> <li>2. Kabupaten Rokan Hilir</li> </ol>	<p><b>Kuadran I</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Pekanbaru</li> <li>2. Kabupaten Indragiri Hilir</li> </ol>



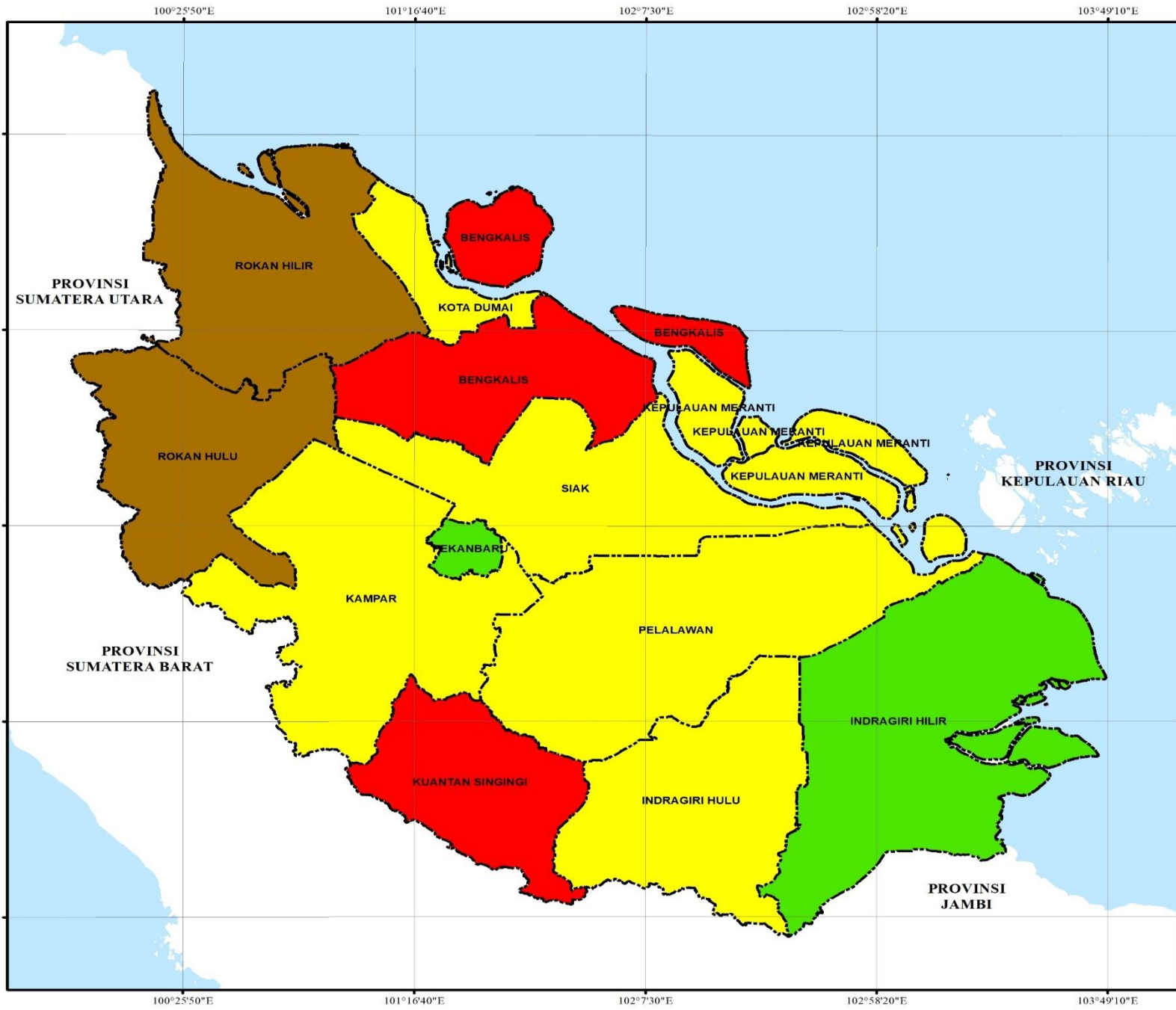
	$(y_i < y)$	$(y_i > y)$
$(r_i < r)$	<p style="text-align: center;"><b>Kuadran IV</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Kuantan Singingi</li> <li>2. Kabupaten Bengkalis</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Kuadran II</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Dumai</li> <li>2. Kabupaten Siak</li> <li>3. Kabupaten Pelalawan</li> <li>4. Kabupaten Indragiri Hulu</li> <li>5. Kabupaten Kampar</li> <li>6. Kabupaten Kepulauan Meranti</li> </ol>

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pada tahun periode 2011-2015, kabupaten/kota yang termasuk ke dalam :

- a. Kuadran I : Kabupaten/ kota yang cepat maju dan cepat tumbuh dengan kriteria kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi adalah: Kota Pekanbaru dan Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Kuadran II : Kabupaten/kota yang berkembang cepat, yaitu kabupaten/kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, tetapi t Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.
- c. Kuadran III adalah Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir.
- d. Kuadran IV adalah Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Bengkalis.

Pemetaan ketimpangan pola pembangunan atau tipologi wilayah Provinsi Riau Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 5.14 Peta Tipologi Wilayah Antar Kabupaten Tahun 2011-2015.



**GAMBAR 5.14 PETA TOPOLOGI WILAYAH ANTAR KABUPATEN TAHUN 2011-2015**



Sistem Grid : ..... Grid Geografi  
 Datum Horizontal : ..... WGS 84



**LEGENDA**

**ADMINISTRASI**

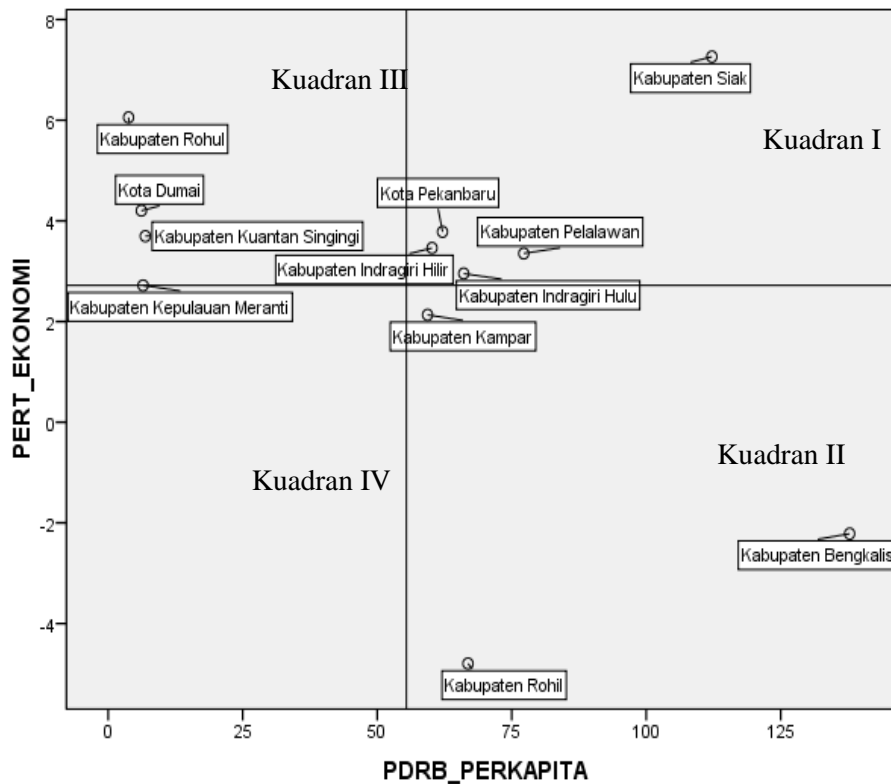
-  Batas Kabupaten/  
Kota
-  Wilayah Maju dan Cepat Tumbuh (Kuadran I)
-  Wilayah Maju Tetapi Tertekan (Kuadran II)
-  Wilayah Berkembang Cepat (Kuadran III)
-  Wilayah yang Relatif Tertinggal (Kuadran IV)

**Dosen Pembimbing :**  
Puji Astuti, ST, MT

**Nama :** Melisa Pebriani  
**NPM :** 173410870

- SUMBER**
1. SHP RBI (Rupa Bumi Indonesia) Tahun 2017
  2. Citra Satellite

Untuk pola pembangunan ekonomi periode tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 5.15 Pola Pembangunan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2016-2020.



**Gambar 5. 15 Pola Pembangunan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2016-2020**

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen yang tertera pada Gambar 5. 15 Dimana Provinsi Riau yang terdiri dari 12 kabupaten/kota dibagi menjadi 4 kuadran berdasarkan pada PDRB perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi. Maka di dapat hasil klasifikasi per kabupaten/kota pada periode tahun 2011-2015 dalam bentuk Tabel 5.14 sebagai berikut:

**Tabel 5. 14 Matriks Tipologi Klassen Provinsi Riau Tahun 2016-2020**

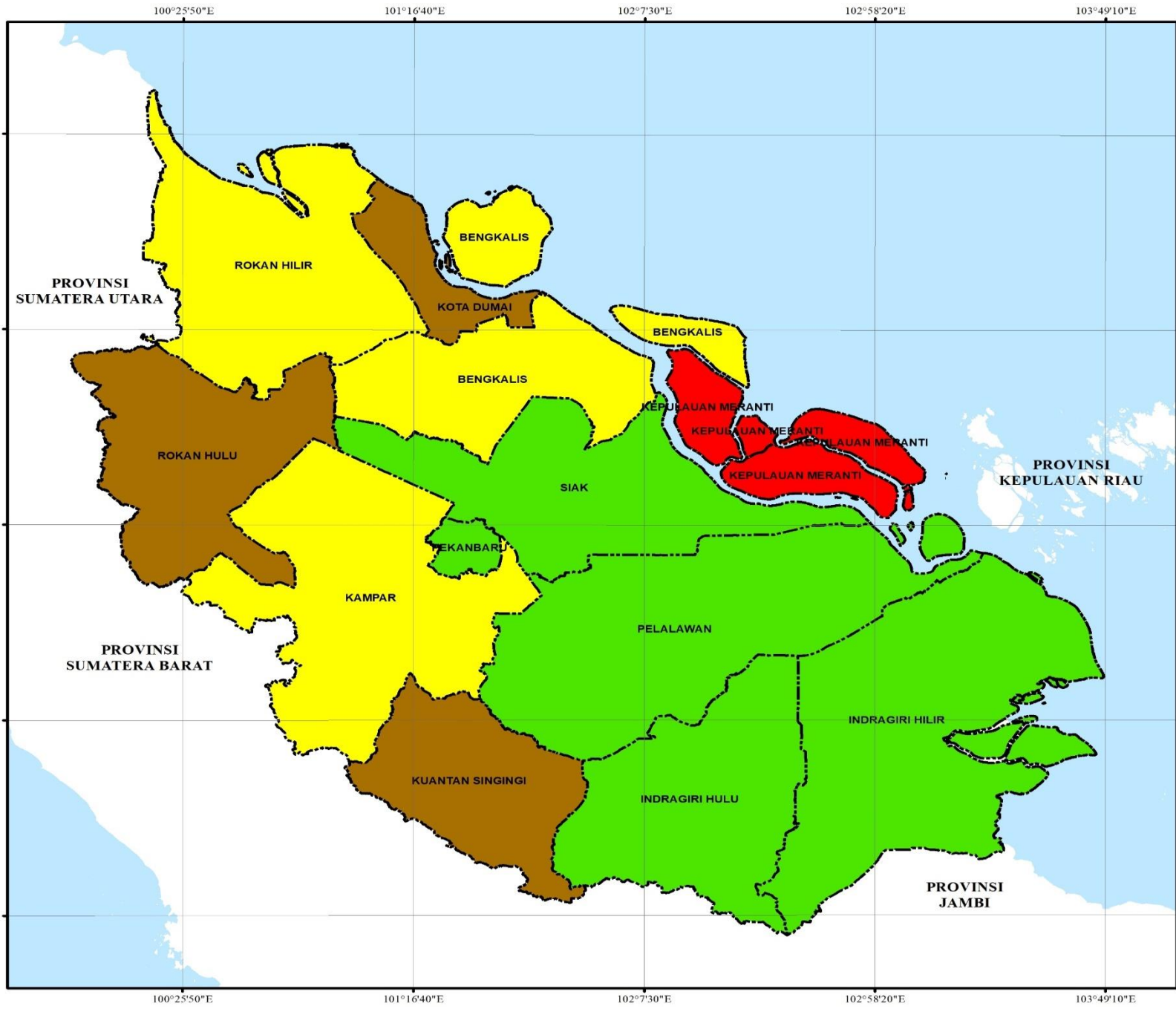
	$(y_i < y)$	$(y_i > y)$
$(r_i > r)$	<p><b>Kuadran III</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Dumai</li> <li>2. Kabupaten Rokan Hilir</li> <li>3. Kabupaten Kuantan Singingi</li> </ol>	<p><b>Kuadran I</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Pekanbaru</li> <li>2. Kabupaten Siak</li> <li>3. Kabupaten Pelalawan</li> <li>4. Kabupaten Indragiri Hulu</li> <li>5. Kabupaten Indragiri Hilir</li> </ol>
$(r_i < r)$	<p><b>Kuadran IV</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Kepulauan Meranti</li> </ol>	<p><b>Kuadran II</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Bengkalis</li> <li>2. Kabupaten Kampar</li> <li>3. Kabupaten Rokan Hilir</li> </ol>

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Dari Tabel Matriks 5.14 di atas, kabupaten/kota yang termasuk ke dalam

- Kuadran I adalah Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Kuadran II kabupaten/kota yang termasuk adalah Kabupaten Kampar, Kabupaten, Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir.
- Kuadran III adalah Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi.
- Kuadran IV adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pemetaan ketimpangan pola pembangunan atau tipologi wilayah Provinsi Riau Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 5.16 Peta Tipologi Wilayah Antar Kabupaten Tahun 2011-2015.



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS TEKNIK  
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**GAMBAR 5.16 PETA TOPOLOGI WILAYAH  
ANTAR KABUPATEN TAHUN 2016-2020**



Sistem Grid : ..... Grid Geografi  
Datum Horizontal : ..... WGS 84



**LEGENDA**

**ADMINISTRASI**  
 - - - - - Batas Kabupaten/  
 Kota

- Wilayah Maju dan Cepat Tumbuh (Kuadran I)
- Wilayah Maju Tetapi Tertekan (Kuadran II)
- Wilayah Berkembang Cepat (Kuadran III)
- Wilayah yang Relatif Tertinggal (Kuadran IV)

<b>Dosen Pembimbing :</b> Puji Astuti, ST, MT	<b>Nama :</b> Melisa Pebriani <b>NPM :</b> 173410870
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

**SUMBER**

1. SHP RBI (Rupa Bumi Indonesia) Tahun 2017
2. Citra Satelite

100°25'50"E      101°16'40"E      102°7'30"E      102°58'20"E      103°49'10"E

2°20'50"N

1°30'00"N

0°39'10"N

0°11'40"S

1°27'50"S

100°25'50"E      101°16'40"E      102°7'30"E      102°58'20"E      103°49'10"E

Adapun Kabupaten yang mengalami perubahan pola pembangunan tersebut adalah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Bengkalis. Di antara kabupaten/kota yang mengalami perkembangan pola ekonomi, kabupaten/kota yang bergeser pada pola pembangunan ekonomi yang baik terdiri dari Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Dapat diartikan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten/kota ini telah terjadi dan memberikan hasil pada laju pertumbuhan ekonominya, sehingga mampu mengejar ketertinggalannya.

Periode tahun 2011-2015 Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Pelalawan berada pada posisi Kuadran II dan bergeser naik pada Kuadran I pada periode tahun 2016-2020. Sedangkan, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hilir pada periode tahun 2011-2015 masing-masing berada pada Kuadran IV dan Kuadran III. Namun, pada periode tahun 2016-2020 bergeser pada kuadran II. Dan, untuk Kabupaten Kuantan Singingi pada periode tahun 2011-2015 pola perkembangan ekonominya berada pada kuadran IV dan mengalami pergeseran pada periode tahun 2016-2020 ke kuadran III.

Selain ada nya kabupaten/kota yang mengalami perubahan pada pola perkembangan ekonomi yang baik. Tentu saja, masih ada kabupaten/kota yang mengalami perubahan pola perkembangan perekonomian yang tidak

baik. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai. Dimana pada awalnya Kabupaten Kepulauan Meranti pada periode tahun 2011-2015 pola perkembangan ekonominya berada pada kuadran II dan pada periode tahun 2016-2020 bergeser pada kuadran IV. Sedangkan, untuk Kota Dumai pada periode tahun 2011-2015 pola perkembangan ekonominya berada pada kuadran II bergeser berada pada kuadran III pada periode tahun 2016-2020. Dapat disimpulkan, bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai tidak mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapitanya sehingga kabupaten/kota tersebut justru mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan kabupaten/kota yang mampu bertahan. Kabupaten/kota yang mampu bertahan pada kuadran nya adalah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak yang mana tetap berada pada kuadran I dari periode tahun 2011-2020. Selain itu Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu juga masing-masing tetap bertahan pada kuadran II dan kuadran III.

### **5.2.2 Analisis Tipologi Sektor Antar Wilayah Provinsi Riau**

Pada analisis *Tipologi Sektor Ekonomi* antar wilayah Provinsi Riau, input data yang digunakan oleh peneliti adalah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2020 yang digunakan untuk menemukan hasil dari laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi wilayah/kabupaten yang ada di Provinsi Riau dan kemudian membandingkan dengan angka laju pertumbuhan dan kontribusi Provinsi Riau. Dari data laju

pertumbuhan dan kontribusi ini nanti akan diketahui sektor ekonomi tersebut termasuk kedalam kelas atau klasifikasi apa dalam melihat disparitas pada pola pembangunan ekonomi di Provinsi Riau. Untuk lebih jelas dan agar mudah dipahami peneliti telah menyajikan tabel-tabel dibawah ini yang berisi angka laju pertumbuhan dan angka kontribusi pada setiap sektor yang ada di Provisni Riau:

**Tabel 5. 15 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Provinsi Riau**

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,68	25,01
2	Pertambangan dan Penggalian	-5,29	23,56
3	Industri Pengolahan	4,92	28,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,23	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	1,30	0,01
6	Konstruksi	4,50	7,67
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM	3,64	8,72
8	Transportasi dan Pergudangan	2,08	0,79
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,97	0,43
10	Informasi dan Komunikasi	8,59	0,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,55	0,91
12	Real Estate	4,84	0,86
13	Jasa Perusahaan	4,63	0,00
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	1,81	1,75
15	Jasa Pendidkan	4,30	0,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,29	0,18
17	Jasa Lainnya	5,47	0,44

Sumber: Hasil Analisis,2022

**Tabel 5. 16 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kota Pekanbaru**

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-19,13779646	
2	Pertambangan dan Penggalian	-8,68676061	
3	Industri Pengolahan	-4,955784577	



No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
4	Pengadaan Listrik dan Gas	68,40	4,49
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	-10,09	0,05
6	Konstruksi	-6,96	21,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM	-7,70	1,41
8	Transportasi dan Pergudangan	-8,30	0,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	67,73	16,65
10	Informasi dan Komunikasi	-14,44	16,93
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-5,29	1,49
12	Real Estate	-6,95	3,54
13	Jasa Perusahaan	91,98	18,49
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	-9,53	2,19
15	Jasa Pendidikan	3,94	1,70
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,70	0,22
17	Jasa Lainnya	7,31	2,28

Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Tabel 5. 17 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kota Dumai**

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,56	5,43
2	Pertambangan dan Penggalian	-1,06	0,38
3	Industri Pengolahan	4,92	55,02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	23,23	0,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	2,45	0,02
6	Konstruksi	1,83	10,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM	0,66	17,79
8	Transportasi dan Pergudangan	1,35	2,67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,76	0,67
10	Informasi dan Komunikasi	9,97	1,11
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,52	1,43
12	Real Estate	3,40	0,43
13	Jasa Perusahaan	-7,99	1,71
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	0,84	1,96
15	Jasa Pendidikan	4,25	0,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,39	0,15
17	Jasa Lainnya	5,25	0,47

Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Tabel 5. 18 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Indragiri Hulu**

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,44	28,35
2	Pertambangan dan Penggalian	-3,04	11,71
3	Industri Pengolahan	6,93	28,38
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,66	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	1,6	0,05
6	Konstruksi	4,59	11,85
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM	4,54	9,02
8	Transportasi dan Pergudangan	1,62	1,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,90	0,73
10	Informasi dan Komunikasi	7,61	0,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,78	0,91
12	Real Estate	5,06	1,16
13	Jasa Perusahaan	-5,80	2,85
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	2,40	1,72
15	Jasa Pendidikan	4,77	0,67
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,60	0,18
17	Jasa Lainnya	5,61	0,65

Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Tabel 5. 19 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Indragiri Hilir**

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,05	47,30
2	Pertambangan dan Penggalian	18,74	0,80
3	Industri Pengolahan	5,51	27,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,29	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	2,71	0,01
6	Konstruksi	5,23	4,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM	4,28	13,71
8	Transportasi dan Pergudangan	2,98	1,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,12	0,45
10	Informasi dan Komunikasi	8,51	0,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,73	0,60
12	Real Estate	5,83	0,78
13	Jasa Perusahaan	3,78	0,00

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	2,41	1,89
15	Jasa Pendidkan	5,32	0,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,93	0,13
17	Jasa Lainnya	4,64	0,41

Sumber: Hasil Analisis,2022

**Tabel 5. 20 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten Kampar**

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,04	29,77
2	Pertambangan dan Penggalian	-1,66	27,93
3	Industri Pengolahan	5,67	27,95
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,28	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	0,77	0,00
6	Konstruksi	5,00	6,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM	3,05	3,04
8	Transportasi dan Pergudangan	3,38	0,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,71	0,08
10	Informasi dan Komunikasi	4,06	0,43
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,12	0,46
12	Real Estate	4,33	0,96
13	Jasa Perusahaan	3,63	0,04
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	1,91	1,67
15	Jasa Pendidkan	3,86	0,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,84	0,17
17	Jasa Lainnya	4,33	0,29

Sumber: Hasil Analisis,2022

**Tabel 5. 21 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten Bengkalis**

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,91	9,90
2	Pertambangan dan Penggalian	-5,96	64,43
3	Industri Pengolahan	5,87	14,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-4,82	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	-8,88	0,01

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
6	Konstruksi	6,00	2,51
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM	4,56	5,21
8	Transportasi dan Pergudangan	2,04	0,25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,17	0,21
10	Informasi dan Komunikasi	10,64	0,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,68	0,28
12	Real Estate	3,96	0,29
13	Jasa Perusahaan	5,45	0,00
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	2,07	0,98
15	Jasa Pendidkan	4,96	0,25
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,80	0,08
17	Jasa Lainnya	5,91	0,22

Sumber: Hasil Analisis,2022

**Tabel 5. 22 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten Siak**

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,40	21,37
2	Pertambangan dan Penggalian	-7,20	29,15
3	Industri Pengolahan	3,50	40,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,70	0,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	1,25	0,04
6	Konstruksi	3,52	4,01
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM	3,95	1,84
8	Transportasi dan Pergudangan	3,16	0,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,28	0,04
10	Informasi dan Komunikasi	7,76	0,25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,19	0,36
12	Real Estate	5,91	0,41
13	Jasa Perusahaan	2,09	0,00
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	2,22	0,95
15	Jasa Pendidkan	2,66	0,49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,78	0,19
17	Jasa Lainnya	4,56	0,50

Sumber: Hasil Analisis,2022

**Tabel 5. 23 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,37	34,91
2	Pertambangan dan Penggalian	-1,93	14,75
3	Industri Pengolahan	5,90	25,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,19	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	3,15	4,93
6	Konstruksi	9,59	3,45
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM	6,24	7,08
8	Transportasi dan Pergudangan	1,66	2,10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,19	0,19
10	Informasi dan Komunikasi	5,46	0,59
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,91	0,27
12	Real Estate	5,94	0,39
13	Jasa Perusahaan	6,99	2,85
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	2,97	2,02
15	Jasa Pendidikan	3,43	0,18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,96	0,05
17	Jasa Lainnya	5,14	0,25

Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Tabel 5. 24 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,74	48,20
2	Pertambangan dan Penggalian	-4,78	6,85
3	Industri Pengolahan	6,23	28,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,28	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	1,13	0,02
6	Konstruksi	3,94	6,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM	2,71	3,48
8	Transportasi dan Pergudangan	5,19	0,42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,29	0,18
10	Informasi dan Komunikasi	4,87	0,39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,69	0,55
12	Real Estate	4,51	0,68

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
13	Jasa Perusahaan	2,36	0,00
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	2,29	2,57
15	Jasa Pendidikan	4,49	0,53
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,28	0,16
17	Jasa Lainnya	4,52	0,40

Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Tabel 5. 25 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten Pelalawan**

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,59	37,57
2	Pertambangan dan Penggalian	1,27	2,06
3	Industri Pengolahan	3,89	51,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,69	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	1,53	0,00
6	Konstruksi	5,78	2,12
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM	4,22	2,56
8	Transportasi dan Pergudangan	3,20	0,21
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,64	0,15
10	Informasi dan Komunikasi	7,08	0,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,38	0,56
12	Real Estate	5,93	0,60
13	Jasa Perusahaan	6,22	0,00
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	2,83	1,15
15	Jasa Pendidikan	4,77	0,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,47	0,13
17	Jasa Lainnya	5,27	0,26

Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Tabel 5. 26 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Rokan Hulu**

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,97	52,66
2	Pertambangan dan Penggalian	0,21	4,49
3	Industri Pengolahan	7,50	24,92
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,99	0,07

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	1,62	0,01
6	Konstruksi	3,88	2,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM	3,63	4,72
8	Transportasi dan Pergudangan	4,03	0,49
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,51	0,25
10	Informasi dan Komunikasi	6,02	1,07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,90	0,91
12	Real Estate	3,91	0,65
13	Jasa Perusahaan	-6,14	2,57
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	2,00	3,21
15	Jasa Pendidikan	3,82	0,38
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,97	0,17
17	Jasa Lainnya	4,97	0,42

Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Tabel 5. 27 Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten Rokan Hilir**

No	Sektor	Laju Pertumbuhan	Kontribusi Sektor
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,87	30,26
2	Pertambangan dan Penggalian	-4,63	43,89
3	Industri Pengolahan	5,91	17,60
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,25	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	1,73	0,70
6	Konstruksi	5,83	0,99
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM	3,38	4,00
8	Transportasi dan Pergudangan	3,78	0,12
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,62	0,18
10	Informasi dan Komunikasi	5,75	0,25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,06	0,29
12	Real Estate	3,43	0,33
13	Jasa Perusahaan	2,09	0,20
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos	1,06	0,69
15	Jasa Pendidikan	3,76	0,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,35	0,06
17	Jasa Lainnya	2,34	0,17

Sumber: Hasil Analisis, 2022

### 5.2.2.1 Analisis Tipologi Sektor Ekonomi Kota Pekanbaru

Hasil yang didapatkan terhadap disparitas antar sektor Kota Pekanbaru yang di ambil melalui perbandingan data laju pertumbuhan dan kontribusi antara Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau, maka didapatkan hasil seperti pada Tabel 5.28 Tabel Hasil Analisis Tipologi Sektor Kota Pekanbaru.

**Tabel 5. 28 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kota Pekanbaru**

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan				√
2	Pertambangan dan Penggalian				√
3	Industri Pengolahan		√		
4	Pengadaan Listrik dan Gas				√
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang				√
6	Konstruksi		√		
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM		√		
8	Transportasi dan Pergudangan		√		
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	√			
10	Informasi dan Komunikasi		√		
11	Jasa Keuangan dan Asuransi		√		
12	Real Estate		√		
13	Jasa Perusahaan			√	
14	Administrasi				√



No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial				
15	Jasa Pendidikan				√
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	√			
17	Jasa Lainnya	√			

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan Hasil olah data yang telah dilakukan pada Kota Pekanbaru, maka kelas pembagian sektor terbagi menjadi 4 yaitu sektor maju dan tumbuh cepat, sektor maju tapi tertekan, sektor potensial atau berkembang cepat dan sektor relatif tertinggal. Sektor maju dan cepat tumbuh pada Kota Pekanbaru yaitu terdiri dari penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Selanjutnya beberapa sektor yang termasuk pada kategori sektor maju tapi tertekan terdiri dari industri pengolahan; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sm; transportasi dan pergudangan; infromasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi; real estate. Sedangkan sektor yang termasuk pada kategori sektor potensial atau masih berkembang dengan cepat yaitu hanya jasa perusahaan. Dan, yang terakhir adalah sektor dengan kategori sektor relatif tertinggal di Kota Pekanbaru terdiri dari Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang; Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jamiinan Sosial; Jasa Pendidikan. Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada Tabel 5.29 Klasifikasi Tipologi Sektor Kota Pekanbaru.

**Tabel 5. 29 Klasifikasi Tipologi Sektor Kota Pekanbaru**

Sektor (Si)	Pertumbuhan Sektor	
	gi>=g	gi<g
si>=s	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya.	Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM; Transportasi dan Pergudangan; Infromasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate;
si<s	Jasa Perusahaan	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamiinan Sosial; Jasa Pendidikan.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

### 5.2.2.2 Analisis Pola Disparitas antar Sektor Kota Dumai

Hasil yang didapatkan terhadap disparitas antar sektor Kota Dumai yang di ambil melalui perbandingan data laju pertumbuhan dan kontribusi antara Kota Dumai dan Provinsi Riau, maka didapatkan hasil seperti pada Tabel 5.30 Tabel Hasil Analisis Tipologi Sektor Kota Dumai.

**Tabel 5. 30 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kota Dumai**

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan				√
2	Pertambangan dan Penggalian			√	
3	Industri Pengolahan	√			
4	Pengadaan Listrik dan Gas			√	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	√			
6	Konstruksi		√		
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM		√		
8	Transportasi dan Pergudangan		√		
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	√			
10	Informasi dan Komunikasi	√			
11	Jasa Keuangan dan Asuransi		√		
12	Real Estate				√
13	Jasa Perusahaan		√		
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial		√		
15	Jasa Pendidikan				√
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial				√
17	Jasa Lainnya		√		

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan Hasil olah data yang telah dilakukan pada Kota Dumai, maka klasifikasi pembagian sektor terbagi menjadi 4 yaitu sektor maju dan tumbuh cepat, sektor maju tapi tertekan, sektor potensial atau berkembang cepat dan sektor relatif tertinggal. Sektor maju dan cepat tumbuh pada Kota Dumai yaitu terdiri dari Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Penyediaan Akomodasi dan makan Minum; Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya beberapa sektor yang termasuk pada kategori sektor maju tapi tertekan terdiri dari konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan; jasa lainnya. Sedangkan sektor yang termasuk pada kategori sektor potensial atau masih berkembang dengan cepat yaitu pertambangan dan penggalian; pengadaan listrik dan gas. Dan, yang terakhir adalah sektor dengan kategori sektor relatif tertinggal di Kota Dumai terdiri dari Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Real Estate; Jasa Pendidikan dan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.31 Klasifikasi Tipologi Sektor Kota Dumai.

**Tabel 5. 31 Klasifikasi Tipologi Sektor Kota Dumai**

Sektor (Si)	Pertumbuhan Sektor	
	gi>=g	gi<g
si>=s	Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Penyediaan Akomodasi dan makan Minum; Informasi dan Komunikasi	Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan; Jasa Lainnya.
si<s	Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas;	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Real Estate; Jasa Pendidikan dan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

### 5.2.2.3 Analisis Pola Disparitas antar Sektor Kabupaten Indragiri Hulu

Hasil yang didapatkan terhadap disparitas antar sektor Kabupaten Indragiri Hulu yang di ambil melalui perbandingan data laju pertumbuhan dan kontribusi antara Kabupaten Indragiri Hulu dan Provinsi Riau, maka didapatkan hasil seperti pada Tabel 5.32 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Indragiri Hulu.

**Tabel 5. 32 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Indragiri Hulu.**

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	√			
2	Pertambangan dan Penggalian			√	
3	Industri Pengolahan	√			
4	Pengadaan Listrik dan Gas			√	

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	√			
6	Konstruksi	√			
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM	√			
8	Transportasi dan Pergudangan		√		
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	√			
10	Informasi dan Komunikasi				√
11	Jasa Keuangan dan Asuransi		√		
12	Real Estate	√			
13	Jasa Perusahaan				√
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	√			
15	Jasa Pendidikan	√			
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		√		
17	Jasa Lainnya	√			

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan Hasil olah data yang telah dilakukan pada Kabupaten Indragiri Hulu, maka klasifikasi pembagian sektor terbagi menjadi 4 yaitu sektor maju dan tumbuh cepat, sektor maju tapi tertekan, sektor potensial atau

berkembang cepat dan sektor relatif tertinggal. Sektor maju dan cepat tumbuh pada Kabupaten Indragiri Hulu yaitu terdiri dari pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; dan jasa lainnya. Selanjutnya beberapa sektor yang termasuk pada kategori sektor maju tapi tertekan terdiri dari Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sedangkan sektor yang termasuk pada kategori sektor potensial atau masih berkembang dengan cepat yaitu Pertambangan dan Pengalihan; dan Pengadaan Listrik dan Gas. Dan, yang terakhir adalah sektor dengan kategori sektor relatif tertinggal di Kabupaen Indragiri Hulu terdiri dari Infromasi dan Komunikasi; dan Jasa Perusahaan. Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada Tabel 5.33 Klasifikasi Tipologi Sektor Kota Indragiri Hulu.

**Tabel 5. 33 Klasifikasi Tipologi Sekor Kota Indragiri Hulu**

Sektor (Si)	Pertumbuhan Sektor	
	gi>=g	gi<g
si>=s	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; dan Jasa Lainnya.	Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

si<s	Pertambangan dan Penggalian; dan Pengadaan Listrik dan Gas	Infomasi dan Komunikasi; dan Jasa Perusahaan.
------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

Sumber: Hasil Analisis, 2022

#### 5.2.2.4 Analisis Pola Disparitas antar Sektor Kabupaten Indragiri Hilir

Hasil yang didapatkan terhadap disparitas antar sektor Kabupaten Indragiri Hilir yang di ambil melalui perbandingan data laju pertumbuhan dan kontribusi antara Kabupaten Indragiri Hilir dan Provinsi Riau, maka didapatkan hasil seperti pada Tabel 5.34 Tabel Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Indragiri Hilir.

**Tabel 5. 34 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	√			
2	Pertambangan dan Penggalian			√	
3	Industri Pengolahan	√			
4	Pengadaan Listrik dan Gas				√
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	√			
6	Konstruksi			√	

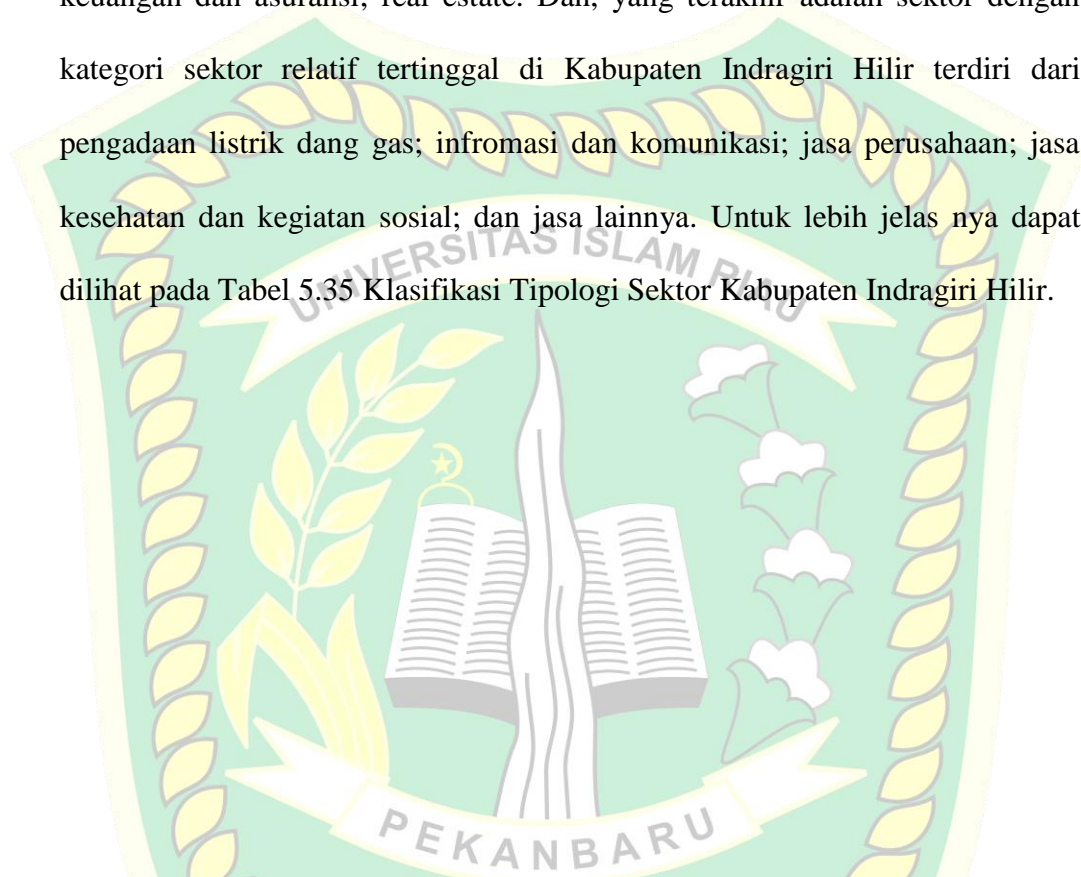


No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM	√			
8	Transportasi dan Pergudangan	√			
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	√			
10	Informasi dan Komunikasi				√
11	Jasa Keuangan dan Asuransi			√	
12	Real Estate			√	
13	Jasa Perusahaan				√
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	√			
15	Jasa Pendidikan	√			
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial				√
17	Jasa Lainnya				√

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan Hasil olah data yang telah dilakukan pada Kabupaten Indragiri Hilir, maka klasifikasi pembagian sektor terbagi menjadi 3 yaitu sektor maju dan tumbuh cepat, sektor potensial atau berkembang cepat dan sektor relatif tertinggal. Sektor maju dan cepat tumbuh pada Kabupaten Indragiri Hilir yaitu terdiri dari pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; administrasi

pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; dan jasa pendidikan. Sedangkan sektor yang termasuk pada kategori sektor potensial atau berkembang dengan cepat yaitu pertambangan dan penggalan; konstruksi; jasa keuangan dan asuransi; real estate. Dan, yang terakhir adalah sektor dengan kategori sektor relatif tertinggal di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari pengadaan listrik dan gas; informasi dan komunikasi; jasa perusahaan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.35 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Indragiri Hilir.



**Tabel 5. 35 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Indragiri Hilir**

Sektor (Si)	Pertumbuhan Sektor	
	$gi \geq g$	$gi < g$
$si >= s$	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Pendidikan.	

si<s	Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate;	Pengadaan Listrik dan Gas; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.
------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Hasil Analisis, 2022

### 5.2.2.5 Analisis Pola Disparitas antar Sektor Kabupaten Kampar

Hasil yang didapatkan terhadap disparitas antar sektor Kabupaten Kampar yang di ambil melalui perbandingan data laju pertumbuhan dan kontribusi antara Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau, maka didapatkan hasil seperti pada Tabel 5.36 Tabel Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Kampar.

**Tabel 5. 36 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Kampar**

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	√			
2	Pertambangan dan Penggalian	√			
3	Industri Pengolahan	√			
4	Pengadaan Listrik dan Gas			√	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang				√
6	Konstruksi			√	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM				√

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
8	Transportasi dan Pergudangan			√	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum				√
10	Informasi dan Komunikasi				√
11	Jasa Keuangan dan Asuransi				√
12	Real Estate		√		
13	Jasa Perusahaan		√		
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial			√	
15	Jasa Pendidikan		√		
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		√		
17	Jasa Lainnya				√

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan Hasil olah data yang telah dilakukan pada Kabupaten Kampar, maka klasifikasi pembagian sektor terbagi menjadi 4 yaitu sektor maju dan tumbuh cepat, sektor maju tapi tertekan, sektor potensial atau berkembang cepat dan sektor relatif tertinggal. Sektor maju dan cepat tumbuh pada Kabupaten Kampar yaitu terdiri dari pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan. Selanjutnya sektor maju tapi tertekan terdiri dari sektor real estate; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Selanjutnya ada sektor potensail atau berkembang cepat yang terdiri dari pengadaan listrik dan gas; konstruksi;

transportasi dan pergudangan; dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Dan, yang terakhir adalah sektor dengan kategori sektor relatif tertinggal di Kabupaten Kampar terdiri dari pengadaan air pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; perdagangan besar dan ecerean; reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; dan jasa lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.37 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Kampar.

**Tabel 5. 37 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Kampar**

Sektor (Si)	Pertumbuhan Sektor	
	gi>=g	gi<g
si>=s	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan;	Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
si<s	Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Ecerean; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; dan Jasa Lainnya.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

#### 5.2.2.6 Analisis Pola Disparitas antar Sektor Kabupaten Bengkalis

Hasil yang didapatkan terhadap disparitas antar sektor Kabupaten Bengkalis yang di ambil melalui perbandingan data laju pertumbuhan dan kontribusi antara Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau, maka didapatkan hasil seperti pada Tabel 5.38 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Bengkalis.

**Tabel 5. 38 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Bengkalis**

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			√	
2	Pertambangan dan Penggalian		√		
3	Industri Pengolahan			√	
4	Pengadaan Listrik dan Gas				√
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang		√		
6	Konstruksi			√	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM			√	
8	Transportasi dan Pergudangan				√
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			√	
10	Informasi dan Komunikasi			√	
11	Jasa Keuangan dan Asuransi				√
12	Real Estate				√
13	Jasa Perusahaan			√	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial			√	
15	Jasa Pendidikan			√	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial				√
17	Jasa Lainnya			√	

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan Hasil olah data yang telah dilakukan pada Kabupaten Bengkalis, maka klasifikasi pembagian sektor terbagi menjadi 3 yaitu sektor sektor maju tapi tertekan, sektor potensial atau berkembang cepat dan sektor relatif tertinggal. Sektor maju tapi tertekan pada Kabupaten Bengkalis yaitu terdiri dari pertambangan dan penggalian; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang . Selanjutnya ada sektor potensial atau berkembang cepat yang terdiri dari pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Dan, yang terakhir adalah sektor dengan kategori sektor relatif tertinggal di Kabupaten Bengkalis terdiri dari pengadaan listrik dan gas; transportasi dan pergudangan; jasa keuangan dan asuransi; real estate; dan jasa pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.39 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Bengkalis.

**Tabel 5. 39 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Bengkalis**

Sektor (Si)	Pertumbuhan Sektor	
	$g_i \geq g$	$g_i < g$
$s_i \geq s$		Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

si<s	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.	Pengadaan Listrik dan Gas; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; dan Jasa Pendidikan.
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Hasil Analisis, 2022

### 5.2.2.7 Analisis Pola Disparitas antar Sektor Kabupaten Siak

Hasil yang didapatkan terhadap disparitas antar sektor Kabupaten Siak yang di ambil melalui perbandingan data laju pertumbuhan dan kontribusi antara Kabupaten Siak dan Provinsi Riau, maka didapatkan hasil seperti pada Tabel 5.40 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Siak.

**Tabel 5. 40 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Siak**

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan				√
2	Pertambangan dan Penggalian		√		



No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
3	Industri Pengolahan		√		
4	Pengadaan Listrik dan Gas			√	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang		√		
6	Konstruksi				√
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM			√	
8	Transportasi dan Pergudangan			√	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			√	
10	Informasi dan Komunikasi				√
11	Jasa Keuangan dan Asuransi			√	
12	Real Estate			√	
13	Jasa Perusahaan		√		
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial			√	
15	Jasa Pendidikan		√		
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		√		
17	Jasa Lainnya		√		

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan Hasil olah data yang telah dilakukan pada Kabupaten Siak, maka klasifikasi pembagian sektor terbagi menjadi 3 yaitu sektor maju tapi tertekan, sektor potensial atau berkembang cepat dan sektor relatif tertinggal.

Sektor maju tapi tertekan pada kabupaten siak terdiri dari pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengaduan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa perusahaan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya. Selanjutnya ada sektor potensial atau berkembang cepat yang terdiri dari pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Dan, yang terakhir adalah sektor dengan kategori sektor relatif tertinggal di kabupaten siak terdiri dari pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi; informasi dan komunikasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.41 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Siak.

**Tabel 5. 41 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Siak**

Sektor (Si)	Pertumbuhan Sektor	
	gi>=g	gi<g
si>=s		Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengaduan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.
si<s	Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi;

Sumber: Hasil Analisis, 2022

### 5.2.2.8 Analisis Pola Disparitas antar Sektor Kabupaten Kepulauan Meranti

Hasil yang didapatkan terhadap disparitas antar sektor Kabupaten Kepulauan Meranti yang di ambil melalui perbandingan data laju pertumbuhan dan kontribusi antara Kabupaten Kepulauan Meranti dan Provinsi Riau, maka didapatkan hasil seperti pada Tabel 5.42 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Kepulauan Meranti.

**Tabel 5. 42 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	√			
2	Pertambangan dan Penggalian			√	
3	Industri Pengolahan			√	
4	Pengadaan Listrik dan Gas				√
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	√			
6	Konstruksi			√	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM			√	
8	Transportasi dan Pergudangan		√		
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			√	
10	Informasi dan				√

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
	Komunikasi				
11	Jasa Keuangan dan Asuransi				√
12	Real Estate			√	
13	Jasa Perusahaan	√			
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	√			
15	Jasa Pendidikan				√
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial				√
17	Jasa Lainnya				√

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan Hasil olah data yang telah dilakukan pada Kabupaten Kepulauan Meranti, maka klasifikasi pembagian sektor terbagi menjadi 4 yaitu sektor maju dan tumbuh cepat, sektor maju tapi tertekan, sektor potensial atau berkembang cepat dan sektor relatif tertinggal. Sektor maju dan cepat tumbuh pada Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu terdiri dari pertanian, kehutanan dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan Sosial Wajib. Selanjutnya sektor maju tapi tertekan hanya sektor Transportasi dan Pergudangan. Selanjutnya ada sektor potensial atau berkembang cepat yang terdiri dari pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum dan; real estate. Dan, yang terakhir adalah sektor dengan kategori sektor relatif tertinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti

terdiri dari pengadaan listrik dan gas; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan; jasa lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.43 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Kepulauan Meranti.

**Tabel 5. 43 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Kepulauan Meranti**

Sektor (Si)	Pertumbuhan Sektor	
	gi>=g	gi<g
si>=s	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;	Transportasi dan Pergudangan;
si<s	Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate;	Pengadaan Listrik dan Gas; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan; Jasa Lainnya.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

### 5.2.2.9 Analisis Pola Disparitas antar Sektor Kuantan Singingi

Hasil yang didapatkan terhadap disparitas antar sektor Kabupaten Kuantan Singingi yang di ambil melalui perbandingan data laju pertumbuhan dan kontribusi antara Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau, maka didapatkan hasil seperti pada Tabel 5.44 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel 5. 44 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	√			
2	Pertambangan dan Penggalian			√	
3	Industri Pengolahan	√			
4	Pengadaan Listrik dan Gas			√	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang		√		
6	Konstruksi				√
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM				√
8	Transportasi dan Pergudangan			√	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			√	
10	Informasi dan Komunikasi				√
11	Jasa Keuangan dan Asuransi			√	
12	Real Estate				√
13	Jasa Perusahaan				√
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	√			
15	Jasa Pendidikan	√			
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial				√
17	Jasa Lainnya				√

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan Hasil olah data yang telah dilakukan pada Kabupaten Kuantan Singingi, maka klasifikasi pembagian sektor terbagi menjadi 4 yaitu sektor maju dan tumbuh cepat, sektor maju tapi tertekan, sektor potensial atau berkembang cepat dan sektor relatif tertinggal. Sektor maju dan cepat tumbuh pada Kabupaten Kuantan Singingi yaitu terdiri dari pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan. Selanjutnya sektor maju tapi tertekan terdiri dari sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Selanjutnya ada sektor potensial atau berkembang cepat yang terdiri dari pertambangan dan penggalan; pengadaan listrik dan gas; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi. Dan, yang terakhir adalah sektor dengan kategori sektor relatif tertinggal di Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; informasi dan komunikasi; real estate; jasa perusahaan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.45 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel 5. 45 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Kuantan Singingi**

Sektor (Si)	Pertumbuhan Sektor	
	$g_i \geq g$	$g_i < g$
$s_i \geq s$	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;

si<s	Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi;	Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Hasil Analisis, 2022

### 5.2.2.10 Analisis Pola Disparitas antar Sektor Kabupaten Pelalawan

Hasil yang didapatkan terhadap disparitas antar sektor Kabupaten Pelalawan yang di ambil melalui perbandingan data laju pertumbuhan dan kontribusi antara Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau, maka didapatkan hasil seperti pada Tabel 5.46 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Pelalawan.

**Tabel 5. 46 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Pelalawan**

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		√		
2	Pertambangan dan Penggalian			√	
3	Industri Pengolahan		√		
4	Pengadaan Listrik dan Gas			√	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang			√	
6	Konstruksi			√	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM			√	



No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
8	Transportasi dan Pergudangan			√	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			√	
10	Informasi dan Komunikasi				√
11	Jasa Keuangan dan Asuransi				√
12	Real Estate			√	
13	Jasa Perusahaan			√	
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial			√	
15	Jasa Pendidikan			√	
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial				√
17	Jasa Lainnya				√

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan Hasil olah data yang telah dilakukan pada Kabupaten Pelalawan, maka klasifikasi pembagian sektor terbagi menjadi 3 yaitu sektor sektor maju tapi tertekan, sektor potensial atau berkembang cepat dan sektor relatif tertinggal. Selanjutnya sektor maju tapi tertekan terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan. Selanjutnya ada sektor potensial atau berkembang cepat yang terdiri dari pertambangan dan penggalian; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial; jasa

pendidikan. Dan, yang terakhir adalah sektor dengan kategori sektor relatif tertinggal di Kabupaten Pelalawan terdiri dari informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan; dan jasa lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.47 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Pelalawan.

**Tabel 5. 47 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Pelalawan**

Sektor (Si)	Pertumbuhan Sektor	
	gi>=g	gi<g
si>=s		Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan;
si<s	Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; Jasa Pendidikan.	Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan; dan Jasa Lainnya.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

#### 5.2.2.11 Analisis Pola Disparitas antar Sektor Rokan Hulu

Hasil yang didapatkan terhadap disparitas antar sektor Kabupaten Rokan Hulu yang di ambil melalui perbandingan data laju pertumbuhan dan kontribusi antara Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau, maka didapatkan hasil seperti pada Tabel 5.48 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Rokan Hulu.

**Tabel 5. 48 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Rokan Hulu**

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	√			
2	Pertambangan dan Penggalian			√	
3	Industri Pengolahan			√	
4	Pengadaan Listrik dan Gas				√
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang			√	
6	Konstruksi				√
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM				√
8	Transportasi dan Pergudangan			√	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum				√
10	Informasi dan Komunikasi		√		
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	√			
12	Real Estate				√
13	Jasa Perusahaan		√		
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	√			
15	Jasa Pendidikan				√
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		√		
17	Jasa Lainnya		√		

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan Hasil olah data yang telah dilakukan pada Kabupaten Rokan Hulu, maka klasifikasi pembagian sektor terbagi menjadi 4 yaitu sektor

maju dan tumbuh cepat, sektor maju tapi tertekan, sektor potensial atau berkembang cepat dan sektor relatif tertinggal. Sektor maju dan cepat tumbuh pada Kabupaten Rokan Hulu yaitu terdiri dari pertanian, kehutanan, dan perikanan; jasa keuangan dan asuransi; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Selanjutnya sektor maju tapi tertekan terdiri dari sektor Informasi dan komunikasi; jasa perusahaan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya. Selanjutnya ada sektor potensail atau berkembang cepat yang terdiri dari pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; transportasi dan pergudangan. Dan, yang terakhir adalah sektor dengan kategori sektor relatif tertinggal di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari pengadaan listrik dan gas; konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; real estate; jasa pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.49 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Rokan Hulu.

**Tabel 5. 49 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Rokan Hulu**

Sektor (Si)	Pertumbuhan Sektor	
	$gi \geq g$	$gi < g$
$si \geq s$	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib;	Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.
$si < s$	Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan;	Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Jasa Pendidikan.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

### 5.2.2.12 Analisis Pola Disparitas antar Sektor Kabupaten Rokan Hilir

Hasil yang didapatkan terhadap disparitas antar sektor Kabupaten Rokan Hilir yang di ambil melalui perbandingan data laju pertumbuhan dan kontribusi antara Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau, maka didapatkan hasil seperti pada Tabel 5.50 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Rokan Hilir.

**Tabel 5. 50 Hasil Analisis Tipologi Sektor Kabupaten Rokan Hilir**

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	√			
2	Pertambangan dan Penggalian	√			
3	Industri Pengolahan			√	
4	Pengadaan Listrik dan Gas			√	
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	√			
6	Konstruksi			√	
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SM				√
8	Transportasi dan Pergudangan			√	
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum			√	
10	Informasi dan Komunikasi				√
11	Jasa Keuangan dan Asuransi			√	
12	Real Estate				√

No	Sektor	Klasifikasi			
		Sektor Maju dan Tumbuh Cepat	Sektor Maju Tapi Tertekan	Sektor Potensial atau Berkembang Cepat	Sektor Relatif Tertinggal
13	Jasa Perusahaan		√		
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial				√
15	Jasa Pendidikan				√
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial				√
17	Jasa Lainnya				√

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan Hasil olah data yang telah dilakukan pada Kabupaten Rokan Hilir, maka klasifikasi pembagian sektor terbagi menjadi 4 yaitu sektor maju dan tumbuh cepat, sektor maju tapi tertekan, sektor potensial atau berkembang cepat dan sektor relatif tertinggal. Sektor maju dan cepat tumbuh pada kabupaten rokan hilir yaitu terdiri dari pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Selanjutnya sektor maju tapi tertekan hanya sektor jasa perusahaan. Selanjutnya ada sektor potensial atau berkembang cepat yang terdiri dari industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; konstruksi; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum dan; jasa keuangan dan asuransi. Dan, yang terakhir adalah sektor dengan kategori sektor relatif tertinggal di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan

dan kegiatan sosial dan; jasa lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.51 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Rokan Hilir

**Tabel 5. 51 Klasifikasi Tipologi Sektor Kabupaten Rokan Hilir**

Sektor (Si)	Pertumbuhan Sektor	
	gi>=g	gi<g
si>=s	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;	Jasa Perusahaan.
si<s	Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan; Jasa Keuangan dan Asuransi.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan; Jasa Lainnya.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

### 5.3 Analisis Tingkat Disparitas Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2011-2020

Analisis yang digunakan untuk melihat tingkat disparitas ekonomi yang terjadi di Provinsi Riau antar wilayah periode tahun 2011-2020 dengan menggunakan analisis *Indeks Williamson*. Dimana pada dasarnya dengan melihat PDRB Perkapita dan jumlah penduduk pada suatu wilayah. PDRB Perkapita setiap kabupaten didapat dari PDRB atas dasar harga konstan antar kabupaten di Provinsi Riau yang dibagi dengan jumlah penduduk masing-masing kabupaten. Berikut peneliti menyajikan tabel-tabel berisi hasil analisis angka Indeks Williamson tahun 2011-2020.

**Tabel 5. 52 Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2011**

No	Kabupaten	Penduduk	PDRB	PDRB Perkapita (Yi)	Peluang Penduduk	(Yi-y)	(Yi-y) <sup>2</sup>	(P/ZP) <sup>(Yi-y)<sup>2</sup></sup>	
1	Kota Pekanbaru	930.215,00	44.845.770,00	48,21011272	0,162099509	6,715913	45,10348728	7,311253121	
2	Kota Dumai	262.976	18.242.262	69,36854314	0,045826266	27,87434	776,9790205	35,60604755	
3	Kabupaten Indragiri Hulu	376.578	21.874.124	58,08656905	0,065622581	16,59237	275,3067198	18,06633738	
4	Kabupaten Indragiri Hilir	685.698	30.066.529	43,84806285	0,119489912	2,353863	5,540671602	0,662054364	
5	Kabupaten Kampar	713.078	39.378.306	55,22299945	0,124261158	13,7288	188,4799418	23,42073588	
6	Kabupaten Rohul	492.006	1702672	3,460673244	0,085737094	-38,0335	1446,549137	124,0229192	
7	Kabupaten Rohil	573.211	399643	0,697200507	0,162099509	-40,797	1664,395145	269,7976351	
8	Kabupaten Bengkalis	516.348	919993	1,781730538	0,089978937	-39,7125	1577,080209	141,904001	
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	182.662	9.287.925	50,84760377	0,031830728	9,353404	87,48616721	2,784748372	
10	Kabupaten Siak	390.359	33.530.068	85,89546546	0,068024061	44,40127	1971,472398	134,107559	
11	Kabupaten Pelalawan	312.738	25.161.103	80,45425564	0,054497805	38,96006	1517,885957	82,72145357	
12	Kabupaten Kuantan Singingi	302.674	17.307	0,057180366	0,05274405	-41,437	1717,026574	90,56293577	
<b>Jumlah</b>		5.738.543,00		41,49419973				930,9676802	
								30,51176298	
								<b>IW</b>	0,73

Sumber: Hasil Analisis, 2022



**Tabel 5. 53 Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2012**

No	Kabupaten	Penduduk	PDRB	PDRB Perkapita (Yi)	Peluang Penduduk	(Yi-y)	(Yi-y) <sup>2</sup>	(P/ZP) <sup>(Yi-y)<sup>2</sup></sup>
1	Kota Pekanbaru	964.558	48.351.737	50,1283873	0,162679227	7,493268	56,14907049	9,134287402
2	Kota Dumai	271.552	18.909.846	69,63618754	0,045799081	27,00107	729,0577048	33,39017255
3	Kabupaten Indragiri Hulu	388.916	23.708.459	60,96035905	0,065593313	18,32524	335,8144244	22,0271805
4	Kabupaten Indragiri Hilir	689.938	32.444.529	47,02528198	0,116362708	4,390163	19,27353138	2,2427203
5	Kabupaten Kampar	739.655	41.668.547	56,33511164	0,124747816	13,69999	187,6897995	23,41389257
6	Kabupaten Rohul	517.577	1.806.905	3,491084418	0,08729286	-39,144	1532,25544	133,7549596
7	Kabupaten Rohil	595.695	399608	0,670826514	0,100467989	-41,9643	1761,00184	176,9243131
8	Kabupaten Bengkalis	530.191	91397	0,172385046	0,089420296	-42,4627	1803,083771	161,2322852
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	183.135	9.909.809	54,11204303	0,030886956	11,47692	131,7197861	4,06842321
10	Kabupaten Siak	405.850	34.546.110	85,12038931	0,068449346	42,48527	1804,998197	123,5509463
11	Kabupaten Pelalawan	332.075	25.920.639	78,05658059	0,056006694	35,42146	1254,679944	70,27047527
12	Kabupaten Kuantan Singingi	310.060	1833320	5,912791073	0,052293715	-36,7223	1348,529365	70,5196104
<b>Jumlah</b>		5.929.202		42,63511896				830,5292664
								28,81890467
<b>IW</b>								0,67

Sumber: Hasil Analisis,2022

**Tabel 5. 54 Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2013**

No	Kabupaten	Penduduk	PDRB	PDRB Perkapita (Yi)	Peluang Penduduk	(Yi-y)	(Yi-y) <sup>2</sup>	(P/ZP) <sup>(Yi-y)<sup>2</sup></sup>	
1	Kota Pekanbaru	999.031	51.053.167	51,1026855	0,163099566	7,821565	61,17687561	9,977921872	
2	Kota Dumai	280.027	19.605.668	70,01349156	0,045716582	26,73237	714,6196504	32,66996755	
3	Kabupaten Indragiri Hulu	401.201	25.180.130	62,76188245	0,065499178	19,48076	379,5000774	24,85694303	
4	Kabupaten Indragiri Hilir	697.814	34.769.508	49,82632621	0,113923553	6,545205	42,83971492	4,880452516	
5	Kabupaten Kampar	766.351	41.297.583	53,88860065	0,12511275	10,60748	112,5186305	14,07751528	
6	Kabupaten Rohul	543.857	1915056	3,521249152	0,088788877	-39,7599	1580,847387	140,3616645	
7	Kabupaten Rohil	618.355	414182	0,669812648	0,100951254	-42,6113	1815,723576	183,2995719	
8	Kabupaten Bengkalis	543.786	884111	1,625843622	0,088777286	-41,6553	1735,16211	154,0429827	
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	183.912	10.329.760	56,16686241	0,030025062	12,88574	166,0423389	4,985431471	
10	Kabupaten Siak	421.477	36.254.780	86,0184067	0,068809392	42,73729	1826,475613	125,6786767	
11	Kabupaten Pelalawan	352.207	27.360.639	77,68340493	0,057500527	34,40228	1183,517159	68,05286024	
12	Kabupaten Kuantan Singingi	317.265	1933693	6,094882827	0,051795974	-37,1862	1382,816289	71,62431676	
<b>Jumlah</b>		6.125.283		43,28112072				834,5083045	
								28,88785739	
								<b>IW</b>	0,66

Sumber: Hasil Analisis,2022

**Tabel 5. 55 Hasil Analisis Indeks Williaimson Tahun 2014**

No	Kabupaten	Penduduk	PDRB	PDRB Perkapita (Yi)	Peluang Penduduk	(Yi-y)	(Yi-y) <sup>2</sup>	(P/ZP) <sup>(Yi-y)<sup>2</sup></sup>	
1	Kota Pekanbaru	1.011.467	54.570.280	53,95161681	0,163444531	8,722949	76,089845	12,43646903	
2	Kota Dumai	280.109	20.204.796	72,13190579	0,04526325	26,90324	723,7842317	32,76082694	
3	Kabupaten Indragiri Hulu	400.901	26.572.896	66,28293768	0,064782218	21,05427	443,2822937	28,71681028	
4	Kabupaten Indragiri Hilir	694.614	37.155.800	53,49129157	0,11224376	8,262624	68,27095678	7,662988902	
5	Kabupaten Kampar	773.171	45.816.466	59,25786922	0,124937908	14,0292	196,8185013	24,5900919	
6	Kabupaten Rohul	568.576	2038326	3,584966654	0,091877083	-41,6437	1734,197819	159,3330371	
7	Kabupaten Rohil	627.233	424509	0,676796342	0,101355559	-44,5519	1984,869222	201,1775301	
8	Kabupaten Bengkalis	536.138	850037	1,585481723	0,086635376	-43,6432	1904,727663	165,0167974	
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	179.894	10.788.877	59,9735233	0,029069352	14,74486	217,410773	6,319990331	
10	Kabupaten Siak	428.499	37.806.325	88,22966915	0,069241822	43,001	1849,086144	128,0340938	
11	Kabupaten Pelalawan	377.221	29.058.309	77,03258567	0,06095573	31,80392	1011,489212	61,65606338	
12	Kabupaten Kuantan Singingi	310.619	2.033.115	6,545365866	0,050193409	-38,6833	1496,397824	75,10930791	
<b>Jumlah</b>		6.188.442		45,22866748				902,8140071	
								30,04686352	
								<b>IW</b>	0,66

Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Tabel 5. 56 Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2015**

No	Kabupaten	Penduduk	PDRB	PDRB Perkapita (Yi)	Peluang Penduduk	(Yi-y)	(Yi-y) <sup>2</sup>	(P/ZP) <sup>(Yi-y)<sup>2</sup></sup>	
1	Kota Pekanbaru	1.038.118	57.557.348	55,44393605	0,163627399	11,10137	123,2405188	20,16552559	
2	Kota Dumai	285.967	20.445.652	71,49654331	0,045073909	27,15398	737,3387328	33,23473913	
3	Kabupaten Indragiri Hulu	409.431	25.804.982	63,0264489	0,064534215	18,68389	349,0876517	22,52809742	
4	Kabupaten Indragiri Hilir	703.734	37.922.057	53,88691892	0,110922038	9,544358	91,09476027	10,10441646	
5	Kabupaten Kampar	793.005	46.304.582	58,39128631	0,124992868	14,04872	197,3666713	24,66942624	
6	Kabupaten Rohul	592.278	2077897	3,508313664	0,093354425	-40,8342	1667,435789	155,6625091	
7	Kabupaten Rohil	644.680	441532	0,684885525	0,10161399	-43,6577	1905,992664	193,6755191	
8	Kabupaten Bengkalis	543.987	826764	1,519823084	0,085742833	-42,8227	1833,786918	157,2340851	
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	181.095	11.077.555	61,1698556	0,028544061	16,82729	283,1578297	8,082474467	
10	Kabupaten Siak	440.841	38.786.333	87,98259009	0,069485036	43,64003	1904,452103	132,3309226	
11	Kabupaten Pelalawan	396.990	29.774.302	75,00013099	0,062573273	30,65757	939,8865722	58,81177931	
12	Kabupaten Kuantan Singingi	314.276	1,414293981	4,50017E-06	0,049535953	-44,3426	1966,262353	97,40067975	
<b>Jumlah</b>		6.344.402		44,34256141				913,9001743	
								30,2307819	
								<b>IW</b>	0,68

Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Tabel 5. 57 Indeks Williamson Tahun 2016**

No	Kabupaten	Penduduk	PDRB	PDRB Perkapita (Yi)	Peluang Penduduk	(Yi-y)	(Yi-y) <sup>2</sup>	(P/ZP) <sup>(Yi-y)<sup>2</sup></sup>	
1	Kota Pekanbaru	1.064.566	60.891.070	57,19802248	0,163754922	2,094539	4,387095286	0,718408447	
2	Kota Dumai	291.908	2139157	7,328189018	0,044902215	-47,7753	2282,478723	102,4883512	
3	Kabupaten Indragiri Hulu	417.733,00	26.742.942	64,0192228	0,064257016	8,91574	79,49041478	5,107816884	
4	Kabupaten Indragiri Hilir	713.034,00	39.697.572	55,67416421	0,109681154	0,570681	0,325676943	0,035720623	
5	Kabupaten Kampar	812.702,00	47.610.214	58,58262192	0,125012402	3,479139	12,10440705	1,513201	
6	Kabupaten Rohul	616.466	2179297	3,535145491	0,094826757	-51,5683	2659,293442	252,1721741	
7	Kabupaten Rohil	662.242	45.555.997	68,79055844	0,101868167	13,68708	187,3360317	19,08357818	
8	Kabupaten Bengkalis	551.683	80.577.991	146,0584992	0,084861631	90,95502	8272,814952	702,0445671	
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	182.152	1145108	6,286551891	0,028019199	-48,8169	2383,092771	66,77235054	
10	Kabupaten Siak	453.052	51.577.220	113,8439296	0,069689897	58,74045	3450,440059	240,4608126	
11	Kabupaten Pelalawan	417.498	30.654.217	73,42362598	0,064220868	18,32014	335,6276358	21,55429807	
12	Kabupaten Kuantan Singingi	317.935	2066980	6,501265982	0,048905771	-48,6022	2362,175507	115,5240148	
<b>Jumlah</b>		6.500.971		55,10348308				1527,475294	
								39,08292842	
								<b>IW</b>	0,70

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 5. 58 Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2017

No	Kabupaten	Penduduk	PDRB	PDRB Perkapita (Yi)	Peluang Penduduk	(Yi-y)	(Yi-y) <sup>2</sup>	(P/ZP) <sup>(Yi-y)<sup>2</sup></sup>	
1	Kota Pekanbaru	1.091.088	64.619.259	59,22460791	0,16387843	4,77174	22,76949863	3,731429682	
2	Kota Dumai	297.638	2234483	7,50738481	0,044704413	-46,9455	2203,878423	98,52309022	
3	Kabupaten Indragiri Hulu	425.897	27.807.309	65,2911596	0,063968563	10,83829	117,4685576	7,514294839	
4	Kabupaten Indragiri Hilir	722.234	41.491.371	57,44865376	0,108477569	2,995785	8,974730328	0,973556929	
5	Kabupaten Kampar	832.387	49.022.012	58,89329362	0,125022248	4,440425	19,71737677	2,465110768	
6	Kabupaten Rohul	641.208	2296545	3,581591309	0,096307686	-50,8713	2587,886826	249,2333911	
7	Kabupaten Rohil	679.663	42.265.171	62,18548163	0,102083521	7,732613	59,79330838	6,103911475	
8	Kabupaten Bengkalis	559.081	79.189.782	141,6427709	0,083972435	87,1899	7602,07911	638,3650955	
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	183.297	1182731	6,452538776	0,027530707	-48,0003	2304,031638	63,43162098	
10	Kabupaten Siak	465.414	52.029.653	111,7921958	0,069903908	57,33933	3287,79847	229,8299628	
11	Kabupaten Pelalawan	438.788	31.899.178	72,69838282	0,065904756	18,24551	332,8987988	21,93961411	
12	Kabupaten Kuantan Singingi	321.216	2157402	6,716359085	0,048245764	-47,7365	2278,774315	109,9412068	
<b>Jumlah</b>		6.657.911		54,45286833				1432,052285	
								37,84246669	
								<b>IW</b>	0,69

Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Tabel 5. 59 Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2018**

No	Kabupaten	Penduduk	PDRB	PDRB Perkapita (Yi)	Peluang Penduduk	(Yi-y)	(Yi-y) <sup>2</sup>	(P/ZP) <sup>(Yi-y)<sup>2</sup></sup>	
1	Kota Pekanbaru	1.117.359	68.104.593	60,95139789	0,163958022	6,352604	40,35557617	6,616620447	
2	Kota Dumai	303.292	2353847	7,760992707	0,044504189	-46,8378	2193,779631	97,6323839	
3	Kabupaten Indragiri Hulu	433.934	28.778.036	66,31892408	0,063674218	11,72013	137,3614489	8,746382813	
4	Kabupaten Indragiri Hilir	731.396	42.988.737	58,77628125	0,10732293	4,177487	17,45139966	1,87293534	
5	Kabupaten Kampar	851.837	49.958.841	58,64835761	0,124996093	4,049564	16,39896537	2,049806603	
6	Kabupaten Rohul	666.410	2392569	3,590235741	0,097787072	-51,0086	2601,873016	254,4295451	
7	Kabupaten Rohil	697.218	46.136.679	66,17252997	0,102307749	11,57374	133,9513642	13,70426255	
8	Kabupaten Bengkalis	566.228	77.848.258	137,4857089	0,083086656	82,88691	6870,240667	570,8253232	
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	184.372	1230437	6,673665199	0,027054213	-47,9251	2296,817971	62,13860273	
10	Kabupaten Siak	477.670	52.595.328	110,108083	0,070091912	55,50929	3081,281163	215,9728873	
11	Kabupaten Pelalawan	460.780	33.056.062	71,73935935	0,067613522	17,14057	293,7989802	19,86478383	
12	Kabupaten Kuantan Singingi	324.413	2257912	6,959992355	0,047603424	-47,6388	2269,455423	108,0338479	
<b>Jumlah</b>		6.814.909		54,59879401				1361,887382	
								36,90375837	
								<b>IW</b>	0,67

Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Tabel 5. 60 Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2019**

No	Kabupaten	Penduduk	PDRB	PDRB Perkapita (Yi)	Peluang Penduduk	(Yi-y)	(Yi-y) <sup>2</sup>	(P/ZP) <sup>(Yi-y)<sup>2</sup></sup>	
1	Kota Pekanbaru	1.143.359	72.181.895	63,13143553	0,165064399	7,970073	63,52205701	10,48523016	
2	Kota Dumai	308.812	2485582	8,048851729	0,044582556	-47,1125	2219,588713	98,95493912	
3	Kabupaten Indragiri Hulu	441.789	29.866.449	67,60342381	0,063780174	12,44206	154,8048784	9,87348205	
4	Kabupaten Indragiri Hilir	740.598	44.775.564	60,45866178	0,106918618	5,297299	28,06137496	3,000283419	
5	Kabupaten Kampar	871.117	51.888.864	59,56589528	0,125761379	4,404532	19,39990508	2,439758806	
6	Kabupaten Rohul	692.120	2510165	3,626777148	0,099919948	-51,5346	2655,813534	265,3687501	
7	Kabupaten Rohil	714.497	46.436.793	64,99228548	0,10315047	9,830923	96,64703787	9,969187348	
8	Kabupaten Bengkalis	573.003	76.376.990	133,2924784	0,08272327	78,13112	6104,471202	504,9818222	
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	185.516	1262943	6,80773087	0,026782565	-48,3536	2338,073735	62,61961239	
10	Kabupaten Siak	489.996	53.366.526	108,9121666	0,07073972	53,7508	2889,148896	204,3775832	
11	Kabupaten Pelalawan	438.622	34.336.470	78,28259868	0,06332296	23,12124	534,591542	33,85191909	
12	Kabupaten Kuantan Singingi	327.316	2361274	7,214050031	0,047253941	-47,9473	2298,944816	108,6342028	
<b>Jumlah</b>		6.926.745		55,16136295				1314,556771	
								36,25681689	
								<b>IW</b>	0,65

Sumber: Hasil Analisis, 2022



**Tabel 5. 61 Hasil Analisis Indeks Williamson Tahun 2020**

No	Kabupaten	Penduduk	PDRB	PDRB Perkapita (Yi)	Peluang Penduduk	(Yi-y)	(Yi-y) <sup>2</sup>	(P/ZP) <sup>(Yi-y)<sup>2</sup></sup>	
1	Kota Pekanbaru	983.356	69.016.920	70,18508048	0,153791464	12,34334	152,358085	23,43137292	
2	Kota Dumai	316.782	24596	0,0776433	0,049542961	-57,7641	3336,690724	165,3095369	
3	Kabupaten Indragiri Hulu	444.548	29.830.890	67,1038673	0,069524859	9,262129	85,78702519	5,964330869	
4	Kabupaten Indragiri Hilir	654.909	44.927.611	68,60130339	0,102424162	10,75956	115,7682311	11,85746401	
5	Kabupaten Kampar	841.332	51.423.899	61,12200534	0,131579692	3,280267	10,7601489	1,415817082	
6	Kabupaten Rohul	561.385	2547988	4,538753262	0,087797523	-53,303	2841,208262	249,4510476	
7	Kabupaten Rohil	637.161	45.992.509	72,18349679	0,099648472	14,34176	205,6860237	20,49629799	
8	Kabupaten Bengkalis	565.569	73.856.113	130,5872723	0,088451877	72,74553	5291,912649	468,0796093	
9	Kabupaten Kepulauan Meranti	206.116	1268387	6,153753226	0,032235407	-51,688	2671,647848	86,12165706	
10	Kabupaten Siak	457.940	53.313.850	116,4210377	0,071619295	58,5793	3431,534264	245,7640631	
11	Kabupaten Pelalawan	390.046	35.107.147	90,00770935	0,061001047	32,16597	1034,649664	63,11471254	
12	Kabupaten Kuantan Singingi	334.943	2.384.440	7,118942626	0,052383241	-50,7228	2572,802047	134,7717096	
<b>Jumlah</b>		6.394.087		57,84173875				1475,777619	
								38,41585114	
								<b>IW</b>	0,66

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Untuk melihat perbandingan tingkat disparitas pada Provinsi Riau dari tahun 2011-2020 seperti yang telah dijabarkan pada tabel-tabel diatas maka *Indeks Willimason* memiliki 3 kategori dalam mengambil kesimpulan dari indeks yang diperoleh yaitu yang pertama jika  $0,1 < IW < 0,35$  maka tingkat ketimpangan termasuk rendah, kedua jika hasil penelitian  $0,35 < IW < 0,50$  maka tingkat ketimpangan sedang, dan apabila  $IW > 0,50$  maka indikasi ketimpangan yang terjadi termasuk tinggi. Berikut dibawah ini adalah Tabel 5.39 Kategori Tingkat Disparitas Indeks Williamson

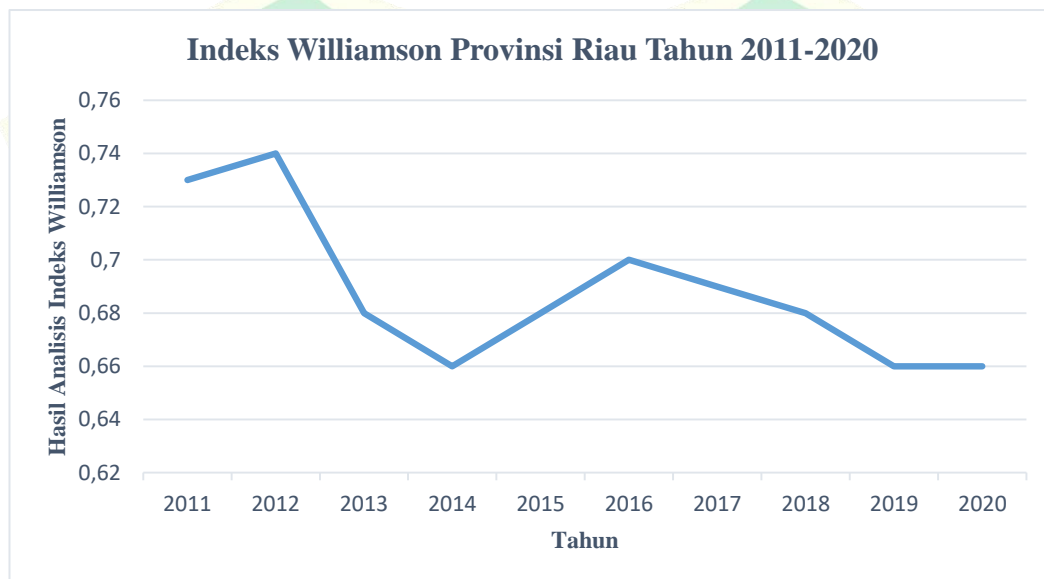
**Tabel 5. 62 Kategori Tingkat Disparitas Indeks Williamson**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Indeks Williamson (IW)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>2011</b>	0,73	Ketimpangan Level Tinggi
<b>2012</b>	0,74	Ketimpangan Level Tinggi
<b>2013</b>	0,68	Ketimpangan Level Tinggi
<b>2014</b>	0,66	Ketimpangan Level Tinggi
<b>2015</b>	0,68	Ketimpangan Level Tinggi
<b>2016</b>	0,70	Ketimpangan Level Tinggi
<b>2017</b>	0,69	Ketimpangan Level Tinggi
<b>2018</b>	0,68	Ketimpangan Level Tinggi
<b>2019</b>	0,66	Ketimpangan Level Tinggi
<b>2020</b>	0,66	Ketimpangan Level Tinggi
<b>Rata-rata</b>	0,69	Ketimpangan Level Tinggi

*Sumber: Hasil Analisis, 2022*

Rata-rata nilai Indeks Williamson selama periode penelitian adalah 0,69. Nilai tersebut menunjukkan bahwa disparitas Provinsi Riau tergolong tinggi.dari Tabel 5.62 Indeks Williamson Provinsi Riau Tahun 2011-2020, terlihat bahwa

Indeks Williamson Provinsi Riau berfluktuatif. Grafik Peningkatan dan Penurunan Indeks Williamson yang terjadi di Provinsi Riau Selama tahun 2011-2020 dapat dilihat pada Gambar 5.17 Grafik Indeks Williamson Provinsi Riau Tahun 2011-2020.



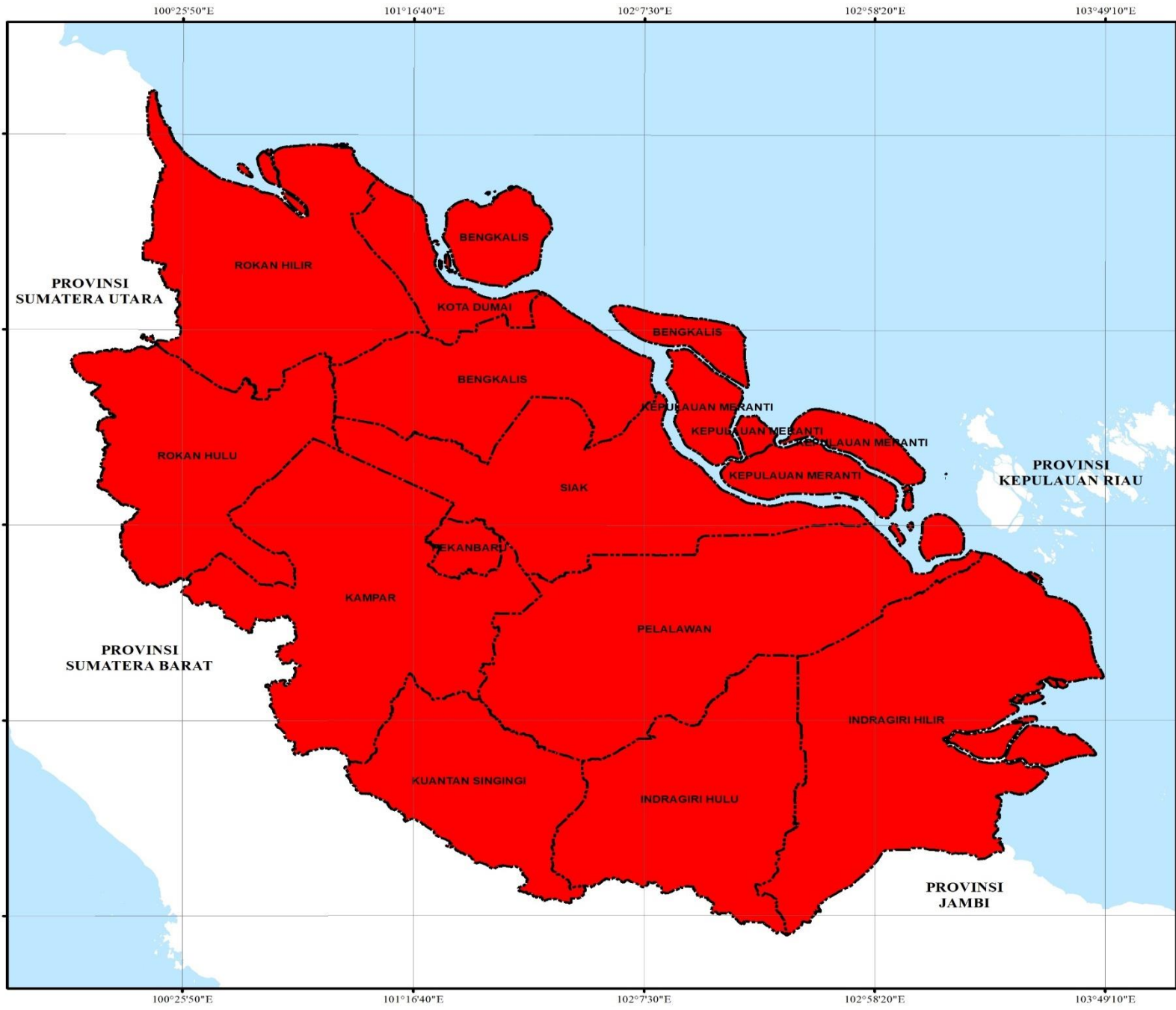
**Gambar 5. 17 Grafik Indeks Williamson Provinsi Riau Tahun 2011-2020**

Angka *Indeks Williamson* yang diperoleh pada tahun 2011 adalah sebesar 0,73 yang artinya Indeks Williamson memasuki kategori yang ketiga yaitu tingkat kesenjangan ekonomi wilayah termasuk tinggi. Tahun selanjutnya, 2012 angka *Indeks Williamson* diperoleh sebesar 0,74 yang artinya *Indeks Williamson* memasuki kategori tingkat kesenjangan ekonomi wilayah tinggi. Tahun 2013 angka *Indeks Williamson* diperoleh sebesar 0,66 yang artinya memasuki wilayah kategori tingkat kesenjangan ekonomi wilayah tinggi. Tahun 2014 diperoleh angka sebesar 0,66 yang menunjukkan kategori tingkat wilayah pada tahun 2014 memasuki tingkat kesenjangan ekonomi wilayah tinggi. Tahun 2015 angka

*Indeks Williamson* diperoleh sebesar 0,68 yang menunjukkan kategori tingkat kesenjangan ekonomi wilayah tinggi. Tahun 2016 angka *Indeks Williamson* diperoleh sebesar 0,70 yang menunjukkan kategori tingkat kesenjangan ekonomi wilayah tinggi pada tahun 2016 tersebut. Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 masing-masing angka *Indeks Williamson* diperoleh sebesar 0,64, 0,68, 0,66, dan 0,66 dimana berarti tingkat kesenjangan ekonomi wilayah tinggi.

Berdasarkan kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011 hingga tahun 2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa disparitas yang terjadi antar kabupaten di Provinsi Riau mengalami tingkat kesenjangan ekonomi wilayah yang tinggi. Dan angka kesenjangan paling tinggi pada tahun 2016. Bahkan selama kurun waktu 10 tahun kesenjangan yang terjadi selalu berada pada kategori kesenjangan tingkat tinggi. Tingkat ketimpangan tinggi yang terjadi karena kegiatan perekonomian maupun pembangunan hanya berpusat di beberapa wilayah saja.

Berikut hasil dari analisis *Indeks Williamson* mengenai tingkat ketimpangan Provinsi Riau tahun 2011-2020 jika di jadikan peta, dapat dilihat pada Gambar 5.18 Peta Hasil Analisis Tingkat Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2011-2020.



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS TEKNIK  
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**GAMBAR 5.16 PETA HASIL ANALISIS TINGKAT  
KETIMPANGAN EKONOMI ANTAR KABUPATEN  
DI PROVINSI RIAU**



Sistem Grid : ..... Grid Geografi  
Datum Horizontal : ..... WGS 84



**LEGENDA**

**ADMINISTRASI**  
 - - - - - Batas Kabupaten/  
 Kota  
 ■ Berat

Dosen Pembimbing :  
Puji Astuti, ST, MT

Nama : Melisa Pebriani  
NPM : 173410870

- SUMBER**
1. SHP RBI (Rupa Bumi Indonesia) Tahun 2017
  2. Citra Satellite

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab v, maka diajukan beberapa kesimpulan penting yang merupakan inti dari hasil penelitian ini, diantaranya:

- Pertumbuhan ekonomi selama periode tahun 2011-2020 pada bab v dilihat dari pertumbuhan ekonomi dengan migas, dimana pertumbuhan ekonominya cenderung melemah dan berfluktuasi. Adapun kendala dari melemahnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode tahun 2011-2020 disebabkan karena kondisi beberapa sumur minyak yang sudah mulai menua, adanya bencana kabut asap yang melanda Provinsi Riau, ketidakstabilan harga migas, bencana COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau periode tahun 2011-2020 tertinggi terletak pada tahun 2012 dengan nilai sebesar 6,54 persen. Selain ada nya pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2012, maka tentu saja ada pertumbuhan ekonomi terendah yaitu berada pada tahun 2020 yaitu senilai 0,27 persen. Penyebab dari drastis nya penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ini disebabkan karena bencana COVID-19.
- Hasil penelitian dari analisis *Typologi Klassen*
  - a. Tipologi Wilayah

Menunjukkan bahwa pola pembangunan ekonomi Provinsi Riau terbagi menjadi dua bagian. Ada wilayah yang mengalami perubahan terhadap pola pembangunan lebih baik dan ada juga wilayah yang mengalami ketertinggalan atau perkembangan pola pembangunan ekonominya tidak menjadi lebih baik. Adapun kabupaten/kota yang mengalami perkembangan lebih baik terhadap pola pembangunannya periode tahun 2011-2020 adalah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan kabupaten/kota yang pola perkembangan yang mengalami ketertinggalan selama periode tahun 2011-2020 adalah Kota Dumai dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Hanya ada dua kabupaten/kota yang mengalami ketertinggalan terhadap pola perkembangan pembangunan ekonomi di Provinsi Riau periode tahun 2011-2020.

b. Tipologi Sektor Antar Wilayah Provinsi Riau

Sektor dikelompokkan berdasarkan kelas dan klasifikasi masing-masing dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Sektor (Si)	Pertumbuhan Sektor	
	$g_i \geq g$	$g_i < g$
$s_i \geq s$	-Kota Pekanbaru (3) -Kota Dumai (4) -Kab.Indragiri Hulu (9) -Kab. Indragiri Hilir (8)	-Kota Pekanbaru (8) -Kota Dumai (8) -Kab.Indragiri Hulu (3) -Kab. Indragiri Hilir (0)

	-Kab. Kampar (3) -Kab. Bengkalis (0) -Kab. Siak (0) -Kab. Kepulauan Meranti (4) -Kab. Kuansing (4) -Kab. Pelalawan (0) -Kab. Rokan Hulu (3) -Kab. Rokan Hilir (3)	-Kab. Kampar (4) -Kab. Bengkalis (2) -Kab. Siak (7) -Kab. Kepulauan Meranti (1) -Kab. Kuansing (1) -Kab. Pelalawan (2) -Kab. Rokan Hulu (4) -Kab. Rokan Hilir (1)
si<s	-Kota Pekanbaru (1) -Kota Dumai (2) -Kab. Indragiri Hulu (2) -Kab. Indragiri Hilir (4) -Kab. Kampar (4) -Kab. Bengkalis (10) -Kab. Siak (8) -Kab. Kepulauan Meranti (7) -Kab. Kuansing (5) -Kab. Pelalawan (12) -Kab. Rokan Hulu (4) -Kab. Rokan Hilir (6)	-Kota Pekanbaru (6) -Kota Dumai (4) -Kab. Indragiri Hulu (2) -Kab. Indragiri Hilir (5) -Kab. Kampar (7) -Kab. Bengkalis (5) -Kab. Siak (3) -Kab. Kepulauan Meranti (6) -Kab. Kuansing (8) -Kab. Pelalawan (4) -Kab. Rokan Hulu (7) -Kab. Rokan Hilir (10)

- Analisis Indeks Williamson menunjukkan bahwa hasil analisis terhadap tingkat kesenjangan yang terjadi di Provinsi Riau dalam periode tahun 2011-2020 selalu pada posisi kategori dengan tingkat kesenjangan ekonomi wilayah termasuk tinggi. Hasil Indeks Williamson yang di dapat tidak ada dibawah 0,50. Indeks Williamson terendah hanya bernilai 0,66 pada tahun 2019 dan 2020, dan masih berada pada kategori dengan tingkat kesenjangan ekonomi wilayah termasuk tinggi.



## 6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di bab 5 antara lain:

- Lebih memperhatikan sektor yang menyumbang PDRB pada masing-masing wilayah sehingga tidak terjadi penurunan persentase pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih stabil setiap tahunnya.
- Melakukan kajian strategi kebijakan pemerataan ekonomi wilayah Provinsi Riau guna menekan angka disparitas pada wilayah Provinsi Riau
- Pemerintah Provinsi Riau sebaiknya memperbaiki kinerja dan manajerial kelembagaannya agar pelaksanaan atau pengimplementasian dari rencana pembangunan ekonomi berjalan secara terintegrasi.
- Perlu diadakan penelitian lanjutan dengan mengubah maupun menambah variabel penelitian, baik mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas ekonomi dan strategi penanggulangan terjadinya disparitas ekonomi

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Jurnal:

- Bintang, Cihe Aprilia dan Putu Gde. 2012. Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Berbasis Komoditas Unggulan Sub Sektor Perkebunan di Wilayah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Urban and Regional Palnning Departement Universitas Islam Riau.*
- Jauhariyah, N. A. (2014). Analisis Kemiskinan dan Disparitas Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi Melalui Pendekatan Partisipatif. *Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 80-97.
- Kharunnisa, A. (2015). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 448-463.
- Mopangga, H. (2011). Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Trikonomika* , 40-51.
- Muhammad, M. P. (2015). Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal*
- Nurhayani, Hodijah, S., & Bhakti, A. (2015). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi dan Hubungannya dengan Investasi di Provinsi jambi Tahun 2002-2014. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 302-311.
- Astuti, Puji. (2018). Impact Analysis of leading sub sector on basic sector to regional income in Siak Regency, Riau Province. *Jurnal Urban and Regional Palnning Departement Universitas Islam Riau.*
- Utama, N. P. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar. *Jurnal EP Unud*, 119-128.
- Waluyo, A. (2017). Kebijakan Fiskal dan Upaya Mengatasi Disparitas Ekonomi Perspektif Islam. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 19-38.

Wiguna, D. P. (2016). Sebaran Disparitas Antar Daerah di kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 142-143.

Sirojuzilam. (2005). Beberapa Aspek Pembangunan Regional. *Jurnal Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia*.

Moihuddin, s., & Hashia, H (2012) Regional Socioeconomic Disparities in the Kashmir Valley (India)- A Geographichal Apporoch. *Bulletin of Geography*, 85-98

**Sumber Buku:**

Todaro, Michael. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ke-3*. Jakarta : Erlangga

Adisasmita. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Emilia. Imelia. (2006). *Modul Ekonomi Regional*, DE-UNJA. Jambi

Budiharsono.(2001). *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta: Pradnya Pramita

Sukirno, Sadono. 2016. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana

Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Padang: Rajawali Pers

Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta

**Sumber Skripsi:**

Siregar, Renggi Erwanda (2020). *Analisis Tingkat Disparitas Wilayah Di Provinsi Kepulauan Riau*. Pekanbaru

R, Ibnu Thomiyah (2019). *Analisis Disparitas Ekonomi Wilayah Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelalawan)*. Pekanbaru

Andriani, S. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017*. Malang.

- Budiwikramatungadewa, & Hairlangga, Y. (2015). *Disparitas Ekonomi Kabupaten Cilacap 2007-2011*. Semarang.
- Dermawan, F. (2020). *Analisis Ketimpangan Antar Wilayah Pembangunan di Provinsi Jawa Barat*. Bandung.
- Firdhaus, M. F. (2018). *Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Lumajang*. Jember.
- Julianto, A. N. (2018). *Analisis Tingkat Kesenjangan Wilayah Kabupaten Pemekaran di Provinsi Riau Tahun 2012-2016*. Pekanbaru.
- Pangestuti, F. W. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur*. Surakarta.
- Purbo, P. (2020). *Analisis Ketimpangan Wilayah Berdasarkan Persebaran dan Kecukupan Fasilitasnya di Kabupaten Siak*. Pekanbaru.
- R, I. T. (2019). *Analisis Disparitas Ekonomi Wilayah Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelalawan)*. Pekanbaru.
- Siallagan, D. Y. (2019). *Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2017*. Tasikmalaya.
- Siregar, R. w. (2019). *Analisis Tingkat Disparitas Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013-2017*. Pekanbaru.
- Suri, K. A. (2017). *Tipologi Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota Menggunakan Metode Multidimensional Scaling di Pulau Timur*. Malang.
- Utama, N. P. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar. *Jurnal EP Unud*, 119-128.